

FAHRI HAMZAH

WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORKESRA



GELORA KATA-KATA



SEPUTAR DEMOKRASI DAN MUSUH-MUSUHNYA

**KUMPULAN SUARA PEDAS FAHRI HAMZAH MELALUI TWITTER UNTUK
REFORMASI HUKUM, DEMOKRASI DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**



Fahri Hamzah adalah politisi sekaligus intelektual dengan corak pikir integratif, selalu melihat gambar besar dari setiap persoalan, sebelum menyentuh potongan-potongan kecilnya. Dia juga selalu gelisah dengan pengkultusan. Bagi dia, pengkultusan bisa menjebak manusia dalam feodalisme yang menyebabkan stagnasi berpikir. Dari pengkultusan, inisiatif menjadi tumpul, tidak ada inovasi atau pembaharuan. Padahal, politisi memerlukan kemerdekaan berfikir untuk menemukan keputusan terbaik bagi bangsanya. Politisi ibarat pelita yang mesti menerangi dan membawa harapan pada kegelapan zamannya.

(Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI)



Fahri Hamzah

**Gelora Kata-kata
Seputar Demokrasi dan Musuh-musuhnya**

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019

PERINGATAN!

AWAS !!!

Dalam buku ini ada banyak bahasa “kicauan”
sehingga nampak informal dan “ulgar”.
Memang demikianlah kutipan aslinya.

Isi buku ini boleh diperbanyak tanpa izin
demi landasnya pencerahan dan tegaknya demokrasi
di bumi manusia Indonesia

**FAHRI HAMZAH
GELORA KATA-KATA
SEPUTAR DEMOKRASI DAN MUSUH-MUSUHNYA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All rights reserved

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
xxvi + 598 hlm., 13,8 x 20,5 cm

ISBN 978-602-51512-9-3
Cetakan Pertama, Agustus 2019

Penulis

Fahri Hamzah

Kurator Twit

Suryo Samawa, Taufik Amrullah, Lalu Fahrurrozie

Kurator Foto

Endy Kurniawan, Muhammad Akmal

Ide Sampul

Endy Kurniawan

Desain Sampul

Noorrahman Hartono

Tata Letak

Dito Sugito

Diterbitkan oleh:

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Tlp. 021-571 5697 Faks. 021-571 5421
Surel: bag_penerbitan@dpr.go.id



KATA SAMBUTAN KETUA DPR RI

Sejak lama, saya mengenal Fahri Hamzah. Sebelum di Pimpinan DPR RI, kami bersama-sama di Komisi III DPR-RI yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan. Dia masuk ke panggung politik seiring keberhasilan Reformasi '98 meruntuhkan Orde Baru, dimana Fahri menjadi salah satu motor penggeraknya.

Semangat reformasi melekat pada jiwanya. Demokrasi menjadi prinsip dan cara pandangnya dalam menjalankan haluan negara, termasuk dalam penegakan hukum. Demokrasi memberikan kebebasan bagi setiap warga negara, namun diikat oleh hukum. Lembaga penegak hukum menegakkan hukum tanpa diskriminasi dan bebas dari nepotisme, namun terikat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Begitulah demokrasi menjalankan keseimbangan seperti yang diperjuangkan Fahri.

Fahri Hamzah adalah politisi sekaligus intelektual dengan corak pikir integratif, selalu melihat gambar besar dari setiap persoalan, sebelum menyentuh potongan-potongan kecilnya. Dia juga selalu gelisah dengan pengkultusan. Bagi dia, pengkultusan bisa menjebak manusia dalam feodalisme yang



menyebabkan stagnasi berpikir. Dari pengkultusan, inisiatif menjadi tumpul, tidak ada inovasi atau pembaharuan. Padahal, politisi memerlukan kemerdekaan berfikir untuk menemukan keputusan terbaik bagi bangsanya. Politisi ibarat pelita yang mesti menerangi dan membawa harapan pada kegelapan zamannya. Politisi mesti hadir dengan ide-ide pembaharuan untuk menjaga pergerakan selalu mengarah ke depan.

Apa yang disampaikan dalam buku ini, merefleksikan keteguhan dan konsistensi pandangan Fahri dalam pembangunan demokrasi dan hukum di Republik Indonesia tercinta. Kumpulan *twit*-nya ini adalah kumpulan kegelisahan. Fahri gelisah dengan agenda pemberantasan korupsi yang seakan-akan jalan di tempat. Lebih 20 tahun reformasi berjalan, ia kini menagih ujungnya.

Terkait strategi pemberantasan korupsi, Fahri Hamzah keluar dari pakem umum, dia menawarkan resepnya sendiri. Resep yang disajikan Fahri di buku ini tampak tak biasa, tapi perlu untuk dipertimbangkan. Sebagai ketua DPR RI, Saya sangat mengapresiasi seluruh anggota DPR RI yang mau menuliskan ide dan gagasannya melalui buku. Terakhir, saya menyambut baik buku kumpulan *twit* saudara Fahri hamzah. Semoga bisa memperkaya khazanah intelektual kita.

H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.

KATA PENGANTAR

Buku ini adalah kumpulan *tweet* saya dalam rentang tahun 2010-2019 tentang demokrasi, HAM, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dunia kicauan atau orang sekarang menyebutnya *Twitland* adalah satu dunia baru di era digital, tempat orang-orang menumpahkan ide dan gagasannya serta berkomunikasi secara virtual. Kicauan adalah ekspresi dari refleksi sadar seseorang akan realitas sosial-politik-budaya, yang oleh seorang maestro musik Indonesia di masa lalu di sebut sebagai *coretan dinding*. “*coretan di dinding membuat resah, resah hati pencoret mungkin ingin tampil, tapi lebih resah pembaca coretannya, sebab coretan di dinding adalah pemberontakan*” demikian bunyi lagu Iwan Fals. Untuk itulah rangkaian *tweet* ini merupakan cara pandang saya dalam melihat realitas, yang juga bisa dimaknai sebagai pemberontakan. Bagi saya demokrasi haruslah menjadi kaca mata untuk mengurai masalah dan mengkonstruksi peradaban baru Indonesia. Kicauan dan pemberontakan hadir jika sesuatu sudah mulai keluar dari rel demokrasi, khususnya terkait pengelolaan bangsa dan negara.

Demokrasi memang terlihat bising, karena demokrasi memberi penghormatan atas ide ide kebebasan manusia untuk mengembangkan diri. Dalam demokrasi, kehidupan ibarat seseorang yang tinggal dipinggir rel kereta api. Setiap hari penuh kebisingan dan terlihat seperti hidup dalam permainan yang berbahaya (*dangerous games*). Tapi semua orang merasa aman karena mereka tahu bahwa kereta yang lewat tidak akan



keluar dari rel atau consensus yang telah disepakati. Hukum atau konsensuslah yang menjadi batasan kebebasan yang dijamin demokrasi pada tiap individu tak akan mengganggu kebebasan orang lain. Demokrasi adalah keasadaran tentang hidup di bumi manusia yang penuh ragam dan warna. Tidak ada jalan pintas dalam demokrasi karena demokrasi adalah seni untuk hidup dalam kompleksitas. Dibutuhkan otak yang besar untuk memahami cara kerja demokrasi dalam mengelola kompleksitas masalah manusia modern. Demokrasi memiliki tools yang lengkap untuk menjawab kompleksitas masalah manusia modern, kebebasan di satu sisi dan penegakan hukum di sisi yang lain. Dalam sistem hukum demokratis, hukum dibangun dalam rangka memfasilitasi kebebasan manusia untuk terus tumbuh berkembang menciptakan inovasi dan perubahan. Musuh besar demokrasi adalah anasir otoriter di dalam pikiran, yang hendak mencari jalan pintas untuk menciptakan tertib sosial di tengah keragaman dan kebebasan.

Seperti beberapa refleksi saya dalam buku ini, yang melahirkan gelora kata ketika merefleksikan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagi saya, demokrasi adalah antivirus yang paling ampuh untuk memberantas korupsi. Demokrasi adalah kesadaran tentang transparansi sehingga tidak ada lagi tangan yang bekerja di bawah meja seperti di era tertutupan. Semua pejabat dan pelayan publik bekerja seperti di dalam aquarium, mereka telanjang di hadapan pengawasan publik. Demokrasi seperti cahaya yang masuk ke dalam jendela

KATA PENGANTAR

rumah yang sebelumnya tertutup dan sumpek. Rumah yang tertutup dan sumpek inilah perlambang sistem totaliter yang di dalamnya tikus hidup nyaman. Sistem totaliter memang sengaja menyimpan korupsi di dalam dirinya. Respon sistem totaliter dalam menghadapi korupsi adalah dengan mengambil salah satu tikus yang paling besar, lalu dibunuh dengan keji di jalanan agar tikus-tikus lainnya ketakutan. Sementara demokrasi tidaklah bekerja dengan cara membangun ketakutan di benak massa untuk bekerja di luar kesadarannya.

Demokrasi mengakhiri era ketertutupan dengan membangun sistem terbuka. Ketika demokrasi dianut, maka terbukalah jendela rumah yang membuat cahaya masuk sampai ke lorong dan selubung terdalam tempat tikus nyaman mengerat. Melihat cahaya masuk maka keluarlah tikus-tikus yang memang takut dengan cahaya dan keterbukaan. Itulah penjelasan kenapa banyak sekali kasus korupsi yang terkuak di era awal transisi menuju demokrasi. Bukan karena pilihan atas demokrasi yang membuat korupsi semakin banyak, tapi demokrasilah yang menguak sehingga tikus keluar dari sarang persembunyiannya. Namun harus diingat perbedaan respon sistem totaliter dan demokrasi dalam memandang korupsi. Sistem totaliter membangun ketakutan di benak massa sembari memberikan justifikasi moral sebagai sumber korupsi, tanpa hendak memperbaiki sistem. Sementara demokrasi bekerja dengan cara membuka seluruh dinding rumah agar cahaya masuk, sehingga tak ada lagi tempat yang nyaman bagi



tikus untuk hidup. Demokrasi *dealing* dengan sistem tanpa menuduh bahwa bangsa manusia amoral dan *incapable* dalam mengelola kehidupan. Demokrasi memberikan penghargaan yang tinggi pada bangsa manusia bahwa tabiat yang buruk pada diri manusia bisa diikat oleh sistem yang baik. Untuk itu saya tidak setuju dengan justifikasi moral dan kultural sebagai penyebab korupsi. Kelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia murni terkait dengan ketidakmampuan membangun sistem.

Hari ini adalah tahun ke-74 Indonesia merdeka dan tahun ke-17 dari konsensus kita membangun system pemberantasan korupsi. 17 tahun sejak UU 30 Tahun 2002 disahkan, Indonesia masih berjalan di tempat. *Judgment* moralitas sebagai pendosa kepada para koruptor dan malaikat kepada pemberantas korupsi semakin mendapat tempat. Sebuah judgment naif dan fatalis untuk tidak dikatakan sebagai sikap menyerah. Inilah yang sering saya kritik dari KPK yang dalam sistem kerjanya semakin jauh dari maksud UU 30 tahun 2002. UU memberikan KPK wewenang sangat besar melakukan pencegahan, monitoring, supervisi dan bahkan penindakan. wewenang besar ini dimaksudkan UU agar KPK bisa lebih cepat membangun sistem yang *zero* maladminstrasi dalam pelayanan publik di Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan.

Konstruksi UU 30 tahun 2002 memosisikan KPK sebagai roket peluncur satelit. KPK berperan sebagai *trigger mechanism* bagi lembaga inti negara seperti Kepolisian, Kejaksaan dan

KATA PENGANTAR

Peradilan. Tugas utama KPK adalah memperbaiki lembaga penegak hukum agar kembali mendapatkan kepercayaan publik di tengah *distrust* pasca runtuhnya rezim. Inilah falsafah kelahiran *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan, yaitu sengaja dilahirkan untuk mengisi ruang kosong di saat lembaga inti negara belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan publik. Sebagai peluncur, tugas utamanya adalah mendorong perbaikan pada lembaga inti negara dan segera melepaskan diri di saat satelit tersebut telah mencapai titik orbitnya. Namun faktanya sampai tahun ke-17, KPK justru mengorbit sendiri ke udara sementara satelit yang mau diluncurkan masih tertinggal di bumi. Alih alih melakukan perbaikan, KPK justru membangun MoU untuk tidak saling mengganggu dengan lembaga penegak hukum lain. Kembali ke nilai dasar demokrasi sebagai sistem yang paling memberi jaminan aman bagi kehidupan individu, fakta hubungan antar lembaga penegak hukum tersebut membahayakan kehidupan warga negara. Antar lembaga penegak hukum seperti berlomba-lomba menjadi yang paling banyak tangkapannya demi citra institusi di satu sisi dan juga promosi jabatan di sisi yang lain.

Korupsi dan KPK di dalamnya hanyalah sebagian kecil dari refleksi problem transisional kita menuju demokrasi. Ada banyak persoalan transisional lain yang sudah 20 tahun ini tak juga kita selesaikan. Namun apapun temuan dalam refleksi kita membaca problem transisi Indonesia, tak boleh membuat



kita berujung pada kesimpulan bahwa transisi menuju demokrasi telah gagal dan menemui jalan buntu. Setidaknya bahwa konsolidasi demokrasi dan pelembagaan politik-hukum yang sudah kita capai telah menutup rapat pintu untuk kembali menoleh ke masa lalu. Tak ada jalan kembali apalagi dengan sentimentil meromantisir masa lalu sebagai kerinduan. Konstitusi baru pasca amandemen dengan 80% ketentuan baru adalah penutup pintu untuk kembali ke masa lalu. Tugas demokrasi kita hari ini tinggallah mengakhiri transisi sembari mewaspadai terbukanya ruang bagi hadirnya kelompok *ahistoris* dan *advonturir* yang tidak pernah hadir dalam *time line* perubahan sejarah, lalu gagap memaknai masa lalu dan gamang menatap masa depan.

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini adalah bagian dari tugas *parle* saya sebagai anggota parlemen yang memang oleh konstitusi ditugaskan untuk terus berbicara. Buku ini adalah kumpulan *twit* saya di akun @Fahrihamzah antara tahun 2010 sampai dengan 2019 yang terkait dengan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Rangkaian *twit* itu saya kelompokkan dalam beberapa bagian, tidak mesti berurutan sesuai tanggal, namun sepenuhnya merefleksikan isu-isu kunci, isu yang saya pandang strategis untuk dipertimbangkan dalam penataan penegakan hukum di Indonesia. Pada beberapa tempat

KATA PENGANTAR

terjadapat perulangan pembahasan, namun saya biarkan untuk menjaga orisinalitas dari *tweet* tersebut.

Terimakasih untuk semua pihak yang membantu hingga buku ini terbit. Saya ingin menyisipkan potongan puisi dalam *kultwit* sebagai *standing position* saya dalam berbicara:

*Kalau harus memilih antara berkata benar atau
menghibur orang, pilihlah berkata benar karena
kebenaran tetap, sementara sikap orang berubah.*

*Ada banyak yang terluka oleh kata yang benar tetapi luka
itu akan sembuh oleh keikhlasan. Baik bagi yang berkata
atau yang mendengar.*

.....

Berjalanlah secara harfiah

Apa adanya

*Aku menunggumu di persimpangan kesadaran
Lentera yang kau bawa, nyalakanlah di malam hari*

.....



Kalau kau jatuh cinta,
Katakanlah, jangan sembunyikan
Karena itu membebani hatimu
Katakanlah sekarang meski hanya dengan bunga

~oOo~

FAHRI HAMZAH

Makkah Al-Mukarramah, 4 Agustus 2019

PROLOG

GELORA KATA-KATA : TENTANG DEMOKRASI DAN MUSUH-MUSUHNYA

Sejak awal saya meyakini demokrasi adalah dan antibodi bagi penyakit korupsi. Demokrasi memiliki dua sifat bawaan yang bisa mengikis lemak-lemak korupsi, yaitu sistem yang terbuka dan distribusi kekuasaan. Dua sifat bawaan demokrasi ini sangat ditakuti oleh korupsi, yang lazimnya subur tumbuh di ruang gelap kekuasaan, dikerjakan secara berbisik, dan terkonsolidasi pada kekuasaan yang kuat: *Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely.*

Demokrasi mendorong keterbukaan dan partisipasi yang luas dari seluruh elemen warga negara. Demokrasi menarik partisipasi warga negara untuk terlibat dalam menentukan dan mengawasi rantai kekuasaan dari pusat hingga batas terluarnya. Demokrasi menarik partisipasi yang luas, maka sebaliknya korupsi meminimalkan partisipasi. Jika rantai kekuasaan dijalankan secara demokratis dan partisipasi warga meningkat pada setiap level dan tahap kekuasaan, maka setiap aliran kekuasaan akan melalui jalur yang terang benderang. Adapun korupsi akan berusaha mencari ruang gelap yang gagal diberikan pencahayaan demokrasi, dan



di sanalah transaksi gelap oleh beberapa orang dilakukan secara tersembunyi.

Beberapa kejadian mega-korupsi seperti BLBI, Century, Hambalang, Pelindo atau Sumber Waras, memperlihatkan masih adanya ruang-ruang gelap dalam sistem kita. Ruang gelap yang memungkinkan oknum-oknum pemegang kuasa melancarkan niat jahat untuk mencuri uang negara. Ruang gelap tersebut ini membuat kita terlambat menyadari bahwa uang negara telah mengalir deras ke kantong-kantong koruptor. Kita baru tersadar, setelah pesta usai, begitulah seterusnya peristiwa terus berulang.

Peristiwa yang terus berulang tersebut bukannya membangunkan kesadaran tentang banyaknya ruang gelap dalam arsitektur sistem kekuasaan, tapi justru membius bangsa ini untuk terus bertepuk tangan atas drama penangkapan tiada henti orang per orang. Saya menyinggung pola pemberantasan korupsi recehan yang tidak memiliki dampak perbaikan terhadap sistem ini dalam beberapa *tweet*. Saya ingin membangunkan kesadaran kita bersama, agar mulai melihat persoalan sistem dalam pemberantasan korupsi, bukan justru terjebak dengan atraksi teatral untuk mengungkapkan peristiwa recehan.

Demokrasi juga mendistribusi kekuasaan sedemikian rupa pada lembaga-lembaga negara untuk saling mencurigai

dan saling mengawasi. Pemusatan kekuasaan seperti yang pernah kita jumpai pada Orde Baru atau yang lazim terjadi dalam praktek negara-negara otoriter, cenderung menjadi lahan subur bagi praktek korupsi. Secara empiris, kita pernah mengalami pembusukan, akibat sistem kekuasaan yang terpusat. Ungkapan Lord Acton dua abad lampau masih terasa relevan, “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* - Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak pasti korup”. Demokrasi datang untuk memecah realitas kekuasaan tersebut, sehingga jika ada satu pihak hendak memanipulasi kekuasaan untuk korup, maka pihak yang lain secara *automaticly* menghentikannya. Demikianlah hukum baku mekanisme kerja sistem yang satu dengan yang lainnya saling terkait.

Dalam kumpulan *twit* ini, saya juga menyinggung banyaknya pola hubungan antar lembaga negara. Mulai dari lembaga inti negara hingga lembaga sampiran negara. Kehadiran lembaga-lembaga itu bukan sekedar untuk “ada”, tapi juga mesti memiliki alasan keberadaan. Pemilahan dan pagar kekuasaan antar lembaga mesti dituntaskan, agar tidak ada overdosis kekuasaan pada satu organ negara. Dalam konteks itulah, saya menyorot peran-peran lembaga penegak hukum -utamanya KPK- yang tidak “*balanced and equal of power*”, semacam kewenangan yang berimbang dan sama di antara penegak hukum.



Dalam konteks ini, pembangunan demokrasi mesti dituntaskan. Karena itu, saya mengawali buku ini dengan catatan ‘*Pseudo Demokrasi*’, agar dalam pemberantasan korupsi tidak dialasi oleh demokrasi semu, namun berbasiskan pada yang asli. Yang tercermin pada keterbukaan negara, partisipasi yang luas, serta distribusi kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara secara berimbang.

Dua tesis itulah, yang melandasi pandangan saya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi yang sistemik mesti diselesaikan dengan pendekatan sistem, yang didahului dengan menuntaskan pelembagaan demokrasi. Langkah ini adalah syarat mutlak dalam penuntasan pemberantasan korupsi. Pandangan ini sudah saya elaborasi cukup luas dalam buku terdahulu saya berjudul “Demokrasi Transisi Korupsi”.

Di titik itulah, saya menyadari, penanggung jawab utama pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Presiden, bukan KPK. Saya men-twit terkait hal ini dalam beberapa kesempatan. Saya ingin menegaskan kembali peran penting presiden dalam orchestra pemberantasan korupsi. Presidenlah yang disumpah oleh rakyat untuk memberantas korupsi, maka Presidenlah yang harus memimpin pemberantasan korupsi dalam suatu okestra

yang disebut *dengan national integrated system*. Presiden adalah komandan bagi kepolisian dan kejaksaan, Presiden juga masih memiliki “lebih dari setengah” kekuasaan legislatif untuk membentuk Undang-Undang, bahkan peraturan-peraturan teknis sepenuhnya berada dalam kekuasaannya.

Jika presiden tidak mengambil alih dan memimpin langsung kerja pemberantasan korupsi, maka agenda pemberantasan korupsi hanya akan menjelma sinetron tanpa akhir yang terus bersambung dengan modus yang sama, pola yang sama, dengan aktor yang berganti. Albert Einstein berkata “*Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.*” - “Bahwa kegilaan itu adalah terus melakukan sesuatu dengan cara yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda”.

Maka, jika saya ditanya, seefektif apakah kekuasaan Presiden dalam memberantas korupsi? Saya menjawabnya dalam retorika singkat, “Jika saya menjadi Presiden, maka saya akan menuntaskan pemberantasan korupsi dalam dua tahun.” Jawaban ini bukanlah bentuk kepongahan, tetapi kesadaran dan keyakinan bahwa korupsi itu adalah musuh sistem demokrasi, maka saya percaya kehadiran demokrasi akan mengakhiri korupsi sementara ketiadaan demokrasi adalah lahan subur bagi korupsi. Korupsi bukanlah sesuatu



yang irasional yang tak bisa diurai, sehingga tak perlu muncul khayalan khayalan yang memandang korupsi sebagai penyakit akut yang tak bisa diakhiri seperti tindakan mengkambinghitamkan moralitas individu dan kultur bangsa sebagai penyebab.

Tindakan mengkambing hitamkan kultur dan moralitas orang per orang adalah musuh besar demokrasi yang mengaggap manusia sebagai mahluk yang baik, yang menggerakkan turbin sejarah dengan kebebasan dan kreativitasnya. Agama juga sudah membuat fatsun yang baku tentang manusia sebagai *insan kamil*, Mahluk terbaik ciptaan Tuhan. Tindakan mengalihkan ketidakmampuan membangun sistem dengan menjustifikasi moralitas orang per orang akan membuat pikiran pendek dengan mengambil jalan pintas. Jalan pintas adalah anasir otoriter yang tidak lagi mendapat tempat di era demokrasi. Jalan pintas yang sering muncul dalam pikiran kaum fatalis adalah menganggap tujuan utama bernegara adalah melawan korupsi, maka genderang perang harus ditabuh: demi memberantas korupsi hukum dan HAM pun boleh ditabrak. Inilah musuh musuh demokrasi.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	V
KATA PENGANTAR	VII
PROLOG	XV
Bagian Pertama	1
Pseudo Demokrasi	
Bagian Kedua	21
Wajah DPR Kita	
Bagian Ketiga	35
Otoritariansime Baru	
Bagian Keempat	49
Sensasi di Atas Substansi	
Bagian Kelima	63
Korupsi: Persoalan Individu atau Sistem?	
Bagian Keenam	79
Kerja Sunyi Senyap	
Bagian Ketujuh	93
Infalibilitas KPK	
Bagian Kedelapan	105
Orkestra Pemberantasan Korupsi	



Bagian Kesembilan Catatan untuk Para Aktivist	123
Bagian Kesepuluh Anomali Kasus Century	143
Bagian Kesebelas Memberantas Kepastian Hukum	165
Bagian Kedua Belas Aneh Tapi Nyata	181
Bagian Ketiga Belas Bubarkan KPK?	191
Bagian Keempat Belas Puja puji “Berhala” Baru	199
Bagian Kelima Belas Bahkan Tuhan pun Membela Manusia	211
Bagian Keenam Belas Sang Peniup Terompet	215
Bagian Ketujuh Belas Eyang Pemberantas Korupsi	231
Bagian Kedelapan Belas Ayo Bekerja Dalam Sistem, Bukan Pencitraan	243

DAFTAR ISI

Bagian Kesembilan Belas Hukum Memerlukan Cinta	263
Bagian Kedua Puluh Perkuat Lembaga Inti Demokrasi	273
Bagian Kedua Puluh Satu Seperti Ruang Kaca yang Transparan	293
Bagian Kedua Puluh Dua Memburu Recehan, Trilyunan Tak Tampak	311
Bagian Kedua Puluh Tiga Kita bukan Bangsa Maling	323
Bagian Kedua Puluh Empat Tegakkan Hukum tanpa Dendam	355
Bagian Kedua Puluh Lima Fiksi Penegakan Hukum	371
Bagian Kedua Puluh Enam Operasi Tangkap Tangan Ilegal	381
Bagian Kedua Puluh Tujuh Kedzaliman Berbungkus Keadilan	427
Bagian Kedua Puluh Delapan Mewaspadaai Agenda Asing dalam Penegakan Hukum	437



Bagian Kedua Puluh Sembilan Skandal Pemberantasan Korupsi, Mempreteli DPR	443
Bagian Ketiga Puluh Aku Tak Akan Diam	467
Bagian Ketiga Puluh Satu Korupsi Sistemik, Bertindaklah Sistemik	491
Bagian Ketiga Puluh Dua Arah Baru Pemberantasan Korupsi	511
Bagian Ketiga Puluh Tiga Presiden Harus Memimpin Orkestra Pemberantasan Korupsi.	527
Bagian Ketiga Puluh Empat Mencipta Sejarah	553
Bagian Ketiga Puluh Lima Lentera Yang Engkau Bawa, Nyalakanlah	559
EPILOG Tiga Agenda Penting	591



BAGIAN PERTAMA **PSEUDO DEMOKRASI**



“ *Demokrasi berpendirian
bahwa sistem adalah jaminan bagi hak publik
akan kepastian dan keadilan.
Makanya harus terbuka..* ”



I. DEMOKRASI MEMBONGKAR BOBROK SISTEM KORUP

Sebagai sistem, saya sudah sering sampaikan beda respon demokrasi dan otoritarian kepada korupsi.

Sebab dua sistem itu memiliki kepercayaan yang berbeda kepada manusia.

Otoritarian itu sistem yang curiga pada manusia dan kebebasannya. Makanya para ideolognya (termasuk Supomo di sini) *state heavy*.

Itu sebabnya mereka terlalu mendukung negara sampai-sampai hak individu hilang. Ini nampak pada komunisme.

Dalam komunisme, polit biro yang korup itu menentukan segalanya. Termasuk memilih koruptor untuk dihukum mati demi efek jera.

Polit biro yang menguasai struktur kekuasaan tidak mengandalkan regulasi atau institusi tetapi kekuasaan, yang lain alat saja.

Beda dalam demokrasi yang menganggap manusia dan kebebasannya itu baik karenanya negara justru harus diawasi ketat.

Maka untuk menjamin itu, demokrasi berpendirian bahwa sistemlah yang harus di perkuat dan setidaknya itu terdiri dari 3 hal:

Pertama, regulasi yang bermakna jelas dan pasti. Kedua, institusi yang terbuka dan ketiga manusia yang merdeka.

Demokrasi berpendirian bahwa sistem adalah jaminan bagi hak publik akan kepastian dan keadilan. Makanya harus terbuka.

Dengan itu juga demokrasi berpendirian bahwa sistem itu tetap dan manusianya datang dan pergi juga kadang-kadang jadi korban sistem.

Institusi yang tertutup, aturan yang samar, dan diskresi berlebihan tanpa pengawasan bisa mendorong korupsi.

Maka, kalau mau korupsi hilang, Anda harus mulai dari pembongkaran aturan yang samar dan institusi yang tertutup, jangan dibalik.

Tapi kan kita heran, kenapa KPK tidak mendorong keterbukaan sistem? Terutama di polisi, jaksa dan hakim? Jadi, pilihan kepada demokrasilah yang telah membuka borok sistem korup yang tertutup di masa lalu. Ini berita baik.



Berita ini akan terus baik jika kita konsisten menggunakan cara kerja demokrasi dalam penanganan masalah yang muncul dalam transisi.

Dalam kerangka itu, UU 30/2002 saya anggap sebagai jalan keluar sementara. Sebab KPK yang *superbody* juga adalah non-demokratis.

Mungkin perbedaan kita hanya pada waktu saya menganggap efek sistemik keberadaan KPK terlalu lama, padahal kewenangan besar.

Saya akan terus memikirkan ini. Sebab citra kita di luar (via IPK = Indeks Persepsi Korupsi) masih buruk sekali. Saya tidak terima bangsa baik ini terhina.

Pandangan dan perasaan saya mungkin tidak mewakili, tetapi setidaknya saya sudah sampaikan sebagai tawaran awal. Mumpung ada.

Saya akan membaca semua respon dan tanggapan di sela-sela kita itikaf. Semoga tambah berkah.

II. KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN

Twips, saya banyak waktu nih sambil saya *share* soal: DPR KPK dan BUMN, supaya masing-masing tahu diri.

Dalam negara, kelembagaan inti yang harus ada: disebut trias politika: eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Cabang kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden, lalu ia membagi kekuasaannya, salah satunya ke Meneg BUMN

Jadi Pak DIS adalah Presiden untuk mengelola BUMN dalam presidensialisme. Dia bukan pejabat tinggi biasa.

Kebijakan Pak DIS di BUMN adalah kebijakan Presiden SBY di BUMN. Itu Presidensial sifatnya.

Tetapi, banyak negara yang tidak ada BUMN karena mereka tidak percaya negara bisa berbisnis. Maka Meneg BUMN juga *gak* ada.

Negara-negara kapitalis tidak memiliki BUMN, tapi negara komunis mengadopsi teori pengelolaan BUMN yang lebih kapitalistik.

Dalam negara seperti itu, pengelolaan BUMN lebih banyak sebagai investasi negara yang diserahkan kepada profesional bukan menteri.

Penghindaran BUMN dikelola oleh pejabat salah satunya untuk menghindari intervensi DPR



Saya sering mengajukan pertanyaan kepada DPR, sebetulnya rapat dengan BUMN itu rapat apa?

Sebab BUMN itu bukan negara. Kalau DPR bikin rapat dengan merpati kenapa tidak dengan Air Asia juga?

Kalau alasannya mau mengawasi BUMN, terus apa guna komisaris dan bagaimana kedaulatan RUPS dalam UU PT?

Lebih dari itu, rapat dengan BUMN kesimpulannya apa? Apa boleh kita bikin kesimpulan dengan selain Pemerintah?

Soal-soal inilah yang seharusnya ditertibkan Meneg BUMN sebagai Presiden RI di bidang BUMN. ini sudah saya usulkan.

Sementara itu, Presiden RI melalui menteri hukum sebaiknya memperkuat mekanisme dan hubungan antar lembaga.

Ada keanehan cara Presiden RI SBY melihat posisi DPR paling tidak dari kelakuan menterinya kepada DPR.

Dan DIS bukanlah satu-satunya yang menteri yang “menyerang” DPR, bahkan staf khusus Presiden SBY juga berani.

Padahal, tidak ada negara kuat kalau kelembagaan trias politiknya timpang. Dan DPR harusnya dibantu keluar dari persoalannya

III. LEMBAGA PUBLIK HARUS TRANSPARAN

Seperti saya sering katakan, beban DPR secara kelembagaan masih banyak.

Di BK lalu, saya memimpin Tim Ahli Lintas AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk penguatan sistem etika DPR

Tetapi, begitu akan diimplementasikan, persoalan klasik muncul, pimpinan DPR merasa tidak sanggup karena merasa hanya sebagai jubir.

Padahal, penguatan DPR akan menjamin kualitas UU, politik APBN dan pengawasan. Implikasinya langsung pada pencegahan korupsi.

Jangan lupa bahwa DPR adalah representasi dari menguatnya suara rakyat melalui amandemen ke-4 UUD '45.

Penguatan DPR adalah syarat mutlak penguatan kelembagaan demokrasi di seluruh lininya, termasuk dalam memberantas korupsi.



Karena itu, seharusnya KPK sebagai lembaga yang dilahirkan tahun 2002 untuk memberantas korupsi sistemik, bekerjasama dengan DPR.

Kenapa KPK kerjasama dengan DPR, karena DPR adalah lembaga pengawas tertinggi dalam ketatanegaraan kita.

Anggota DPR dan komisioner KPK punya kesamaan, mereka hanya sementara saja, birokrasilah yang permanen.

Karena itu, membenahi birokrasi sebagai institusi permanen adalah pekerjaan terpenting DPR dan KPK. Ini ukuran asasi persepsi korupsi.

Tetapi, citra DPR sedang sangat jelek, dan publik menjelang Pemilu ini terus diracuni oleh berita bobroknya DPR.

DPR kita harus terbuka, lembaga publik bekerja dalam etalase, masyarakat berhak tahu apa kerja DPR. Supaya ada yang upayakan perbaikan!

Reformasi DPR harus diteruskan, memang inisiatif akan makin kuat jika partai juga semakin reformis.

IV. OPERASI INTELIJEN BUKAN PENEGAKAN HUKUM

Hukum tidak mencari kesalahan orang. Hukum adalah untuk penjahat. Operasi intelijen bukanlah penegakan hukum.

Kalau ada yang tak pernah salah di dunia ini, tunjukkan padaku, aku akan menjadikannya nabi.

Tapi, nabi sudah tak ada. Tuhan menghentikannya 15 abad silam. Artinya tak ada lagi orang *ma'sum* (bersih dari salah).

Bahkan nabi yang *ma'sum* itu pun pernah berbuat salah tetapi kesalahannya langsung ditegur Tuhan dan menjadi dalil.

Nabi pernah mengharamkan madu bagi dirinya maka Tuhan tegur, “mengapa kau haramkan yang dihalalkan. (66:4).

Tapi kita, adakah Tuhan akan menegur kita jika berbuat salah? Itu privat sifatnya. Tak ada lagi nabi, tak ada lagi.

Tapi hukum tidak berlaku di wilayah privat kita, biarlah Tuhan menegur kita sendiri pada wilayah iman kita masing-masing.



Hukum yang berlaku di wilayah privat baru menjadi masalah jika terkait dengan orang lain.

Jika ia individu disebut perdata dan jika ia negara disebut pidana. Karenanya pidana disebut hukum publik.

Kembali, karenanya pada fungsi hukum dia tidak mencari orang salah. Dia mencari orang jahat.

Apa beda orang jahat dan orang salah? Bedanya pada motif perbuatan.

Orang jahat, punya niat dan merencanakan kejahatannya untuk tujuan yang jahat juga.

Tetapi orang seperti itu tidak banyak, dan kalau ada yang mencuci otak publik seolah banyak, curigailah!

Pasti itu adalah proyek pemberantasan kejahatan untuk merampok uang negara secara legal.

Apalagi jika mereka kampanye terus bahwa kejahatannya tambah banyak, kita perlu tambah curiga.

Karena sebetulnya mereka orang-orang gagal tapi memakai kampanyenya agar kita memaklumi kegagalannya.

Orang jahat itu sedikit, apalagi dalam tubuh bangsaku yang mulia. Aku menangis melihat tuduhan mereka.

Orang yang meniatkan kejahatan atau merencanakan kejahatan pun sebetulnya tidak bisa dihukum.

Karena itu di seluruh dunia, operasi intelijen dan hasil sadapan tidak bisa jadi alat bukti, hanya bisa menjadi petunjuk.

Di Indonesia semua itu jadi alat negara untuk memukul rakyatnya. Operasi intelijen dan sadapan kentara dalam hukum.

Saya teringat disertasi Busyro Muqaddas saat membela Abubakar Ba'asyir: "Hegemoni Rezim Intelijen"

Tapi Busyro sekarang berkuasa, dan apa yang ditinggalkannya dipakainya atas nama Negara Darurat Korupsi.

Mirip Orde Baru yang menumpas rakyat dengan Opsus atas nama Negara Darurat Subversi.

Sementara kita, yang lahir sebagai anak kandung reformasi telah menuliskan amandemen ke-4.



Negara telah kita awasi ketat dan hak-hak rakyat sipil telah dikuatkan. Ini “*fight*” kita.

Fight kita adalah mempertahankan kebebasan sipil dan mencegah negara menggunakan kekuasaan semena-mena.

Negara boleh darurat korupsi atau teroris atau narkoba atau apapun, tapi akal lah yang bisa mengatasinya bukan kuasa “tok”!

Kekuasaan yang besar pada aparat yang sama begonya hanya hasilkan komplikasi masalah.

Bagaimana tidak komplikatif jika membedakan salah dan jahat saja tidak sanggup.

Akhirnya merekayasa supaya kesalahan sama dengan ke-jahatan. Alat bukti dibuat dan dicuri, dan menghukum jadi prestasi.

Demokrasi tidak bekerja seperti ini. Ini adalah respon negara otoriter yang sudah kita tinggalkan.

Demokrasi bekerja dengan asumsi terbalik, bahwa rakyat lebih penting dari negara.

V. LEGISLATIF Vs EKSEKUTIF

Pekan lalu di depan masyarakat di Lombok saya menceritakan beda Legislatif dengan Eksekutif .

Juga saya jelaskan beda pemilihan Legislatif dengan Eksekutif dan mungkin kalau Fadjroel ada bagus.

Saya sayangkan bahwa Bung Fadjroel dalam nama besarnya masih sering bingung beda.

Terus terang sedih karena harusnya dia paham pondasi dari definisi-definisi dalam negara demokrasi.

Ini sangat elementer dan sangat dasar yang kalau salah maka seluruh proses berpikirnya salah.

Di belakang Bung Fadjroel mungkin banyak orang maka artinya banyak orang salah berpikir soal Legislatif dengan Eksekutif.

Kepada orang di kampung itu saya katakan: sadari apa yang kita pilih dan katakan saat memilih.

Ketika memilih eksekutif: “saya pilih kamu untuk to *execute*, dan bukan untuk banyak bicara.”



Tapi waktu memilih legislatif tgl nanti ya, “aku memilihmu untuk bicara dan bertanya.”

Secara kasar bedanya begitu Bung Fadjoel sehingga DPR banyak bicara Anda harus lebih hormat.

Sebaliknya kalau ada lembaga eksekutif saban hari perang opini itu salah. Eksekutif bekerja dalam senyap.

Apalagi lembaga penegak hukum. Keadilan itu ditegakkan bukan saja dengan mulut tetapi mata tertutup.

Hukum tidak akan tegak melalui kontroversi tapi hukum tegak melalui konsistensi.

Kembali soal Legislatif Vs. Eksekutif maka legislatif tugasnya “bicara dan bertanya” seperti asal kata parlemen itu.

Sementara Fadjoel sibuk menyerang mereka yang aktif bertanya dan berbicara.

Fadjoel nampaknya senang kalau kita diam. Setidaknya dia tidak pernah mempersoalkan mereka yang diam.

Kenapa Fadjroel tidak bisa bersama saya
mempertanyakan pemberantasan korupsi yang tidak
selesai?

Kenapa Fadjroel tidak mau mendengar proposal saya
bahwa saya bisa berantas korupsi setahun?

Saya sebagai legislatif tentu punya alternatif tapi kan
saya tidak dalam posisi. Itulah dasar sikap kritis saya
Bung Fadjroel.

Padahal kalau Bung Fadjroel jadi Presiden RI tentu juga
perlu solusi atas korupsi.

Apa Sdr Fadjroel akan terus membiarkan absennya
Presiden dalam pemberantasan korupsi?

Siapa yang disumpah untuk menjalankan konstitusi Bung
Fadjroel ?

Payah Bung Fadjroel, *nih*, kalau serang DPR dia anggap
DPR itu kayak eksekutif sehingga seragam.

Bahkan dia anggap kayak Perseroan *gitu* ya. Padahal DPR
itu representasi dari Daulat Rakyat.



Sekian dulu yang Bung Fadjoel. Atau pemegang akun Anda yang gak paham? Akun jangan dibisniskan, Bung!

Untuk Fadjoel, buku saya terbit awal 2012. <http://t.co/NYVwKQQ8kt>



Harusnya Fadjoel kritik partai yang tanpa kongres tiba-tiba wakil ketua umumnya konglomerat. Sekongkol aja, lu!

Harusnya kalau Fadjoel paham demokrasi ya dukung partai berbasis kaderisasi.

Teganya Fadjoel saban hari dukung konglomerat dan hajar partai yang pimpinannya kawan-kawan aktivis.

Harusnya Fadjoel bersama aktivis *eh kok malah* bersama konglomerat ya?

Mentang-mentang banyak uang lalu aniaya kami mengandalkan kader kami sendiri.

Partai konglomerat berkibar-kibar dan PKS sebagai partai aktivis terus dihancurkan. Duh, Fadjoel!

Partai lain maling segunung. Lalu kami ada 1 kasus yang telah selesai terus dianiaya. Hebat Fadjoel!

Kamu jual ke siapa akun-mu Fadjoel, sampai merusak nuranimu kawan?

Kau boleh cari kesalahan kami kawan, akan susah. Partai kami punya sistem, Fadjoel.

PKS berdiri bukan karena ada orang kaya ingin nyapres penasaran Fadjoel.

PKS berdiri bukan karena disponsori nama besar tapi partai ini berdiri untuk mendukung kader bangsa jadi besar.



Partai ini, bung Fadjoel, adalah untuk menjalankan mimpi para aktivis untuk melanjutkan reformasi.

Anda, Fadjoel, mau fitnah saya tukang bolos dan tukang tidur? Apa anda pernah klasifikasi?

Kalau saya bolos, kan, pasti dihukum? Di DPR ada 6 jenis dan tingkat hukuman, Fadjoel. Anda tahu?

Kalau bolos itu hukuman pertama dan terendah ditegur lisan. Apa saya pernah dapat?

Soal tidur, coba anda lihat foto itu. Apa mungkin saya tidur dikelilingi wartawan, Fadjoel?

Duh, kawan Fadjoel, sayang sekali tenangamu kau pakai untuk hancurkan benih-benih kekuatan aktivis.

Kenapa kau tak hancurkan partai yang dibuat hanya jadi tangga kuasa tanpa sistem kader dan persiapannya?

Itu pun tak boleh, Fadjoel, karena bikin partai tak mudah kawan. Ini inti demokrasi kita.

Siapapun boleh bikin partai, bung Fadjoel, termasuk anda. Sayang anda selalu gagal. Sabar, ya!

Jangan tantang moral, bung Fadjroel. Kami punya standar minimal. Kalau aku salah, aku mundur, bung.

Kau boleh jadi malaikat sekarang, kawan. Ku tunggu kau kalau berkuasa. Ingin tahu aku.

Anda pernah minat jadi capres dan gagal? Kalau serius kan bikin partai, bung? Kenapa kau takut, Fadjroel?

Aku tahu kau takut kalau nanti perlu uang. Lalu terpaksa *fundraising*. Fadjroel, segitu aja, lu, kawan!

Kalau berani kita tanding, bos. Masuk Nasdem atau partai apa, gitu, yang belum ada kesalahan satu. Ada?

Sorry, ya, bos Fadjroel, sesekali menyerang balik biar seimbang dunia kita. Sekian!



BAGIAN KEDUA WAJAH DPR KITA



“ *Memang harusnya gitu,
DPR membuat Undang-Undang dan presiden melak-
sanakan, lalu penegak hukum mengawasi.
Tapi legislasi masih didominasi eksekutif?* ”



I. DPR WAKIL RAKYAT BUKAN BIROKRAT

Setiap masa transisi menimbulkan guncangan pada apapun. Juga pada umur manusia. Dan kita sedang mengalami guncangan, meski agak lama menurut saya.

Saya dapat banyak pengalaman bahwa harusnya kita tidak perlu begini jika ilmu manajemen diterapkan dalam proses legislasi. *Cape deh!*

Bukankah DPR itu dulunya adalah kaki tangan eksekutif? Lupakah bahwa kita semua anggota DPR dipilih oleh eksekutif? Termasuk MPR-nya?

Karena dia pilihan eksekutif, maka seluruh birokrasi DPR adalah kepanjangan tangan Sekneg dan kabinet? Lupakah Anda? Embel embel semata!

Datanglah reformasi 1998. Kita mulai pilih wakil sendiri. Lahirlah DPR yang dianggap aspiratif. Tapi transisi DPR tidak secepat aspirasi rakyat!

Malah, DPR kelihatan kedodoran. Bahkan dinilai sebagai lembaga terkorup, tempat transaksi besar APBN dan pasal-pasal serta kewenangan. Kacau!

Tahun 1999 PDIP menang, tahun 2004 Golkar menang tipis, dan 2009 Demokrat menang agak tebal dikit. PKS mulai masuk No. 4 (sekitar 10%) di DPR

Sekarang, bagaimana supaya DPR memenuhi harapan?

Pertama, jangan Anda harap politisi akan menjadi pujaan. Di negara demokrasi manapun!

Politisi sudah nasibnya menjadi sasaran kemarahan publik. Memang harus begitu, dan untuk itu mereka digaji. Orang cengeng tidak boleh di sini!

Tapi, DPR sebagai sistem perwakilan adalah lembaga tinggi. Merujuk kepada sejarahnya, itu memang tempat orang “terpilih” digelar “Yang Terhormat”.

Makanya, anggota DPR bukan PNS, pekerjaan mereka tidak rutin. Harusnya mereka adalah negarawan yang siang malam memikirkan rakyatnya!

Mereka harusnya saripati terbaik dari masyarakatnya. Dulu di Inggris, mereka berasal dari kaum bangsawan: “*house of lord*”.

Tapi dalam demokrasi, saya pun terpilih sebagai wakil. Padahal belum tentu saya adalah saripati terbaik rakyat Indonesia. Tetapi ...



Demokrasi memang begitu, “bagaimana wajah kalian, segitulah wakil kalian”.

Karena itu, pendidikan politik yang baik adalah jika kita berhasil mengatasi kelemahan kita sendiri agar tiap 5 tahun wakil terbaik terpilih!

Itu sebabnya saya mengkritik pimpinan dewan. Mereka mau membuat laporan kerja seperti birokrasi. Jadi pimpinan dewan juga meleset!

Karena gagal menjadikan dewan sebagai otak kolektif dan saripati masyarakat, mereka mau tertibkan absen, dan lain-lain. Padahal bukan itu yang substantif.

Harusnya, yang substantif adalah penguatan DPR sebagai lembaga perwakilan, pembuat UU, anggaran dan pengawasan, itu memerlukan dapur yang kuat!

Keterjebakan pada rutinitas ini, bukan tidak bikin saya *pegel*. Kamis lalu, dalam rakor, saya protes pimpinan dewan yang terjebak rutinitas.

Harus ada terobosan, *dong*. Di Amerika, perpustakaan terbesar itu di kongres, karena dianggap sebagai otak kolektif bangsa Amerika.

Waktu Rhoma Irama ke Amerika, dia kaget karena album dangdutnya lengkap disimpan di sana dari A-Z. Padahal di perpustakaan DPR...?

Tiba-tiba datang dengan ide mau bikin gedung 1,8 triliun. Jangan loncat ke situ dulu. Harusnya “roadmap”-nya pada proses penguatan dapur.

Bahwa nanti akan berujung ke pembangunan fisik maka orang juga akan dukung. Apalagi jika DPR sudah bisa jadi tempat belajar. Pasti banyak peminat.

II. KINERJA LEGISLASI, ANGGARAN, PENGAWASAN

Belum lagi kita berbicara soal kinerja.

BAB I: LEGISLASI: Pasal 20 UUD 1945 menyebut kewenangan ini ada di DPR sekarang.

Memang harusnya gitu, DPR buat UU dan presiden melaksanakan, lalu penegak hukum mengawasi. Tapi legislasi masih didominasi eksekutif?

Legislasi yang didominasi eksekutif pasti kurang aspiratif. Lihatlah KUHAP dan KUHP itu. Rakyat selalu salah dan negara selalu benar!



Tapi dua UU itu selalu di-“kekep” oleh eksekutif (jaksa dan polisi), sementara itu, DPR merasa *gak* mampu. Komisi 3 sudah minta kedua UU ini diambil!

Secara keseluruhan, kualitas UU yang dibuat oleh DPR akan berkualitas lemah selama DPR tidak memiliki dapur yang serius. Ini lembaga otak, *kok!*

BAB: II: Anggaran. DPR tidak pernah punya pandangan lain soal anggaran, karena *budget house* *gak* ada. Akhirnya banggar jadi tempat nego!

Apa paradigma anggaran, teori apa yang dipakai, dan lain-lain. Tidak pernah mendapat tantangan serius, dan DPR *gak* pernah ribut soal ini.

Keributan mulai saat bicara soal belanja. Kenapa? Karena mulai banyak kepentingan teknis para anggota. Akhirnya kita bisa berubah jadi calo...

Belanja bukan wilayah DPR, itu wilayah eksekutif. Wilayah DPR adalah wilayah politik anggaran. Tetapi politik anggaran perlu ide.

Karena *gak* punya ide, ya akhirnya masuk ke soal teknis. Bisakah ini kita akhiri? Sulit jika DPR tidak menjadi lembaga pemikiran!

BAB III: Pengawasan. Sama saja, jika legislasi dan anggaran tidak diletakkan politiknya secara cerdas, maka pengawasan bisa berubah pemerasan.

Itu sebabnya, DPR memerlukan kerja cepat untuk mereorientasi keterjebakannya sebagai kaki tangan rezim otoriter menuju wakil rakyat sejati.

Karena dalam UU 27/2009 soal MD3, ada fungsi representasi/pelayanan konstituen yang ditegaskan agar DPR makin aspiratif. Selama ini lepas.

Memang dimana-mana legislatif tidak bisa lebih kuat dari eksekutif. Tetapi harus eksis dan menjadi penyalur suara rakyat yang terbawah.

DPR kita harus terbuka, lembaga publik bekerja dalam etalase, masyarakat berhak tahu apa kerja DPR. Supaya ada yang upayakan perbaikan.

Apakah DPR itu, dia adalah institusi publik yang diatur dalam UUD '45, hak-haknya dalam jalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Lembaga ini dulu tukang stempel. Embel-embel, alias kacang Orde Baru.



Karena embel-embel, dia tidak perlu diperkuat. Datang, duduk, diam, duit. Cukup!

Lalu datang reformasi, konstitusi berubah dan DPR jadi kuat. Tapi institusi dan SDM-nya apa otomatis kuat?

Ternyata tidak, malah sebaliknya. Pemilu bebas bikin siapa *aja* bisa jadi anggota DPR.

Ini salah siapa? Tidak ada yang salah, kita yang memilih demokrasi beginian. Karenanya institusi DPR harus diperkuat.

Tetapi jangan lupa, ini presidensiil. Eksekutif sangat kuat. Mau DPR kuat *kayak* apa, tetap saja presiden yang kuat, apalagi lemah.

Belum lagi, eksekutif tidak mau melepas kebebasan DPR atas anggaran, dan birokrasi, sampai sekarang.

Maka saya katakan, DPR masih bisa ditinggal oleh eksekutif, kalau presiden mengerti.

Lalu, DPR dan anggotanya yang masuk dari tempat antah-berantah ini mau diapakan?

Pasti kita harus perkuat, selain sistem rekrutmen diperbaiki dalam Pemilu, mereka juga perlu dipercepat proses belajarnya.

Disinilah muncul istilah studi banding, yang saya tidak setuju.

Studi banding itu dititipkan pada setiap pembahasan RUU, dan *policy making* yang lain.

Padahal, harusnya anggota DPR itu pejabat tinggi negara. Tugasnya *parliamentary diplomacy* ke luar. Ini kesalahan pimpinan.

Sebab kunjungan ini nampak main-main kalau pakai istilah “studi banding”, dan nampak tidak terhormat.

Padahal, tidak ada pejabat negara yang di larang ke luar negara, asalkan untuk tugas kenegaraan.

Dulu zaman Orde Baru, orang harus diseleksi ketat masuk DPR. Sekarang bebas. 560 orang itu nyaris tidak diketahui siapa *aja*.

DPD tambah kacau lagi. Fasilitas sama dgn DPR tapi kewenangan tak ada, tapi publik *gak* tahu. Yang dikasih tahu malah marah.



Kesimpulannya, wajah DPR sebagai lembaga perwakilan tergantung pada sehatnya demokrasi kita. Karena itu kontrol harus makin efektif.

Namun, dalam sistem presidensial, DPR tak akan lebih kuat dari eksekutif. Makanya yang merasa diri pintar, masuk DPR lah. Biar kuat.

Daripada mengutuk gelap, mari nyalakan lilin.

III. KELEMBAGAAN LEGISLATIF HARUS DIPERKUAT

Lembaga DPR, suka atau tidak, adalah karya rakyat Indonesia dan dari hari ke hari sistemnya semakin “langsung”. Kita harus tuntutan itu.

Kenapa kita habiskan Trilyunan untuk Pemilu, karena DPR harus ada sebagai mandat Konstitusi negara.

Ketika sistem 2 kamar belum berjalan, DPR nampak dominan. Saya sering usulkan penguatan DPD, tapi mayoritas tidak setuju.

Itu yang kita sering lupa, anggota DPR itu 560 orang. Saya hanya 0,18 persen anggota. Masing-masing anggota seharusnya tampil.

Karena DPR harus mengawasi birokrasi negara yang tidak kecil, Eksekutif dan Yudikatif. Mereka “powerful” sekali.

Rakyat tidak mungkin mengawasi birokrasi eksekutif yang mengkonsumsi 99,09 % dari APBN kita.

Karena itulah kelembagaan legislatif seharusnya diperkuat sebagai kaki tangan rakyat dalam mengawasi 2 cabang negara lain.

Lalu siapa yang awasi DPR? Ya, rakyat. Masyarakat mengawasi partai-partai yang ada di DPR dan menilai mereka untuk pemilu yang akan datang.

Karena itu, kegiatan mengawasi DPR tidak boleh sensasional. Harus berwujud pada pilihan politik yang benar. Sebab salah memilih, efeknya besar.

Orang lupa bahwa setiap 5 tahun kita terpaksa memilih orang-orang ini. Jika metode pengawasannya sinis, maka bisa keliru.



Saya bukan membela anggota DPR, yang korup silahkan tangkap. Tapi sama dengan KPK, kritikhlah partai-partai di dalamnya, jangan rusak lembaganya.

Kelembagaan legislatif perlu tambah kuat, sebab tugas pengawasan dari rakyat ada di mereka. Kalau lemah, pengawasan lemah.

Sadar atau tidak, kalau legislatif lemah, pasti eksekutif dan yudikatif senang, setidaknya pengawasan jadi longgar.

Padahal, sekali lagi, rakyat tidak punya pilihan kecuali mengawasi DPR sampai dia jadi kuat dan fungsi pengawasan jadi lebih efektif.

Saya sering bicara soal penguatan legislatif cuman memang DPR itu proporsional. Biar vokal kita bisa kalah *voting*.

Tapi kita maju terus. Ini perjuangan menegakkan akal sehat. Jadi upaya penguatan harus terus. Ada beberapa langkah segera.

Jika pendek, ubah Tatib DPR agar rapat-rapat dan pengawasan lebih berisi. Mari dorong bersama-sama.

Jika menengah, ubah UU MD3 dan lakukan penguatan DPD agar mereka jangan cuma jadi embel-embel. Beri tugas!.

Jika panjang, amandemen ke-5 UUD 45, agar terjadi soliditas sistem politik/pemerintahan. Jangan ambigu seperti sekarang.



BAGIAN KETIGA OTORITARIANISME BARU



“ ...Atau Lord Acton tentang kekuasaan yang cenderung korup dan jika absolut juga bisa korup absolut. Karena itulah sebabnya KPK harus bersifat sementara, sebab kalau tidak dia berpotensi merusak sistem. “



I. JIKA SERIUS, KORUPSI BISA SELESAI DALAM TIGA TAHUN

KPK adalah lembaga terkuat dalam jenisnya. Karena dia punya hak menuntut. Kasarnya, dia polisi, dia jaksa juga.

Tentu ada maksud dari penguatan ini, supaya efektif dan transisi kita jangan kelamaan dan mubazir. MK dikasih pamungkas.

Saya kalau cukup umur dan bisa pimpin KPK, 2 tahun korupsi sudah ketemu akarnya dan 3 tahun selesai semua.

UU 30/2002 ini memang luar biasa. Memberikan perasaan dan posisi perkara secara real. KPK itu *super body*.

Sifat *super body* itu sendiri bertentangan dengan prinsip demokrasi. Coba baca rumus klitgaard (C+M+D-A) yang populer di ICW.

Atau Lord Acton tentang kekuasaan yang cenderung korup dan jika absolut juga bisa korup absolut.

Karena itulah sebabnya KPK harus bersifat sementara, sebab kalau tidak dia berpotensi merusak sistem.

Sayangnya setelah 9 tahun, sifat sementara KPK semakin tak nampak, malah ingin buka cabang di mana-mana, jadi permanen.

Karena KPK juga menikmati cara kerja tertutup, diskresi *superbody*-nya itu yang efektif dan praktek lama *lid, dik, tut*.

Memang karena banyak dukungan, orang *gak* lihat lagi ongkosnya. Padahal biayanya mahal sekali untuk hasil yang tidak jelas.

Sekali lagi ini kritik kepada pimpinan KPK, jangan diputar balik. KPK real sebagai terobosan tapi kritik hasil itu kewajiban.

Kembali ke UU 30/2002, maka kita temukan kekuasaan besar untuk membenahi apapun. Dan bisa cepat.
Kenapa?

Karena kewenangan KPK nyaris sempurna dalam proses hukum. Tidak saja *lid, dik, tut* tapi bahkan Hakim *ad-hoc* Tipikor.

Dengan kewenangan itu, nyaris tidak ada kasus yang digarap KPK yang bisa lolos. Tidak ada SP3 dll.



Kalau kuasa besar ini kita pakai untuk tertibkan sistem, luar biasa. Bahkan bisa tertibkan lembaga tinggi negara seperti DPR.

Berikut ini beberapa akibat kelakuan KPK selama ini yang mengindikasikan kerusakan sistem.

Pertama, konsolidasi sistem pengawasan (yudikatif) lemah. Harusnya, sistem pengawasan sebagaimana mandat Pasal 6 dan 7 kuat.

Kedua, karena kepercayaan kepada KPK disertai ketidakpercayaan kepada lembaga lain dalam mengatasi korupsi.

Ketiga, semua laporan korupsi tertuju ke KPK yang hanya 500 orang. Sehingga puluhan ribu kasus terbengkalai.

Keempat, konflik kepentingan secara telanjang membuat adanya upaya pelemahan KPK yang berakhir koma

Kelima, KPK terseret korupsi. Lihat kasus *Century*, teganya pimpinan KPK sembunyikan peristiwa pidana yang kasat mata.

Kasus Bibit-Chandra yang diakhiri *deponering* belum jelas ujungnya. Ini bom waktu yang siap meledak.

Apa bisa kita serahkan urusan negara ini pada penguatan satu institusi? Itulah yang saya katakan di awal. Ini sistem terbuka.

Lihat indeks persepsi korupsi kita. Tidak pernah membaik sebab penindakan hampir tidak berpengaruh pada IPK.

Anda tahu mengapa? Karena IPK itu soal sistem dan KPK menghajar orang hampir 9 tahun.

Soal ketidakpuasan kita pada situasi itu satu soal. Tapi berpikir jernih juga penting dalam situasi itu.

II. MENGUJI KREDIBILITAS KPK

Saya dapat membayangkan kesulitan teman-teman yang terbiasa bela mati KPK. Sekarang siapakah yang harus periksa kasus Nazaruddin?

Apakah KPK akan dibiarkan kerja tertutup dalam kasus Nazaruddin?

Melarang pendampingan *lawyer* adalah salah satu indikasi ketertutupan.



Tadi *lawyer* Nazaruddin bilang *gak* bisa mendampingi. Biasa cuci otak *ala* penyidik.

Mas Yunarto Wijaya, kalau mau publik tidak curiga atas penanganan kasus Nazaruddin, maka KPK harus membuka prosesnya.

Orang akan curiga bahwa strategi pemeriksaan tanpa *lawyer* adalah *setting* untuk menyelamatkan muka tertentu.

Tadi keluarga Nazaruddin dan *lawyer*-nya OCK datang ke DPR-RI minta Nazaruddin dilindungi di KPK.

Menurut OCK sebagai *lawyer* dan Nasir sebagai keluarga, “mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa”. Kok bisa?

Pertanyaannya: Apa yang terjadi dengan Nazaruddin? Kok *lawyer* dan keluarga minta tolong?

Memang banyak misteri, terutama setelah Nazaruddin ditangkap. Ini semua harus diungkap.

Pertanyaan terpenting kepada aparat hukum ini adalah “kenapa masalah ini diliputi misteri?” Terlalu banyak topeng.

Kemana-mana KPK dan penegak hukum kampanyekan transparansi. Tetapi kasus Nazaruddin mereka tutupi.

Mereka selalu ingin dianggap sakral dan berwibawa tapi dengan cara menjaga ketertutupannya.

Mereka takut kelihatan bodoh-nya makanya menutup diri dari pengamatan publik.

Karena bodoh, takut berbicara secara terbuka kepada *lawyer* lalu menakut-takuti saksi/tersangka.

Para *lawyer* mengeluh karena kalau mereka makin pintar mendebat penyidik, maka klien jadi korban.

Kasus Nazaruddin akan menjadikan klimaks kredibilitas KPK. Untunglah terjadi ujung pimpinan lama.

Dalam kasus Nazaruddin, KPK bersandiwara dan bermain sulap. Tapi sulap itu oleh siapa?

Kelakuan melarang *lawyer* mendampingi Nazaruddin bukanlah perilaku anti korupsi, itu perilaku polisi korup.

Lalu membuka alat bukti (tas) tanpa Nazaruddin dan *lawyer*-nya itu bukan kelakuan penyidik baik.



Kelakuan itulah yang merusak kredibilitas KPK. Tapi kita terus memuji kelakuan ini. Kita ikut merusak.

“Pak SBY, tolong jangan ganggu anak isteri saya, saya akan diam”. Semoga kasus ini tidak berhenti di Nazaruddin.

“...penegak hukum-nya seperti anjing, hanya setia pada yang memberi makan, tak tau beda maling atau tamu..”(Zainuddin MZ).

III. PERMINTAAN KITA HANYA SATU: TRANSPARANSI!

Akar dari semua ini adalah kegagalan memahami konsepsi negara demokrasi dalam amandemen ke-4.

Kalau para penyidik membaca UUD '45, maka tindakannya yang tidak manusiawi ini adalah pelanggaran serius.

Apalagi ini adalah Nazaruddin yang “istimewa” bagi penegak hukum.

Dan Nazaruddin memang tersangka. Tapi jangan lupa bahwa dia adalah saksi atas banyak kasus lain.

Karena dia memiliki posisi saksi itulah dia harus dilindungi LPSK.

Falsafah perlindungan itu bukan sekedar soal “bersaksi tanpa tekanan” tetapi lebih dari itu adalah perlindungan HAM.

Sementara sejak awal KPK mementingkan tujuan (pemberantasan korupsi) daripada cara (menghormati HAM).

Padahal kalau sekedar mau efektifkan negara meski langgar HAM, ya kembali *aja* ke UUD '45 sebelum amandemen.

KPK sedang menikmati kampanyenya yang berlebihan dan sekarang sudah tidak bisa balik. Harus tetap PD, *dong*.

Kasus Nazaruddin harus jadi momentum mengembalikan KPK ke jalan yang benar.
Permintaan kita hanya satu: Transparansi!

Sedih juga, ada lembaga namanya MTI/ Masyarakat Transparansi Internasional. Tapi soal KPK dukung terus meski tidak transparan.



Kelompok kepentingan sedang tersingkap. KPK juga nampak sudah seperti kuda troya. Mari kita tonton. Siapa asli siapa palsu.

Yang mau terbuka maka dia asli, dia biarkan publik ambil haknya sesuai UU KIP. Dan yang palsu sebaliknya. Mereka simpan borok.

Kini, setelah 13 tahun demokrasi kita. Ramai orang ingin jadi diktator. Mari cegah!

Jelang magrib dalam perjalanan, ingin saya mengomentari nalar hukum Mahfud MD.

Kawan saya di komisi 3 dulu ini baru saja bikin berita yang mengganggu, karena salah.

Menurut nalar Mahfud, “PKS ngaku sajalah, sebab kalau tidak nanti dibongkar semua percakapan...”.

Menurut nalar Mahfud, KPK atau negara pasti benar dan rakyat (LHI/AF) pasti salah.

Menurut nalar Mahfud, orang yang sudah dituduh negara haruslah segera mengaku dan tidak perlu membela diri.

Menurut nalar mantan kader PKB ini, negara (KPK) pasti benar dan menyimpan hasil sadapan berbulan-bulan.

Menurut nalar mantan ketua MK ini, maka peradilan tidak diperlukan, karena jaksa KPK pasti benar.

Menurut nalar Mahfud, maka dibenarkan rahasia yang berada di tangan KPK adalah alat intimidasi.

Menurut nalar Mahfud, maka pengakuan adalah satu-satunya jalan menghadapi hukum KPK.

Menurut nalar Mahfud, maka penyidik KPK tidak mungkin berbuat salah dan pasti benar.

Menurut nalar Mahfud, maka data KPK pasti akurat dan pasti asli serta sah, tanpa verifikasi.

Menurut nalar Mahfud, maka operasi intelijen dan sadapan percakapan oleh KPK tidak pernah menyimpang.

Nalar Mahfud ini tidak dikenal dalam negara demokrasi. Memakai frasa penjelasan UUD '45 "negara hukum yang demokratis".

Nalar Mahfud MD bertentangan, tidak saja dengan semangat amandemen ke-2, bahkan keseluruhannya.



Nalar hukum Mahfud MD merupakan anomali di tengah posisi nya sebagai mantan hakim MK.

Meski banyak kejanggalan yang masih saya rahasiakan soal kawan saya ini, tapi menganggap KPK berada di luar hukum adalah fatal.

Hukum dalam demokrasi berpegang pada prinsip *equality before the law*. Bahwa kita semua sama di depan hukum.

Pasal 27 UUD '45 menjamin bahwa semua kita termasuk negara dan rakyat adalah sama di depan hukum tak terkecuali KPK.

Bahwa hukum apapun yang berlaku di republik ini tidak saja mengikat rakyat tapi juga aparat.

Tapi nalar hukum Mahfud terbalik karena meletakkan KPK lebih tinggi di hadapan hukum.

Nalar Mahfud juga menentang azas *presumption of innocent* yang ada dalam UUD '45 dan di tegaskan dalam UU. 39/1999 Psl 18 ayat (1).

Masih banyak yang ingin saya tulis sebagai catatan atas Sang Capres. Sayang sekali.

Semoga Pak Mahfud sadar akan kesalahan pikirannya sebelum nyapres.



BAGIAN KEEMPAT SENSASI DIATAS SUBTANSI



“ Dalam demokrasi (sistem terbuka)
korupsi sekecil apapun menjadi tampak.
Kitalah yang membukanya.
Ini berkah demokrasi. ”



I. MODAL SOSIAL KITA BISA MELAWAN KORUPSI

Saya akan coba kultwit lagi hari ini soal Sistem KPK dan Atasi Korupsi. Tapi 3 jam lagi ya. HP mati 3 jam.

Kita mulai kultwit soal Atasi Korupsi. Sebagai pengantar debat dengan Febridiansyah dan Tama Satrya Langkun dari ICW.

Bagi saya, tidak pernah terbayang bahwa Atasi Korupsi akan sesulit ini di negeri ini. Karena pada dasarnya kita tidak mulai dari nol.

Itulah sebabnya saya selalu menolak perasaan tidak berdaya dalam Atasi Korupsi seolah kita tidak punya modal sosial sebagai bangsa.

Modal sosial kita terlalu besar untuk Atasi Korupsi apalagi jika ditambah dengan kemampuan kelembagaan semacam KPK, dll.

Secara kelembagaan, sejak zaman orde lama sampai orde baru lembaga *ad hoc* sudah sering dibuat untuk Atasi Korupsi. Apa yang beda?

Perbedaan itu yang saya ingin sampaikan. Saya pernah sampaikan *paper* ke KPK waktu di UGM. Tentang perbedaan korupsi di China vs USA.

Orang sering salah lihat. Korupsi sekarang tidak lebih banyak. Karena kejahatan ini marak dalam sistem tertutup bukan terbuka.

Dalam sistem tertutup dulu, korupsi sebetulnya lebih dahsyat. Karena konspiratif dan dilindungi.

Dalam demokrasi (sistem terbuka) korupsi sekecil apapun menjadi tampak. Kitalah yang membukanya. Ini berkah demokrasi.

Sistem terbuka dengan sendirinya membersihkan lemak-lemak otoritarianisme. Ini karya bangsa Indonesia yang luar biasa.

Pertanyaannya, apakah sama cara memberantas korupsi di masa tertutup otoriter dan demokrasi terbuka?

Poin ini sering paling sulit dimengerti. Karena itu, atas nama efektifitas mau main terabas secara *ngawur*.

Dalam sistem tertutup, kepala mafianya ada di elit. Mereka bersekongkol korupsi dan bersekongkol menutupinya.



Ada masanya, persekongkolan juga masuk wilayah hukum, mereka “hukum mati satu orang untuk bikin jera yang lain”.

Persekongkolan apapun sah demi proteksi kepada kepentingan diktator. Sistem tetap tertutup dan dikuasai segelintir.

Itu cara kerja sistem tertutup. Tidak ada transparansi, keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Sebaliknya, demokrasi percaya pada transparansi. Saya sering sebut sebagai sistem akuarium. Kerja aparatur nampak.

Pengen kultwit soal Bibit-Chandra dan kronologinya. Tapi lagi sibuk. Aku cicil ya.

Ingat kasus Bibit-Chandra bermula dari mana? Jangan lupa bahwa ini persetujuan terbuka 3 lembaga penegak hukum (POLRI-JARI-KPKRI).

Kalau setuju seteru itu ada, berarti tanya lagi akar seterunya apa? Harus dijawab jujur. Jangan asal rame sok bela Bibit-Chandra.

Saya mengatakan bahwa akar seteru ini adalah KPK karena gagal lakukan fungsi supervisi yang diperintah UU.

Saya akan jelaskan kenapa KPK gagal (daripada aku jilat pantat kawan *tu*, lebih baik kusepak pantat dia supaya lebih baik) itu tugasku.

UU No. 30/2002 itu dibuat naskah akademiknya oleh tim yang intinya Prof. Romly Atmasasmita. Beliau juga akhirnya jadi korban.

Kalau mau kilas balik: Reformasi 98/99 memaksa pemerintah Habibie membuat UU No. 31/1999 yang di dalamnya ada perintah membuat KPK.

Yusril sebagai Menteri Kehakiman, membentuk tim persiapan pembentukan KPK dengan bantuan ADB (1 jt USD?) untuk studi banding.

Bertolaklah tim studi banding ke Australia, Malaysia, Hongkong dan Amerika. Tim juga disupervisi oleh KPK Hongkong.

Lahirlah *Draft* RUU. Dan perbedaan paling mencolok dengan di negara tujuan studi banding adalah “hak penuntutan” KPK RI.



Perdebatan alot. Penyidikan, penyelidikan + penuntutan dengan segala konsekuensinya bisa melangkahi sistem dan berbahaya.

Tapi memang disengaja dibuat “istimewa” atau *super-body* agar KPK *superior* di hadapan polisi dan jaksa yang disupervisinya.

Kalau sempat baca UU ini, mulai pasal 6, definisi dan metode supervisi dan kordinasi sangat detail. Nampaklah superioritasnya.

Sampai disini, aneh kalau KPK jadi pesakitan *kayak* gini. KPK terlalu kuat untuk dilemahkan kecuali oleh diri mereka sendiri.

II. TUGAS KOORDINASI DAN SUPERVISI

Saya menunggu respon pak dosen Zainal A Mochtar soal supervisi. Saya mau belajar malam ini.

Pasal 4 (KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi)

Pasal 6: KPK mempunyai tugas: a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK).

Pasal 6:b. Suvervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK.

Pasal 6:e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Minta pak dosen Zainal A Mochtar jelaskan pasal 4 dan 6 yang saya twit. Apa itu bukan “*System KPK approach*”?

Pak dosen Zainal A Mochtar apa mau diundang ke Komisi 3 biar ngajarin kita-kita.

Kan saya sudah ke UGM diundang KPK. Kapan pak dosen-dosen ini jelasin ke kami-kami ini? Zainal A Mochtar

Sebaiknya pemerintah keluar dengan evaluasi yang mendalam, telanjang dan jujur habis Ramadhan ini. Berhentilah mendengar pembisik citra itu.

III. MENIPU PIKIRAN PUBLIK SAMA DENGAN KORUPSI

Kalau Anda percaya, Jaksa, Polisi dan *Lawyer* tiba-tiba jadi malaikat di KPK RI sama bodohnya dengan percaya manusia jadi setan setelah jadi anggota DPR RI.



Bayangkan, tokoh-tokoh partai yang gerogoti APBN *kongkow-kongkow* dengan pimpinan KPK. Lalu yang salah yang mengkritik? Dianggap lemahkan KPK.

Sampai kiamat korupsi akan merajalela kalau cara kerja kita begini, kata Prof Jimly.

Saya pernah melamar jadi ketua KPK RI untuk me-maksa setiap orang menata *system*. Tapi ditolak, kata Prof Jimly.

Cara kerja KPK RI ini tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kesibukan, demikian observasi Prof Jimly.

Saya mendengar kutipan bang Karni Ilyas dari YouTube tadi pagi. Itu dari Adlai Ewing Stevenson (wapres AS ke-23).

Kira-kira artinya bahwa “barang siapa yang mengkorupsi pikiran publik sama saja dengan mencuri uang negara atau korupsi”.

Korupsi pikiran publik kira-kira semacam tipuan untuk menjejali publik dengan apa yang tidak ada atau diada-ada-kan.

Media tentu dapat menciptakan realitas seolah-olah, dan kecerdasan memilah adalah tantangan pemirsa.

Tapi panggung bukan ciptaan media. Korupsi ingatan publik tidak sepenuhnya dosa media..
panggung ada di KPK.

Coba lihat mutu panggungnya dalam perspektif hukum.
Apa kriteria hukum setiap potong adegan yang dibuka?

Dan yang penting bukanlah tegaknya hukum secara adil dan pasti tapi meriahnya panggung pemberitaan..

Setiap pagi, kita dibangunkan oleh sensasi baru, sebuah penangkapan dan seribu asmara.

Dan secara sepihak hukum diterjemahkan tanpa nalar dan kebijaksanaan. Bahkan tanpa rujukan.

Maka kalau kita kembali pada pembuat hukum seperti Prof. Romli, nampaknya kita selama ini menonton fiksi cerita detektif.

KPK membuat tontonan yang menarik selama 10 tahun tapi hanya sebagai tontonan.

Kita tak kunjung beranjak pada peradaban yang luhur dan penuh etik. Kepastian makin jauh.



Tapi publik mulai menikmatinya, dan lambat laun memori kita mulai menganggapnya wajar

Kegagalan pemberantasan korupsi ini menjadi sukses hanya karena gaduh. Sukses sama dengan sibuk bukan sama dengan berhasil.

Kita mulai menganggap lebih baik ramai, gaduh dan masalah terus ada daripada senyap dan masalah selesai.

Inilah korupsi ingatan. Mengutip Adlai: “sama dengan mencuri uang negara”

Kita nampaknya perlu mulai merehabilitasi pikiran yang dikorup, dan kita titipkan kepada media.

Orang-orang harus dibangunkan (Rendra)

Wahai dunia... Wahai dunia... Tipulah orang lain, jangan tipu aku (Imam Ali).

Panik kasus TPPU, kumpulin wartawan untuk pameran baju. Artifisial. Lembaga penegak mode.

Kalau PKS suruh *ngaku*, apa KPK juga harus *ngaku* bahwa mereka *bocorin* dokumen sprindik?

Kenapa bentuk Komite Etik segala, jadi perhatian berpekan-pekan. Kenapa *gak ngaku aja*?

Ini yang disebut Ahmad Yani PPP sebagai tirani itikad baik itu, wahai prof Moh Mahfud MD.

Yaitu: Kalau KPK pasti beritikad baik, dan kalau partai atau DPR pasti itikad tidak baik?

Kalau KPK pasti itikad baik kalau jaksa dan polisi pasti, itikad tidak baik? (Cicak-Buaya I)

Kalau KPK pasti itikad baik dan kalau polisi pasti itikad tidak baik? (Cicak-Buaya II)

Kalau KPK pasti itikad baik dan kalau PKS pasti itikad tidak baik?

Di mana referensinya ini prof? Saya ingin belajar bahwa kita hanya andalkan “itikad semata” dalam gakkum?

Maka nanti akan ada lembaga penjamin itikad baik, kalau *gitu* kita bikin itu *aja*. Kita bergantung pada manusia?

Itulah beda demokrasi dan otoritarian. Karena demokrasi menilai sama dan derajat kesucian atau itikad tidak ada.



Demokrasi akan hancurkan feodalisme, termasuk yang memakai jubah agama atau gelar akademik.

Dalam demokrasi yang ada adalah sistem dan institusi sebagai jaminan bukan manusia.

Dalam demokrasi ada adagium: *“man come and go but the system remain”*.

Dalam perspektif negara kita katakan: “orang-orang (dengan itikadnya) datang dan pergi tapi Indonesia tetap.

Inilah dulu yang dikatakan oleh orang-orang Jerman pasca Hitler. Institusi adalah segalanya.

Karena itu, dalam perspektif hukum, proses hukum adalah wajib, dan orang jangan disangka karena citranya.

Sebab citra dapat dimainkan dan permainan citra bisa diatur dengan uang. Pengadilan (harusnya) tidak.

Itulah yang menjelaskan kenapa konglomerat ramai-ramai beli media dan banyak yang tersangkut hukum tidak diproses.

Sekali lagi, prinsip-prinsip dalam negara hukum yang demokratis harus mendarah daging. Nalar Mahfud terlalu banyak porsi citra.

Hukum harusnya bekerja dalam senyap, dengan tangan dingin, hati dingin, dan pikiran yang dingin lahirkan “*order*”.

Hukum yang diseret ke ruang publik adalah hukum rimba, jahat dan takkan pernah mencapai tujuannya.

Abraham cs menganggap bahwa jika semakin berwarna baju orang-orang yang dipanggilnya, orang makin malu, dan korupsi turun sendiri.

Ini teori dari mana lagi? Tolong tunjukkan buku hukum mana yang saya harus baca.

Sejak kapan malu dan jera jadi tujuan penegakan hukum? Kita ini diajak tersesat oleh aliran sesat.



BAGIAN KELIMA
**KORUPSI: PERSOALAN INDIVIDU
ATAU SISTEM?**



“

*Hukum harusnya bekerja dalam senyap,
dengan tangan dingin, hati dingin,
dan pikiran yang dingin lahirkan 'order'.*

”



I. MANUSIA DAN HUKUMAN

Saya mau twit soal Manusia dan Hukuman, kelanjutan soal *Man & Woman* yang lalu.

Setelah kita memahami filsafat Manusia atau *Man & Woman*, maka sekarang kita tahu manusia adalah “ciptaan terbaik”.

Karena itu, pasti cara memandang dan memulakan Manusia harus memiliki perspektif yang positif dan tidak sebaliknya.

Termasuk di dalamnya ketika manusia dikategorikan “pendosa” atau “penjahat”, tetap saja dia Manusia.

”Kejahatan” dan “dosa” yang dilakukan Manusia tidak boleh membuat kita meletakkan dan menggunakan negara untuk merusak keistimewaannya.

Sebab Manusia jauh lebih penting dari negara. Manusia ciptaan Tuhan, negara ciptaan manusia. Dia inovasi sementara.

Memang pada masyarakat feodal, orang tertentu merasa menjadi luar biasa kalau sudah mendapat jabatan dalam negara. Padahal dia Manusia juga.

Ada juga yang merasa “sakti dan suci” hanya karena negara memberikan kepadanya “tugas mulia”. Ini Manusia lebih sesat.

Padahal, yang dihukum dan yang menghukum sama-sama Manusia. Hanya kebetulan saja posisi sedang berbeda. Kemuliaan belum tentu.

Dari awal, saya lebih sering mengajak kita “mencurigai” negara daripada Manusia. Sebab salah paham masih luas.

Negara merasa tidak pernah salah dan selalu ingin menang di pengadilan. Padahal negara juga bisa salah.

Saya tidak anti Negara. Tetapi menganggap negara berhak berbuat apa saja itu fatalis dan malapetakanya terhadap Manusia sudah sering.

Bagaimana mungkin Negara begitu percaya diri menegakkan hukum padahal hukum dan penegak hukumnya labil?

Saya ulangi yang sering saya katakan. Indonesia hari ini adalah Negara dengan 88% ketentuan baru dalam konstitusinya.



Ini Negara baru yang bertransformasi dari otoritarian kepada demokrasi. Karena ini negara transisi maka pembenahan (pencegahan) prioritas.

Dalam kasus KPK, itulah yang dimandatkan oleh UU 30/2002. Itu UU untuk pembenahan sistem. Bukan menangkap Manusia.

Bagaimana Anda mau percaya hukum kalau aparat penegak hukum saja berbeda pendapat terbuka.

Coba lihat kasus *Century*, kan negara gagal mempertontonkan kekompakan. Malah negara (KPK) melindungi koruptor.

Jadi Negara juga bisa berkonspirasi melindungi penjahat selain bisa mengkriminalkan koruptor.

Jadi mari kembali ke UUD '45. Konstitusi baru kita lebih pro Manusia daripada negara apalagi pemerintah.

Tema-tema seperti: “moratorium remisi”, hukuman diperberat, hukum mati, dll. Datang dari paham kolonial dan otoriter.

Menteri hukum dan HAM, serta wakilnya yang belum tentu lebih mulia dari koruptor harus memperbaiki pikirannya.

Tatalah aturan secara sistematis dan komprehensif agar hukum dan regulasi bisa diandalkan publik.

Lalu, binalah institusi penegak hukum agar terbuka dan transparan agar jangan ada lagi pejabat memperlmainkan hukum.

II. KPK DAN KORUPSI

Saya ingin *nge-tweet* soal KPK dan korupsi lagi biar pendirian saya jelas. Seperti juga densus 88, juga KPK semakin lama korupsi makin banyak.

Tentu saya tidak anti KPK, memang itu terobosan dari DPR masa lalu. Tapi bersikap kritis kepada keadaan, apa tidak boleh? Kapan korupsi selesai?

Saya wajib mempersoalkan penggunaan APBN untuk pemberantasan korupsi + bantuan asing yang janggal sampai 15 juta USD/tahun. Apa tidak boleh?

Nah, sekarang ketika kita akan memilih pimpinan KPK yang baru, apa yang harus kita mengerti dari persoalan korupsi yang tidak ada ujungnya?



Apakah kita (publik kritis) akan menikmati kembali serangkaian penangkapan, penyadapan dan pemburuan siangmalam? Atau suasana tanpa korupsi?

Misleading ini yang perlu dibenahi... KPK yang akan datang jangan mau lagi terjebak popularitas, bentur sana bentur sini... Supaya rame... Tapi?

Mengesankan, bahwa bangsa besar ini tidak punya daya tahan dan kemampuan untuk mengatasi persoalannya... Moralitas kita harus di atas masalah!

Itu sebabnya saya juga curiga... Ada kelompok yang menganggap “pemberantasan korupsi itu adalah proyek”, jadi buat mereka yang penting tetap ramai...

Kelompok ini sama dengan kelompok yang menganggap terorisme itu proyek... Supaya bantuan asing tetap keluar... Maka teroris harus tetap ada...

Saya menganggap mereka pengkhianat kedaulatan dan harga diri republik!!! Dan saya tidak bisa bersimpati dengan mereka... Bikin kita frustrasi!

Soal korupsi dan teroris itu harus kita letakkan dalam khazanah kita sendiri. Pertanyaannya apakah kita bangsa maling? Apakah maling tradisi?

Kita tidak pernah dikenal sebagai bangsa maling... Para pejabat dengan gaji pas-pasan itu berusaha tidak maling. Kadang mereka *gak* tau caranya.

Sebab kalau kita bangsa maling dan menganggap diri bangsa maling maka apakah masih ada darah halal dalam tubuh anak-anak bangsa ini?

Saya mengajak mencari jalan keluar...

III. BANGSA INI BANGSA BAIK

Sekarang, kita bicara pada dua tingkatan. Satu: individu, dan dua: sistem. Maka yang korup itu apanya? Kita harus bisa membaca peta besar!

Di mana-mana maling dan orang tidak disiplin ada. Tapi orang baik harus diyakini lebih banyak dalam tubuh bangsa ini.

Saya menemukan terlalu banyak itikad baik dalam bangsa ini, bangsa ini bangsa baik, kita semua orang baik. Jangan hina diri.

Pertanyaanya, kenapa KPK dibuat dan untuk apa? Ada salah baca karena mandat ini datang dari masa akhir Orba.



Kesadaran kita waktu itu masih pada orang, “korupsi is Soeharto” dan sebaliknya. Padahal demokrasi bukan soal orang.

Bangsa yang gagal membaca peta besar selalu menyalahkan diri sendiri... Dan keluarlah tuduhan seolah di negeri ini sudah tak ada orang baik!

Orang baik dan orang jahat itu mengikuti kurva normal (*normal curve*). Ingat statistik SMA? Bahwa yang normal selalu lebih banyak. Di tengah!

Maka kita harus percaya bahwa orang baik itu banyak. Kalau ikut kepercayaannya, kenapa kita frustrasi seolah-olah sudah tak ada lagi...?

Itu teori tentang manusia secara umum. Apapun agama, etnis dan kelompoknya, yang normal selalu mayoritas. Maka?

Karena yang normal itu mayoritas, maka kita harus membuat sistem yang melindungi kebaikan mayoritas... Dan mengekang “keganjilan” minoritas!

Koruptor itu minoritas. Kita hanya perlu membatasi ruang gerak koruptor. Jangan dibolak-balik. Sama, teroris juga kecil.

Jangan semua kegiatan disebut korupsi gara-gara aturan tidak jelas. Aturannya bikin jelas. Korupsi oknum karena kita tidak memperjelas aturannya!

Saya masih kasih contoh kasus Aulia... Dan sekian banyak orang yang membuat *pledoi* ratusan halaman.

Anda ingat Prof. Romli Atmasasmita? Beberapa bulan lalu dia datang ke Komisi dan juga datang lagi untuk memberikan beberapa dokumen ke saya.

Saya baca CV-nya, saya kaget. Karena hampir semua aturan/per-UU-an soal korupsi semasa reformasi adalah karya beliau. Beliau juga aktivis.

Tapi tahu apa yang terjadi? Dalam kasus Sismimbakun, Beliau dituduh korupsi. Anda bayangkan, ini gejala apa?

Harusnya kita fokus dalam soal *beginian* sebagai gejala *corrupt by system*. Maksudnya, sistem membuat pasal karet sehingga *gak* jelas.

Lalu negara, dengan angkuhnya seenaknya saja *nahan* orang. KPK dimana? KPK berlomba *nangkap* yang lain lagi...



Demokrasi tidak mengandalkan orang-orang tapi sistem yang bekerja dengan manusia yang datang dan pergi berbagai-bagai jenisnya.

Itu sebabnya Fukuyama menyebut tentang “*man with no chest*” karena demokrasi menang tanpa mensyaratkan kualifikasi manusia.

Maka, dalam demokrasi, kelembagaan publik adalah jaminan bagi masyarakat dalam sistem tertutup tergantung yang kuasa.

Kenapa bicara sistem? Karena demokrasi ada 2 sisi. Norma universal di satu sisi, dan prosedur dan institusi di sisi lain.

Demokrasi yang sukses ditandai dengan hilangnya institusi *adhoc* dan menguatnya institusi inti.

Negara gagal itu diawali oleh banyaknya institusi *adhoc* dan kaburnya peran institusi ini. Ini nampak di kita.

Karena itu, KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi harus tahu akar korupsi itu ada di mana.

Akar korupsi itu dalam sistem ada 3: aturan, institusi dan manusia. Manusia hanya belakangan. Kadang-kadang korban.

Setelah saya baca semua institusi sejenis KPK yang sukses adalah konsentrasisistem, bukan sensasi menyadap, memburu dan menangkap.

IV. FILOSIFI PEMBERANTASAN KORUPSI KITA TIDAK JELAS

Kritik saya kepada KPK adalah agar indikator korupsi itu disusun sendiri...

Aneh, setelah sekian lama KPK berdiri, persepsi soal korupsi tidak terbangun sama bahkan dengan aparaturn pemerintah yang katanya anti korupsi.

Selama ini, indek persepsi korupsi “tunduk” kepada indikator yang dibuat orang lain... Dan menyebut kita bangsa maling...

Padahal maling menurut mereka beda dengan maling menurut kita...

Buat mereka *lobby* senator untuk merampok sumber daya alam kita adalah legal... Di sini?

Coba lihat indikator persepsi korupsi itu... Hampir semuanya mengikuti pola *GNP/capita*... Dan memudahkan para pemilik modal untuk investasi...



Apakah kepentingan kita dengan penanaman modal asing? Selama itu jadi ukuran, maka negara tiran kaum investor mudah *deal*. Investasi akan hebat..!

Itu sebabnya, negara yang dikuasai oleh keluarga semacam Saudi, Kuwait, Qatar, Brunei, dll. jauh melampaui negara demokrasi seperti kita/India

Lalu kemana penghargaan kita atas inisiatif rakyat yang membebaskan diri dari tiran? Apa kita biarkan tidak ada apresiasi? Mau balik lagi?

Maka, pembacaan saya atas UU Tipikor itu, fokus pada supervisi, koordinasi untuk pencegahan... Bukan *petantang-petenteng* dapat popularitas...

Anda tahu, kenapa Aulia dibebaskan? Karena SBY tidak percaya besannya maling! Itulah yang disampaikan Marzuki dan kaum Demokrat!

Kalau antara pejabat definisi tidak diperjelas...

Loh, apa *ndak* nanti kita saling tikam semua? Itulah puncak episode Bibit-Chandra-Antasari

Jadi, tugas KPK adalah dengan kewenangan yang besar itu. Tunjukkan kepada kita bahwa korupsi itu soal kecil.
"We will make it"/ *yes we can!*

Kalian digaji besar. Gaji satpam KPK sama dengan gaji Kombes atau malah Pati. Jangan sok jago. Kalian juga anak bangsa kalian sendiri!

Berhentilah *kayak* Densus 88 itu. Bicara soal teroris pakai bahasa Inggris, padahal akarnya ada pada Bahasa Arab”. Kapan kamu diserang 9/11?

Tuh, sohib saya, Bung Benny Harman, doktor hukum, bilang, “filosofi pemberantasan korupsi *gak* jelas”.

Demikian, kalau ada pertanyaan saya akan jawab umum.. Saya lagi sakit makanya *ngetweet aja*. Hehehe.

V. KORUPSI, MASALAH SISTEM BUKAN BUDAYA

Ada iklan KPK tentang orang-orang yang sejak kecil suka curang dan bohong. Bagus sekali.

Waktu kecil dibiasakan oleh kebiasaan buruk. Dan itu menjadi budaya.

Kebiasaan buruk yang merupakan budaya kita harus dibongkar. Iklan KPK ungkap itu.



Menurut iklan KPK, koruptor itu berakar pada rusaknya budaya akibat pendidikan yang jelek.

Ini suatu perspektif tentang korupsi yang berakar pada budaya, seolah pendidikan kita gagal.

Sekarang, bagaimana menjelaskan kalau koruptor itu ternyata orang baik-baik?

Ada pemimpin agama, ada putri indonesia, ada dosen teladan.

Menyusul aktivis, ulama, guru, artis, tokoh pemuda, dan lainnya. Hampir 50% kepala daerah...dan seterusnya.

Pertanyaannya: “bagaimana orang-orang yang meniti karirnya secara hati-hati, tiba-tiba jadi koruptor?”

Tidak seperti yang dikatakan dalam iklan KPK itu, bahwa koruptor mengakar pada tradisi nyontek, bohong, dan lain-lain.

Bagaimana menjelaskan bebasnya orang-orang nakal, dan tertangkapnya orang-orang baik?

Twit saya ini tidak mengkritik KPK dan iklan KPK ampun deh. Ntar jadi pendukung koruptor...

Dalam buku saya, “Demokrasi-Transisi-Korupsi”, saya mengungkap tentang korupsi sebagai masalah sistem.

Menurut saya, korupsi yang dilihat hanya sebagai kejahatan manusia akan gagal dihentikan.

Twit ini hanya mengajukan sesuatu yang dapat memancing pikiran yang lebih kritis tentang cara melihat korupsi.



BAGIAN KEENAM KERJA SUNYI SENYAP



“ ... Dan kita semua larut
dalam agenda bersama menata sistem yang pasti, jelas,
terbuka, transparan dan efisien.
Dengan kerja senyap ini, saya bayangkan KPK
akan jauh lebih berwibawa
dan berdampak sistemik kehadirannya. ”



I. KERJA SENYAP LEBIH EFEKTIF TAPI TAK POPULER

Ada dua lurah, satu lurah sibuk siang malam tidak tidur dan masuk TV atas penangkapan maling... Satu lagi senyap tanpa maling. Pilih mana?

Sampai sekarang KPK pun terpengaruh bahwa menangkap orang lebih penting dari perbaikan sistem.

Memang, menangkap orang itu sensasinya luar biasa tapi “*going nowhere*”. Pekerjaan senyap bagi sistem tidak populer.

Kalau membaca UU 30/2002, saya membayangkan kerja senyap diam-diam dan melahirkan disiplin aparaturnegara khususnya penegak hukum.

UU ini memungkinkan Anda mengancam siapa saja termasuk presiden agar mendisiplinkan anak buahnya. Tapi ini perlu mental dewasa.

Sayang sekali, superioritas UU 30/2002 tidak jatuh ke tangan juara. Tapi ke manusia-manusia kecil pemburu popularitas. Mulailah bencana.

Maksud baik UU itu melenceng. Bukannya bekerja senyap membenahi disiplin aparat, KPK malah sibuk cari sensasi dengan tabrak lari.

Fungsi supervisi dan koordinasi yang begitu *legitimate* diganti fungsi kampanye dan advokasi *bak* LSM. Sistem mulai cidera luka.

Inilah latar seteru itu, KPK (cicak) dengan kampanyenya menjadi “maha suci” dan POLRI-JARI (buaya) jadi “*comberan*”. Siapa menang?

Makin banyak orang sadar bagaimana KPK harus dijaga jaraknya dengan kasus dan di dekatkan dengan pencegahan.

II. KPK LEBIH BERWIBAWA DENGAN KERJA SENYAP

Saya membaca ICAC (KPK-nya Hongkong), tidak punya hak menuntut tetapi dia awal pembentukannya senyap benahi aturan.

Sementara KPK kita ini, dia bisa memaksa siapa saja untuk menjalankan agenda KPK. Karena kalau bertindak semua bisa kena.



Dia seperti raksasa pegang pentungan sakti mandraguna, lalu bangsa jadi disiplin.

Saya bayangkan dengan tekun para professional bekerja membimbing bangsanya, khususnya aparat penegak hukum.

Dan kita semua larut dalam agenda bersama menata sistem yang pasti, jelas, terbuka, transparan dan efisien.

Dengan kerja senyap ini, saya bayangkan KPK akan jauh lebih berwibawa dan berdampak sistemik kehadirannya.

Dan dalam 5 tahun korupsi hilang dari bumi pertiwi karena kepercayaan diri kita muncul, dibantu KPK kita bisa bersih.

Orang lain boleh bilang korupsi itu *extraordinary-crime*, tapi bangsa kita mengatasinya dengan senyap cepat.

III. BUKAN SEKEDAR ‘SIAP MATI’, TAPI MENGERTI CARA KERJA

Kok lulusan UI, Unpad, UGM, Unbraw, Undip, dan lainnya *gak* ada yang jadi capim KPK RI ya? Katanya sekolah hukum terbaik?

Seandainya anak-anak ICW itu seperti Bambang Widjoyanto. Presentasinya saya dengar bagus sekali.

Saya baru mendengar 2 yang terbaik: Bambang Widjayanto dan Abraham Samad. Semoga dua-duanya masuk Pimpin KPK

Kalau ada yang ngomong “saya rela mati untuk melawan korupsi” biasanya *gak* mampu. Ini yang bikin penegakan hukum jadi kampanye *doang*.

Pengetahuan dan *leadership skill* jauh lebih penting untuk dinilai, terutama memilih KPK RI - 1 (ketua).

Orang-orang yang sukses memimpin dan bekerja bukan karena “rela mati”, tapi karena tahu cara kerja. Itu yang kurang di kita.

Orang yang tidak pernah sukses pada kerja kecil juga akan gagal dalam kerja besar. Karena rumus sukses itu sama.

Dengar Prof Romli di TVone. UU KPK itu dulu dibuat di zaman *jahiliyah*. Banyak pelanggaran!

Kalau Anda *gak* bisa kerja, tidak usah mendramatisir besarnya masalah. Dari awal Anda harusnya tahu.



Dari semua yang diuji di DPR beberapa hari ini, BW saya lihat paling komprehensif. Memang dia ada tantangan leadership.

Dari semua variabel kepemimpinan, pesan saya cuman 1 *aja* ke Pimpin KPK : jangan mau populer karena sensasi, Anda penegak hukum!

Jika Pimpin KPK sukses melawan hasrat untuk populer oleh sensasi. Akan sukses dia memimpin.

Musuh utama pimpinan KPK RI ke depan adalah *over-exposed*. Anda disumpah dalam sistem pemerintahan, bukan LSM

IV. KEHADIRAN KPK UNTUK PERBAIKI SISTEM

Berikut saya *share* *twit* tentang calon pimpinan KPK kita singkat.

Seperti kita tahu KPK lahir dalam transisi. UU 30/2002 lahir dalam gejolak pasca Orde Baru.

Banyak *setting* lain yang harus dipahami oleh Capim KPK. Tapi UU 30/2002 dan notulensi-notulensi rapatnya di DPR RI terpenting.

UU itu “meragukan” efektifitas kelembagaan inti (CJS), terutama dalam berantas korupsi. Maka KPK lahir dengan kecurigaan.

Kalau boleh, saya tidak setuju suasana itu. KPK harusnya tidak larut dalam kecurigaan kepada institusi inti.

Sebab dalam perspektif *System Thinking*, kehadiran KPK adalah untuk kepentingan sistem, bukan KPK sendiri.

Tapi perjalanan sejak 2003-sekarang (13-an tahun) nampak kekhawatiran saya beralasan. KPK mendapat serangan.

Kasus Cicak-Buaya yang heboh itu adalah bukti bahwa antara lembaga tidak saling sapa dan bersengketa.

Maka Capim KPK yang akan datang harus merekam dan memaknai persoalan ini agar tidak terulang nanti. Kita semua rugi.

Saya makin yakin bahwa adu domba atas KPK dan lembaga negara yang lain adalah aneh dan janggal.

Itu sebabnya saya berani meyakini bahwa kekacauan ini ada yang memetik hasilnya. Apakah Capim KPK sadari itu?



Saya membaca UU 30/2002 berulang-ulang dan notulensinya di sana saya temukan maksud KPK sebagai system integrator atas CJS.

Karena itu KPK boleh represif sebab kadang-kadang integrasi itu harus dipaksakan.

Maksud dari pentingnya integrasi pada sistem peradilan pidana (CJS) kita adalah agar hukum memiliki kepastian.

UU 30/2002 adalah *respons* atas kebingungan kita atas kebebasan yang juga mendorong korupsi politisi dan birokrasi.

Tetapi sebagaimana transisi demokrasi yang benar, orientasinya adalah pada penguatan sistem hukum dan sistem peradilan.

Itu pula sebabnya kenapa UU 30/2002 sangat “pencegahan *heavy*” dan bukan penindakan. Sebab orientasinya penguatan sistem.

Secara implisit ini adalah peringatan bahwa “penindakan” bisa menggoyang sistem inti dan merusaknya.

Itulah yang terjadi 8 tahun ini. Dan kerusakannya (setidaknya pada KPK sendiri) telah nampak nyata

Saya *kesel* kepada pimpinan KPK lama yang terus saja menepuk dada tanpa sadar bahwa mereka telah merusak KPK.

Karena itu saya cenderung menolak semua pimpinan KPK dan elemen lama yang akan bekerja dengan cara yang sama.

Kata Einstein, berharap hasil beda dengan cara kerja yang sama adalah semacam kegilaan.

Ke depan Capim KPK harus merekrut lebih banyak *system thinker* dan *system integrator* dari sekedar polisi dan jaksa.

Tapi perlu disadari bahwa waktu sudah tidak banyak. Karena kelakuan pimpinan KPK yang abaikan pencegahan.

V. BAZOOKA DIPAKAI TEMBAK BURUNG, TANK MUSUH BEBAS MELAJU

Senjata KPK di UU 30/2002 itu terlalu dahsyat kalau sekedar dipakai menangkap orang. Coba baca *deh*.

Cara mendukung KPK adalah dengan mencarikan baginya Capim KPK yang tahu kekuatan lembaga ini sehingga korupsi selesai cepat.



Cara hancurkan KPK adalah mengadunya dengan lembaga negara yang lain. Sampai *capek* sendiri dan mati.

Sering kita merasa mendukung KPK padahal kita sedang merusaknya. Terutama ketika kritik dituduh ancaman.

Ketahuilah bahwa kekuatan KPK bukan pada dukungan publik (yang labil) tetapi dukungan permanen UU 30/2002.

Kita membiarkan pimpinan KPK yang sekarang manja dan tidak mau berpikir keras memberantas akar masalah korupsi.

Saya mau ambil contoh kasus di BI. Suap cek pelawat dan kasus Bank Century.

Dengan mudah KPK memenjarakan 28 penerima cek. Padahal kasus suap tidak memiliki efek sistemik. Itu hanya soal manusia.

Tapi soal Century yang memiliki efek luas sekali pada penataan sistem, KPK berputar-putar tidak jelas.

Dalam kasus BI ini, *Bazooka* KPK dipakai tembak burung. Sementara tank musuh yang punya daya rusak luas melaju tak ditembak.

Dari dulu saya katakan, kalau saya mau aman, atau banyak masalah, saya akan pura-pura dukung KPK dan saya suruh *ngaco*!

Tapi saya tidak ada masalah. Saya hanya sedih bangsa saya kelihatan nista oleh pertunjukan sinetron hukum ini.

Karena gagal menata hukum, karena DPR-RI yang *ngaco* dan presidennya penakut semua orang jadi nampak seperti maling.

Saban saat pimpinan lembaga negara ngumpul, seperti arisan, ketawa ketiwi dan tidak ada yang berani ambil keputusan.

Sementara itu, KPK yang berisi polisi dan jaksa, tampil suci menikmati pujian yang sudah lama mereka rindukan di lembaga asalnya.

Ketahuilah, dengan menekankan pada penindakan, maka KPK akan tergantung pada penyidik Polri dan Jaksa.

Seandainya KPK berani bekerja senyap di bidang pencegahan, maka kaum intelektual akan menuntun perbaikan semua lembaga.



KPK *mabok* dengan perlombaan pujian sebagai lembaga andalan. Memang kawan-kawan kita ini gila pujian.

Padahal mereka menggali kubur KPK. Dan sekarang lembaga ini telah membusuk dari dalam.

Btw, setiap saya melihat Johan Budi, saya teringat Bapak Harmoko.

Johan Budi. Punya akun *gak* tu bocah?

Oh ya, akhirnya Darin *gak* dipanggil ya. Katanya mau dijemput di sekolah sama KPK?

Sudah *nggak* waras KPK kalau beraninya sama anak sekolah. Laporkan ke Komnas Anak.

Aktifis perempuan mana? Soalnya Kok perempuan dikriminalisasi KPK? KPK *gak* sensitif gender.

KPK dan PPAK yang tidak sensitif gender layak dilaporkan ke Komnas Perempuan.

Makanya, kalau menegakkan hukum ya senyap *aja*. Maunya hancurkan citra orang. Kejam!

Orang tidak mengerti dari pemberantasan korupsi adalah karena semuanya tiap hari tambah samar.

Tiap hari harusnya hukum tambah jelas buat rakyat dan buat siapa saja termasuk dunia usaha.

Hukum semakin milik sekelompok penyidik dan Jubir, kebenaran sepihak. Orang-orang sulit menebaknya.

Dan mereka menganggap bahwa semakin tertutup semakin angker, semakin berwibawa. Semakin baik. Gila!

Belum lagi hukum kehilangan substansi, karena apa isi dan apa kulit tidak jelas.

Orang-orang dipanggil hanya untuk dipanggil, karena pada dirinya ada aurat yang seksi bagi pemberitaan.

Lalu hukumnya mana? Keadilannya mana? *Equality before the law* mana? Mana filsafatnya? Kita manusia atau mesin?



BAGIAN KETUJUH INFALIBILITAS KPK



“ *Saya ingat Karl Popper.
Demokrasi ini kuat karena menyadari
ketidaksempurnaannya,
dan kritik akan perbaiki sistem.* ”



I. JANGAN ANTI KRITIK

Saya kritisi soal alat sadap dan mekanisme penyadapan. Sekarang terbukti, ternyata di laptopnya Antasari, sadapan ditenteng-tenteng.

Kenapa sih *gak* terima *aja* sebagai perbaikan lembaga publik ini. Kok takut banget sama seorang pengkritik? Aku jadi curiga nih...

Soal alat inilah yang menjadi kerisauan BPKP, karena semua alat sadap harus diperiksa *switch*-nya apakah bocor ke luar negeri. Itu konteksnya.

Soal bantuan dan alat sadap itu adalah isu antar lembaga. Anda ingat KPK kan tidak mau diperiksa BPKP atas alasan sudah diperiksa BPK.

Tanya anggota pansus pencucian uang, saya yang ngotot minta KPK dikasih kewenangan telusur dana korupsi. BW/BM aku mau tanya soal rek *nduuut*...

Itu sedang saya tulis...kalau yang lain kultweet saya dengar *aja*. Kok saya jadi *gak* pantes. Mengkritik KPK *aja* dianggap koruptor. Ini apa?

Saya tidak marah dituduh koruptor karena mengkritik lembaga KPK. Itu sudah dilakukan lama, hanya saya sayangkan iklim demokrasinya.

Sebagai lembaga pengawasan tertinggi, setiap anggota diberikan hak imunitas karenanya semua lembaga negara dapat menjadi objek.

KPK adalah lembaga negara karena diberi kewenangan (superbody) oleh negara dan menggunakan anggaran besar. Karena itu diawasi

Sebagai anggota masyarakat kita berhak mengawasi (kritik) KPK. Sebagai anggota DPR, saya digaji untuk mengawasi KPK (kewajiban).

Jadi, apa salahnya mengkritik KPK? Kenapa KPK tidak boleh diingatkan? Apakah *segitu* elementer salah paham kita? Luar biasa ini.

II. KPK TAK MUNGKIN SALAH?

Apa kabar KPK RI? Korupsi tambah banyak ya? Hebat dan sukses!

KPK sah melakukan pembocoran sprindik. KPK tak mungkin salah. Undang-Undang yang salah.



Demi memberantas korupsi yang sudah merajalela, KPK boleh melakukan apa saja.

Kalau KPK belum menentukan status tersangka, ya karena hanya KPK dan Allah yang tahu.

Kalau KPK langsung tangkap orang, ya itu karena sudah ada alat bukti. Hanya KPK yang tahu.

Kalau KPK tunda kasus Century, ya karena belum cukup bukti. Itu terserah KPK. KPK tak mungkin salah.

Jadi KPK tak mungkin diintervensi. Karena KPK itu profesional. Orang-orang terpilih akhir zaman.

Insya Allah KPK adalah saripati kebaikan dalam bangsa Indonesia. Rakyat akan menjaganya.

Sepertinya KPK bukan buatan manusia. Apalagi DPR. KPK ini dari langit.

Korupsi adalah kejahatan dan KPK adalah kebenaran dan yang lain serta kita semua adalah *embel-embel*-nya.

KPK adalah segala-galanya....

KPK adalah nadi bangsa kita. Kalau nadi putus bangsa kita mati...

Jangan ada yang kritik KPK. Mengkritik KPK adalah kejahatan kemanusiaan.

III. TAK ADA YANG SEMPURNA

Secara pribadi, saya bisa saja tidak sindir KPK. Kan aman dianggap bersih dan mendukung. Namun, saya tahu KPK dalam bahaya..

Dulu orang belum percaya bahwa ketua KPK bisa *abuse*. Tapi pasca Antasari semua jadi sedikit percaya.

Saya tidak cari selamat. Lebih baik ada yang ngomong pahit supaya kita perbaiki sistem kita.

Apa kurang korban? Antasari, Bibit, Chandra, dan embel-embelnya. Apa benturan antar lembaga dianggap baik dan menguntungkan rakyat?

Saya ingat Karl Popper. Demokrasi ini kuat karena menyadari ketidaksempurnaannya, dan kritik akan perbaiki sistem.



Bagi yang percaya bahwa KPK sudah sempurna seperti wahyu Ilahi, silahkan saja. Tapi kalau ada apa-apa nyalahin koruptor lagi... Loh?

Koruptor memang penjahat. Tapi kalau KPK gagal berantas koruptor, jangan salahkan koruptor, *dong*. Karena memang koruptor salah.

Ini kan bisa menular ke pemerintah. Gagal berantas kemiskinan, nanti *nyalahin* kemiskinan. Muka *lu* yang *kagak* profesional dan canggih.

Jadi *tweeps*, bantulah KPK untuk tidak mengulangi sandungannya. Saya cemas kalau calon ketuanya *gak* paham masalah ini.

Semoga para kandidat *ngikutin* diskusi ini *biar* mereka bisa meyakinkan Komisi 3 yang akan *fit and proper test* nanti.

IV. PENCEGAHAN ITU INTI SUKSES PEMBERANTASAN KORUPSI

Pagi *Twips*. Bukti kesuksesan KPK adalah jika 100 tahun lagi makin banyak penangkapan koruptor.

Buat kita, KPK *Hongkong* (ICAC) terlalu cepat menata sistem, dengan tanpa kewenangan menuntut hanya 3 tahun beres.

Buat kita, sukses KPK artinya semakin banyak yang ditangkap. Bukan semakin sedikit yang ditangkap.

Buat kita alat pemberantasan korupsi yang efektif adalah alat sadap, bukan penataan sistem.

Kita nampaknya lebih percaya represi daripada demokrasi. Itulah sebabnya kita lebih sering dijajah.

Dalam pikiran kita sekarang, hukum lebih dekat kepada “efek jera” daripada keadilan.

Para ulama berlomba menyetujui hukum mati padahal nyawa adalah hak Tuhan.

Dalam hukum Islam, mencuri dapat dihukum dengan potong tangan, ada batas minimal tak ada batas maksimal.

Potong-tangan adalah hukuman terberat bagi koruptor. Juga untuk pengobatan, sebab mencuri adalah penyakit jiwa.



Setahu saya, hanya nyawa yang pantas dibayar nyawa.
Harta dibayar harta. Rampas harta koruptor!

Tapi bagi kita yang marah dan kemarahan kita dikocok
oleh kampanye, akal sehat hilang oleh frustrasi.

Bagi kita sekarang, sukses KPK adalah jika bisa
hancurkan lembaga lain dalam persaingan opini dan
dukungan publik.

Sekarang ini kita tidak tahu seberapa baik Polri. Karena
yang kita tahu mereka jahat karena jahati KPK.

Aku tahu seberapa baik kalian, tetapi karena berkali
kritik KPK maka kalian jahat dan pendukung koruptor.

Kaidah-kaidah hukum yang luhur seperti: “*presumption
of innocence*” sudah tidak diperlukan lagi, karena KPK tak
mungkin salah.

Filsafat “lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah
daripada menghukum 1 orang tak bersalah” mustahil
diterima.

Saya bukan SH, tapi dalam tarbiyah diajarkan prinsip-
prinsip hukum dan keadilan. Ini yang saya hayati.

Kecemasan saya adalah karena kita sudah terlalu jauh terjebak *euforia* kampanye balas dendam. Ini bukan hukum atau keadilan.

Karena tujuannya bukan keadilan maka kita berdiri. Bukan dia atas kebenaran tapi suara yang paling bising.

Tapi kalau keadilan adalah tujuan maka kebenaran adalah metodologinya. Persetan opini publik dan persetan tepuk tangan.

Kalau bicara kebenaran, maka kampanye dan propaganda tidak bisa menjadi metodologi. Ia adalah metode politik praktis.

Kebenaran hukum hanya bisa ditempuh dengan metode hukum. Inilah yang di atur dalam hukum acara.

Memang kita tahu UU 30/2002 tidak hanya meletakkan KPK sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai “pembenah sistem”.

Makanya diberi kewenangan *superbody*. Tapi jika kekuasaan yang besar ini hanya untuk menindak, kacaulah sistem.



Ingat, menindak artinya merusak karena sudah ada yang rusak. Karena itu pencegahan itu inti sukses berantas korupsi di mana-mana.

V. SEMUA BISA SALAH, TERMASUK KPK

Pagi, ini sejarah. Oknum penyidik dan Jubir KPK dilaporkan ke Polisi.

Ada yang tidak terima, menganggap KPK tak mungkin salah. Tetapi dimanakah salah benar ditentukan?

KPK sering sekali memakai kalimat, “kita buktikan di pengadilan nanti”. Maka kami ingin buktikan ke pengadilan.

Bahwa oknum KPK bisa salah, sebagaimana PKS oknumnya juga bisa salah. KPK dan PKS adalah jamaah manusia.

Dan bahwa lembaga penegak hukum harus paling mengerti aturan agar tidak mudah dilawan.

Jangan mengambil jalan lain, bahwa lembaga penegak hukum seperti KPK sulit dilawan karena opini publik membelanya.

Opini publik relevan bagi partai politik karena mereka berada di jalur berkelok naik dan turun.

Tetapi bagi penegak hukum jalannya lurus dan opini publik tidak relevan. Dewi keadilan menutup mata dan memegang pedang.

Karena itu, hadapilah laporan ini sebagai cinta kami untuk saling mengingatkan. Manusia bisa salah.

KPK tidak usah protektif kepada oknumnya, sebagaimana kami tidak melarang satu pun dari puluhan kader PKS yang sudah diperiksa.

Mabes POLRI adalah instansi induk dari 10 penyidik yang akan diperiksa. pasti mereka tahu itu biasa saja.

Biarlah proses berjalan dan kita tunggu dengan sabar hasil penyelidikan, penyidikan dan seterusnya.

Kita harus berani menempatkan KPK sebagai lembaga biasa yang powernya sangat besar. Sekali lagi sangat besar.

Saya membaca seluruh dokumen pembentukan UU ini sebelas tahun lalu. Memang luar biasa *euforia* ya.

Kita harus kritik KPK sebagai cara mengkritik diri kita sendiri, bahwa tidak jarang juga kita salah.



BAGIAN KEDELAPAN **ORKESTRA PEMBERANTASAN KORUPSI**



“ Dunia ini dirusak oleh satu
dari dua macam manusia. Yang bekerja terus tanpa
pikiran, dan yang berpikir terus tanpa kerja.
Koreksi yang salah, dong..

“



I. KITA SATU KESATUAN

Sekarang saya dengar sudah mulai.. KPK tidak bisa bergerak sendiri sudah disadari... KPK bukan malaikat dan ini negara manusia... Manusia sama!

Kita tidak boleh memandang lembaga negara sebagai LSM. Atau dalam posisi berhadapan. Kita harus lihat sebagai satu kesatuan!

Karena itu, Bangunlah solidaritas bersama, bahwa kita akan selesaikan ini dalam waktu singkat! Susun abjad kerja yang luas. Kewenangan KPK besar!

Saya yakin, Polisi/Jaksa/Hakim juga SBY akan mau bersama memperbaiki keadaan. KPK jangan menikmati banyak musuh. Itu kekanak-kanakan!

Tapi kalau dari awal didorong untuk memusuhi bangsanya sendiri lalu terima bantuan asing untuk mencucikan Indonesia, “go to hell” KPK!

Jangan dipotong, *dong!* “Go to hell KPK” itu ujung, bisa juga “go to hell SBY”. Tergantung awalnya. Jangan curang ya. Lagi puasa nih...

Jelek-jelek saya ini pimpinan komisi hukum. Sedikit banyak tahu isu pada semua lembaga negara, khususnya penegak hukum. Juga tahu gajinya berapa.

Jika ada sebagian teman yang *concern*, saya akan memfasilitasi agar seleksi atas pimpinan KPK berdasar kepada pengertian yang jelas soal korupsi

Boleh datang dan kita bikin satu sesi di Komisi 3 tentang siapa yang terbaik pimpin KPK sekarang, setelah sekian kali gagal!

Sekali lagi, apa mungkin suatu rumah dibangun oleh 2 kelompok orang: sebagian menyusun batu bata dan sebagian merubuhkannya? Sampai kapan?

Kalau ada yang menikmati suasana itu, percayalah mereka itu pengkhianat yang menjual kekacauan dalam negerinya untuk bantuan asing!

Jadi kalau cari pimpinan KPK, carilah yang mau duduk bareng. Kalau takut tidak independen yang jangan jadi pejabat publik kalau lemah! Marbot *aja!*

Percayalah, kita tidak sedang mencari malaikat. Kita cari



manusia biasa, ada keberanian dan kuat karakternya.
Paham masalah secara luas!

Para pemimpin yang manja berhentilah, waktu kalian sudah habis. Biarkan generasi yang tegar memimpin perubahan.

Manja, pencitraan, tidak fokus, dan penakut adalah ciri pemimpin yang akan tumbang!

Harap teman-temannya Busyro dan Bambang forward ini sebagai bocoran ya. Hehe...

Perlombaan tidak selesai oleh 3 lembaga inilah yang membuat kita menggaji mereka untuk berlomba... Dan apa hasilnya? Tunjuk jago!

Sedikit data soal penanganan perkara korupsi di 3 lembaga (polisi, jaksa dan KPK) tahun 2007-2010.

Tahap penyidikan (1.580 Polri), (7.547 Kejaksaan) dan (181 KPK). Itu total kasus yang disidik.

Tahap Penuntutan: disidik POLRI (1.380), disidik

Kejaksaan (6.239) dan disidik KPK (165).

Hampir semua keputusan hakim Tipikor diwarnai *dissenting opinion* (studi FHUI: lebih 80%). Data2 itu sekedar menegaskan betapa bahayanya kalau penegakan hukum tidak terintegrasi.

Kalau aku sebut Century atau Nazaruddin, ini kasus-kasus yang akan jadi PR. Di luar ada 60-an ribu kasus yang mendekam.

Sementara itu Polisi dan Jaksa menonton atraksi KPK dengan senyum. Entah apa maknanya.

Tiba-tiba mereka sok bela KPK padahal maksudnya adalah agar bangsa kita saling melukai.

Ini akibat 9 tahun setelah UU KPK malah polisi dan jaksanya jadi *membre*. Waktu KPK *membre*?

Negara hadir untuk mengurus dirinya sendiri. Maka negara jadi bencana. Negara menjadi predator rakyatnya. Ini *picture* besar...

Makanya, di balik kebencian kita pada koruptor, lihatlah



pula gambar besarnya. Jangan seperti tikus Hamster yang berlari dalam roda!

Setelah 8 tahun UU lalu koruptor tambah banyak. Polisi dan jaksa tambah busuk. Apa ini bagian dari tugas KPK?

Terakhir, terjadi perkelahian 3 lembaga, dan dan apa hasilnya? Apakah kita tidak layak merenung? Antasari pidanakan, Bibit-Chandra tersangka?

Saya menganggap itu bencana nasional. ICW sendiri menyebut “negara darurat MAFIA”. Tapi apa bisa kita lawan dengan superman KPK saja?

Dunia ini di rusak oleh satu dari dua macam manusia. Yang bekerja terus tanpa pikiran, dan yang berpikir terus tanpa kerja. Koreksi yang salah, *dong*.

II. BEKERJA SISTEM, BUKAN PERLOMBAAN

Penting: Apakah boleh penegak hukum punya sikap yang berbeda di hadapan UU? Kan UUD 45 jelas. “..semua warga negara bersamaan kedudukan..”

Itulah kewenangan KPK dalam supervisi dan koordinasi, supaya jangan ada lembaga penegak hukum baca UU sendiri. Kan kacau negara jadinya!

Tapi KPK menikmati perlombaan ini. Karena mereka dapat *applaus*. Ini kan kekanak-kanakan. Jadilah negarawan! Jangan gampang GEER!

Fokus pertanyaan saya nanti kepada kandidat adalah soal ini. Kalau tidak *clear* saya *gak* mau berhenti. Ketua KPK yang akan datang harus orisinal!

Ada dua bapak. Setiap pulang berantem anaknya kalah, satu bapak memeluknya, yang satu melatih dan mendisiplinkannya. KPK mau yang mana?

Yang berantas korupsi adalah semua pejabat negara. KPK hanya *trigger*. Makanya hati-hati.

Kalau anda mau KPK baik bagi bangsa ini, kembalikan dia sebagai “*trigger mechanism*” yang mensupervisi dan mengkoordinasi.

Kembalikan KPK kepada jati dirinya sebagai lembaga negara yang diberi tugas oleh UU untuk memimpin pemberantasan korupsi.



Bagi yang belum terima argumen ini, bantahlah. Bila perlu kita buka bersama untuk berdebat sampai sahur. Tapi pekan depan ya.

III. DAHULUKAN PENCEGAHAN KORUPSI

Buat sahabat-sahabat Febridiansyah, Tama Satria Langkun, Taufik Basari dan lain-lain saya komentari soal KPK

Tadi saya usulkan agar semua penuntutan kasus korupsi dilakukan oleh KPK saja. Jaksa Agung untuk yang lain.

Alasannya sangat konsisten dengan kritik saya selama ini bahwa KPK membuat sistem tak solid.

Sistem hukum yang solid dicirikan oleh tertutupnya seluruh peluang ketidakadilan di dalamnya.

Pasal 27 UUD 1945 menulis “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan....”

Jika ada 2 lembaga penuntut (JA/KPK) maka “persamaan kedudukan di hadapan hukum” sulit tercapai. Dan itu yang terjadi selama ini.

Selama ini, seseorang yang dituduh kasus korupsi yang sama tetapi dituntut beda oleh KPK dan JA. Yang jelas KPK menuntut lebih berat.

Belum lagi UU KPK yang tidak mengenal SP3, beserta soal-soal lain yang menjadi “perbedaan di hadapan hukum”. Lubang ini harus ditutup.

Itu alasan saya mengusulkan agar “rezim korupsi” diambil alih seluruhnya oleh KPK supaya dualisme ini berhenti.

Jadi perubahan UU KPK memang bermaksud memperkuat “*criminal justice system*” kita, selain nanti melalui UU KUHAP.

Setahu saya, survey membuktikan reputasi KPK meningkat dan reputasi lembaga lainnya merosot dan memburuk.

Jadi, sukses kita di mana? Ketika ketua BPK kemarin melaporkan ke DPR-RI bahwa temuan penyimpangan meningkat.

Saya melihatnya sederhana, karena desain UU 30/2002 menghendaki “*orchestra*” yang kompak pada institusi Gak-kum.



Itu sebabnya kewenangan “pencegahan” itu dominan dan “penindakan” adalah keterpaksaan. Sekarang, institusi inti, tergerus wibawanya. Sementara KPK telah menjadi satu-satunya harapan.

Mari berdebat cari solusi, insya Allah kita mampu asal mau. Energi kolektif kita hebat. Indonesia adalah peradaban.

IV. POLISI DAN KPK

Saya sharing soal Polisi dan KPK dalam kasus simulator. Korupsinya biasa tapi pelakunya yang unik.

Jika kejadiannya awal 2011, maka anggarannya memakai APBN 2010. Saya masih pimpinan Komisi 3.

Modus kasus ini pasti sama: perencanaan di polisi, pengusulan di Kemenkeu, penganggaran di DPR dan eksekusi di Mabes Polri.

Ada kemungkinan *kongkalikong* sejak perencanaan di Mabes Polri bekerjasama dengan institusi lain.

Ada kemungkinan anggota DPR terlibat, termasuk Komisi 3. Dan setahu saya kordinator anggaran waktu itu masih Nazaruddin.

Tapi ini modus baru KPK RI yang sudah lama saya usulkan. Meski Lantas tidak *seserem* Rekskrim. Ini langkah maju.

Kenapa saya bilang maju? Karena korupsi tak akan henti jika hulu penegakan hukum tidak bersih.

Dari dulu saya bilang, kalau mau belajar dari KPK Hongkong, hajar polisi dulu sampai bersih. 3 tahun selesai!

Polisi Hongkong sempat melawan, dengan kewenangan yang lebih kecil dari KPK Indonesia, mereka melawan.

Soal mencontoh ICAC, KPK Hongkong yang sukses.

Sekarang, kita lihat semacam ketegangan. Itu tensi yang wajar. Sebab Polri tidak pernah digeledah seumur hidup.

Tapi, jangan sampai KPK menikmati “kemenangan kecilnya” yang menjadi sumber pujian dan tepuk dada.

Jangan lupa bahwa musuh KPK RI bukan Polri tapi korupsi. Dan korupsi bukan soal manusia, ini soal sistem.

Makanya, UU 30/2002 membolehkan KPK RI menghajar siapapun yang dia mau demi tegaknya sistem yang anti korupsi.



Tetapi, jika visi ini tidak kuat dan KPK RI gagal meyakinkan Polri untuk pembenahan menyeluruh, pertunjukan ini akan sia-sia.

Sekaranglah saatnya, Abraham dan kawan-kawan. duduk bersama Timor cs. Lalu ungkaplah semua yang sudah ditemukan.

Soal simulator, hanya satu kasus yang harus dituntaskan. Tapi yang lain, bukanlah mata mereka tentang betapa buruknya *governance*.

Lalu tawarkanlah alternatif. Semua spot korupsi di lembaga kepolisian harus dibuka.

Mudah-mudahan KPK RI setelah 12 tahun ini sudah punya kajian yang komprehensif soal pembenahan Polri.

Pembenahan sistemik di Polri akan menyelesaikan lebih dari 50% persoalan korupsi di Indonesia

Tapi jangan lupa, sayap pencegahan. KPK RI harus mau mendengar secara sungguh-sungguh. Bantulah polisi berbenah, jangan ada niat lain.

Dalam rangka pembenahan itu, KPK RI harus naik menjadi negarawan. Mintalah waktu kepada Presiden SBY

Ada banyak persoalan di kepolisian yang Kapolri pun tak sanggup. Presiden SBY harus diajak, jangan lepas tangan.

Selama ini, Presiden SBY menikmati Polri sebagai alat kekuasaannya (sadar atau tidak).

Itulah yang membuatnya enggan memperbaiki kepolisian. Apalagi meletakkannya dalam kerangka kelembagaan demokratis.

Sementara itu, polisi semakin sulit mendengar dan besar kepala. Itulah yang menghambat reformasinya.

V. SUPERVISI PADA LEMBAGA, BUKAN KASUS

Kita lanjut...

Saya sering ke daerah-daerah dan melihat kehidupan yang kontras dari prajurit-prajurit polisi kecil yang menjalani hidup yang tak enak.

Dengan empati kita pada mereka, KPK RI kali ini tak boleh gagal. Perbaiki hulu dan hilirinya. Seperti ICAC Hongkong itu.



Untuk itu gunakan kewenangan besar yang diberikan UU. Sikat bos-bos besar kalau menghalangi. Jangan takut!

Ada kemungkinan kasus ini sudah melibatkan orang-orang besar termasuk di DPR. Saya mencium itu.

Dan tahukah anda cara menghadapinya? Satu kata kunci, “berdiri tegak di atas rel hukum”.

Sadarilah bahwa KPK RI tidak hanya memiliki hukum tetapi juga kekuatan yang represif.

Kalau itu terbiasa dipakai untuk menangkap kepala dinas kabupaten, gunakanlah itu sekarang untuk ikan besar.

Sayap-sayap kewenangan KPK RI harus dimekarkan semua. Meski terlambat. Ini tidak saja perlu nyali tapi juga kerendahan hati.

Hati-hati dengan tepuk tangan. Ia bisa membelokkan tujuan.

Masalah seperti ini akan terus terjadi kalau posisi KPK RI sebagai superboddy tidak disadari

Di satu sisi, publik menganggap KPK RI bersih. Dan Polri tidak bersih. Subjektifitas cukup kuat.

KPK RI bisa saja kembali memenangkan opini publik. Tapi bisa dikata tugas supervisi gagal dilakukan setelah 10 tahun.

Karena gagal melakukan supervisi yang diamanatkan UU, malah KPK RI teken MoU yang melemahkan diri.

KPK RI tidak memerlukan MoU apapun karena supervisi adalah perintah UU 30/2002.

Saya duga dari dulu, justru MoU dibuat karena pimpinan KPK RI tidak paham bagaimana supervisi diselenggarakan.

Sekarang terbukti, MoU itu memperlemah posisi KPK RI karena istilah “bersama-sama” justru menghilangkan fungsi pemimpin.

Dan terbukti bahwa Polri (juga kejaksaan) akhirnya gagal disupervisi seperti kemauan UU 30/2002.

MoU adalah basa-basi untuk tidak menjalankan fungsi supervisi secara riil.



Seharusnya, posisi KPK RI untuk melakukan supervisi tidak boleh direduksi. Tapi apa yang disupervisi?

Supervisi itu seharusnya dilakukan pada lembaga, bukan kepada kasus. KPK RI melenceng dari sistem.

KPK RI dibawah Abraham harus menyadari kesalahan pimpinan KPK lama. Yang gemar mencari dukungan publik melalui kasus.

Lalu demi dukungan publik itu tugas untuk bersinergi dikorbankan. 10 tahun bertengkar dan memalukan.

Nanti publik akan memaki polisi dan memaki yang mengkritik KPK RI sambil terus menikmati eksklusifitas.

Tapi bisa juga pimpinan KPK RI mulai sadar diri. Sadar bahwa tepuk tangan ini nyaris menghancurkan kita semua.

Ini sepuluh tahun, Bung. Kekuatan Anda yang begitu besar Anda pakai untuk apa *aja*? Kok korupsi tidak hilang?

Polisi, jaksa, hakim adalah amanah UU kepada kepada

KPK RI untuk dibenahi. Untuk itulah kekuasaan besar diberikan.

Supaya nanti merekalah yang menegakkan hukum dan memberantas semua jenis kejahatan. KPK RI adalah lembaga sementara.

Setelah 10 tahun di Ramadhan ini, hadirkan kerendahan hati. Musuh kita ada pada diri sendiri.



BAGIAN KESEMBILAN CATATAN UNTUK PARA AKTIVIS



“ *Demokrasi adalah kesadaran tentang kekuasaan terbatas dan terbagi. Tapi mentalitas sebagian kita ingin agar negara tidak ada batas kuasa!* ”



I. NEGARA ADA UNTUK MENJAMIN HAK WARGANYA

Pagi ini, 10:00 pleno Komisi 3 soal jadwal *fit and proper test* Pimpinan KPK. Rencana pagi: *fit/test* (BW/BM) siang: pilih 1. Malam: pilih 1 ketua (dari 5).

Rencana-nya *fit/proper test* hari Rabu, 24 november 2010. Mulai jam 10 pagi. Kalau mau datang silahkan tapi jangan jadi supporter.

Saya tidak mau block orang. Orang usil adalah ujian buat kesabaran pribadi kita. Apalagi pejabat publik. “*Tell him that I am not going to block*”.

Kadang-kadang muncul keinginan untuk menghilangkan orang-orang yang menyerang atau tak bersepakat. Padahal itu kekanak-kanakan.

Berkali, jibril menawarkan kepada Muhammad Saw, jasa menghancurkan para penentang. Dijawab singkat: “jangan Jibril, mereka belum paham...”.

Apa hak kita meniadakan orang lain? Sejelek apapun dia menurut kita dan seberdosa apapun menurut keyakinan kita, kita tidak punya hak.

Sadarkah bahwa negara lahir untuk menghindari keinginan saling meniadakan? Tanggalkan senjatamu. Serahkan kepada negara. Kita sudah terlucuti.

Bagiku, kebesaran Tuhan nampak pada dunia yang indah meski sulit dicerna. Nikmat yang mana lagi yang boleh kita ingkari. Periharalah hidup kita.

II. PEMBERANTASAN KORUPSI SALAH ARAH

Soal KPK, saya mencari orang yang bisa merubah pendirian saya. Terlalu banyak pakar yang mendukung.

Sedang mendengar keterangan Prof Romli Atmasasmita (gurubesar UNPAD). Beliau adalah konseptor UU KPK. Dahsyat...! Anak-anak ICW perlu dengar ini.

Kok saya sepakat sekali dengan beliau ini. Dia konseptor UU KPK dan mengkritik KPK secara sangat tajam... Todung Lubis, Febridiansyah dkk.

Pemberantasan korupsi salah arah...! KPK melenceng jauh! Ini harus jadi headline! Besok BW/BM harus baca ini...! Seru!



Semoga teman-teman wartawan bisa mengikutipnya secara lengkap! Gila, kita terperangkap dalam jebakan orang lain! Mengerikan!

Ini gila. Para praktisi hukum harus membuka mata. Negara hancur kalau gini. Bravo Prof Romli. “You open our eyes today”!

Beliau ini korban. Seluruh karirnya untuk pemberantasan korupsi (regulasi dan advokasi), lalu dia menjadi korban sengketa para gajah.

III. MENIKMATI DEMOKRASI

Saya senang orang rasional. BW ini rasional. Akalnya tegak di atas pribadi yang baik. Semoga jalannya mulus.

Saya berharap BW akan memimpin orkestra besar agar kejahatan korupsi nampak kecil di hadapan kebersamaan kita. Apakah saya bermimpi?

Sebaiknya, SBY memilih Jimly atau B Widjayanto sebagai Jaksa Agung. Mereka telah diuji luar dalam. Semoga pembisikannya benar bisikannya.

Soal tuduhan korupsi kepada saya: silahkan laporkan. Silahkan balas dendam. Balas dendam melalui jalur hukum itu halal! “No worry bro”!

Soal PKS... Kami kritis pada semua hal karena tugas. Soal dukungan kepada KPK *gak* usah tanya. Teman-teman KPK lebih tahu partai mana yang kooperatif.

Soal anti KPK: tugas saya kritis kepada setiap lembaga negara pengguna APBN. Karena KPK belanja hampir 400 milyar/tahun, maka saya kritisi!

Soal berpolemik: saya berpolemik bukan cari musuh, saya tidak menyinggung pribadi kecuali pribadi yang melekat pada jabatan publik.

Soal anti KPK, Anda bisa datang ke Komisi 3 dan lihat hasil rapat-rapat. Saya mengusulkan penggantian bantuan asing 15 juta USD/tahun oleh APBN.

Anda tanya Chandra Hamzah atau Haryono Umar atau M Yasin. Yang penting saya konsisten. Kerja KPK berat, karena itu perlu dikritisi.

Mari menikmati demokrasi kita. Ini anugerah terindah



yang Allah berikan setelah proklamasi kemerdekaan.
Jangan takut beda pendapat, wahai pemuda!

Saya menikmati semua tanggapannya. Banyak *banget*.
Saya lagi baca secara teliti.

IV. JANGAN IKUT SENSASI PENCITRAAN

Banyak *banget* mentionnya. Bagaimana menjawabnya
selain kata “terima kasih dan maaf”.

Apa yang kita katakan adalah apa yang kita harus perbuat
dan tanggung jawab. Dan kita mulai harus berani.

Kata-kata kita tidak hanya kita pertanggungjawabkan
di dunia tetapi di pengadilan hari akhir nanti (sorry bagi
yang tidak percaya).

Saya senang pagi ini ada forum agar anak-anak muda
seumur, saya, Fadjoel, Denny Indrayana, Alex Lay,
melihat masalah bersama.

Setiap generasi memandang masalahnya sendiri dengan
time frame dan beban yang berbeda.

Saya mengajak optimis, bahwa generasi kita harus menganggap soal korupsi ini kecil.

Energi kita lebih besar dari yang kita pikirkan. Ada di bumi, air dan manusia Indonesia kita.

Saya dari Sumbawa. Pernah gunung Tambora pada April 1815 meletus dan tahun berikutnya belahan benua gelap setahun

Jika sebuah pulau kecil mampu memproduksi peristiwa yang menutup satu musim di Eropa, itu pula kemampuan manusianya.

Saya percaya dengan manusia Indonesia. Karena itu saya sedih dengan tuduhan maling yang setiap hari digemakan.

Ini bangsa baik, dari tanah dan manusia baik. Karena itu kita harus yakin bahwa kita mampu lebih cepat.

Kritik saya setelah 9 tahun UU 30/2002 adalah ketidakpercayaan bahwa kita harus selamban ini *bahkan set back*.

Mungkin ini pandangan generasi lama yang pesimis dan penuh beban sejarah masa lalu. Sehingga apologi dominan.



Kewenangan besar KPK pun akhirnya hanya jadi alat penampik nyamuk yang hanya hasilkan bising.

Padahal energi yang kita tempatkan dalam UU ini besar sekali. Kalau ICAC Hongkong 3 tahun, bayangan saya KPK harusnya hanya 2 thn.

Sekarang setelah 8 tahun KPK, sekian ratus tangkapan dan sekian tahun penyadapan. Ada yang klaim sukses ada yang kecewa gagal

Bung Denny Indrayana anggap sudah sukses dan Presiden SBY ada di belakang sukses ini.

Bung Fadjoel relatif kritis dan tidak puas. Dan Bung Alex Lay pokoknya KPK *gak* ada salah.

Bagi saya, kalau kita sukses artinya 8 tahun seluruh lembaga gakkum tertransformasi menuju *Good Governance*.

Anak-anak ICW ternyata GOLPUT. pantesan advokasi ber-latar kebencian pada politik. Agenda siapa?

Kalau saya jelas, bikin partai, berjuang dalam kerangka 4 pilar kebangsaan. Kalau yang GOLPUT jalankan agenda siapa?

Memang GOLPUT tidak dilarang, tetapi layak bertanya kerja untuk siapa? Mereka kan juga cari pengaruh.

Saya sensitif dengan kelompok yang menyerang institusi-institusi demokrasi seperti Parpol dan DPR. Ada kemungkinan agenda asing.

Jangan lupa Parpol adalah wujud agregasi suara rakyat. Dan DPR-RI adalah perwakilannya. Tidak ada cara lain.

Jika 95 % rakyat memilih, maka mereka ini yang tidak beritikad baik dengan proses demokrasi rakyat.

Gagal memahami demokrasi lalu para GOLPUT ini mau merusaknya dengan institusi superbody dan opini-opini sesat.

Mereka melakukan dekonstruksi kepada institusi inti dalam demokrasi melalui KPK. Ini yang akan saya kejar.

Pemuda Indonesia jangan ikut-ikutan pencitraan. Gagal bekerja dan selesaikan masalah dialihkan ke sensasi pencitraan.

Tanya ICW, KPK kan banyak sadapan orang Banggar, masak sih *gak* ada 1 pun bukti aliran dana ke saya? Kan saya koruptor!



Menganggap “LSM anti korupsi” pasti bebas korupsi adalah kenaifan dan sama naifnya dengan anggap semua anggota DPR maling.

Makanya, kalau diskusi jangan serang pribadi orang. Seranglah idenya. Pribadi itu bisa tersinggung, ide tidak.

Ada juga orang yang kita kritik idenya tapi tersinggung dan balik argumentum ad hominem, menyerang pribadi. Ini childish!

Dibangunlah gagasan, kritik KPK dan pimpinannya berarti koruptor! Istilahnya “koruptor fight back!”.

Dibalik kampanye “koruptor fight back” itu ada dana asing. Langsung atau tidak. Padahal tidak sanggup nunjukin siapa yang nyerang balik.

V. DOUBLE STANDARD ITU BIASANYA PERMAINAN ASING

Menjelang sore, teruntuk para pejuang HAM, Bang Todung Lubis, Usman Hamid, KontraS dan Komnas HAM dll.

Saat diwawancara kemarin soal baju baru tersangka korupsi, Samad mengatakan “warna putih membuat mereka nampak bagus”.

Jadi menurut Abraham, “kita mencari warna yang membuat mereka malu dan jera”. Dan 5 pimpinan KPK berpendapat sama.

Nampaknya mereka bukan saja tak mengerti warna, tapi juga tidak paham hak-hak warga negara sipil.

Setiap warga negara termasuk yang tersangka harus dihormati hak mereka untuk dianggap “innocent” sampai divonis salah.

Prinsip ini sangat masyhur di negara demokrasi manapun karena merupakan penjelmaan langsung dari pengakuan atas HAM.

UUD 45 dan UU kita juga telah mengakomodasi dan menuliskan secara terang (UU no 39/1999 ttg HAM psl 18 ayat 1)

Ada kemungkinan KPK berargumen bahwa mereka boleh melanggar HAM, dan janganjangan itu disetujui oleh konco-konconyanya.



Padahal dalam negara demokrasi yang beradab, tersangka bahkan boleh membayar denda untuk erada di luar penjara.

Negara memang boleh menangkap pada kasuskasus serius dan itupun batasan waktunya sangat ketat. biasanya hanya 24 jam.

Pada saat ditahan, negara harusnya memberikan akses data kepada tersangka untuk menyiapkan pembelaan dirinya dan memiliki lawyer.

Bahkan harusnya kalau Ia tak punya uang, maka negara harusnya membantu menyiapkan lawyer. Ini prinsip bantuan hukum.

Masih banyak prinsip yang seharusnya perlu menjadi catatan bahwa pasca amandemen ke-2 HAM manusia Indonesia sangat kuat.

Tapi apa yang terjadi setelah pengadilan memutuskannya bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap?

Barulah ia masuk bui dan dia memakai baju penjara yang loreng-loreng, dan di situlah dia jera dan malu.

Maka konsisten dengan filsafat hukum lama, prinsip “*presumption of innocent*” itu ada sampai seseorang terbukti bersalah.

Maka penjeratan dan pe-malu-an itu terjadi pada saat orang sudah dihukum dengan hukum yang memiliki kekuatan tetap (*inkracht*).

Saya tidak mengerti kenapa KPK sudah mengajak kita menyimpang sejauh ini? Dan kita semua tersihir oleh pertunjukan sesat ini.

Yang lebih saya tidak mengerti kenapa Bang Todung Lubis dkk. sebagai khotib-khotib HAM Kok malah dukung langgar HAM?

Double standard itu biasanya permainan asing. Semoga tidak ada bau kapital di dalamnya...

VI. PENEGAKAN HUKUM JANGAN “CAMPAIGN ORIENTED”

Pagi ini akan menguap bersama Monorail, MRT, Transjakarta, Bibit/Chandra, Century, Lapindo, dll. Lalu kita lupa dan datanglah ingatan baru.



KPK mendapat pelajaran penting akibat pendekatannya yang “*campaign oriented*” vs “*law enforcement*”. Kita semua perlu berfikir “*integrated*”!

Yang aneh dari semua ini adalah tim 8, satgas anti mafia, dan sejenisnya, mereka abai melihat awal masalahnya, yaitu rekayasa dan mafia.

Kalau rekayasa, ya bukan rekomendasikan kejaksaan fokusnya, tetapi menangkap anggota mafia rekayasa, *dong*. Di mana pun mereka, lalu suruh nyanyi.

Kan sudah ada Susno yang nyanyi, oleh satgas anti mafia malah bela yang bungkam Susno. Loh, katanya anti mafia, yang bongkar mafia malah dibungkam!

Ini semua serangkaian cara kerja yang amatir dan membingungkan. Urutannya tidak ilmiah dan tidak masuk dalam katagori nalar sehat.

Saya heran banyak doktor yang mampu hidup dengan akal tidak sehat dan tata kerja yang jungkir balik? Ini akibat membungkuk pada kekuasaan!

Dunia ini dirusak oleh 1 dari 2 macam orang: yang berilmu tapi tidak bekerja, dan yang bekerja tanpa ilmu. Coba tengok diri kita dan sekitar!

Siapakah yang menjadi dalang intervensi yang terus menggerus penegakan hukum kita ini? Yang menimbulkan kerusakan sistemik yang makin parah.

Usulkan saja, siapa yang kita percaya pimpin KPK, nanti kita bahas. Kita memerlukan lelaki setengah dewa? Atau “a man among us”... Atau?

Kalau kebanggaan pada diri sendiri mulai hilang dari para pemimpin, maka bangsa sesungguhnya sedang lunglai. Sempoyongan dan menunggu jatuh!

“Orang yang tidak berilmu yang ingin melakukan perbaikan, maka kerusakan yang mungkin ditimbulkan bisa lebih besar dari perbaikan yang diinginkan”.

Bangsa Ini harusnya tidak kekurangan calon pimpinan KPK. Saya menyangkan senior kita Pak Jimly dan Busyro Kita perlu “fighter”!

Justru karena saya sangat tidak meragukan reputasinya selama menjadi dosen dan hakim, tapi Todung lebih pas, sudah biasa “tempur”!

Tidak ada soal mereka maju, bagi mereka mungkin ini



untuk tidak mempersonalisasi masalah “bangsa” ini. Tapi apakah sepesimis ini kita?

Ini tentang pesimisme suatu generasi. Mana ICW, MTI, KAPAK, TOMBAK, LBH dan yang setiap hari kritis? Apakah tidak siap dikritisi?

Teten Masduki, Ibrahim Fahmi Badoh, Febridiansyah, Emerson Yuntho, Ilian Dita Sari, Todung Mulya Lubis, Sudirman Said, Denny Indrayana...

250 juta rakyat Indonesia, terbesar ke-4 di dunia, mencari satu orang dianggap sulit. Padahal pesimismelah yang membuat kita hilang asa...

Mengandalkan seorang individu untuk menuntaskan masalah korupsi adalah gila. Kita butuh perbaikan sistem. Yang korup itu adalah sistem!

Dari dulu saya bilang KPK gagal, karena pendekatannya tidak sistemik, “*one man show and campaign oriented*”.

Korupsi itu budaya, situasional, residu pembangunan dan kebebasan dan sistemik. Karena itu mencakup banyak aspek. KPK abai identifikasi ini.

Pegawai KPK : 500 orang, gaji bisa 10 kali gaji polisi, 400.000 orang. Banyangkan kalau KPK bersih dan polisi kotor, belum kejaksaan.

Antasari, seorang jaksa dengan catatan buruk, tiba-tiba jadi hero di KPK, Slank pun latah, lalu dibongkar kejahatannya. Dan publik kaget. Apa?

Intinya, demokrasi bukan soal individu, tapi pembangunan system. Jika pendekatan kita terus saja pada isu individu, matilah kita!

“All governments are essentially bad because they impinge on the of the individuals... But we agree to form one...”

Tapi, meskipun negara pada dasarnya buruk, individu setuju membentuk nya. Karena kalau tidak, maka hidup akan hanya ada perang.

Negara kadang menjadi beban, bahkan musuh ketika kekuasaan yang kita serahkan dipakai untuk membatasi warga, padahal kita bebas.

Negara harus minimalis karena keberadaannya tidak boleh mendominasi, yang akhirnya hilangkan kebebasan, padahal kita lahir merdeka.



Karena negara bukan saja datang belakangan, tetapi fungsinya minimal, hampir semua urusan kita (juga dengan Tuhan) tidak perlu negara!

Negara oleh kaum feodal dianggap milik pribadi, pada level elite dan dianggap sakral oleh rakyatnya. Di sinilah mulainya otoritarianisme!

Ketua KPK yang baru hanya bisa diterima jika memiliki proposal untuk memberantas korupsi secara sistemik, hentikan kegenitan publikasi!

Para hakim kita atau siapapun dalam “*criminal justice system*” nampak juga bingung dalam sistem yang simpang siur. Harus ada yang menata lagi!

Negara harus bertindak tegas atas tindakan komunitas sipil yang mengambil alih tugas aparat hukum. Sebab itu namanya main hakim sendiri. Clear?

Apa sih yang eksekutif kita kuat determinasinya? Hampir tidak ada. Demokrasi dianggap tidak berbuat apa-apa dan *decisive* dianggap otoriter!

Absennya negara dalam banyak momen penting

tidak saja menggambarkan kegagalannya, tetapi juga disorientasi aparat publik akan eksistensinya!

Kesaksian Prof. Romli Atmasasmita pagi ini di komisi 3 sangat penting untuk didengar oleh presiden dan aparatnya. Juga aktivis anti korupsi

Berikut sesalnya: hukum anti korupsi itu luar biasa (represifnya), ternyata digunakan oleh penjahatpenjahat untuk tujuan lain! Dia berpikir ulang!

Dia mengkritisi kembali semua upaya negara untuk mengontrol rakyat, termasuk UU yang dia juga terlibat. "Hati-hati atas KPK, TPPU, KIP, dll."

Dari dulu saya menentang lembaga *ekstra judicial*, super body atau konsep jera. Saya menentang negara yang kerjanya hanya mengumpulkan kuasa!

Seolah-olah jika negara sudah memiliki semua macam kuasa lalu semua masalah akan beres. Ini kolonial dan otoriter, serta sangat primitif!

Demokrasi adalah kesadaran tentang kekuasaan terbatas dan terbagi. Tapi mentalitas sebagian kita ingin agar negara tidak ada batas kuasa!



BAGIAN KESEPULUH ANOMALI KASUS CENTURY



“

**Fiat justitia ruat caelum,
hukum harus ditegakkan
walau langit akan runtuh.**

”



I. DRAMA CENTURY MEMBUKA MATA PUBLIK

Sebagai mantan anggota pansus century dan anggota Timwas, saya akan tweet perkembangan penyelesaian kasus Century yang pernah heboh itu.

Tuh, orang2 menyerang KPK soal Century. Katanya: “kenapa soal sarung Bachtiar ditangkap tapi 6,7 T menguap?” Wah-wah ini akan sejauh apa?

Kasus Century tidak mungkin dikubur oleh siapapun, termasuk oleh aparat hukum. Karena DPR memiliki keputusan lanjutan yang mengikat.

Kesimpulannya adalah: 1. Proses penegakan hukum; 2. Aliran dana; 3. Asset recovery; 4. Antaboga; dan 5. Revisi paket UU keuangan/perbankan.

Kelima tugas dari paripurna ini menyebabkan kita tidak mungkin bisa melupakan kasus Century, sampai kapan pun. Memang bisa dimatikan sesaat

Tetapi, sepertinya masa kerja Timwas akan terus berjalan setidaknya 4 tahun ke depan. Itu sebabnya sulit setidaknya 4 tahun ini ditutup.

Lihatlah 5 tugas itu. Satu demi satu memang tidak nampak hasilnya. Semua aparat penegak hukum nampak diam. Akhirnya orang marah lagi.

Saya kira generasi ini sulit melupakan drama pansus yang begitu menarik perhatian publik berbulan-bulan lamanya. Live!

II. KEBOBROKAN LAMA DITUTUPI YANG BARU

Berikut akan saya bedah satu per satu 5 tugas paripurna kepada Timwas. Sabar ya...

Penegakan hukum kasus Century hanya satu dari 5 tugas berat pemerintah. Dan kita lihat ada lebih dari satu jenis tindak pidana (TP).

Ada TP perbankan, TP money laundry, TP penipuan/ penggelapan, dan TP korupsi. Ada juga yang hanya di-“kenakan” ke Misbakhun (TP pemalsuan).

Semua TP belum ditangani serius. Bahkan dalam rapat pertama dengan Polisi, Jaksa dan KPK, mereka mengutip opsi A dari paripurna DPR.



Kalau polisi dan jaksa dapat dimengerti, sebab mereka tidak independen. Bahkan melakukan serangan balik dengan mengkriminalkan Misbakhun.

KPK gimana? Ini yang saya mau clearkan. Apakah betul KPK tidak menemukan indikasi korupsi pada kasus besar dan telanjang ini?

Jangan lupa kasus ini “upaya pembobolan bank secara berlanjut dengan melibatkan institusi moneter/fiskal yang merugikan keuangan negara”.

Robert, Rafat, Hesham secara sah dan meyakinkan telah dinyatakan bersekongkol (dengan siapa?) dalam melakukan serangkaian TP.

Mereka melakukan pengurusan dana setoran modal, dana pihak ketiga, fasilitas GSM-102. Mereka melakukan pidana perbankan yang beragam.

Tiga bank (CIC, PIKKO, DANPAC) menjadi media kejahatan. Semua kecurangan itu akhirnya terbungkus rapi oleh adanya merger dan akuisisi.

Siapa yang ijin merger? Pejabat negara di BI. Padahal

merger itu juga hasilnya buruk. Terbukti tgl 28 Februari 2005, bank baru memburuk.

Bank yang diberi nama Century ini mengalami kerugian dengan modal sisa negatif (-) Rp. 2. 944. 958 atau CAR negatif (-) 132,58 %. Gila, kan?

Jangan lupa, kenyataan buruk ini ditutupi oleh BI. Dan jangan lupa bahwa kejahatan berlanjut karena kebobrokan awal ditutup oleh yang baru.

Sesungguhnya saya belum masuk inti persoalan. Sudah banyak yang nanya. Tapi saya mau selesaikan bagian pendahuluannya dulu. Sabar ya...

III. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Dalam logika sederhana, memang BI menjadi pusat masalah awalnya. Merekalah yang memberikan kemudahan dan pembiaran pada kejahatan bank.

Tadinya, Pansus mau mendalami soal lain. Misalnya, soal fasilitas GSM-102 yang ternyata fasilitas Departemen Pertanian Amerika. Ini seru.



Tapi kita fokus saja pada skandal ini. Ada yang tanya, ini kan bukan uang negara. Nah itu dia. Siapa yang berhak menilai uang di saku bank.

Ada kontroversi dalam penilaian uang negara di LPS (nanti kita selesaikan di tugas ke-5 soal paket UU). Tapi soal FPJP dari BI jelas.

Soal FPJP ini coba kita nalar secara terang apakah ada tindakan korupsi berdasarkan UU Tipikor no. 31/1999 jo. 20/2001. Coba tanya ICW.

Biar ada alat analisa, UU tadi menyebut korupsi itu kriterianya ada tiga saja (belakangan KPK saya dengar menambah 2 poin).

Kriteria 1. Melawan hukum; 2. Memperkaya diri atau orang lain; 3. Merugikan keuangan negara (untuk kasus Century KPK tambah niat jahat +manfaat).

Kita sekarang harus melek, jangan biarkan mereka yang merasa paling paham hukum dan sok bikin definisi soal korupsi, melanggar hukum, dan lain-lain.

Jika kita berdebat soal kriteria, saya senang sekali. Sebab

akan terang benderang nasib orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan. Selama ini kabur.

Sekian bagian pendahuluan. Saya masih banyak peluru. Tapi kita istirahat untuk jawab *tweps*.

IV. PENEGAKAN HUKUM PERLU KETEGASAN

Saya sudah terangkan latar dan kronologinya. Soal krisis global tentu jadi pertimbangan, tapi temuan BPK (supreme auditor) juga fakta.

Lalu DPR berkesimpulan dan membentuk Timwas untuk meneruskan tugas memantau kerja pemerintah dan DPR dalam beberapa hal.

Yaitu: 1. Penegakan hukum; 2. Aliran dana; 3. Asset recovery; 4. Antaboga; 5. Paket UU Keuangan dan Perbankan. Kelima hal ini hikmahnya besar bagi kita.

Itulah tugas Timwas DPR sekarang. Kelima hal ini harus tuntas. Cara berpikirnya sudah benar, sebab penegakan hukum diakhiri dengan perbaikan hukum.



Sekarang kita bicara penegakan hukum. Tetapi, respons Presiden sehari setelah paripurna cukup meragukan.

Kita tidak perlu takut membahas pemerintah salah atau tidak dalam *bailout* ini. Jangan juga takut buka-bukaan.

Kalau memang ada situasi mendesak, buka saja semuanya. Biar rakyat menonton penjelasan saksi-saksi kunci. Tapi jangan ditutupi.

Sangat menyedihkan, ketakutan yang berlebihan sehingga saksi kunci pergi dengan alasan yang terlalu dibuat-buat.

Pada setiap peristiwa yang membuat kita bimbang, harus ada yang berdiri tegar meyakinkan kita semua. Itulah pemimpin.

Kita seperti menghindar dan tidak berani bersaksi di hadapan sejarah. Adakah bangsa bisa bertahan di depan pribadi yang mudah goyah?

Akhirnya, polisi dan jaksa ragu. Bahkan keraguan itu menular ke KPK yang tadinya menjadi andalan kita.

Padahal dalam hukum, tegas meski salah lebih baik, dari pada goyah meski benar. Kita tidak terbiasa melihat peragu jadi pemimpin.

Akan sampai dimana pengusutan Century? Berpulang kepada ketegasan pemerintah dan aparat hukum.

Penegakan hukum akan menentukan pekerjaan lainnya: aliran dana, *asset recovery* dan penataan paket UU.

Tidak ada kasus yang seterang kasus Century. Harusnya penegakan hukumnya bisa lebih cepat. Tapi siapa yang menghambatnya?

Kasus Century adalah contoh bahwa KPK sudah kewalahan. Lalu berpolitik. Sekali lagi ini bukan soal lembaga, ini manusia merusak.

Satu kasus, diakui polisi, dicitum busuknya oleh KPK (lama), lalu BPK, lalu DPR, dan diputuskan PN Jakpus oleh KPK (baru) dibilang “belum”.

Seolah2 hukum itu berbagai-bagi, terang buat Si B(urhanuddin) dan kabur buat Si B(oediono).



V. HUKUM JANGAN DIBELOKKAN DEMI ORDER

Saya mau contohkan kasus Misbakhun kawan saya. Ini real karena saya tahu. Bagaimana hukum dibelokkan.

Alkisah, ada 10 perusahaan yang LC-nya bermasalah oleh Bareskrim (Susno), BPK & juga Bank Mutiara. 6 dianggap fiktif dan 4 tidak fiktif.

Para jaksanya kebingungan mau mendelik Misbakhun dengan apa? Tiba-tiba muncul tuduhan baru. Hukum apa ini?

Logika hukumnya sederhana. 6 perusahaan tidak bisa dibela. Mereka bisa diproses cepat dan langsung disidang. Yang 4 secara perdata selesai.

Karena yang 4 itu mengembalikan (menyicil) hutang LC yang terganggu. Tapi yang 6 betul-betul fiktif dan sekali lagi terang benderang.

Tapi polisi (atas lap staf presiden) memproses 1 dari yang 4 yang ada Misbakhunnya (anggota DPR yang memulai kasus Century).

Harus ijin presiden. Misbakhun kooperatif. Tapi presiden cepat sekali mengeluarkan ijin (dalam 2 hari). Ada apa?

Kalau pakai logika hukum, polisi harusnya tuntaskan yang bermasalah dan jelas merugikan negara (uang nguap), bukan yang bayar.

Tapi kita tau akhirnya. Jaksa yang sedang berkompetisi jadi Jagung ini juga meloloskan kasus ini. Tapi sidang sudah 5 kali ditunda.

VI. DPR INGIN TERBUKA, KPK INGIN TERTUTUP

Sudah selesai dengan KPK soal Century. Alhamdulillah...

Hari ini hanya soal FPJP dan KPK merasa banyak masukan baru.

Ijinkan saya *kultwit* soal pertemuan di KPK tadi pagi sampai sore soal Century. Ini info tangan pertama.

Mayoritas anggota Timwas menghendaki rapat tentang Century terbuka. Tetapi KPK meminta tertutup.



Timwas beranggapan bahwa tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Masalah Century ini terlalu transparan buat publik.

Tapi memang, Timwas juga ingin memberikan kesempatan sebebaskan kepada KPK untuk membuka masalah, FPJP khususnya.

Dan KPK minta rapat kali ini hanya soal FPJP atau Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek. Akhirnya disetujui tertutup.

Ternyata, dalam pendahuluannya, ketua KPK malah minta kepada Timwas untuk menyampaikan temuannya soal FPJP. Loh?

Saya interupsi, justru timwas mau tanya, apa yang belum jelas? Wong ini sudah menjadi pengetahuan publik Kok?

Lupakah KPK bahwa ini sudah diungkap oleh polisi, BPK, angket DPR dan PN Jakpus?

Kita tidak boleh mentolerir perbedaan pendapat KPK dengan 2 lembaga penegak hukum lainnya (Polisi+Jaksa), sebab bisa jadi bencana.

Buat Timwas, FPJP terlalu terang. Kami mau tahu versi KPK yang rahasia itu apa? Biar kita adu data. Terjadi perdebatan.

Kalau KPK mau tutup kasus Century maka mereka akan terguling...

VII. APAKAH ADA *TIME TABLE*?

Saya twitt beberapa soal rapat timcil (tim kecil) timwas Century dengan KPK hari ini.

Ini adalah kelanjutan dari kerja tim kecil untuk berkordinasi khusus dengan 2 lembaga: BPK untuk “*forensic audit*” dan KPK (*cross exam*).

Saya sudah memimpin rapat dengan Tim BPK yang dipimpin Pak Ruki dan Pak Hasan Bisri. Dan hasilnya cukup memuaskan.

Hari ini saya memimpin dengan KPK untuk menanyakan rencana lanjutan *cross examinasi*. Rabu besok ada rapat Timwas Century juga.

Secara pribadi, saya akan mengajukan pertanyaan: “apakah KPK ada *time table*?” Kalau ada kapan?



Seperti kita tahu, Timwas Century akan bekerja sampai Desember. Dan KPK pun pimpinannya akan berakhir Desember ini.

Status mega kasus ini harus jelas. Apapun yang terjadi, KPK harus menegaskan sikapnya. Tentu ini sikap hukum terhadap kasus Century

Mustahil tidak ada jalan keluar dan tidak bisa dijelaskan masalahnya secara hukum? DPR pun siap mendengar KPK tentang Century.

Jika KPK mengatakan tidak ada kasus, katakan saja. Jangan diendapkan. Kasian nama-nama yang sudah jadi perbincangan, termasuk Pak Boediono.

Selamat mengikuti dinamika ini. Nanti saya kabari lagi ya.

VIII. BALIKIN DUIT RAKYAT!

Ada yang berharap KPK berhasil tutup kasus Century ini. Lalu mereka semua akan nampak suci. Sadarkah KPK sedang jadi stempel?

Surat permohonan Repo aset Bank Century dijawab FPJP oleh BI sekitar 0,689 Trilyun. KPK menolak melihatnya sebagai masalah? Kenapa?

Repo aset dijawab FPJP, duit negara Ngocor 0,689 T. *Masak sih* salah ketik? Oooi KPK!

Sebelum duit Bank Century balik, aku takkan diam mengusut. #BalikinDuitRakyat. Hehehe...

Saya hanya sampaikan betapa teganya KPK sembunyikan kesalahan ini.

Kalau Anda paham kasus bank Century, maka Anda *gak* akan paham kenapa dia bertele-tele sampai hampir 4 tahun.

Kalau KPK masih ngomong soal dampak sistemik dan bank gagal, hare gene? Artinya memang bertele-tele lah

Soal dampak sistemik dan bank gagal itu sudah jelas adalah akal-akalan. Tapi kasus korupsi Century tak harus mulai dari situ.

Maka, kecurigaan saya adalah, ini operasi penyelamatan Boediono atau lembaga KSSK.



Padahal kalau KPK konsisten ingin perkuat lembaga lain, pakai *aja* hasil audit BPK 4 tahun lalu kan selesai.

Atau kalau mau langsung, pakai saja konstruksi Mabes POLRI zaman Kabareskrim Susno Duadji yang hampir periksa Boediono.

Atau kalau mau lebih dalam, pakai *aja* hasil Pansus angket yang sidangnya sangat terbuka dan transparan.

Sekali lagi, kalau kita ngerti kasus ini, maka kita tak ngerti kenapa dia bertele-tele.

Sekarang malah aneh, Abraham bilang SCF tersangka, Johan Budi berkata belum. Lalu Anggito dipanggil. Apa nih?

Apakah maksud KPK hanya KPK dan Allah yang tahu, kita hanya nonton. Hukum kan milik mereka, suka hatilah...

IX. TUJUAN MENGHALALKAN CARA?

Saya mau kasih 1 konstruksi pidana saja, yang bisa ditulis pada 140 karakter, saking mudahnya kasus ini.

Dasar: UU 30/2002: 1. Setiap orang 2. Melanggar UU 3. Perkaya diri/orang lain; 4. Rugikan uang negara.

Maka: 1. Boediono dkk.; 2. Ubah PBI seenaknya; 3. Perkaya Robert (BC); 4. Pakai uang BI (uang negara). Jelas, kan?

Saya sengaja bikin mudah sekedar untuk tidak mengerti kenapa dibikin sulit. Kecuali kalau KPK mau bikin kaidah baru.

Misalnya KPK mau konstruksi kan bahwa semua tindakan itu sah karena situasi global?

Bukankah itu artinya KPK izinkan penggunaan kesempatan dalam kesempitan secara semena-mena?

Seperti juga falsafah yang dianut tentang “tujuan menghalalkan cara?” Ini kan Machiavelli juga?

Tapi, ini sudah saya sampaikan lama. Saya gemas karena saya tahu, dan menulis buku tebal tentang kasus ini.

Tapi sebagai rakyat kita tahu bahwa hanya Allah dan KPK yang tahu akhirnya. mari kita berdoa.

Semoga Abraham tidak pulang kampung bawa tangan kosong atau pakai celana kolor. Saya juga ikut malu.



Kalau terlibat Century pasti rada hati-hati. Sudah ratusan yang diperiksa diam-diam

Karena mereka bukan orang Parpol, Boediono dan kawan-kawan. Pada dasarnya orang baik. Mereka penyelamat negara.

Mereka yang berjas dan berdasi. Mondar-mandir seminar di luar negeri. Mereka rujukan dunia. Bersih dan rapi.

Nah kalau orang Parpol yang terlibat ya harus dipanggil, bila perlu diancam. Jemput paksa. Panggil paksa, dll.

Jangan lupa, suruh mereka lewat depan KPK dan difoto... Lalu ditanya oleh yang menyamar jadi wartawan.

Pertanyaan dibikin menjatuhkan mental supaya orang yang jiwanya lemah ngaku *aja*.

Abis itu disuruh nunggu dan dibongkar pribadinya. Setiap hari dibikin malu bak putri solo itu.

Tapi kalau pejabat Century ya harus didatangi. Tidak boleh dihina. Harus *kulonuwun*. Ijin, Pak. Ijin, Bu...

Kata KPK: “Mereka kan orang penting, sibuk... Tidak sembarangan...

Tapi kalau orang partai (kecuali SBY), bajingan semua. Pemalu mereka.

Tak ada lagi pasal 27 UUD 1945... “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan...”

“...dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya...”

Demikianlah konstitusi menjaga persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan.

Tapi kita telah memberikan hak diskriminasi kepada KPK, karena ia adalah kebenaran.

Semoga pengabdian kita kepada KPK diterima sebagai amal baik kita kepada KPK. Amien...

Keanehan adalah tanda dosa dan dosa adalah awal taubat kita. Sebelum gelombang perubahan.

Sementara itu, soal *asset recovery*. Jangan lupa, belum ada 1 rupiah uang balik!



6,7 trilyun rupiah mengalir ke kantong penjahat, hilang, dan jejaknya ingin dihilangkan.

Kalau kutengok-tengok, tinggal KPK RI dan ICW yang mengerti hukum di negeri ini. Sita terus semuanya. Maju terusss...!

Kenapa korupsi Century 6,7 T, pengembalian asset Rp.0 mana jurus sita KPK, *Kok gak* jalan?

Supaya pada mudeng, kasus korupsi Century tersangkanya sudah banyak dari pihak bank, tapi tidak dari pihak pemerintah. Baru BM.

Timnya Presiden SBY di bidang hukum ini nyebelin. Apalagi kenyataannya uang *gak* balik.

Wahai KPK RI sitalah aset para penjahat kasus Century yang bergentayangan di dalam negeri.

X. HUKUM HARUS DITEGAKKAN WALAU LANGIT RUNTUH

Timwas Century takkan lalai untuk membongkar skandal ini, meski KPK menghindar.

Fiat justitia ruat caelum, hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh.

Di tengah kebingungan pemerintah yang gagal menegakkan hukum dan melahirkan hukum rimba.

Di tengah KPK yang sibuk melakukan OTT alias Operasi Tangkap Tangan dan pasal berlapis.

Di tengah KPK mau usut lagi BLBI sejak zaman Suharto dan saksi-saksi sudah banyak yang wafat.

Di tengah itu, Timwas akan tetap tegak melawan lupa bangsa kita. Bahwa kasus century adalah skandal kerah putih.

Bahwa kasus Century adalah skandal tingkat tinggi jelang pemilu 2009.

Bahwa skandal Century adalah skandal para sengkuni yang berbisik santun tapi jahat minta ampun.

Bahwa skandal Century adalah kejahatan yang canggih karenanya memerlukan audit BPK.

Dan bahwa KPK telah meminta BPK melakukan audit kepada kasus Century setelah mencium “bau busuk”.



Akhirnya DPR juga meminta audit yang sama kepada BPK, setelah juga melihat gelagat otoritas keuangan yang ganjil.

Dan audit Century rampung 23 November 2009, diserahkan kepada DPR oleh ketua BPK Hadi Poernomo.

Bahwa hasil audit kasus Century itu sangat jelas cetowelowelo. Konstruksi jelas.

Semua instansi negara yang menangani kasus Century sepakat dengan temuan BPK.

Zaman Pak Tumpak sudah ok juga, tapi zaman-zaman seterusnya, KPK menghindar menuntaskan Century

Hanya ada 2 kemungkinan jawaban: 1. BPK dan semua lembaga negara selain KPK adalah jahat dan mengkriminalisasi Century.

2. KPK melakukan deal tingkat tinggi juga setinggi kejahatan Century itu sendiri. Deal apa?

BAGIAN KESEBELAS
**MEMBERANTAS
KEPASTIAN HUKUM**



“ *Saya maklumkan
bahwa saya mendukung KPK
dengan mengembalikannya
ke dalam rel yang benar.* ”



I. MEMBONGKAR KEJAHATAN SISTEMIK

Dulu Waktu Hendarman dan BHD menjelaskan kasus Bibit-Chandra, mereka sangat yakin bahwa status tersangka. Ada nuansa “kompak”.

Kalau sekarang mereka melemah, jelaslah bahwa merekalah yang takut berperkara di pengadilan. Aktivitas mafia terendus.

Lalu, kenapa Bibit-Chandra tidak justru menolak deponeering? Supaya mafia “rekayasa” ini terbongkar habis di pengadilan?

Yang paling menyedihkan dari kasus ini jika di deponeering, tertutupnya sebuah kegiatan mafia yang diduga melibatkan pejabat atas Bibit-Chandra.

Ini tidak boleh menjadi kepentingan pribadi Bibit-Chandra. Ini soal kerja membongkar kejahatan sistemik. Kita perlu membuka mata semua.

Tapi, akhirnya semua kembali pada Bibit-Chandra. Anda siapa? Anda sedang menulis dalam sejarah republik tentang siapa Anda. Siapa?

Saya sedang membayangkan menonton sebuah persidangan yang seru. Lalu semua fakta dibongkar lagi; sadapan itu, cctv, Susno, dll.

Harus ada rekonstruksi tentang kejahatan besar ini. Tapi, tiba-tiba aktivis pun ingin kasus ini ditutup. Mungkin prihatin pada Bibit-Chandra.

Tapi, bukankah kalau deponering artinya Bibit-Chandra disandera seumur hidup? Apakah betul mereka tidak terima suap? Prihatin juga kan?

Kalau kasus ini ditutup, apa kata dunia?

Jika lawyer Bibit-Chandra khawatir dengan pengadilan sesat, maka biarkan rakyat menonton kelakuan sesat secara terbuka. Aku mau lihat nyalinya.

Sorry, seharian HP gak hidup. Teman-teman menganggap deponering tidak menghilangkan “status tersangka” Bibit-Chandra. Bagaimana pendapat Anda?

Sudah diputuskan Bibit-Chandra diminta tidak hadir dalam rapat-rapat di Komisi 3.



Saya kira sudah jelas ya. Intinya interpretasi soal “apakah deponering menghilangkan kesalahan Bibit-Chandra”? Mayoritas anggap tidak.

Jadi, besok tetap ada rapat KPK. Tapi Bibit-Chandra diminta tidak hadir. Ini keputusan mayoritas.

Memang kalau Anda tersangka dan posisi Anda penting, sebaiknya Anda non aktif. Itu wilayah etik.

Saya tidak pernah paham ini: “mau bongkar mafia, tapi kasus Bibit-Chandra ditutup”. Aneh kan?

Waktu teman-teman terima deponering itu artinya mau tutup rekayasanya kan. Itu maunya mafia.

Bikin debat publik soal ini, saya mau hadir.

II. INSTITUSI PENEGAK HUKUM BERKELAH, RAKYAT KORBAN

Saya lanjutkan soal ini ya. Ini tentang merenovasi ingatan kita semua. Kalau mau tatap muka saya lebih senang. Laki-laki gitu.

Singkat cerita terjadilah yang tak kita kehendaki, 3 institusi penegak hukum itu berkelahi. Negara menikam dirinya sendiri.

Jika lembaga negara bersengketa, maka siapa yang jadi korban? Rakyat. Kepastian hukum hilang. Pada saat sulit itulah Komisi 3 ikut.

Waktu Susno Duadji bersumpah di Komisi 3, saya tahu orang ini jujur dan sampai sekarang terbukti dia menjadi korban.

Saya siap merubah pendapat, saya masih percaya Susno Duadji pada sumpahnya. Tapi setelah dia dikorbankan terbukti dia bukan buaya.

Sementara yang ikut hantam Susno Duadji, termasuk Denny Indrayana tidak pernah menyesal. Malah bekerjasama mafia. Hanya ABN yang jantan.

Jadi kalau akhirnya kita sependapat ada mafia (rekaman MK, dll), kenapa tidak ditangkap secara sistematis? Kok muter-muter *gak* jelas?

Catat ini: ketika tuduhan kepada Bibit-Chandra akan diakhiri, kami usulkan SP3. Pimpinan Komisi 3 resmi konferensi pers soal ini.



Tapi Denny Indrayana cs usulkan SKP2 (penghentian demi hukum) tapi dengan alasan sosialogis. Tau kenapa bukan SP3 seperti usul kami?

Karena para mafia masih takut akui rekayasa mereka, maka dikasi jalan keluar anomali. Akibatnya SKP2 kalah dalam pra-peradilan.

Jadi siapa yang ingin Bibit-Chandra selamat dengan SP3(Komisi 3) dan siapa yang mengambangkan SKP2 (Denny Indrayana cs) ini faktanya.

Seandainya SP3 dikeluarkan, maka kasus ini ditutup meski kita rugi karena operasi mafia yang diputar di MK itu sulit dibuka lagi.

Akhirnya, SKP2 kalah dan Bibit-Chandra jadi tersangka permanen. Sementara itu, para mafia itu mulai takut terbongkar di sidang.

Karenanya mereka keluarkan deponering supaya tidak ada sidang kan Denny Indrayana cs ini setuju lagi. Gila juga kalian!

Kenapa anak-anak LSM ini yang dulu

“menginstitutionalisasi” kasus Bibit-Chandra ini tidak menolak deponering agar mafia terbongkar?

Kalau saya Bibit-Chandra, saya akan menolak deponering demi terbukanya operasi mafia ini. Saatnya lupakan pribadi.

Tapi ok-lah. Tapi kan status mereka P21(terbukti bersalah) karena deponering bukan SP3 (kasus ditutup karena tidak terbukti).

Saya ikut pandangan Benny K Harman sejak awal waktu kami usulkan SP3 bagi Bibit-Chandra bahwa hanya itu caranya.

Di sekitar presiden banyak penjiat; asal bapak senang, samar dan tak mau terang. Mereka jerumuskan SBY (bersambung) .

III. INDUSTRI KETIDAKPASTIAN HUKUM

Akhirnya terbukti, mana rekaman-rekaman itu bung?
Siapa yang perintahkan pelemahan KPK? Ayo jujur sodara! Kita buka-bukaan...



Industri ketidakpastian hukum...

Saya maklumkan bahwa saya mendukung KPK dengan mengembalikannya ke dalam rel yang benar.

Kalau jahat saya *jorogin* KPK berkelahi dengan POLRI+JARI+ DPR. Tapi itu khianat kepada rakyat. KPK tidak mungkin menang, dia ad hoc. Sadarlah!

Saya kutip pendapat ahli soal deponering. Soal teknis istilah hukum saya boleh salah. Terima kasih koreksinya. Tapi substansi sama.

"Saya kira, deponering itu tidak menghilangkan unsur kesalahan, ia hanya hilangkan kewenangan penuntutan JA, kesalahan tetap melekat".

"Jadi dia (Bibit-Chandra) statusnya tersangka sebetulnya. yang bisa tentukan dia bukan tersangka adalah pengadilan, terbukti atau tidak".

..."Jadi karena MA sudah keluaran putusan harus ke pengadilan, ya... pengadilan. Ini ada filosofinya. Demi kepastian hukum".

SH-SH (Lisra Sukur dan Taufik Basari) dll tidak bisa jawab apakah deponering termasuk dalam *criminal justice system*?

Lain lagi dengan Si Fadjoel. Kegagalan KPK datangkan Nunun ditimpakan ke PKS juga. Payah kawan!

Jadi kalau statusnya kontroversial apa tetap harus memimpin lembaga “maha suci” ini? Kan akhirnya memasuki wilayah etik.

Soal kedua, sebagian anggota komisi tdk melihat sekedar etik tapi politik penegakan hukum. Karena KPK “maha suci” itu.

Jadi Denny Indrayana yang guru besar itu abai melihat argumen. Dia bilang pokoknya bela KPK artinya dia percaya ide”maha suci” itu.

Lembaga publik tak ada yang suci. Semua harus bekerja dalam akuarium. Semakin kuasa semakin dikontrol. Ini elementer dalam demokrasi.

IV. DEPOONERING YANG JANGGAL

Istilah “mengusir Bibit-Chandra” itu dari siapa ya? Kok mengusir? Kekanak-kanakan ya.



Kan bisa pakai istilah: “Bibit-Chandra dianggap belum jelas statusnya. Karena deponering tidak menghapus status tersangka”. Better, kan?

Media lebai ah...

Jadi waktu itu ada lobby. Karena ada 2 pendapat maka Tjatur Saptoedy (PAN) skors rapat 1x24 jam. Eh, besoknya KPK *gak* datang.

Istilah “skors” kan tidak = “usir”. Tapi *Kok* kesannya diusir? Siapa yang mengusir? Yeeee... Lebay ah... Melow amat...

Soal surat deponering itu. Point “kepentingan umum” hanya 1 yaitu apabila perkara atas nama tersangka Bibit SR...dst.

..Dilimpahkan ke pengadilan, akan dapat berakibat terganggu-nya kinerja KPK dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

... sehingga merugikan bagi kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, negara dan masyarakat

Setelah baca 3 point di atas soal KPK, apakah poin “menimbang” itu objektif atau subjektif?

Rapat konsultasi dengan MK tadi semakin meyakinkan saya bahwa deponering atas Bibit-Chandra adalah janggal. Sadarlah...

Dengan segala hormat, Chandra Hamzah tidak bisa membedakan yang private dan yang publik. Dan KPK RI jadi para pihak.

Lalu apa masih mungkin KPK RI menjadi lembaga penegakan hukum?

Dari dulu kantor KPK RI ini menjadi bumper para pejabatnya, padahal itulah wilayah etik yang harus dijaga.

Ingat lawyer Bibit-Chandra yang menjadikan gedung KPK RI tempat membela klien-nya? Lalu bertemu hakim MK, Mahfud MD

Kita sekarang lupa bahwa KPK RI dan pimpinanya + pejabatnya adalah pejabat negara yang disumpah. Bukan LSM sembrono.

Saya kenal Chandra Hamzah karena waktu masuk UI tahun 92, namanya sudah hebat sebagai pimpinan mahasiswa. Tapi soal etik.



Persoalan kita soal etik itu adalah. Tidak cukup menjadi bersih tetapi juga harus terlihat bersih. Dan ini yang tidak nampak.

Kesedihan saya karena tiba-tiba KPK RI melalui komisi etik mau pakai prosedur pro-justicia. Padahal ini bukan soal hukum.

Sekarang, KPK RI telah turun menjadi para pihak: KPK Vs Nazaruddin atau KPK vs NAZAR. Lalu siapakah penegak hukum?

Saya berpendapat bahwa Chandra Hamzah tidak akan rugi kalau mundur untuk selesaikan banyak hal. Ada beberapa:

Pertama, kasus “rekayasa” atas dirinya. Apa saudara Chandra Hamzah tega membiarkan itu karena hadiah Deponeering?

Kedua, Chandra Hamzah adalah saksi hidup gagalnya KPK RI menjalankan fungsi supervisi dan monitoring atas lembaga lain.

Ketiga, KPK RI sukses menangkap orang tapi gagal memberantas korupsi. Ini harus Chandra Hamzah jawab.

Keempat, waktu dia kan tinggal 2 bulan lebih. Chandra Hamzah untuk apa bertahan? Jangan sampai etika habis.

Saya mendengar Antasari bercerita kepada kawan-kawan jaksanya dan meminta maaf. Pertemuan tidak mungkin (meski teman).

Bung Chandra Hamzah, mari bergabung membaca masalah ini dari jauh. Anda korban kebodohan membaca peta.

Terbanglah ke angkasa seperti garuda. Maka bumi ini akan menciut nampak dimatamu.

Ayo pada bikin analisis yang ilmiah. Pejabat negara seperti saya dan Chandra Hamzah memang harus dikritisi.

V. KEKUASAAN BUKAN MAINAN

Katanya Bos Anas Urbaningrum bikin KLB di Bali juga?

Kalau gini ngapain sih KPK tetapkan status Anas Urbaningrum tersangka? *Kayak* untuk kepentingan KLB aja, dong.



Toh yang bersangkutan *nggak* diperiksa Kok sampai sekarang. KLB-in aja tu KPK sekalian. Ganti Abraham.

Kuasa menyidik dan menuntut Kok jadi bahan maenan ya? KPK apa yang kau cari?

Yang lucu kasus LHI, awalnya dibilang “tangkap tangan”, ternyata yang bersangkutan ada di tempat lain. Artinya “tangkap tangan orang lain”.

Lalu karena “tangkap tangan orang lain” *gak* ada dalam pasal-pasal korupsi, dipakailah “menerima suap via orang lain”.

Belakangan ketahuan lagi, ternyata si AF sudah ditunggu oleh orang yang dia mau bayar utang di lobby. Nah loh.

Selain buktinya uang itu *gak* pernah sampai LHI, uang itu ternyata untuk keperluan lain. Dan memang tidak pernah diterima.

Sekarang bingung lagi, “jadi kita pakai pasal apa ya?”. Nyutt... nyuut... Masalahnya *gak* ada bukti suap seperti diatur UU.

Sekarang pakai pasal TPPU alias Tindak Pidana Pencucian Uang... Lah uang apa yang mau dicuci? Lah wong bukti suap disita KPK.

Lalu, sebagai *superbody*, muncullah pasal “pamungkas” menggunakan hak subjektif KPK.

Dalam hak subjektif KPK, KPK boleh melakukan apa saja demi agar sebuah target bersalah.

Bukan cuma itu, hak subjektif juga bisa dipakai untuk meringankan orang tertentu. Misalnya kasus Ibas, dll. Dalam kasus Ibas, kenapa orang yang ada dalam daftar penerima dana dan disebut oleh terdakwa/terpidana tidak dipanggil?

Kenapa orang lain, yang tidak disebut kadang hanya untuk nakut-nakutin *aja*, dipanggil?

Apa perbedaan kedudukan hukum Ibas dan semua orang yang dipanggil gara-gara disebut namanya oleh Nazar atau terpidana lain?

Namanya hak subjektif, dulu zaman Orde Baru hak subjektif ini yang kita lawan. Bikin hukum *kagak* jelas.



Kembali ke LHI, dia pasti “dihabisi” pakai TPPU. Dan susahnya karena dia juga pebisnis.

Pebisnis selayaknya tidak jadi politisi sebab lonjakan aset dalam bisnis tak terduga, dalam politik harus wajar.

Pasal ini sudah saya usulkan tapi ditolak berkali-kali. Memang susah jadi partai kecil, *nggak* didenger, kalah voting.

Tapi, kita tidak tahu apa yang terjadi, hukum korupsi di negeri ini hanya Allah dan KPK yang tahu.

BAGIAN KEDUA BELAS **ANEH TAPI NYATA**



“

*Siapapun yang mengkhianati demokrasi kita
akan hancur oleh generasi yang melawan
otoritarianisme.*

”



I. MENUNTUT TRANSPARANSI BUKAN MENGHAMBAT

Ngomong-ngomong tangkap tangan stafnya
Menakertrans kenapa berhenti?

Masih ingat kardus duren Menakertrans? Di mana dia?

Meminta transparansi KPK adalah upaya menghambat pemberantasan korupsi.

Mari beri tepuk tangan pada KPK.

Tahukah anda kenapa anggota DPR inisial JAM dihentikan kasusnya di KPK?

Quiz: Ada yang tahu total pengaduan masyarakat ke KPK?

Quiz 2: ada yang tahu total kasus yang selesai/tahun berapa?

Quiz 3: tahukah anda sisa kasus yang ditinggal KPK, ada di-mana?

Nggak ada yang jawab benar. Saya jawab sendiri. Puluhan ribu (sisanya). Datanya ada di saya.

Yang rajin riset bisa bantu menyusun data-data yang ganjil itu. Beranikah?

Tuhan tak pernah tidur. KPK tak pernah tidur. Hebat!

Sebentar lagi akan ada ketua partai tersangka. Jadilah heboh baru. Mari bertepuk tangan.

Dan kita bertepuk tangan terurai senyum kepuasan. Maling-maling tertangkap lagi. Untuk selamanya...

Pengintipan yang kita haramkan dalam demokrasi kita halalkan kembali.

Siapun yang mengkhianati demokrasi kita akan hancur oleh generasi yang melawan otoritarianisme.

Kita hanya perlu melawan lupa...seperti kata kundera...

Orang-orang sedang terlupa atau tertidur, maka bangunkan-lah.



Kok wartawan *gak* mau tahu ya? KPK tidak mungkin salah. Duh percaya deh.

KPK itu lembaga yang sangat teliti... Hati-hati... Dan similikiti...

Kawan, aku masih di Cirebon, jadi sprindik KPK RI aman kah?

Kawan, aku di Cirebon, isi pidato tadi? Aman?

Bochor... Bochor... Bochor... Iklan yang inspiratif, tapi iklan apa ya? Hahaha...

Ngomong-ngomong soal bochor, apa bocoran dari dalam KPK ke majalah TEMPO besok?

Saya teringat Rupert Murdoc dalam skandal pembocoran sadapan pejabat Inggris.

Di negara kita, media massa berkolaborasi untuk dapat bocoran biasa *aja*.

Di negara demokrasi, raksasa sekelas Murdoc bisa ditutup.

Di negara kita, KPK bahkan bisa melarang opini tandingan. Saya termasuk mengalami.

Suatu waktu, Pemred sebuah koran yang adalah teman saya menolak tulisan saya

Alasannya: “maaf mas, kita ada agreement dengan KPK.” Hebat, kan.

Tapi kembali ke teori awal, “apapun demi pemberantasan korupsi halal bagi KPK”.

Termasuklah pem-bochor-an. Lihatlah sebentar lagi percakapan aneh keluar.

Anda ingat Al-Amin Nasution? Gara-gara lawyernya ajukan praperadilan, bochor -an “pesan cewek” diungkap.

Orang-orang kayak saya, bukan sekali dapat ancaman. Percakapan saya dengan si A, si B akan diungkap.

Hebatnya Si A dan si B yang disebut memang benar, saya ada percakapan pribadi.



Artinya, saya diintip setiap saat. Setiap saat bisa di bochor-kan.

Jadi, pembocoran adalah modus dalam pemberantasan korupsi.

Dan yang mendapat bocoran juga happy, rating dan oplah naik.

Seorang penyadap berbicara kepada saya, “payah anggota DPR, kalau ngomong sama isterinya *gak* selembut ke pacarnya”.

II. NEGARA HARAM MERAMPAS WILAYAH PRIVAT, APALAGI MEMBOCORKAN

Ini musim hujan, memang kebocoran ada di mana-mana.

Tapi saya akan melawan negara yang merampas rahasia pribadi saya sampai mati.

Karena tidak untuk itu negara dibuat. Negara harus melindungi hak sipil warga negara.

Atas nama apapun negara harus diharamkan merampas wilayah privat. Apalagi membocorkannya.

Mungkin ada yang sudah kehilangan akal sehat, akhirnya tumbuhlah akal jahat.

Akhirnya atas nama tugas, mulai mereka halalkan segala cara, tujuan halalkan cara.

Bukankah ini ajaran Niccolo Machievelli yang kita tentang?

Jadi, taulah sekarang kita bahwa bochor adalah instrumen machiavellian.

Apakah sengkuni sudah masuk ke dalam?

Kabarnya sengkuni lagi berdebat soal Sprindik?

Jika kasus sprindik ditutup ya karena KPK tak mungkin salah. ALLAH melindunginya.

Sprindik ditutup demi sebuah pidato lurah. KPK profesional.

Aye tak paham kenapa pembocoran sprindik jadi masalah interen KPK. Bukankah itu Pidum?



III. SIAPA PEMBOCOR DOKUMEN?

Kalau sore-sore begini iseng boleh juga kali ya? Ini tentang Komite Etik KPK RI.

Mereka sudah bersidang lama, menemukan siapa yang membocorkan sebuah dokumen.

Dokumen itu memang bukan sprindik tetapi persis sama isinya dengan sprindik yang akhirnya terbit.

Awalnya sang jubir berusaha membela diri bahwa dokumen itu bukan sprindik dan karenanya “gak penting”.

Tetapi, begitu sprindik muncul dan akhirnya memang berisi sama, senada dan seirama apa bedanya?

Nilai dokumen itu bukan pada keaslian kertasnya tetapi pada “motif jahat” di balik pembocorannya.

Kenapa? Karena informasi di dalamnya mengandung kerahasiaan. Itu rahasia penyidik, rahasia negara.

Jadi harus jelas bahwa pengusutan ini bukan soal etika, ini soal “kejahatan pembocoran rahasia negara”.

Sekarang, terbentuklah komite etik. Dan sepertinya hukum tak boleh menyentuh lembaga suci. Apalagi oleh polisi.

Komite etik ini seperti jeruk makan jeruk. Ada pihak yang mungkin bersalah di dalamnya. Tapi jalan terus.

Dan katanya, mereka akan selesaikan pemeriksaan sepekan lagi. Ketuanya mengatakan:

Pertama, ada kebocoran tapi bukan ke istana. Kedua, motifnya bukan merupakan pidana.

Jadi jelas bahwa bocornya sprindik Anas yang heboh itu akan hanya kesalahan teknis.

Padahal kita tahu bahwa jadwal kebocoran itu terkait dengan penetapan Anas atas “isyarat SBY”.

Hanya Allah dan KPK RI tahu. Adapun kita hanya menonton dan berdoa agar tak ditimpa musibah.

Aneh, baru 14 tahun kita melawan Absolutisme sekarang dia mulai meracuni anak2 muda. Pikiran pendek mulai dapat tempat



BAGIAN KETIGA BELAS **BUBARKAN KPK?**



“ Kalau saya mau cari aman,
saya puji-puji aja pimpinan KPK tiap hari.
Kan aman buat saya pribadi. ”



I. SEPERTI MENEGAKKAN BENANG BASAH

Bisa minta link soal “bubarkan KPK”? Please... pengen baca kata siapa..

Bagiku aneh sekali. Yang diributin adalah yang tak pernah ada.

So sad on KPK and bubarkan

Sistem tidak bekerja. Kalau ada apa-apa semua bilang “silahkan KPK periksa!” Loh, lembaga negara lain mana?

Sulit ajak orang berpikir sistemik. Dia kira kalau KPK sibuk sendiri itu bagus bagi pemerintahan?

Sekarang kembali ke akar, kritik saya bukan kepada KPK tapi pimpinannya yang gagal membaca UU 30/2002.

Saya heran tadi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa dan dosen malah kayak setuju sama saya soal revisi UU KPK ya? Febridiansyah

Sayang *gak* ada ICW deh... Febridiansyah

Jadi gini judulnya: <http://www.jakartapress.com/detail/read/1637/lecehkan-penegakanhukum-bubarkan-kpk>

KPK harus kembalikan pemberantasan korupsi sebagai instrumen penegakan hukum dan keadilan dan bukan sebagai strategi nangkap orang.

Menegakkan hukum dengan melanggarnya adalah seperti menegakkan benang basah.

Sebenarnya saya hampir menolak bicara KPK, sebab kritik dianggap “koruptor”. Tapi KPK lembaga publik, hanya DPR yang mengawasinya

So, let us see what we can do in the future and what I can still say about this very strong institution.

Banyak tweeps yang mulai mengerti kenapa saya kritik KPK. Semoga 9 tahun pasca UU 30/2002 itu buat KPK berkaca.

Saya hampir sampai kesimpulan adalah dosa para pimpinan KPK sehingga korupsi berlanjut marak karena KPK melemahkan sistem.

Jika memakai UU 30/2002 untuk memberantas korupsi, harusnya maksimal 2 tahun korupsi sirna dari bumi pertiwi. Ini sudah 9 tahun.

Hati-hati saya tidak kritik KPK. Ia adalah produk DPR yang luar biasa. Tapi jatuh ke tangan orang yang salah.



Mungkin banyak yang bingung, Kok saya kritik pimpinan KPK? Sadarlah..

Sadarlah bahwa justru karena KPK disalahgunakan, kita mau menyelamatkan KPK. Gitu, *dong* mikirnya.

Kalau saya mau cari aman, saya puji-puji *aja* pimpinan KPK tiap hari. Kan aman buat saya pribadi.

DICARI: Putra/i Indonesia yang dalam 2 tahun bisa berantas korupsi dangan UU No. 30/2002. Saya akan pilih dia.

II. SAYA MANUSIA MERDEKA

Yang suruh aku bicara *kayak* Busyro ditolak. Aku *gak* bisa cengar-cengir mendayu-dayu. LOL

Busyro kekanak-kanakan. twitter saya soal Sistem KPK di bawa ke PKS. Ngadu domba *aja*....

Mungkin Busyro kecewa karena dulu saya milih Bambang W, bukan dia. Dan memang tadi Aziz Syamsuddin ngaku salah pilih.

Saya ingin buka masalah seputar Busyro biar *clear*. Inilah pimpinan KPK yang lemah..

Menari-nari dari kasus ke kasus, termasuk untuk tutup kasus Nazaruddin yang melibatkan pimpinan PK adalah bukti lemahnya.

Saya tidak mengerti Kok ada budaya begitu, senyum di depan menikam di belakang.

Suatu hari, saya akan membuka mata publik tentang siapa yang sebetulnya kendalikan KPK.

Biang kerok semua ini juga adalah alpanya arahan presiden, politik hukum entah di mana.

Kalau pemimpin tidak punya arah, kita semua saling tikam. Secara kasar tanpa aturan.

Hampir sembilan tahun menepuk dada, keadaan tambah *ancuur!* Kemana kewarasan? Kegagalan dikampanyekan sebagai sukses?

Lalu Presiden SBY di mana? Denny Indrayana di mana? Lagi memberantas mafia di mana?

Pak Busyro, saya manusia merdeka. Anda *gak* bisa suruh orang tekan saya.

Saya pernah twit soal sistem KPK yang saya indikasikan



telah merusak sistem kita. Saya ada bukti. Kasus Bibit-Chandra salah satunya.

Jadi kalau efeknya telah merusak sistem inti, makanya saya bilang bubar *aja* KPK.

Masak konstitusi dikorbankan demi sesuatu yang tidak jelas.

Kenapa presiden mundur dari “memimpin sendiri pemberantasan korupsi”, karena Presiden SBY ke kiri dan KPK ke kanan.

Lalu kita mau minta tanggung jawab ke siapa, atas kekacauan yang tidak berujung ini?

III. BANG BUYUNG BICARA

Saksikan wawancara Bang Buyung di TVOne.

Tujuan tak boleh halalkan cara.

Saya mantan jaksa dan saya tahu kelakuan penyidik.

Timpa saja nanti buktikan belakangan. ITULAH KELAKUAN KPK!

Polisi saja masih menghargai pembela.

KPK merasa kalau tujuan benar maka cara apapun benar.

Arogansi dan kesombongan oleh negara dulu kita lawan dan sekarang saya tetap akan lawan.

Ini tambah buruk di KPK. Banyak orang gila di KPK ingin memiskinkan orang.

Kalau begini caranya, BUBARKAN SAJA KPK!

KPK mencari-cari kesalahan orang padahal tak ada orang yang tak ada salahnya.

Hakim-hakim diintimidasi karena kalau membebaskan terdakwa korupsi disebut koruptor.

Pimpinan KPK dulu suka konsultasi tapi setelah berkuasa sombong.

Kekuasaan itu seperti orang naik kuda. Semakin lama semakin enak. Lupa diri.



BAGIAN KEEMPAT BELAS PUJA PUJI “BERHALA” BARU



“

Kerumitan kita karena banyak yang tidak mau diskusi akal sehat tapi suka menyerang pribadi. Sehingga tidak sampai substansi.

“



I. TUGAS DPR MENGAWASI KPK, BUKAN SEBALIKNYA

Yang *muji* KPK sampai KPK nyemplung ke lembah Cicak-Buaya *dah* banyak. Masak satu orang kritis *aja gak* boleh. Yeee... *Kayak* orde baru *aja*.

Lalu muncul judul: “ICW: hanya koruptor yang takut Bambang-Busyro...” Siapa yang takut. Salah satunya kan pasti terpilih. Mending dipuji, *dong*.

Saya dapat membayangkan kesulitan teman-teman yang terbiasa bela mati KPK.

Saya membaca aksi beberapa orang yang kemudian ditangkap oleh pimpinan KPK, entah untuk apa. Terbentuklah Tim Bela KPK.

Saya yakin pimpinan KPK telah semakin kehilangan akal. Karena itu, kelakuannya semakin tidak mencerminkan lembaga negara.

Coba anda pikir, ada jenderal dan tim suksesnya tiba-tiba mau dukung KPK, lalu dengan senang hati diterima.

Memang lebih baik dari kerjasama diam-diam pimpinan KPK selama ini dengan pihak luar (seperti membocorkan data dan BAP).

Tetapi, pembentukan Tim Bela KPK semakin menegaskan bahwa KPK berkelakuan seperti LSM. Dia *gak* sadar disumpah dan makan APBN.

Padahal yang disumpah saja gampang salah gunakan posisi apalagi yang tidak disumpah. Lalu bagaimana cara kerjanya?

Kesibukan mencari pendukung menjelaskan KPK tidak percaya dengan apa yang dilakukan. Dan akhirnya pencitraan.

Padahal, KPK tidak perlu mendapat dukungan dan pencitraan sebab UU telah memperkuatnya dan kinerja akan membuatnya populer.

Pembentukan Tim Bela KPK ini meneguhkan keyakinan saya bahwa pimpinan KPK disorientasi.

Mereka tidak paham UU 30/2002 itu.



Pimpinan KPK *gak* paham latar filosofis UU dan juga kenapa terjadi pelemahan kepada KPK akhirnya bentuk Tim Bela KPK

Satu-satunya yang mereka paham dari semua ini adalah Koruptor Fight Back, sehingga pengkritik disebut kolaborator koruptor.

Dan para pendukung termasuk Tim Bela KPK halal melakukan apapun asalkan atas nama bela KPK.

Orang-orang yang tergabung dalam Tim Bela KPK ini lupa bahwa KPK adalah polisi dan jaksa negara sekaligus untuk memberantas korupsi.

Sebagai polisi dan jaksa negara yang disumpah dan makan uang rakyat seperti DPR, wajib kita kritisi semua langkahnya.

KPK sebagai institusi kita jaga tetapi pemimpin yang melenceng kita sikat saja. Dan itu berlaku bagi semua lembaga negara.

Kembali ke koruptor *Fight Back* siapakah mereka itu? Apakah saya? Kalau ya, mana persidangannya? Saya datang.

Adalah tugas DPR-RI mengawasi KPK dan bukan sebaliknya. Pimpinan KPK jangan keliru sebab lembaga bisa rusak.

II. BELA MATI KPK, TIDAK RASIONAL

Sekarang, orang-orang cuci nama dengan mendukung KPK, seolah mereka barisan generasi pembaharu. Padahal mereka ini anti reformasi.

Mereka yang ingin KPK kerja dengan metode kopkamtib adalah pengkhianat demokrasi yang malas berpikir.

Tim Bela KPK ini akan didorong sebagai alat pencitraan seolah pimpinan KPK itu identik dengan KPK itu sendiri. Padahal beda.

Sibuk bangsa ini dibuat ramai oleh KPK. Tapi pertanyaan: Mana hasilnya? Mana Polisi, Jaksa, BPK, BPKP, inspektorat, dll?

Apakah bangsa ini maling semua dan orang suci hanya ada di KPK (Polisi Dan Jaksa juga) dan Tim Bela KPK (jenderal dan lawyer kaya itu?).



Kerumitan kita karena banyak yang tidak mau diskusi akal sehat tapi suka menyerang pribadi. Sehingga tidak sampai substansi.

Saya siap diundang oleh Tim Bela KPK atau mereka datang ke komisi 3. Saya hanya mau tanya, siapa yang nyerang KPK?

Lebih jauh aku mau tanya, apakah lawyer yang membela klien adalah penyerang KPK? Wahai Tim Bela KPK, jawablah!

Pagi Twips. Dari dulu saya katakan, kalau ingin KPK hancur, pujalah mereka sampai lupa diri. Jangan dikritik sedikitpun.

Maju terus KPK. Tabrak terus semua pengritik dibayar koruptor. Jangan denger. Hanya KPK yang bisa atasi masalah!

Di dunia ini, penegak hukum yang bersih hanya ada di KPK. Meski dari polisi/jaksa kotor, begitu masuk KPK langsung suci.

Semua penyusun UU KPK bilang ada masalah dan perlu revisi. Tapi jangan dengar. UU KPK itu suci!

Semua lembaga yang ada dalam UUD '45 dapat dilemahkan dan dibubarkan kecuali KPK. Haram hukumnya.

Kita ini melihat koruptor: anggota DPR, bendahara Partai, menteri, gubernur, bupati, polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain., kecuali KPK.

Orang-orang suci akhir zaman itu tak ada lagi di lembaga agama tetapi adanya di KPK.

Bagaimana kalau kita ganti pimpinan semua lembaga tinggi negara dari pimpinan KPK saja?

Presiden: AS, Ketua DPR: BW, ketua MA: BM, Kapolri: APP, Jaksa Agung APP. Nampaknya semua masalah beres.

Usia UU KPK sdh 10 tahun. Semoga 100 tahun lagi KPK jaya karena koruptor terus beranak pinak.

Kasus Century tak perlu diselesaikan KPK, karena itu produk DPR yang korup. Boediono dan kawan-kawan pahlawan!

Anggota DPR yang 560 orang itu maling dan dipilih oleh maling. Lalu mereka memilih pimpinan KPK yang suci.



Trus kenapa polisi menarik penyidikanya? Apakah polisi takut polisi-polisi itu menjadi suci? Nampaknya demikian?

Aktifkan alat sadapmu wahai KPK. Pantau semua DPR, DPD, Polisi, Jaksa, Hakim, Pemda, dan istana. Sadap dan tangkap!

Tidak penting kasus hukum dituntaskan, pilih satu dua orang yang penting, KPK menang, KPK senang, rakyat senang!

Kawan sejati adalah yang selalu setuju dan memuji-muji kita. Musuh adalah yang selalu kritik KPK.

Wahai pimpinan KPK jaga diri, jangan bergaul sama manusia kecuali LSM dan konsultan asing. Hanya mereka yang aman.

Akan ada waktunya, semua pejabat terpegang rahasiannya, sehingga mereka bekerja yang benar, kalau nakal bocorkan rekamannya.

Omong kosong HAM, dan tak ada HAM bagi koruptor. Sadap, hajar, tahan dan tangkap! Mereka jahat pada rakyat!

Hidup KPK, maju terus, pantang menyerah. Rakyat mendukungmu bila perlu jadi partai ikut pemilu 2014 ber-sama partai SRI.

Tapi? Apa perlu Parpol? Bukankah Parpol ini peternakan tikus? Apakah KPK nanti berubah? Kok ragu?

Sebaiknya jangan jadi Parpol tapi boleh memberi dukungan bagi Parpol yang merupakan kawan atau pura-pura jadi kawan.

Parpol tak perlu ada, demokrasi tak dapat dipercaya. Sebaiknya KPK usulkan kembali ke masa kekuasaan efektif.

Demokrasi ini bising dan membuat KPK tidak efektif. Terlalu banyak dikritik dan DPR sarang koruptor merajalela.

Sebaiknya KPK yang mengawasi DPR karena KPK punya alat pantau dan bersih. Tidak sebaliknya, karena DPR dipilih rakyat, tapi kotor.

Apa kabar Abraham, Busyro, Bambang, Zulkarnain, Adnan of KPK RI



Tidurlah. Nama kalian melelahkan bangsa ini, seolah hanya ada kalian di kolong Pertiwi.

Lima jagoan kita, “*our last chance*” Ambillah waktu untuk dirimu, jangan lukai kemesraanmu.

Bangunlah malam untuk pertajam hatimu agar niatmu lurus dan dadamu lapang.

Ujilah keikhlasanmu agar hidup-matimu hanya untuk Allah, dan kau diterima-Nya sebagai “*nafsul muthmainnah*”.

Sehebat apapun kuasa kalian hari ini. Sadarlah bahwa kematian itu pasti.

Dan perbedaan sakit dan jihad adalah pada cara kita menemui kematian.

Orang sakit dijemput mati dan yang berjihad menjemputnya di medan amal.

Agar tegak “*muru’ah*” dan nama bangsa, KPK RI bukanlah panggung hiburan pemuas nafsu.

Hati-hati kawanku, Allah tak pernah tidur. Kedipan matamu dihitung-Nya dan kezaliman adalah musuhNya.

Sehingga doa orang yang ingkar kepada-Nya pun jika dizalimi akan dijawab-Nya segera.

Apakah jiwamu tenang? Teruskan aksimu. Tapi apakah kau gelisah? Waspadalah!

Tepuk tangan takkan membuatmu tenang. Kebenaran dan zikrullah adalah sumber ketenangan hakiki.



BAGIAN KELIMA BELAS **BAHKAN TUHAN PUN MEMBELA MANUSIA**



“ Karena itu, bersyukurlah kita menjadi manusia dan diberi Iman. Dalam syukur itu, kita membangun optimisme bahwa manusia Indonesia akan menjadi kontributor kebaikan. ”



I. BAHKAN TUHAN PUN MEMBELA MANUSIA

Pagi *Twips*, Assalamu'alaikum. Kita selalu mulai dengan salam Damai.

Kitalah manusia, punghuni buki kecil ini, anak-anak Adam dan Hawa yang memangku amanah.

Kita disebut khalifah (wakil) Tuhan di bumi. Bahkan malaikat awalnya ragu dengan penciptaan kita.

Dalam kitab suci disebutkan pertanyaan ragu malaikat di depan Allah.

”Tuhan, apakah Kau akan menciptakan makhluk yang akan akan lahirkan bencana? Sementara kami terus menyembah-Mu?

Tuhan tidak berargumen, “Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu”, demikian kepada malaikat dikatakan.

Mungkin itulah sebabnya, manusia ini unik dan penuh misteri. Kita adalah ciptaan Tuhan terindah.

Para filosof mengatakan bahwa kita manusia ini adalah “masterpiece” Tuhan. Subhanallah.

Karena itu, bersyukurlah kita menjadi manusia dan bersyukurlah kita diberi Iman.

Dalam syukur itu, kita membangun optimisme bahwa manusia Indonesia akan menjadi kontributor kebaikan.

Kegetiran, musibah dan frustrasi kita pada kenyataan hari-hari jangan membuat kita salah paham pada manusia.

Kita harus optimis pada diri sendiri. Bahwa kita adalah bangsa baik dari keturunan Adam.

Saya termasuk yang juga melakukan protes keras atas kejahatan kita menghadapi hari-hari kita.

Seolah-olah kita semua manusia tanpa harapan dan masalah tak kunjung hilang.

Kita hanya perlu bersabar dan jangan kekanak-kanakan. Tidak ada yang tidak bisa selesai.

Perasaan bahwa kita tidak diperlakukan sebagai manusia, inilah yang bikin kita marah.



Saya meminta pimpinan KPK dan penyidik membaca UUD 45 pasca amandemen supaya mereka mulai menghargai manusia Indonesia.

Kampanye kalian untuk hancurkan citra manusia Indonesia harus diakhiri. Percayalah, masalah tak serumit kampanye mu.

Masalah ini jadi rumit karena kapasitas pejabat rendah termasuk para penyidik dan aparat KPK.

Jadi, lupakanlah perempuan dan anak-anak itu karena mereka tidak relevan. TPPU kalian salah pakai. Tobatlah!

Rujuklah UU kepada pembuat UU dan pakar pembuatnya. Jangan ngotot kalau salah, sebab korban kalian sudah banyak.

Sekarang tidurlah...

Doakan bangsa kita yang lelah. Besok kita jumpa lagi.

BAGIAN KEENAM BELAS **SANG PENIUP TEROMPET**



“

*Hukum harus ditegakkan oleh hamba hukum,
bukan orang comotan sembarangan
dengan dalih reputasi*

”



I. PEMBOCORAN SPRINDIK ADALAH KRIMINAL

Apa betul Abraham mau didongkel? Oleh siapa? Berani amat?

Ada link berita soal Abraham mau didongkel?

Menarik membaca tanggapan soal kudeta Abraham oleh Jubir Johan ya...

Perlu diketahui bahwa Johan orang tua di KPK. Lebih senior dari yang lain.

Itu sebabnya dia Johan nampak paling matang. Paling tenang dan paling berdarah dingin.

Tentu itu bagus buat KPK, sebab dengan itu KPK nampak “terkelola” Itulah jasa Johan.

Sesuatu, apabila sudah dikatakan oleh Johan, sepertinya semua sudah beres. Media menganggu-anggu.

Dari semua wajah yang paling populer hari ini, selain wajah SBY, maka saya menduga wajah Johan juga TOP.

Sekali lagi Johan membuat KPK nampak mantap.

Tapi, bagaimana kalau di balik wajah tenang itulah KPK menyimpan masalah?

Reaksi seperti ini bukan yang pertama terjadi. Bayangkan soal status SCF yang sudah disebut tersangka Century oleh Abraham tahun lalu.

Tiba-tiba seperti meralat sang ketua, Johan mengatakan belum tersangka karena yang yang bersangkutan sedang sakit.

Padahal sebagai orang yang mengerti kasus ini, mungkin saja KPK menetapkan status tersangka seseorang tanpa pernah diperiksa.

Bukankah KPK mentersangkakan Nazaruddin, LHI dan sederet nama lainnya tanpa pernah diperiksa?

Tapi, kenapa Abraham yang akhirnya mengalah dan Johan benar?

Artinya Johan lebih memiliki kepercayaan diri dan terintegrasi dengan kekuatan inti KPK.



Sementara Abraham nampaknya tidak mengakar dan lama-lama makin nampak lonely.... Saya tentu tidak tahu persis jawabannya, kenapa Johan kuat sekali.

Jangan lupa, Johan adalah sarjana teknik lulusan TEMPO, karena itu sebetulnya bukan orang Hukum..

Nalar PR Johan banyak dibentuk oleh karir jurnalis investigatif tinimbang bahasa hukum yang pasti.

Dan sekali lagi, Johan sukses membuat KPK tidak pernah nampak kehabisan bahan, enak ditonton dan perlu...

Padahal, Johan sendiri secara etika pernah diadili di dalam KPK karena berjumpa Anas dan Nazaruddin di rumahnya.

Dan itu membuat Johan gagal mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode Abraham.

Panitia seleksi menggugurkan pencalonan Johan karena dianggap ada masalah etika.

Tapi kenapa dipertahankan menjadi juru bicara dan PR? Bukankah seharusnya soal etikanya tidak hilang?

Apalagi kalau dibaca UU 30/2002 tentang KPK, sebetulnya bertemu dengan pihak yang berperkara di KPK bukan sekedar masalah etika.

Tapi kenapa Johan begitu kuat? Pertanyaan saya ini belum terjawab dan tidak mudah

Apalagi melihat sikap Johan yang sering lebih mewakili bahkan dibanding pimpinan KPK.

Sebagai contoh, sekarang kita kembali saja soal skandal sprindik dan kudeta Abraham.

Saya pernah twit bahwa pembocoran dokumen sprindik adalah kriminal.

Dan karena kepentingan menjaga nama baik KPK, maka pimpinan membentuk komite etik.

Meski itu saya anggap lucu, karena seperti jeruk makan jeruk. Tetapi Johan seperti para “die hard” KPK lainnya anggap itu remeh.

Menurut mereka dokumen bocor itu bukan sprindik dan tidak perlu dipersoalkan, apalagi dilapor polisi.



Lebih aneh lagi, polisi juga tidak berani mengusut kasus ini. Kubu Anas sudah melapor tapi tidak digubris.

Waktu saya ke rumah Anas beberapa pekan lalu, mereka mengeluhkan ini. Polisi takut rupanya.

Tapi, ketua KPK kini mengeluh secara terbuka, dan Johan meremehkannya.

Apa makna dua sikap di dalam KPK ini, dan mana yang merupakan keadaan sebenarnya?

Dugaan saya, Abraham mengeluh karena pasti dia merasa tersudutkan. Oleh siapa?

Kalau oleh orang dalam maka pasti ini akan merusak nama KPK, selain kalau tuduhan itu berhasil dialamatkan ke Abraham.

Kalau Abraham kena, maka sukses sebuah percobaan kudeta Abraham seperti yang dia sinyalir.

Dan lihat respons Johan, pasti dia akan katakan bahwa KPK DISERANG. CORRUPTOR FIGHT BACK, dll.

Sehingga, tugas Jubir adalah melemparkan semua kasus di dalam KPK sebagai serangan luar kepada KPK.

Tapi, masalahnya kenapa ada pembocoran sprindik, kenapa Abraham merasa diserang, dan ini permainan siapa?

II. SERANGAN LUAR PADA KPK

Untuk menutup kebingungan kita, ijinkan saya mengingatkan kembali beberapa peristiwa antara pimpinan KPK.

Zaman Ruki (KPK jilid I), Amin Sunaryadi (salah satu pimpinan) menyadap Ruki dalam kasus Bulog.

Zaman Antasari (KPK jilid II) menyuruh chandra menyadap Nasruddin dan Rani (pacar Antasari), tanpa perkara.

Zaman Abraham (KPK jilid III), Abraham mensinyalir ada kudeta terhadap dirinya via kasus sprindik.

Belum lagi kasus-kasus lain soal aktivitas KPK menyadap lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam peristiwa Cicak-Buaya.



Dan semua ini adalah peristiwa internal murni. Tetapi selalu saja dianggap ini serangan luar pada KPK.

Dengan catatan ini, saya menganggap PR KPK canggih. Johan salah satu aktor terbaiknya.

Tentu ada yang tidak terjawab yaitu soal apakah Johan hanya seorang Jubir dan PR?

Dan tentunya kenapa Abraham merasa terancam padahal kasus sprindik masalah internal.

Siapakah di dalam KPK yang memiliki kekuatan mengancam selain Abraham?

Ataukah Johan yang sangat kuat itu ditopang oleh kekuatan lain? Hanya Allah dan Johan yang tahu.

Mari kita budayakan BERANI JUJUR HEBAT bersama KPK. Semoga pembocor sprindik ngaku sudah berbulan-bulan.

KPK adalah lokomotif kejujuran. Kejujuran sudah hilang di republik ini. Tinggal di KPK ajah...

KPK menganggap moralitas pejabat tanggung jawab mereka, padahal mereka juga pejabat.

Kalau mau jujur, buka *dong* siapa yang mau kudeta Anda, wahai Abraham.

III. ADA 'KUDETA' DI KPK?

Saya lupa cantumkan ini...

Bagaimana Johan dengan mudahnya menjawab isu kudeta Abraham dengan “kudeta kan pakai senjata”.

Bagaimana membaca himbuan Johan kepada Komite Etik untuk mementingkan KPK?

Masalahnya adalah yang menghimbau ini pegawai biasa, tetapi nampaknya punya kekuatan lain.

Johan memakai istilah “mencemaskan kekompakan pimpinan KPK saat ini”. Kekompakan dalam rangka apa?

Di luar sana, anak-anak muda, baik pribadi maupun lembaga, yang berjuang bersama isu anti korupsi ikut tersengat.



Kita tahu jika sebuah LSM memperjuangkan isu tertentu maka isu itu pulalah “sumber proyeknya”.

Jadi, bagi mereka membela suatu isu atau institusi yang berkaitan dengan isu tersebut adalah soal hidup dan mati lembaga juga.

Jika lembaganya sudah teken mati untuk membela lembaga negara, maka selain ganjil tapi juga banyak komplikasinya.

Misalnya lembaga yang dianggap *circle* KPK, biasanya memiliki sumber funding yang sama.

Komplikasinya adalah mereka takkan pernah kritis pada KPK. Bahkan mereka *nggak* mau KPK ada cacat. Harus ditutup.

Karena itu, sekarang mereka menganggap bahwa kritik kita soal sprindik bocor dianggap upaya adu domba dari luar.

Padahal kasus bocornya sprindik Anas adalah murni peristiwa dari dalam. Apa mungkin orang luar bocorkan dokumen *intern*?

Tapi, mereka para jejaring menganggap dokumen itu tak penting, dan isu kudeta adakah upaya pecah belah.

Singkat cerita, isu CURRUPTOR FIGHT BACK, PELEMAHAN KPK, POLITISI BUSUK, ADU DOMBA, dll. diangkat lagi.

Tapi kali ini, yang menarik karena sang Johan mengingatkan Komite Etik. KPK hidup dan mati.

Tragis, sejak awal KPK dijadikan tempat mangkalnya LSM. Ingat konferensi pers berkali-kali.

Apa pikiran orang-orang plat merah ini ya? Apa mereka tidak paham bahwa KPK itu lembaga negara?

Pahamkah mereka bahwa memakai kantor negara untuk perjuangan pribadi meski dengan maksud baik adalah akar korupsi?

Sekarang kembali ke pernyataan Johan, Komite Etik diminta menjaga KPK dengan cara (dugaan saya) tutup kasus ini.

Melindungi KPK itu artinya menutupi kesalahan pribadi orang-orangnya yang membuat wibawa lembaga jatuh.



Sekarang apa beda prinsip ini dengan rezim otoriter tanpa transparansi yang kita tumbang dulu? Sama!

Orang-orang ini tidak percaya bahwa setiap lembaga tertutup mungkin diselewengkan. Ini hukum besi.

Itulah dasar sikapku dari dulu. Lembaga super body bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Jadi, langkah pertama adalah abaikan kasus sprindik, kedua tuduh pihak luar, ketiga apa?

IV. PROTEKSI ATAU MATI

Seperti janji saya, saya coba *share* tentang KPK. Bagian ini berjudul: Proteksi atau Mati.

Sekedar memberi catatan bahwa KPK yang super body harusnya mendapat pengawasan yang lebih kuat.

Sayangnya, Humas/PR KPK telah menciptakan rantai pengaman, tapi tak ada rantai pengawasan.

Bukan itu saja, PR KPK tak segan melakukan serangan bahwa pengritik adalah “corruptor fight back, pelemahan, dll.”

Maka mengkritik KPK adalah semacam pekerjaan berbahaya. Padahal dalam demokrasi kritik artinya sehat.

Tapi, yang dilupakan oleh para pendukung KPK adalah bahwa kalau kita menutup KPK dari kritik luar, ia akan membusuk di dalam.

Ini hukum besi. Makanya kebusukan itu terus menyebar dan percaya deh, suatu saat kita akan kaget bengong.

Nah, dalam kasus sprindik hal itu kembali terjadi. Dengan niat memproteksi KPK, kelompok ini membuat Komite Etik.

Padaahal, saya sudah saya katakan, bahwa pembocoran informasi dalam bentuk apapun adalah pidana.

Dan setiap tindakan pidana tidak bisa diselesaikan secara ininternal. Dia harus diproses secara hukum.

Saya tidak mau berpanjang cerita soal ini. Karena ada banyak UU yang mengatur. UU ITE, KUHP, dll.

Tapi yang perlu digarisbawahi adalah “motif” di balik pembentukan Komite Etik. Memproteksi lembaga.



Motif ini sepenuhnya keluar dari kesimpulan kelompok ini bahwa KPK adalah aktor handalan.

Ibarat mereka sedang bermain film. Film itu akan berhenti kalau aktor utamanya terbunuh.

Karena itu, coba lihat seluruh kesimpulan KE dan headline yang mereka buat. Intinya “lindungi KPK”.

Sebetulnya sih tidak salah melindungi KPK, tapi yang lebih penting adalah melindungi sistemnya.

Sebab kalau KPK untuk selalu menyelesaikan soal pidana secara tertutup bagaimana kalau lembaga lain minta hal yang sama?

Bagaimana kalau semua lembaga membentuk komite etik untuk semua pidana yang mereka buat? Sistem rusak!

Sekali lagi pembocoran rahasia negara adalah pidana. Sebab kalau bukan pidana ngapain kita ribut?

Tapi demi KPK, hukum dianggap tidak penting. Diselesaikan secara “adat” dan tertutup.

Padahal penyelenggaraan hukum terikat pada UU secara formil atau materil. Tidak bisa ngarang.

Hukum harus ditegakkan oleh hamba hukum, bukan orang comotan sembarangan dengan dalih reputasi.

Hukum juga ditegakkan melalui tata cara yang ketat dan seluruhnya bertanggung jawab dan profesional.

Karenanya aparat hukum dalam suatu negara adalah kelembagaan yang permanen dan disumpah.

Sebab mereka akan memegang rahasia lain dalam prosesnya. Itu juga rahasia negara. Tidak sembarang orang boleh akses.

Berkali KPK mengangkat secara resmi atau tidak para “rantai pelindung” jadi petugas dadakan. Rahasia KPK diobral.

Dari kalangan inilah secara suka-suka berkali KPK mengangkat komite etik. Dan mau akses data pribadi pejabat KPK.

Berkali juga mereka ini berdatangan ke kantor KPK untuk “pasang badan”. Sok anti korupsi.



Dasar kualifikasinya apa?

Hubungan mereka belakangan ini sudah menjadi semacam simbiosis mutualisma. Ada yang jadi markus juga.

Kita semua lupa bahwa selingkuh seperti inilah yang dianggap akar korupsi oleh KPK. Tapi untuk KPK semua OK.

BAGIAN KETUJUHL BELAS EYANG PEMBERANTAS KORUPSI



“

*Kita tertidur Tuhan tak pernah tidur.
Kita lupa Tuhan tak pernah lupa.
Kita mati Tuhan takkan pernah mati.*

”



I. MANTRA-MANTRA PENJELASAN SEPIHAK

Daripada Anda menuduh bangsa Anda sebagai bangsa maling dan jahat, akuilah bahwa KPK-nya goblok.

Kalau dia pimpinan KPK maka aku akan ajari cara mereka memberantas korupsi dengan UU 30/2002 dalam 3 tahun saja.

Kalaulah nyawa punya manusia maka aku pasti akan jadi bebek. Tapi karena nyawa punya Allah, aku jadi diriku sendiri.

Kita tertidur Tuhan tak pernah tidur.

Kita lupa Tuhan tak pernah lupa.

Kita mati Tuhan takkan pernah mati.

Seperti Eyang Subur yang ngerjain orang bertahun-tahun maka waktu KPK juga sudah habis.

Selama ini kita disihir Eyang KPK oleh mantra-mantra penjelasan sepihak.

Seolah KPK tak pernah salah dan seolah KPK selalu benar dan berada dijalur hukum yang legal.

Entah bagaimana, sebagian kita pun tersihir atau kena santet mantra-mantra itu setiap hari.

Bukan cuman itu, sebagian dari kita mau merelakan hidupnya pada Eyang KPK.

Mirip 8 isterinya Eyang yang seperti bebek, memakai baju yang sama, kalung yang sama. Tanpa nalar!

Tragislah kita berbangsa seperti ini. Di mana kita diteror dan disirep “ajian anti korupsi”.

Eyang KPK menarik seluruh kisah bangsa kita dan menjadikannya pertunjukan.

Eyang KPK sudah sejak 2002 dan efektifnya 2003, mengisi hampir seluruh HL media cetak harian.

Sudah hampir 11 tahun televisi setiap pagi dan sore memaparkan kedahsyatan ajian Eyang KPK.

Diumumkanlah ke seluruh dunia bahwa hanya Eyang KPK yang layak dan bersih.



Kita pun memberinya pujian decak kagum sebagai sesembahan. Bahkan kita mulai percaya Eyang adalah hidup kita.

Kita ciptakan lagu untuk menyambutnya seperti hymne keluarga Eyang Subur.

Dan kita menyederhanakan persoalan bangsa ini seolah hanya Eyang KPK yang bisa selesaikan.

Ini semacam cult atau kultus pasca modern. Kita kehilangan akal sehat, juga memasuki ruang ruang kelas dan dunia akademik.

Ketaatan kepada Eyang atau ketaatan pada hukum tidak bisa dilakukan dengan sihir.

Ketaatan memakai sihir bukan saja totalitarian tetapi juga ajaran setan yang berdiri menganggang.

Ketaatan dan kesetiaan kepada hukum adalah hasil dari interaksi yang sehat dan terbuka.

Kita harus mencintai dengan kesadaran, sebab akal adalah karunia Tuhan yang paling berharga.

Semakin banyak akal sehat kita dirampas dan kebebasan kita dikendalikan, awal-awalnya seperti nyaman.

Seperti zaman Orba. Dengan mantra anti komunis, bangsa ini cocok hidungnya lama.

Bangsa ini menista saudaranya sendiri seperti manusia kelas dua. Seolah mereka kena lepra.

Dengan ajian anti komunis segala cara dihalalkan dan introduksi sebagai kebenaran.

Negara membuat bahasa dan membangun propaganda dan dilakukan penguasaan wilayah makna.

Negara membuat kampanye hari-hari dan sistematis soal bagaimana bahaya komunis harus dibasmi.

Orang-orang komunis didata, dikait-kaitkan dan diumumkan-kan. Dan hanya karena membaca “das kapital”, rakyat jadi tersangka.

Kampanye anti komunis massif dan sistematis. Bangsa ini membebek selamat 30 tahun lebih. Sebagian masih tercemar.



Sekarang sebagai manusia merdeka dan sebagai generasi baru, saya tahu bahwa inilah cara kerja totalitarian.

Totalitarian mengembangkan narasinya, membangun institusinya dan masuk ke dalam hidup rakyat sebagai kontrol.

Totalitarian menakut-nakuti orang dengan cap “komunis, subversif, separatis, dan sekarang...”

Totalitarianisme mengintegrasikan operasi intelijen dalam penegakan hukum menumpas musuh negara..

Totalitarianisme menyukai kosa kata: “ upaya paksa, represif, dan melakukan kekerasan serta kriminalisasi..”

Totalitarianisme seolah menegakkan hukum padahal men-gendalikan proses hukum di satu tangan dan persidangan hanya ritual...

Totalitarianisme menganggap negara harus benar dan yang berhadapan dengan negara harus salah.

Sadarkah kita bahwa Eyang telah menggunakan cara-cara itu?

Anatominya sudah saya baca, karena mereka yang telah menyusun UU ini mulai menyesal bersama.

Karena UU KPK hanya bisa dijalankan malaikat, atau minimal nabi atau wali kekasih Tuihan.

Tidak oleh Eyang Subur atau Polisi atau Jaksa comotan yang kurang pembinaan.

Maka, jika kau menyuruhku memilih menerima kenyataan ini sebagai nasib kita..

Aku mohon maaf, misiku melawan tirani, disebabkan oleh apapun.

Saya mengundang teman-teman angkatan-98 untuk merenungi kembali apa yang dulu kita lawan.

Tetapi seperti kata kundera, ini adalah ingatan melawan lupa.

II. TAK PERNAH SALAH, TAK PERNAH KALAH

Eyang lagi ngamuk tuh...!

Eyang panik kalau dilawan pakai opini, sebab selama ini dia selalu ditaati.



Selama ini, Eyang tak ada yang bantah, Eyang selalu benar dan ditaati.

Selama ini Eyang membangun kesan bahwa Eyang *gak* pernah salah dan tak mungkin kalah. Selama ini Eyang berbicara teratur dan sepihak.

Selama ini kita tak pernah mempertanyakan kehidupan pribadi Eyang. Kita hanya membahas keterangannya.

Kita hanya mendiskusikan dan melanjutkan keterangannya. Tak pernah kita membalik pertanyaan.

Sementara Eyang memang memiliki banyak amunisi untuk meyakinkan kita bahwa dia memang selalu benar.

Pertama, Eyang selalu bisa tahu percakapan kita di luar saat tak bertemu dengannya. Itu selalu.

Aneh sekali kalau kita ketemu, Eyang selalu tahu kita sedang mengalami apa. Kita tak bisa berkitik.

Eyang tahu kita berhubungan dengan siapa saja dan bertemu dengan siapa saja.

Sepertinya Eyang punya pasukan siluman yang setia memata-matai kita 24 jam.

Kedua, saya bertanya kenapa Eyang mensyaratkan pertemuan selalu sendiri dan kita tak didampingi?

Padahal kita umumnya tidak mengerti persoalan dan kadang tak mengerti aturan Eyang.

Dan Eyang sering menekan atau memaksa kita yang karena tidak tahu aturan kadang terpaksa melanggar.

Kadang dalam keadaan seperti itu eyang menyuruh kita bohong untuk tujuannya. Dan kita terpaksa bohong... For Eyang.

Entahlah, aura Eyang sangat dahsyat dan ketika kita tak ditemani apalagi oleh ahli. Mampuslah kita.

Eyang menyihir kita ketika kita sendiri. Lebih tepatnya intimidasi.

Ketiga, informasi (break dulu).

III. MEMAINKAN INFORMASI DAN OPERASI

Kita lanjutkan soal Eyang. Ketiga, informasi.

Tepatnya, Eyang menguasai puluhan bahkan ratusan ribu aib kita.



Eyang memiliki database yang dibangun selama belasan tahun ini.

Karena dianggap bisa menyelesaikan masalah secara cepatlah Eyang dipercaya.

Tapi karena data aib itu terlalu banyak, maka ini senjata ampuh Eyang. Data itu juga kerap dibocorkan.

Eyang diam-diam punya orang kepercayaan untuk memeras dan meneror orang yang dianggapnya perlu.

Jika kita kritis kepada Eyang maka siap-siaplah Eyang mengirim utusannya memperlihatkan aib kita. Takutlah kita.

Jika kita punya uang, penciuman Eyang tajam sekali. Ada saja caranya uang itu melayang sebagian atau seluruhnya.

Informasi Eyang terus diperkaya oleh pasukan siluman pendengar percakapan.

Dulu pernah Eyang suruh orang kemana-mana bawa laptop yang berisi percakapan orang. Itu jadi uang.

Informasi juga dipakai Eyang untuk alihkan perhatian kita. Eyang biasa menyuruh aparatnya beraksi.

Tiba-tiba ada yang tertangkap basah dan tiba-tiba ada yang digeledah atau disita. Lalu kita lupa apa yang sesungguhnya.

Seperti kata Toffler dulu, informasi adalah senjata dan ka-rena Eyang punya info banyak, Eyang tambah sakti.

Yang lucu, karena tamu Eyang banyak dan orang-orang penting maka industri media sangat perlu Eyang.

Hubungan Eyang dengan industri media sudah sangat akrab, dan memang Eyang memakai konsultan PR kelas 1.

Eyang mengidupi industri media dengan informasi paling top. Tapi juga itu senjata Eyang.

Hampir sepuluh tahun ini headline media massa tiap pagi siang sore adalah tentang Eyang. Luar biasa Eyangku terkenal.

Eyang juga punya beberapa media yang menjadi piaraan khusus. Mereka ini mendapat bocoran.



Mereka juga diancam kalau berani kritis. Dengan cara tak dapat berita khusus. *Inside story* Eyang mahal sekali.

Intinya informasi dan aib kita semua adalah senjata Eyang yang paling utama.

BAGIAN KEDELAPAN BELAS
**BEKERJALAH DALAM SISTEM,
BUKAN PENCITRAAN**



“ *Pujian publik adalah satu soal
tapi penyelesaian masalah adalah soal lain yang kadang
tak tersambung.* ”



I. DEMI PUJIAN

Kita terlalu sering mengagumi manusia termasuk pemimpin, lebih dari kapasitas. Itulah yang meracuni.

Memang penyakit manusia bahkan tak jarang manusia mempertuhankan manusia lainnya. Ini sejarah.

Maka sering menjadi sikap saya pribadi: “siapa yang menuai pujian akan menuai kritik dari saya”... jika Politik Pencitraan.

Pujian publik adalah satu soal tapi penyelesaian masalah adalah soal lain yang kadang tak tersambung.

Pujian publik pada pejabat publik satu soal tapi keharusan pemimpin untuk tetap berada di garis rencana dan UU wajib.

KPK menurut saya paling tragis. Hampir semua tujuan penciptaannya oleh DPR dan oleh UU tak tercapai.

Lalu mereka mengembangkan alat ukur sendiri yang tak ada mandatnya dalam UU. Atraksinya mengagumkan.

Tapi apa yang selesai dalam 10 tahun ini? Apa mandat UU 30/2002 dan UU lain dalam sistem hukum kita?

Ya sering dipakai sebagai *show*: jumlah orang yang disadap lalu ditangkap dan jumlah yang dihukum (*conviction rate*).

Pertanyaannya adalah *claim* kinerja dan sukses dasarnya apa?

Apakah boleh pejabat negara membuat dasar kinerja yang tidak ada dalam UU dan perencanaan bersama? Demi Politik Pencitraan?

Maka pertanyaan kembali kepada pejabat KPK adalah apa yang selesai dari isu korupsi ini?

Nyaris tak ada karena KPK tak pernah berorientasi pada penyelesaian masalah tapi pujian demi pujian.

Pujian inilah yang mematikan dan mengalihkan mereka dari cita-cita konstitusi Negara UUD'45 dan UU yang berlaku.

Bayangkan, serangkaian pelanggaran mereka lakukan:



menyadap, melarang pendampingan advokat,
pencemaran nama, dll.

Semua pelanggaran itu sekarang seolah legal karena tak
ada satu yang berani melawan.

Sekarang kita bersabar dan berdoa, semoga keadilan
dan kepalsuan kedok terbuka.

Dan terus membantu rakyat kita karena Politik
Pencitraan atau Politik Blusukan sudah mati.

Sekarang ini publik harus dititipkan pertanyaan kepada
para pemimpinnya siapapun dia: “apa yang sudah
selesai?”

Karena kalau bukan itu yang dijawab oleh pemimpin
maka kita semua telah tertipu oleh Politik Pencitraan
dan Politik Blusukan.

Tebar Pesona dan Tebar Kepalsuan itulah sejatinya
musuh rakyat sebab transisi kita ini lambat sekali.

Mereka yang lebih khawatir Citra Diri daripada
penyelesaian masalah adalah tukang tipu.

Memanfaatkan keamanan publik untuk bersandiwara tanpa ujung adalah pengkhianatan.

Mari selalu bersikap kritis kepada siapapun....Tolak Politik Pencitraan!

II. MK Vs KPK

Sekarang terbuka sudah mata publik bahwa lembaga yang tak ada pengawasnya akan rusak sendiri.

Publik memang mudah dikibuli tapi harus ada kita yang berdiri tegak agar publik tak jadi korban.

Harus ada yang mengembalikan memori publik bahwa sandiwara kepalsuan inilah biang kerok masalah.

Ketika keputusan penting hanya alat pencitraan dan bukan untuk menyelesaikan masalah.

Kita lanjutkan sedikit, soal keputusan yang dibuat untuk menyenangkan hati publik. Bukan selesaikan masalah.

Waktu itu, hampir semua pimpinan KPK bermasalah: Antasari dituduh membunuh, Bibit-Chandra dituduh terima suap.



Yasin pun dituduh terima uang meskipun pasir dan dikembalikan. Hanya Haryono yang tak ada soal.

Maka gejolak besar terjadi dengan KPK, publik terbawa dalam gerakan massa save KPK dan lawan buaya.

Secara tidak jernih kemarahan publik telah menjadi segala-galanya tanpa seorangpun berani hentikan.

Mulailah hukum dan sistem hukum kita dirusak. Pertama-tama di KPK. Diam-diam Pimpinan KPK melakukan penyadapan.

Lalu hasil sadapan itu disusun rapi dalam sebuah percakapan menarik selama hampir 5 jam.

Pimpinan KPK telah menyusunnya rapi dan mencari tempat untuk membukanya. Tapi belum ketemu.

Menyadap untuk kepentingan pribadi adalah kebiasaan pimpinan KPK. Periode Ruki terjadi dan periode Antasari terjadi.

Pada periode Antasari ada sadapan terhadap Rani Juliani sang pacar bersama.

Penyadapan Anggodo juga di zaman Antasari. Lalu hasil sadapan dipilih dan dibocorkan. Awalnya ke media cetak.

Lalu sebuah persidangan di MK dirancang? Bibit-Chandra tidak terima dinonaktifkan oleh UU KPK.

Padahal maksud UU itu mulia agar pimpinan dan pegawai KPK harus super hati-hati di lembaga *superbody*.

Sebelum persidangan terselenggara, menurut Akil Mochtar ada pertemuan ketua KPK Mahmud MD dengan BW.

Waktu itu BW adalah Kordinator pengacara Bibit-Chandra. Kini yang bersangkutan adalah pimpinan KPK.

Upacara mendengarkan rekaman itu seperti menyiarkan kematian. Tetapi orang menyimak nya dengan khusyuk

Mengapa aku menyebutnya seperti kematian? Karena pada hari itu MK berselingkuh dengan para tersangka.

Wajarkah sebuah sadapan yang rapi tentang apa yang disebut sebagai “konspirasi lemah kan KPK?”



Wajarkah pertemuan pendahuluan antara para lawyer tersangka dan ketua Mahkamah?

Wajarkah persidangan norma hukum dan UU di depan konstitusi negara berubah jadi persidangan pidana?

Wajarkah sebuah alat bukti pidana menjadi dasar pergeseran norma dalam UU?

Para lawyer Bibit-Chandra yang dipimpin BW berpandangan demikian.

Bahwa karena kasus klien-Nya (Bibit-Chandra) direkayasa maka UU diubah agar menyelamatkan mereka.

Ini dosa mereka yang ke-3 setelah menyusun rekaman satu versi dan menemui ketua Mahkamah.

Perhatikan: ini mirip dengan bailout bank Century, “Bahwa karena BC mau tutup maka aturan PBI kita ubah.”

Saya menarik garis asosiasi murni karena saya tahu bahwa para pelaku memiliki ideologi yang sama.

Bahkan secara kasat mata saya bisa melihat bahwa orang-orang yang terlibat di Century ada di belakang mereka.

Sehingga saya berkesimpulan ini semua barter kasus. Dan sudah ditekan sedemikian rupa kasus Century 5 tahun sudah.

Nanti kita bicara itu. Sekarang lanjutkan kasus pemutaran kaset rekaman hasil sadapan kreatif KPK di MK.

Maka karena siaran langsung di hampir semua TV, berita itu heboh. Langkah selanjutnya adalah menekan SBY.

Mereka tahu betul kelemahan SBY yang mudah ditekan. Para pembisik segera beraksi.

Dan berhasil, SBY segera berpidato dan membentuk tim-8. Mereka yang tiba-tiba merampas kewenangan penyidik.

Bayangkan beberapa lembaga yang dibentuk melalui UU dan mendapatkan kewenangan dalam UUD45 dikalahkan.

Tim-8 yang bekerja hanya dengan keputusan Presiden menghapus kredibilitas lembaga POLRI dan Kejaksaan.



Saya teringat sumpah Kapolri dan Jaksa Agung RI di ruang Komisi 3 bahwa mereka yakin dengan kasus pidana ini.

Lalu mereka menuntaskan temuannya sampai P-21 yang berarti bahwa penuntut telah lengkapi berkas perkara.

Perkara siap disidangkan. Dan harusnya disidangkan. Seperti doktrin Johan Budi, “Kita buktikan di persidangan.”

Tadi saat itulah hukum mulai dikhianati. Atas nama dukungan publik sebuah kasus pidana dibelokkan.

Hukum kita mulai menyimpan nanah. Bahwa banyak hal yang bisa diselesaikan di luar hukum.

Saya tahu saat itu bukan pertama kali MK sebagai pemegang tugas menjaga konstitusi ditekan.

Dan saya tahu kapan MK mulai membiarkan diri ditekan. Lalu hukum mengambang dan tak terpegang.

Polisi dan Jaksa telah kehilangan nyawa karena hukum yang ingin mereka tegakkan ternyata nisbi.

Sampai hari ini, di Republik ini jika kita bertanya, “Dimanakah keadilan dan kepastian hukum dijaga?” Kita terdiam.

III. TUNTASKAN REFORMASI HUKUM

Aneh ketika justru yang menolak RUU KUHAP/KUHP Minoritas Polisi+KPK. Ada yang tahu alasannya?

Ada kelompok Polisi yang senang jika hukum samar, pasal karet, diskresi dll.

Ada kelompok Polisi yang senang jika hukum banyak lubangnya. Semakin banyak jebakan makin baik.

Reformasi Hukum yang telah digodok oleh para pakar hukum utama inilah RUU KUHAP/KUHP itu.

Intinya kita lanjutkan Reformasi Hukum dan menutup lubang samar dalam teks hukum kita.

KUHAP dan KUHP ke depan harus memiliki makna pasti. Jangan seperti yang sekarang.



Kalau kita mau nenek tua dituduh pencuri sebutir kakao masuk bui berbulan-bulan tolak RUU ini. Reformasi Hukum mati.

Kalau Anda mau lubang bagi rekayasa hukum dan praktik dark justice berlanjut maka tolak RUU ini. Reformasi Hukum tamat.

RUU ini adalah jawaban atas pertanyaan panjang rakyat yang memimpikan keadilan dan kepastian hukum.

Memang menyedihkan. Lubang hukum tak mau ditambah tapi sibuk meributkan kebocoran.

Seperti korupsi yang sesungguhnya pelaku utamanya adalah penegak hukum. Ramai diributkan solusi ditolak.

Aparat hukum malah lebih senang kalau bocor bertambah banyak agar bisa kelihatan sibuk. Tak harus selesai.

Aku jijik melihat kelakuan mereka. Gaji besar dan biaya operasional besar. Tambah tepuk tangan.

Masalah ditekankan untuk menunjukkan bahwa mereka bekerja. Mereka jahat. Uang negara diboroskan.

Sayang kebanyakan tidak paham. Kebanyakan terbuai pencitraan. 13 tahun berantas korupsi, gagal.

Orang gak paham bahwa jika korupsi tambah banyak artinya negara gagal. Eh, malah tepuk tangan. Siting!

Aparat dengan berbagai cara meyakinkan kita bahwa itu adalah sukses. Berantas korupsi seperti berburu.

Tidak ada yang berpikir bahwa sukses artinya korupsi tak ada lagi. Lubang tak mau ditutup.

Aparat berpendapat bahwa hanya dengan semakin represif negara bisa sukses tegakkan hukum.

Mereka berpendapat hanya dengan semakin abu-abu aturan ruang gerak aparat makin luas untuk menyalahkan.

Mereka meminta diskresi besar agar mereka bisa berbuat apa saja untuk termasuk menjebak.

Sekali lagi lubang tak mau ditutup karena kalau lubang ditutup mereka jadi pengangguran.

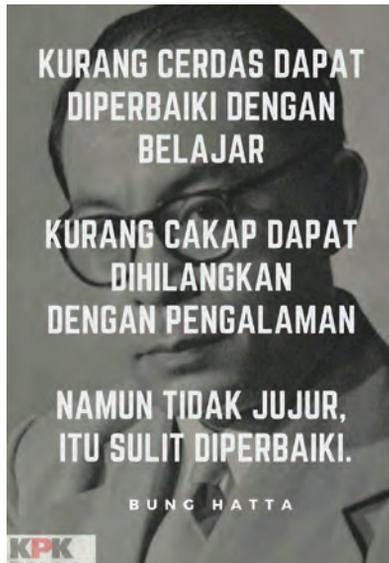
Ini adalah perjuangan terakhir mereka setelah belasan tahun hidup dalam gemerlap kepahlawanan.



Kepalsuan harus disingkap. Orang-orang harus dibangunkan. Akal sehat tak boleh kalah oleh kemunafikan.
Sekian sementara...

IV. SELAMAT BEKERJA PANSUS ANGKET KPK

Dalam logika negara moderen. Semua lembaga negara (termasuk KPK) punya penyakit sama proporsinya secara adil. <https://t.co/UcJJZlQW9f>



Maka, KPK harus mulai memperbaiki cara melihat diri...

Misalnya,

Bukan karena semua lembaga disadap dan semua pejabat di lembaga itu telah kena operasi OTT lalu KPK bebas suap...

Untuk membuktikan suap di tubuh KPK, kita perlu lembaga yang bisa menyadap KPK dan itu tidak ada..

Polisi disadap KPK lalu polisi kena OTT...

Jaksa disadap KPK lalu jaksa kena OTT..

Hakim disadap KPK lalu hakim kena OTT..

DPR disadap KPK anggotanya kena OTT..

DPD disadap KPK anggotanya kena OTT..

MK, KY, MA dll semua sudah kena...

Lalu siapa yang boleh menyadap seperti KPK?

Tidak ada!

Pertanyaanya,

Kenapa dalam 15 tahun KPK berdiri kita hanya punya 1 lembaga yang tidak ada suap? Yaitu KPK sendiri?

Setelah 15 tahun,

Kenapa polisi masuk KPK bersih..



Kenapa jaksa masuk KPK bersih..

Tapi kenapa POLRI dan KEJAKSAAN tidak kunjung bersih?

Maka pretensi eksklusif ini yang harus diperbaiki ke depan... agar KPK ada gunanya...

KPK tidak bisa lagi klaim diri sendiri dan sok benar sendiri sambil tidak mau perbaiki cara kerjanya...

Semua lembaga termasuk BPK dan TNI yang terakhir sudah jadi pasien KPK...

Seolah publik diarahkan untuk menyimpulkan.. hanya ada KPK di negeri ini...

Apakah itu maksud dari semua ini?

Mari kita urai di Pansus Angket KPK nanti..

V. MARI BUAT SEDERHANA: DUKUNG PANSUS ANGKET KPK BEKERJA

Pagi-pagi hari jumat...

Suara Hati

Membuka Nurani
Menemukan Kebenaran Sejati....

Padahal tidak banyak dari kita yang tahu banyak...
Sebagian hanya emosi dan ikut-ikutan saja..

Yang tahu banyak kadang diam..
Yang tidak tahu banyak bicara...
Lalu siapa yang benar?

Jangan mau diadu domba,
Kita tidak bicara membela koruptor..
Tidak ada yang tidak anti korupsi...

Ya,
15 tahun UU Tipikor...
Lahirkan KPK sebagai lembaganya...
Di sini kita berbeda pandangan...

Ada yang bilang KPK sudah benar...
Korupsi banyak yang ditahan...
Semua masuk bui dan tahanan...

Ada yang bilang KPK gagal...
Kok korupsi tambah banyak...
Kok tidak makin hilang...



Ada yang bilang..

Karena tambah banyak korupsi, KPK harus ada...

Ada yang bilang kalau tambah banyak korupsi artinya gagal... bubarkan saja....!

Tapi yang jelas,

KPK telah hanya mengungkap satu versi dari peristiwa selama belasan tahun ini...

Nah,

Angket ini mengungkap temuan sebenarnya yang melengkapi sisi yang ada... maka kita akan kaya data....

Maka *gini* saja,

Mari kita dukung Pansus angket ini...

Kita buka semuanya...

Tidak ada yang rugi ya...

Sama sekali tidak ada ruginya..

Jangan takut terbuka...

Ini semua demi kebenaran...

DPR adalah lembaga sah dan konstitusional untuk tugas ini... Angket adalah hak konstitusional dewan ...

Pansus sudah diumumkan dalam berita negara... sudah sah dan biarkan mereka bekerja...

Mari kita dorong kerja terbuka...

Dengan hati yang baik...

Niat tulus ikhlas....

Ayuk semuanya...

Dukung Angket KPK

Bismillah....

Suara Rakyat Sejati



BAGIAN KESEMBILAN BELAS **HUKUM MEMERLUKAN CINTA**



“

Hukum memerlukan CINTA.

Hukum memerlukan

HIKMAT KEBIJAKSANAAN

”



I. SRIKANDI PANSEL KPK

Saya termasuk yang memuji keputusan Joko Widodo memilih 9 Srikandi jadi Pansel KPK.

Keputusan ini adalah inisiatif yang baik. Dan 9 Srikandi itu orang-orang hebat.

Pertama, perempuan lebih banyak dari laki-laki dan biarlah mereka tampil.

Kita bangsa besar dan di dalamnya banyak perempuan besar; 9 Srikandi Pansel KPK ini di antaranya.

Selain itu nampaknya KPK sedang memerlukan sentuhan yang feminin.

Selama ini KPK terlalu maskulin.

Hukum yang ditegakkan dengan otot takkan melahirkan kedisiplinan.

Hukum yang ditegakkan dengan *ngotot* takkan lahirkan rasa keadilan.

Hukum memerlukan cinta. Hukum memerlukan hikmah kebijaksanaan.

Jika kelak mereka memilih pimpinan KPK saya hanya titip satu kriteria, negarawan.

KPK ini lembaga kuat yang kekuasaannya mendorong orang melampaui hukum.

Padahal orang kuat harus semakin arif bijaksana.

KPK memerlukan ahli strategi bukan tukang pukul jalanan.

KPK memerlukan solidaritas dan pencipta kekompakan polisi jaksa dan hakim.

KPK tidak memerlukan orang Yang sok menang sendiri.

KPK memerlukan imajinasi bukan emosi.

Selamat bekerja 9 Srikandi Indonesia.

II. MILITERISASI KPK

Bukan karena rakyat percaya TNI lalu ia diseret masuk wilayah sipil...



Mental ini nanti membuat kita menyetujui kudeta militer...jangan goblok deh!

Militer kita telah dikagumi dunia oleh keberaniannya transisi keluar dari politik dan bisnis.

Tidak banyak transisi yang sukses ketika di banyak dunia, militer selalu mengintai kesempatan.

KPK gagal karena sistem kerja sembrono...bukan soal orang..jangan rusak TNI kita..

TNI kita adalah harapan kita tentang kekuatan bersenjata yang melindungi NKRI..

TNI kita sedang memulai tradisi baru setelah 17 tahun keluar dari jebakan kekuasaan..

Saya teringat dulu sebagai anggota komisi 6 ikut mendorong BUMN mengelola bisnis TNI.

Dan ada rasa haru bahwa semuanya dilakukan secara sukarela.

Seolah kalangan TNI sendiri yang mengatakan *enough is enough* TNI kembali ke barak.

Kita tentu tidak khawatir bahwa TNI kita Yang telah profesional tergoda.

Tapi yang menyebarkan adalah elemen sipil yang gagal dan ingin mengandalkan tentara.

Penegakan hukum adalah wilayah sipil...POLRI telah susah payah kita tarik dari barisan tentara.

Polri sendiri tidak mudah berubah tapi hargailah mereka terus mencoba.

Bukankah 13 tahun KPK semua penyidiknya anggota Tri Brata?

Apa alasan KPK tidak lagi percaya POLRI dan beralih ke Tentara?

Siumanlah wahai saudara...

III. VIRUS MEMATIKAN BERNAMA “HILANGNYA KEPERCAYAAN”

Fitnah kepada pimpinan KPK hari ini harus segera lapor polisi...



Pimpinan KPK harus percaya pada polisi...

Asas bernegara paling penting adalah kepercayaan...

Kalau kita tak lagi saling percaya maka habislah sendi utama bernegara..

Negara juga seperti rumah tangga...jika tak ada lagi saling percaya maka hancurlah..tinggal tunggu waktu..

Memang dalam rumah tangga tidak ada pembaharuan mandat..tapi ada minta maaf..

Kita tidak bisa memperbaharui suami atau isteri atau anak setiap kita tidak percaya...

Dalam negara, pembaharuan itu dengan pemberian mandat ulang..rakyat menentukan pejabat baru di lembaga inti..

Eksekutif (Presiden) dipilih ulang dan legislatif (DPR/DPD) juga dipilih ulang...

Presiden baru namanya Joko Widodo wakilnya Jusuf Kalla usia kuasa baru 3 bulan..

Maka percayailah ia..setidaknya jangan rusak kepercayaan yang telah ia miliki...

Kepercayaan itu penting bagi publik...kepercayaan publik itu rawan dan harus dirawat bersama..

Sekedar renungan agar kita saling menjaga...

Belakangan ini telah mewabah penyakit saling tidak percaya dalam negara...

Maka penyakit itu saya sebut virus mematikan negara...

Sepertinya ada gerakan untuk sangat mudah saling fitnah dan saling hina...

Para pemilik otoritas seperti senang jika yang diketahuinya dari aib pejabat negara lain dibuka...

Atas nama keterbukaan informasi publik sebagian pejabat menyatu dengan publik menggalang fitnah..

Lalu hukum dicampur dengan opini dan analisa..ribuan orang seperti telah nista jika telah disebut namanya..



Secara nasional sekarang ini kita sudah percaya bahwa:
tak ada lagi pejabat yang bisa dipercaya...

Tak ada lagi polisi bersih seperti Hoegeng dan tak ada
lagi jaksa seperti Lopa...

Tak ada lagi bupati dan walikota yang tidak punya cela...

Tak ada gubernur yang tidak berpotensi jadi tersangka...

Semua anggota DPR bermain cela dan DPR lembaga
paling banyak tidak dipercaya..

Dan seterusnya...

Ada yang menikmati keadaan ini...

Dan sedihnya karena kini..

Korbannya adalah Presiden Joko Widodo yang katanya
pilihan sempurna...

Apa salah seorang Presiden ketika memilih orang yang
seluruh prosedurnya benar?

Dan kini mereka datang lagi..

Intinya kita tidak saling percaya..

Dan kita akan melihat Presiden ada dimana?

Bagaimana Presiden mengembalikan kehangatan bernegara seperti kehangatan rumah tangga?

Rumah tangga Baru 3 bulan ..
Pasti sedang mesra...

Kita tentu tak punya kuasa..
Kecuali kata2...

Malam ini kita doakan Presiden kita..
Semoga jiwanya merdeka...

Banyak yang tidak percaya..
Bener, kan...?

Saya kasihan Pak JOKOWI aja..
Masak cepet amat *gak* dipercaya...

Terutama yang dulu memuji berlebihan...



BAGIAN KEDUA PULUH
**PERKUAT LEMBAGA INTI
DEMOKRASI**



“

Demokrasi kuat ditandai oleh menguatnya lembaga inti demokrasi dalam negara bukan melemahkannya...

”



I. KPK DAN KRIMINALISASI

Saya senang editorial Media Indonesia di Metro TV hari ini.

Mengingatkan kita untuk percaya pada Institusi.
Terutama penegak hukum.

Karena kita tidak punya pilihan. Tidak percaya pada institusi negara artinya kita mau main hakim sendiri.

Ini yang selalu saya ingatkan kepada KPK dari dulu.
Penguatan institusi.

Efek kehadiran KPK yang dimanfaatkan oleh UU 30/2002 adalah menguatnya POLRI dan Kejaksaan.

Maka jika efek sebaliknya yang muncul sama saja dengan mengatakan tujuan kehadiran KPK tidak tercapai.

Dulu sering saya ingatkan keyakinan akademik saya soal lembaga *superbody* dalam demokrasi adalah anomali.

Demokrasi bekerja dengan prinsip yang berbeda dengan lembaga *superbody*.

Dalam buku, “Demokrasi Transisi Korupsi”, yang saya tulis (2012) saya sudah menjelaskan situasi ini.

Kalau KPK sekarang nampak sendiri adalah efek langsung dari kegagalan jalankan UU 30/2002.

Dalam UU itu KPK ditugaskan untuk “Kordinasi, supervisi dan Monitoring” sebagai inti tugas KPK.

Saya juga menjelaskan kenapa tugas pencegahan menjadi inti persoalannya?

Karena pembuat UU tahu bangsa negara kita baru dan sedang berubah.

Jangan lupa UUD 45 diamandemen 4 kali dan terakhir 2002.

Negara yang berubah lebih memerlukan penataan sistem daripada efek jera.

Di sini falsafah, “mencegah lebih baik daripada mengobati” menemukan pembenaran.



Dan KPK itu bukan obat. Dia suplemen. Dalam bahasa naskah akademik UU adalah *trigger mechanism*.

Agar lembaga penegakan hukum yang inti POLISI dan Kejaksaan serta HAKIM menjadi efektif.

Sekarang, bagaimana kalau KPK justru mengembangkan ketidakpercayaan kepada lembaga penegak hukum?

Dan bagaimana jika armada aktifis anti korupsi menolak diperiksa proses hukum?

Berarti sempurnalah pengrusakan kepada negara dan institusi-nya.

Mari kita waspada...

II. KEMBALIKAN KPK PADA AKAR UNDANG-UNDANGNYA

Tulisan Prof. Romli Atmasasmita di SINDO pagi ini bagus sekali bagi pejuang hukum...

[https://twitter.com/Fahrihamzah/
status/573284376605138944](https://twitter.com/Fahrihamzah/status/573284376605138944)

PERKUAT LEMBAGA INTI DEMOKRASI



Saya senang sekali karena beliau Prof. Romli Atmasasmita sebagai pembuat #UUKPK terus meluruskan pikiran kita.

Dan saya sayangkan para pegawai dan Mujahidin anti korupsi kalau gak mau baca pikiran dasar UU KPK Prof. Romli Atmasasmita

Kalau kita tersesat..atau salah arah...kembalilah kepada dasar..para ahli dan pembuatnya..terima kasih Prof. Romli Atmasasmita



Ada gejala...asalkan tepuk tangan riuh kita terus berbuat salah...

Dan ada wabah..lebih baik kita sembunyikan kebenaran karena sedang tidak populer dan dicemooh orang..

Sampai kita sembuh dari penyakit ini..lalu menjadi bangsa rasional..dan berkarakter barulah kita maju...

Para guru besar saya sarankan kembali kepada akal dan nalar..Tinggalkanlah emosi dan perasaan...

Sadarlah wahai para ilmuwan...

III. PERKUAT LEMBAGA INTI

Para pemberantas korupsi di Negeri ini telah berubah menjadi malaikat dan pengawas moral...

Mereka mencatat dan mengintip hidup pribadi orang yang tugas itu tidak pernah diberikan UU...

Tugas lembaga negara inti yang diberi kewenangan semacam lembaga intelijen dilampaui...diambil alih...

Dan mereka berkoar-koar membocorkan rahasia negara tanpa ada hukum yang menjerat mereka...

Saya senang Presiden Joko Widodo mengembalikan peran lembaga inti...

Jangan mendengar berita dan gosip murahan...dengarlah BIN dan institusi pembantu Presiden..

Mereka yang disumpah...bukan bibir *dower* di pinggir jalan...kembalikan wibawa institusi inti...

Kemarin sudah 10 lembaga semi negara dibubarkan... saya dukung..

Demokrasi kuat ditandai oleh menguatnya lembaga inti demokrasi dalam negara bukan melemahkannya...

Maju terus Pak Joko Widodo . Kalau Anda benar saya pasang badan buat Anda.

IV. SINERGI BPK & KPK

Pagi teman, saya ingin *sharing* sedikit soal BPK RI sebagai sebuah lembaga negara yang sangat penting.



Saya termasuk yang sering mengingatkan banyak pihak, agar KPK RI membangun sinergi dengan BPK RI

Karena BPK RI adalah auditor *independent* negara yang tertinggi (*Supreme auditor*).

BPK RI tercantum dalam konstitusi negara UUD 1945 sehingga sebagian ahli menyebutnya sebagai lembaga tinggi.

Sebagai auditor negara, BPK RI punya kebebasan untuk memeriksa seluruh proses penyelenggaraan negara.

Pemeriksaan itu bisa berkaitan dengan keuangan, kinerja atau tujuan tertentu berdasar permintaan.

Oleh karena itu, teman-teman kita yang bekerja di BPK RI sudah sangat mumpuni. Semua Audit mereka sanggup.

Sementara itu, temuan BPK RI memang seharusnya jadi rujukan bagi mereka yang ingin memperbaiki sistem negara.

Karena sistem bekerja sejak UU dibuat oleh DPR RI bersama presiden. Lalu dilaksanakan.

Dari dalam pemerintahan, BPKP bertugas memberikan audit dan asistensi.

Dari luar BPK RI melakukan audit setiap akhir masa pelaksanaan. Ada juga audit untuk tujuan tertentu.

Di sepanjang perjalanan sistem itulah DPR RI juga hadir untuk mengawasi.

Demikianlah sistem bekerja menyempurnakan diri dari waktu ke waktu.

Temuan BPK RI adalah indikasi yang kasat mata apakah sistem pemerintahan berjalan dengan baik atau tidak?

Sehingga temuan BPK RI juga adalah alat yang paling ampuh dalam memberantas korupsi.

Alat sadap memang bisa mengetahui penerimaan uang tapi kerusakan sistem hanya bisa dilacak oleh BPK RI melalui audit.

Dulu, dalam kasus Bank Century banyak yang tidak percaya adanya korupsi atau pidana lainnya.



Tapi setelah audit BPK RI keluar mata kita terbelalak.
Kaca pembesar mereka sangat ampuh.

Menurut saya BPK RI lebih ditakuti karena kemampuan membaca *fraud* yang tersembunyi sangat teliti.

Kejahatan korupsi itu terjadi bukan saja karena orang terima uang *cash* dan tertangkap tangan.

Korupsi itu soal penyalahgunaan kewenangan dengan melawan hukum dan biasanya tersembunyi dalam kebijakan dan belanja.

Dan yang ahli membaca *fraud* itu ada di BPK RI mereka sangat ahli.

Tentu ada saja oknum BPK RI yang main-main. *Wong* wakil rakyat dan wakil Tuhan juga ada *kok*.

Tapi soal kapasitas lembaga kita harus apresiasi. Ini terbukti dengan banyak prestasi internasional mereka.

Semoga saja KPK RI dan BPK RI bisa bersinergi. Sehingga pemberantasan korupsi itu nyata.

Pemberantasan korupsi harus punya efek sistemik. Pada perbaikan cara kerja aparaturnegara.

V. ANTARA BPK DAN KPK

Temennya Ahok ada banyak yang *gak* paham beda BPK RI dan KPK RI ...

BPK RI adalah auditor negara tertinggi... KPK RI adalah penegak hukum..

BPK RI itu melakukan pemeriksaan audit..KPK RI melakukan pemeriksaan *pro justitia*..

BPK RI bekerja senyap tanpa diketahui publik.. KPK RI setiap hari konferensi pers..

Kalau mau bantah BPK RI itu saat diperiksa sebagai *auditee*..kalau bantah KPK RI di pengadilan..

Karena perbedaan fungsinya maka BPK RI dan KPK RI harusnya bermitra..

BPK RI berhak menghitung jumlah kerugian negara, KPK RI menggunakannya untuk tentukan delik pidana..



Temuan BPK RI ada bermacam termasuk pelanggaran hukum berakibat pidana..

Jadi tidak wajar menyerang BPK RI terbuka sebab pemeriksaan sudah selesai..

Kalau mau bantah BPK RI sebaiknya saat diperiksa dulu... sebab *gak* ada gunanya...

Jika KPK RI memerlukan pendalaman dia bisa minta BPK RI audit lagi...dengan tujuan tertentu..

Demikianlah kedudukan lembaga-lembaga ini..masing-masing ada fungsi..

VI. KPK (Jangan) BERMUKA DUA

Pagi-pagi menuju kantor, sambil menulis sebuah renungan tentang DUA WAJAH KPK DALAM PENANGANAN PERKARA.

Dan mumpung lagi ramai, mari lihat bagaimana perbedaan penanganan kasus RJ Lino (Dirut BUMN) dan kasus Setya Novanto (Ketua DPR).

Bareskrim Polri melakukan penyidikan atas pengadaan 10 unit mobile crane tahun 2014 oleh RJ Lino sebagai dirut PT Pelindo II.

Lalu Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Budi Waseso melakukan penggeledahan ke PT Pelindo II pada 28 Agustus 2015

Saat digeledah RJ Lino mengontak seorang menteri dan berkata: “Mereka (polisi) cari file, ya itu tugas. Mereka saya hormatilah. Tapi yang saya tidak bisa itu begini-ini. Harusnya dipanggil dulu, ditanya dulu dicek dulu ada apa, dll (masih ingat kan?)

Terlihat RJ Lino menginginkan agar tidak ada kegaduhan, ini rasional karena pasar tidak suka gaduh, RJ Lino pimpinan sebuah korporasi. Dia bukan pegawai negeri meski dia kerja di perusahaan negara.

Berdasarkan audit internal yang dilakukan Pelindo II serta hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik Bareskrim, Budi Waseso menemukan bahwa sementara ditaksir kerugian negara mencapai Rp 45 miliar.

24 Februari 2016 Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes (Pol) Agung Setya



menyebutkan Total kerugian negara atas pengadaan 10 unit mobile crane sebesar Rp 37.970.277.778, terlihat angka tersebut begitu presisi sampai satuan terkecil.

Atas penggeledahan tersebut, Budi Waseso dikontak oleh seorang pembesar di negeri ini dari Seoul menanyakan perkara tersebut dan menyampaikan bahwa kebijakan korporasi tak boleh dipidana.

Terkait permintaan Pejabat tsb, Budi mengaku tidak bisa melakukannya. Dia beralasan jika keinginan Itu dipenuhi maka pidana berbentuk kebijakan tidak bisa diusut. “Tidak bisa dong, jika pidananya tak diusut berarti tidak boleh lagi pelanggaran pidana diusut.”

Sampai hari ini, penyelidikan Mabes Polri tak kunjung naik status menjadi penyidikan. Kita tahu Buwas tiba-tiba dipindahkan ke BNN dan entah oleh siapa kasus itu gak jalan. Lalu KPK jadi harapan.

Di sisi yang lain, jika polisi melakukan penyelidikan atas pembelian 10 Unit Mobil crane oleh PT Pelindo II pada tahun 2014. Maka KPK melakukan penyelidikan pengadaan 3 unit quay container crane (QCC) tahun 2010 yang juga dilakukan oleh RJ Lino di PT Pelindo II.

Setelah memanggil ahli dari ITB dan BPKP dalam penyelidikan, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka pada tanggal 18 Desember 2015 karena melakukan penunjukan langsung.

RJ Lino disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hingga hari ini, 2 tahun kurang satu bulan dari penetapan RJ Lino sebagai tersangka, namun Lino tak kunjung ditahan, Lino masih bebas berjalan tidak hanya di dalam negeri namun juga ke luar negeri karena tidak dicekal.

Febri Juru Bicara KPK mengatakan di banyak perkara yang menggunakan Pasal 2 dan 3 memang butuh waktu untuk membuktikan atau menghitung lebih lanjut indikasi kerugian keuangan negara. (ingat, SN juga kena pasal ini).

Belum tuntasnya menghitung kerugian negara inilah yang membuat KPK belum juga menahan RJ Lino, dan penggunaan pasal 2 dan 3 UU Tipikor membutuhkan



waktu yg lama untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

Padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyimpulkan adanya indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal sebesar US\$ 306 juta ekuivalen Rp 4,08 triliun (kurs Rp 13.337/US\$).

Simpulan tersebut merupakan hasil pemeriksaan investigatif atas perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan Pelindo II berupa kerja sama usaha dengan PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT).

Selanjutnya Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka telah menyerahkan hasil temuan itu kepada KPK 7 Juli 2017. Sampai hari ini, sekali lagi kasus ini masih mengambang. RJ lino masih bebas berkeliaran tanpa penjelasan.

Di sisi yang lain lagi, ada Setya Novanto seorang ketua DPR RI. 31 Oktober 2017 KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus EKTP untuk yang kedua kalinya. Novanto disangka melakukan pelanggaran terhadap pasal yang sama yang disangkakan pada RJ Lino.

Kita tidak sedang membela SN dan mengecam RJL. Saya tidak punya urusan bisnis apapun dengan keduanya. Kita sedang melakukan pertanyaan yang menjadi hak warga negara dalam demokrasi. Tentang penggunaan uang dan kewenangan.

SN disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1. Sebelumnya KPK pernah menetapkannya sbg tersangka juga disangkakan melakukan pelanggaran pasal yang sama yaitu Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor.

Dan Novanto memenangkan prapradilan dengan konsekwensi KPK tidak boleh lagi mengusut kasus yang sama. Atas keputusan itu harusnya KPK segera mengeluarkan SP3 tetapi karena tidak punya kewenangan, harusnya dilimpahkan ke Kejaksaan seperti kasus BG.

Namun, apesnya Novanto, RJ Lino setelah dua tahun menjadi tersangka tidak juga ditahan karena butuh waktu lama utk menghitung kerugian negara. Namun Novanto langsung ditahan hanya berselang 15 hari setelah bebas dan baru panggilan pertama sbg tersangka.



Dalam kasus E KTP, dua lembaga resmi auditor negara secara kelembagaan mengatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus EKTP. Dua lembaga resmi ini dikalahkan oleh ocehan Nazaruddin yang punya motif kerjasama dengan KPK.

Fakta Persidangan 10/11/2017, Mantan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Iman Bastari mengatakan BPKP tidak menemukan ada masalah dalam proyek (e-KTP).

Hasil audit resmi BPK pada 2013 atas program E-KTP tahun 2011 dan 2012 (setelah E KTP mulai diterapkan) hanya menemukan potensi kerugian negara Rp 24,90 miliar. Potensi itu bisa hilang jika pihak pelaksana memperbaiki kewajibannya.

Rekomendasi BPKP dan BPK sudah diselesaikan dengan baik oleh kemendagri, proyek EKTP pun ditutup dengan status clean and clear. Ini adalah pendapat resmi karena memang persoalan pokok proyek EKTP sudah selesai.

Ada yang tak akan selesai di proyek EKTP yaitu pengadaan blangko dan input baru. Hal ini karena jumlah penduduk bertambah dan setiap tahun ada yang

berulang tahun ke-17 lalu mulai aplikasi EKTP

Namun, KPK terus menyebutkan ada 2,3 T rupiah kerugian negara dalam kasus EKTP. Angka Rp. 2,3 T ini kemudian membuat kasus EKTP menjadi kolosal dan seolah melibatkan banyak orang. Khususnya DPR tempat bancakan uang rakyat!

Dalam kasus Novanto, keterangan KPK bahwa butuh waktu utk menghitung kerugian negara atas sangkaan pasal 2 dan 3 UU Tipikor sbgmn dlm kasus RJ Lino tak relevan lagi

KPK menggunakan keterangan seorang auditor dari BPKP (konon mantan pegawai KPK) dalam menentukan kerugian negara. Canggih sekali seorang auditor tersebut mengalahkan temuan dua lembaga auditor resmi. Personal mengalahkan lembaga.

Agak lucu jika kita melihat kronologi proyek EKTP dimana BPKP terlibat secara intens untuk mengawasi proyek. Maka pantas jika temuan kelembagaan BPKP tdk ada masalah dalam kasus E KTP krn BPKP termasuk yg bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.



Mendagri Gamawan Fauzi saat itu terkenal sebagai seorang yg keras dan presisi dalam bekerja. Tiap langkah dalam pengerjaan proyek E KTP diaudit oleh BPKP. Dan semua audit BPKP lah yg menjadi dasar proyek dilanjutkan tahap demi tahapnya.

Gamawan adalah champion anti korupsi dari daerah: dipilih menjadi menteri setelah sukses memimpin daerahnya di Sumatera Barat. Seorang datuk yang dihormati dan dicintai rakyatnya.

Tapi sekarang, KPK akan memakai Nazaruddin untuk meyakinkan publik (selanjutnya hakim) bahwa Gamawan bersekongkol untuk merampok 2,3 T. Ini kelakuan biasa penyidik KPK. Pakai publik untuk menekan hakim.

Rakyat Indonesia pasti ingin tahu kasus2 ini secara terbuka. Mari kita dorong penyelidikan terbuka. Di pelindo 2 dan di EKTP agar semua jadi terang benderang.

Agar keadilan menjadi milik semua orang dan segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tercapai secara sempurna.

BAGIAN KEDUA PULUH SATU **SEPERTI RUANG KACA YANG TRANSPARAN**



“ Lembaga negara mesti terbuka, tidak boleh ada yang menutup diri. Semakin besar kekuasaan dan uang yang dikelola, lembaga itu harus semakin terbuka dan transparan. ”



I. PANSUS ANGKET KPK, TRADISIKAN KETERBUKAAN

Akan banyak yang mengejutkan dalam pemeriksaan Angket KPK yang rakyat wajib tahu...lihat saja nanti.

Hak Angket adalah kewenangan konstitusional untuk memeriksa jalannya penggunaan uang dan kekuasaan..

Tidak ada ruginya bagi rakyat dalam penggunaan Hak Angket karena akhirnya ini untuk melayani rakyat agar tahu..

Hak Angket hanyalah pisau bedah... untuk mengurai sesuatu yang sering tidak nampak oleh kasat mata.. rakyat pasti bahagia..

Bagi rakyat,
Pertunjukan pemeriksaan oleh DPR seharusnya pemandangan rutin. Karena semua akan bermuara pada kebenaran..

Rakyat perlu tahu apa yang terjadi.

Rakyat perlu tahu penggunaan uang dan kekuasaan dalam lembaga negara.

Tugas lembaga legislatif di manapun adalah menyajikan data informasi yang terbuka kepada pembayar pajak... kepada rakyat.

Karena itulah nanti rapat-rapat Angket KPK akan selalu terbuka agar publik mengetahui apa yang terjadi... transparan..

Rakyat dipersilahkan datang menonton di ruang yang ada agar tidak ada keraguan.. saksikan langsung atau siaran langsung..

Yang datang dengan maksud mau bikin *streaming* silahkan.. Rakyat wajib tahu apa yang terjadi.. lembaga negara wajib transparan..

Dengan itikad terbuka seperti itu kenapa tetap ada yang tidak setuju DPR menggunakan Hak Angket terhadap KPK ?

Saya sendiri menganggap karena mayoritas belum paham manfaat keterbukaan penggunaan Hak Angket itu..



Saya yakin banyak yang sudah berubah dan justru penasaran ingin menonton.. dengan penuh tanya “ada apa sebenarnya?”

Tetapi memang ada kelompok kecil yang sangat takut dengan Angket KPK karena akan banyak yang jadi terbuka..

Ada sekelompok orang yang ingin mempertahankan agar gerakan anti korupsi menjadi tertutup dan eksklusif..

Mereka sepertinya ingin mempertahankan agar ini tetap hanya menjadi kesibukan KPK dan LSM pendukungnya..

15 tahun sudah mereka menguasai lapangan permainan pemberantasan korupsi... permainan ini sepertinya ingin dikuasai..

Mereka sudah berhasil melumpuhkan semua lembaga.. sehingga kredibilitas hanya menjadi milik segelintir orang..

Tentu kecurigaan itu harus objektif karena itu tidak ada yang lebih baik kecuali terbuka saja..

Tidak ada yang perlu ditakutkan..
Seperti semboyan KPK selama ini:
Berani Jujur Hebat
Bersih Kok Risih

Ini semua bagi kebaikan rakyat dan bangsa Indonesia..
Mari tradisikan keterbukaan.. jangan takut..

II. YANG TIDAK MAU TERBUKA PASTI PUNYA AGENDA RAHASIA

Korupsi Bank Century aman berkelana...6,7 Trilyun ada di mana?

Cek kosong kepada KPK jangan lagi diberikan... sebab KPK pun bisa jadi tempat para pelindung korupsi...

Bukti-bukti saya akan saya serahkan ke Pansus Angket agar diverifikasi secara seksama...

Banyak penghilangan alat bukti... tepatnya penyerobotan alat bukti... ada juga skandal aset sita...

Tonton aja, pasti rakyat senang dan bahagia...



Yang tidak mau terbuka pasti punya agenda rahasia...

Jangan mau percaya ada lembaga yang hebat sendiri...
bohong.. kita memang mudah ditipu... lembaga negara
sama aja...

Yang menjadikan KPK sebagai *holycow* atau
memitoskannya punya agenda di belakangnya..

Ada yang cari hidup, ada yang cari perlindungan.. ada
yang cari popularitas dan ada yang cari nama... karena
mau ikut kontes...

Ada partai baru pendukung pejabat calon tersangka
korupsi.. maka dia cari kontak ke dalam KPK untuk saling
bantu...

KPK hari-hari ini lagi jual murah...
Siapa aja yang datang mendukung pasti akan diterima..
termasuk antek reklamasi...

Kita jangan mau lagi dibohongi...
Ini aksi menutup kebenaran..
Pengalihan dan pembodohan dari isu sebenarnya...

Waktu Prof Rudi Rubiandini, alm Sutan Batugana dan Jero Wacik ditangkap gara-gara uang THR lebaran... KPK bilang pintu masuk Mafia Migas..

Ternyata bohong... ini hanya soal dana operasional menteri... ratusan juta...

Waktu Suryadarma Ali ditangkap bilangnya pintu masuk Mafia Haji....Ternyata dana operasional menteri lagi..

Tapi memang kita senang dibohongi...
Mungkin ada semacam kebahagiaan kalau dibohongi...

Pansus Angket KPK ini akan membuka mata kita sebagai sebuah bangsa.. setelah 15 tahun UU ini lahir..

Sebab banyak orang yang terpukau dengan sulap dan akrobat... tapi hasilnya hanya kegembiraan sesaat...

Sulap dan akrobat tidak menyelesaikan masalah.. ia adanya memberikan hiburan dan kegembiraan..

Sementara negara bukan rumah sulap bukan pula akrobat atau klub sirkus... negara bukan pelawak.. negara punya tugas berat..



Negara bekerja memakai dana rakyat yang terbatas...
setiap tindakan menggunakan uang dan kewenangan
harus bertanggungjawab..

Jangan sampai pemberantasan korupsi tidak
dipertanggungjawabkan padahal uang terpakai sudah
trilyunan..

Saya sendiri punya kecurigaan bahwa sebagian lembaga
negara terutama yang *ad hoc* tidak mau masalah selesai..

Supaya tetap relevan dan supaya tetap ada kegiatan,
pakai APBN.. soal korupsi saya curiga... karena polanya
mulai nampak..

Semua ini bisa terang kalau dibuka...

Kasus-kasus yang ada ini seperti hanya *dagelan*.. gak
selesai dan tak ada ujung pangkal..

Kasus dianggap ada kalau ada yang tertangkap tangan...
lalu hilang tidak jelas tujuan pemberantasan korupsinya..

Sensasi didahulukan daripada azas kemanfaatan lain
yang ada dalam UU...

Saya lagi mempelajari kasus e-KTP... saya mulai mencium ini kasus sama saja.. lebih banyak unsur fiksi daripada kebenaran..

Dikisahkan...(hehe)

Ada pembagian uang sebanyak 2,3 T atau lebih dari 50% dari nilai proyek.. bancakan anggota DPR..

Bagaimana bisa sebuah proyek yang dirampok lebih dari 50% di depan lalu bisa selesai? Dan e-KTP relatif sudah selesai.

Lalu uang itu mana?

Siapa yang makan?

Emang gampang makan uang 2,3 Trilyun...?

Ini semua fiksi yang kita dipaksa terima..

Sampai sekarang yang makan uang *gak* jelas.. sementara proyek sudah selesai.. alhamdulillah..

Jadi KPK mengembangkan fiksi dari seorang yang kalah tender... yang pernah *denger-denger* ada bagi-bagi... ini yang sampai kemarin masih jadi *Headline* koran..



Koran dari kelompok tertentu seperti liurnya menetes kalau dengar ada berita bagi-bagi uang dari ruang sidang...

Dan KPK mengirimnya ke ruang sidang... tanpa verifikasi... atau dengan tekanan supaya seseorang menyebut nama seseorang...

Sehingga bangsa menuai keributan...
Tapi hasilnya tidak ada...

III. NASEHAT PADA PIMPINAN KPK

Polling kemarin 84% netizen minta kpk diawasi...

<https://t.co/SYYVb22hze>



Saya seperti netizen setuju lebih baik presiden yang pimpin pemberantasan korupsi.. <https://t.co/qo1qN1jgBj>



Karena mayoritas rakyat tahu bahwa KPK tidak dipilih rakyat sehingga mandatnya tidak kuat... <https://t.co/ZzCSL7XcdB>





Nasehat saya pada pimpinan KPK:

1. Hormatilah hukum karena korupsi hilang bukan oleh represi tapi tegaknya hukum.
2. KPK boleh punya UU sendiri yang superior tetapi konstitusi negara lebih tinggi. Jangan mau menang sendiri.
3. Hormatilah lembaga inti dalam negara. Eksekutif, legislatif dan yudikatif, adalah cabang-cabang utama pemeritahan.
4. Jangan karena KPK sudah tahu banyak keadaan lembaga lain melalui alat sadap lalu mengurangi hormat kepada lembaga.
5. DPR adalah kamar terbesar dalam cabang kekuasaan legislatif. Haknya juga besar diatur dalam UUD1945.
6. DPR lahir sehari setelah proklamasi bahkan sebelumnya sejak zaman *Volksraad* Belanda. Hak angket lahir sejak 1950an.
7. Negara kita punya sistem. Konstitusi mengatur cara

kerja lembaga negara. Mustahil KPK lebih paham soal kerja DPR yang lebih tua.

8. Ibarat bayi yang lahir. Begitu bisa bicara langsung kasih perintah kepada orang tua: itu boleh, ini tidak boleh.

9. Datanglah ke DPR dan jawablah pertanyaan yang ada. Jangan takut. DPR bukan malaikat penjaga neraka.

10. Selama ini KPK telah memakai semboyan BERANI JUJUR HEBAT. Maka jujurilah, katakan apa adanya. Ini demi kebaikan KPK.

11. Jangan takut membuka apa yang tertutup sebab dasarnya kita semua lemah, kalau tertutup banyak yang busuk dan pengap.

12. Ini saatnya KPK mulai membuka jendela dan menunjukkan kepada bangsa Indonesia isi rumah apa adanya.

13. Hadapi sendiri. *Gak* usah galang LSM atau pakar ini itu. KPK harus merdeka. Jangan banyak berhutang jasa kepada siapapun.



14. Datanglah ke Senayan. Siapkan diri lahir batin. Sampaikan apa adanya: KALAU BERSIH KENAPA RISIH?
15. Barangkali setelah 15 tahun UU 30/2002 inilah saatnya kita berbicara apa adanya kepada bangsa kita.
16. Korupsi adalah masalah bersama bukan masalah KPK. Jangan ambil pribadi masalah bangsa.
17. Bangsa Indonesia telah dikaruniai Tuhan kekuatan untuk mengusir penjajah. *Masak* usir korupsi tidak bisa?
18. Apa yang dianggap mustahil oleh KPK mari kita hadapi bersama. Kita semua bersaudara. Kita semua cinta Indonesia.
19. Saya punya ide. Bisa berantas korupsi lebih cepat. Ada caranya. Kenapa KPK tidak mau dengar? Ayo kita bicara. Sesama anak bangsa.
20. Semoga di bulan suci ini KPK membuka hati. Demi masa depan negeri. Demi ibu pertiwi.
21. Dan kepada para pemuji atau fans atau mereka yang cari hidup dari isu korupsi berhentilah memuji KPK.

22. Sebetulnya memuji tidak masalah tetapi jangan sambil memusuhi lembaga lain dan memfitnah bangsa sendiri.
23. Para pendukung KPK bahkan dipersilahkan datang ke Pansus untuk menyatakan aspirasi. *Feel free* saja.
24. Menasehati KPK untuk membangkang adalah fatal dan merusak sistem tata negara kita. Jangan begitu.
25. Terima kasih presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk berdiri menjadi penjaga konstitusi. Mari bersatu demi negeri.. !

IV. KPK, SUPERMAN DAN MITOS ORANG PACARAN

Lebih baik kita percayakan. Bahwa jika lembaga negara dibedah akan banyak peluang perbaikan kita lakukan..

Jangan percaya lagi doktrin bahwa hanya ada satu yang bisa diandalkan.. itu mitos orang pacaran.. cara lelaki merayu...



Nah ini negara,
Jangan ada mitos superman..
Sekarang itu mitos pun sudah pindah ke Avenger..
Superman gak bisa sendiri lagi..

Mitos *aja* begitu..
Atau dongeng atau fiksi..
Bagaimana negara bisa percaya hanya kepada 1 lembaga?
Waspadalah..

Itu tipu daya..
Semuanya bohong..
Tapi jangan lupa bahwa kebohongan yang diulang-ulang
bisa jadi kebenaran..

Tugas kita dalam negara demokrasi adalah kritis... Jangan
mau dijebak propaganda... lebih baik kita suruh lembaga
negara terbuka...

Tidak boleh ada yang menutup diri..
Semakin besar kuasa dan uang... semakin harus terbuka
dan transparan...

Kegagalan bisa dianggap sukses..

Masalah bisa nampak sebagai solusi...

Aksi kelabakan bisa nampak sebagai produktif...

Mari kita mulai..

Tanpa pretensi..

Jangan takut dengan keterbukaan..

Jangan takut dengan Transparansi..



BAGIAN KEDUA PULUH DUA **MEMBURU RECEHAN, TRILYUNAN TAK TAMPAK**



“

Perampokan uang negara melalui bank dan perampasan aset BUMN secara telanjang, sebuah kota dibangun nyaris tanpa selebar ijin, tak nampak sebagai kerugian.

”



I. KPK DAN OTT RECEHAN

Pada malam ketika kita bisa merenung... kita wajib memikirkan substansi... Negara adalah entitas rasional...

Dan saya senang karena istana tahu posisi untuk tidak terbawa oleh emosi pimpinan KPK yang sedang galau.

Sebab selalu begitu...

KPK minta tolong ke istana setelah semua usaha dilakukan.. sekarang dukungan publik tidak sebesar dulu...

Saya ingat kelakuan ini sudah berulang kali..

KPK bertindak sebagai partai politik..

Lobby sana lobby sini...

Di satu sisi KPK selalu menyebut diri *independent* (sebagaimana UU menyebutnya demikian). Tetapi KPK terlalu aktif penggalangan..

KPK aktif menerima orang yang akan memuji dan memberikan dukungan tetapi menolak kritik dan pengawasan DPR...

Ini yang membuat KPK nampak sebagai kekuatan politik dari sekedar penegak hukum..mental berpolitik ini bahkan turun ke penyidik dan pegawai.

Saya belum pernah mendengar di seluruh dunia ada lembaga penegak hukum punya serikat pegawai..

Seorang pegawai dihukum oleh pimpinan KPK lalu dilepas kembali karena didemo oleh serikat pegawai.. Ini hukum?

Seorang pimpinan KPK mengeluh karena disemprot oleh pegawai, “bapak orang baru di sini, saya sudah 10 tahun...”

Abraham Samad pernah mengeluh kepada saya bahwa dia disadap...pimpinan KPK seperti hanya embel-embel karena dosanya disandera..

Pimpinan KPK banyak yang *gak* paham tiba-tiba sudah ada penyadapan atau OTT...lalu siapa yang pimpin lembaga ini? Siapa yang tanggungjawab?

Ada banyak yang publik belum tahu soal KPK ini dan publik wajib tahu setiap kewenangan dan uang yang dipakai..



Ini saat memulai era baru di KPK setelah 15 tahun..
saatnya bersih-bersih..KPK itu sapu yang tidak boleh
kotor...

Sebab jika KPK kotor maka KPK tidak sedang
membersihkan republik ini tetapi sedang mengotorinya...

Saya hanya takut kepastian hukum hilang...dampaknya
kepada perekonomian..dampaknya pada perut rakyat...
jangan lupa!

KPK boleh gagah tangkap sana sini tapi kalau
ketidakpastian merajalela...negara ini berhenti...

Berani Jujur Hebat
Bersih Kok Risih
Jangan lagi
OTT Recehan

II. BPK SERGAP, KPK HEBOH

Pada saat ramai KPK menangkap jaksa OTT Recehan Rp
10 jt - BPK senyap temukan kerugian Rp 4,08 T dalam
kasus Pelindo II

Tepuk tangan tetap untuk KPK dan BPK dimaki karena
OTT Recehan juga yang Rp 40 juta auditornya

Mari kita bandingkan untuk mengukur nalar kita... apa
yang menjadi objek perbandingan...

OTT Recehan memakai alat sadap...
Audit BPK memakai keahlian auditor..

Sambil...ayo bandingkan..

Rp 10.000.000 OTT recehan Vs Rp 4.085.000.000.000
Audit BPK

10 juta hasil OTT recehan itu bukan uang negara...
kenapa heboh ?

4,08 trilyun hasil Audi BPK itu uang rakyat...
kenapa senyap ?



III. TRILYUNAN KASUS DI DEPAN MATA TAK TAMPAK, OTT RECEHAN DI SEBERANG LAUTAN TAMPAK

Setiap DPR akan membuat Pansus angket maka pasti sebuah skandal besar akan terungkap...

Itulah yang terjadi pada kasus Bank Century yang merupakan salah satu skandal perbankan yang sangat besar

Awalnya ini dianggap tidak perlu atau tidak penting, ditentang oleh banyak pihak termasuk partai penguasa..

Tapi alhamdulillah DPR menyepakati pembentukan Pansus Angket Century setelah melalui *voting* penolakan..

Pansus Angket Century terbentuk 4 Desember 2009 dan selesai 3 Maret 2010 dengan hasil yang mencengangkan.

Sebuah skandal mencuri uang rakyat dilakukan dengan canggih terungkap...ini bukan OTT Recehan menjelang Lebaran...

Demikian pula dengan skandal Pelindo II yang angketnya dibentuk dengan penolakan. Bahkan diremehkan...

Padahal,

Sejak awal Komisi 6 yang membawahi pengawasan terhadap kementerian BUMN telah curiga dengan gelagat perusahaan pelabuhan itu.

Awalnya adalah kontrak konsesi yang diberikan kepada *Hutchison Port Holding (HPH)* perusahaan Hongkong sampai tahun 2038..

Perpanjangan pengelolaan terminal Priok ini dianggap banyak pelanggaran... khususnya UU 17 2008 tentang pelayaran.

Silahkan ketik di google “pdf benang kusut PELINDO 2” majalah DPR pernah bikin laporan

Lalu apa yang terjadi sekarang..

Di tengah keraguan dengan bantuan BPK Pansus Angket Pelindo2 terbukti benar..

Kemarin secara mengagetkan BPK telah melaporkan hasil audit yang menemukan kerugian negara sebesar 4,08 Trilyun Rupiah.



Ketua Pansus ibu Rieke Diah Pitaloka bahkan menduga total kerugian sebesar 17 Trilyun setelah kasus Global Bond, dll.

Itulah hasil dari temuan dua Pansus angket DPR yang selalu mengungkap skandal...

Tapi sayangnya,

Dua skandal yang merupakan juga hasil audit resmi auditor resmi negara itu malah *mandeg* dan mungkin lenyap..

KPK sebagai lembaga negara yang dibuat dengan uang dan kewenangan yang besar malah terkesan tidak tertarik..

Buat KPK tas *kresek* berisi puluhan juta lebih menarik dan lebih penting... sementara trilyunan rupiah tidak jelas rimbanya..

Sekarang DPR berkesimpulan bahwa jangan-jangan di dalam KPK ada skandal juga...

Saya termasuk yang percaya bahwa KPK bisa menjadi skandal... karena itu Pansus Angket harus turun tangan kembali...

Seperti biasanya pasti ditolak. Tetapi DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus jalan terus.

Dengan niat ikhlas DPR akhirnya akan membuktikan bahwa kecurigaan awal sangat berdasar.

Rakyat harusnya santai dan tenang. Lihat saja rapat-rapat yang akan dibuat terbuka. Ini adalah tontonan yang menarik.

Semoga di bulan baik ini kita sebagai bangsa akan bangkit melawan pembodohan oleh kemunafikan.

Selamat itikaf dan selamat menyaksikan...

Dukung Angket KPK

Bongkar Skandal KPK

Angket Bongkar Skandal

IV. KPK MAU KEMANA?

Lihat pola ini siapa tahu dapat Hidayah:

Century Gate (T) stop.

Reklamasi Gate (T) stop.



Hambalang Gate (T) stop.....

162 Proyek Nazar (T) Stop

Pelindo 2 Gate (T) Stop

Sumber Waras (Ratusan M) stop...

Lalu.....

OTT Jaksa Bengkulu 10 (J) heboh..

OTT Hakim Bengkulu (J) heboh..

OTT Auditor BPK 40 (J) heboh..

OTT kades... dst..

Kesimpulan:

Kerugian negara Trilyunan Stop.

Kerugian Swasta Jutaan heboh..

KPK mau ke mana ?

*T = Trilyun

*J = Juta

V. DRAMA KORUPSI RECEHAN. KORUPSI MAJIKAN MILYARAN DIAMANKAN.

Kita tidak tahu uang besar, kita ini terbiasa miskin. Maka kita mudah ditipu angka-angka.

Perampokan uang negara melalui bank, berkali-kali dan perampasan aset BUMN telanjang.. tak nampak sebagai kerugian.

Mata kita telah dipicingkan dari yang benar oleh kebenaran baru yang dibuat seolah-olah.

Sebuah kota dibangun nyaris tanpa selebar ijin. Ratusan trilyun uang mengalir. Mengapa bisa? Tak adakah pelicin?

Pelicin pasti banyak, ratusan trilyun pasti bisa mengeluarkan puluhan trilyun untuk memudahkan jalan.

Tapi kesepakatan yang mereka buat, ini uang majikan mari kita amankan. Demikian kesepakatannya.

Ada puluhan pulau dibangun tanpa studi dan izin otoritas pusat. Pertengkaran terbuka terjadi.



Lalu insiden pelicin diungkap, seorang utusan bernama matahari ditangkap bersama pejabat. Tapi matahari pergi dan bebas.

Ini proyek ratusan trilyun maka orang2 harus dijaga kesuciannya. Ini wibawa pasar. Berhentilah kasus itu, kita masih melihat luka orang2 yg digusur dengan kejam. Pembangunan jalan lagi.

KPK seperti bekerja untuk kerajaan uang. Raja-raja dan Sultan jangan diganggu. Uang besar jangan dihukum.

Uang-uang kecil silahkan atur sebagai pertunjukan biar rakyat ada puas ada tontonan
Rakyat tetap harus tahu bahwa seolah uang mereka dijaga 24 jam melalui alat intip super canggih.

Tikus-tikus got di kelurahan, kabupaten dan kota dikerjai sampai titik darah penghabisan.

Uang dikumpulkan dari ucapan terima kasih dan pungutan...10 jt, 50 jt, dll.... Lumayan.

Alhamdulillah...

Korupsi BESAR gak ada lagi... ?

BAGIAN KEDUA PULUH TIGA
**KITA BUKAN
BANGSA MALING**



“ *Korupsi adalah kejahatan yang mudah diakhiri kecuali bagi mereka yang niatnya memperpanjang masalahnya.* ”



I. SURAT CINTA UNTUK ‘GURU BESAR KPK’

Ingin mengirim surat terbuka kepada Guru Besar KPK sebut saja demikian namanya.. sebagian mereka memakai Forum Rektor:

Para Guru Besar KPK yang terhormat,
Teriring salam hormat pada gelar kehormatan yang bapak-bapak dan ibu-ibu sandang...

Semua sarjana yang mengerti arti gelar kehormatan professor tentu menghormati... betapa gelar itu mulia...

Kita pasti punya standar pengertian yang sama jika mendengar gelar professor... meski belakangan bermakna lebih fungsional...

Saking cinta pada gelar kehormatan itu... saya pernah marah... di sini di negara Kita... ketika puluhan profesor.. kriminalisasi korupsi..

Sungguh akal sehat saya tidak bisa menerima jika para guru besar itu akhirnya disebut koruptor...

Dan saya mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi... para guru besar itu tidak salah... yang salah adalah penegakan hukum yang kacau..

Sudilah para Guru Besar KPK membaca artikel yang masih ada di website KPK ini..

<https://t.co/3Vo6bCpHo5>

10 Profesor dan 200 D...
<https://www.kpk.go.id> TWEET

Framework Ltd

SALDO
 0/0/00
 0/0/00 (Language T)

KPK | Indonesia Utama | Tentang KPK | Berita | Publikasi | Layanan Publik | Pengisian Survei dan Jasa | Menu | 0/0/00

Indonesia Utama | Berita | Berita | Berita | Berita

Berita

10 Profesor dan 200 Doktor Terjebak Korupsi

KPK_RI on Twitter

Asesmen Perencanaan dan Pengawasan
 atau anggaran yang dilakukan
 oleh KPK RI dan 200 DOKTOR
 dan 100 PROFESOR
 @KPK_RI @KPK_RI @KPK_RI

Di lingkungan ini
 @KPK_RI @KPK_RI @KPK_RI
 @KPK_RI @KPK_RI @KPK_RI

2019 ini, kita bisa lihat bahwa ada
 banyak laporan yang masuk
 dan banyak laporan yang
 diproses dan
 @KPK_RI @KPK_RI @KPK_RI

YOGYAKARTA- Praktik korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan. Tindak pidana itu telah menjadi bahaya laten yang dapat menjerat siapa pun, tanpa memandang tingkat pendidikan. Mereka yang menyandang gelar akademik tinggipun bisa terjebak dan akhirnya mendekam di penjara.

"Ada 10 profesor, 200 doktor yang terjebak kasus korupsi,"sebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dalam talkshow bersama tokoh budaya Kotagede di Graha Sabha Pramana Un-iversitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, kemarin.

Busyro mengungkapkan, kenyataan tersebut menggambarkan cengkeraman korupsi di Tanah Air sangatkuat. Korupsi telah menjalar hingga tatanan keluarga. Kasus korupsi di Banten misalnya telah menyeret tersangka yang masih memiliki hubungan darah. Begitu juga di Kota Palembang dan Karawang yang melibatkan suami-istri. "Korupsi dapat menjangkiti semua orang, bahkan masyarakat paling terdidik sekalipun," kata Busyro.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP mengakui perilaku koruptif tidak mengenal latar belakang. Itu terbukti dari sejumlah kasus yang ditangani KPK. belaku



Betapa kita tidak lagi punya akal untuk membaca gambar besar sehingga para guru besar itu tega dikriminalisasi...

Wahai Guru Besar KPK bantulah bangsa ini menjawab persoalannya dengan akal sehat... jangan ikut-ikutan menggalang emosi...

Di antara puluhan guru besar yang dikriminalisasi itu adalah ahli agama dan ahli hukum... masuk akalkah?

Bagaimana seorang mendapat gelar doktor dan profesor? Bagaimana bisa dengan sengaja memiliki niat jahat korupsi? *Mensrea*?

Di negara mana ada gejala profesor mencuri uang negara? Betapa jahatnya nalar jahat penegak hukum itu...

Itu sebabnya saya bingung dengan yang menyebut diri Guru Besar KPK yang mendukung buta KPK ini tanpa data..

Dukungan itu memang sukses selama ini.. suatu hari agenda rapat konsultasi pimpinan DPR dan Presiden RI berubah..

Karena adanya penolakan para Guru Besar KPK ini agar UU KPK tidak direvisi. Jadilah KPK lembaga suci..

Sampai sekarang ingin ubah UU KPK dan kritik kepadanya dianggap penistaan.. KPK seperti berhala bagi Guru Besar KPK

Di beberapa kampus yang didominasi oleh Guru Besar KPK ini diskusi tentang UU KPK dilarang.. tragis sekali..

Para guru besar yang seharusnya merayakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar malah menjadi penganut kultus..

Begitu kita bicara KPK maka semua kebebasan kita hentikan.. dan nalar kita persembahkan ke bawah duli yang maha mulia KPK..

Kampus tidak lagi menjadi tempat alternatif berpikir... jangankan menyelenggarakan debat.. soal KPK tidak boleh lagi diskusi..

Para Guru Besar KPK yth,
Apakah ini pertanda kematian kampus kita? Apakah ini awal runtuhnya kebebasan berpikir?



Sebab di kampus sekarang berkembang larangan untuk mengundang beberapa nara sumber dan melarang diskusi beberapa tema..

Bukankah ini yang seharusnya menjadi perhatian Guru Besar KPK ? Karena pikiran adalah mahkota dan mutiara kampus kita..

Bukankah menghentikan pertanyaan artinya berhentilah pikiran dan reduplah mutiara dan hilanglah cahaya?

Kenapa para Guru Besar KPK tidak mensponsori suatu studi yang lebih luas..? Kenapa lebih suka politik dari pikiran?

Yang lebih menyedihkan dari mereka yang menyebut diri pengajar tata negara... mereka berkumpul beberapa orang... lalu klaim semua orang.

Ada banyak ahli dan pengajar tata negara seperti prof Yusril Ihza Mahendra yang mereka *gak* berani kontak..

Mereka teridentifikasi kelompok yang anti dengan perbedaan pendapat... sejenis juga dengan Guru Besar KPK yang anti diskusi..

Kalau ditelisik jauh mereka saya sebut kontraktor KPK atau negara donor yang dukung KPK... kenapa jadinya begini? Guru Besar KPK

Ada apa dengan kalian wahai Guru Besar KPK kenapa sikap kritis kalian hilang? Kenapa kalian anti perubahan?

Di antara Guru Besar KPK itu ada juga yang disebut Pakar Manajemen Perubahan... tapi sangat terusik dengan perbedaan pendapat..

Kalau apa yang akan menjadi objek studi jika memahami perspektif dalam mengelola perubahan saja tidak paham...'

Para Guru Besar KPK yth,
Karena itu ijinakan saya berpendapat bahwa Ini semua bukan organisasi pikiran..

Apa yang kalian lakukan adalah bukan dialog yang merupakan tradisi ilmu pengetahuan tapi emosi atau politik penggalangan..

Sebagai mantan mahasiswa saya menyangkan ketidaksanggupan Guru Besar KPK memahami keadaan...



Sekarang ijin kan saya memberikan pengantar kecil atas situasi yang oleh para Guru Besar KPK ini sulit dipahami..

Pertama,
Tentang Transisi kita. Kita baru saja 19 tahun menikmati demokrasi. Dan kita masih memilikinya.

Bahwa kampus tidak sanggup memanfaatkan secara baik adalah salah kampus..Tapi mari kita nikmati...

Karena kita teringat masa-masa gelap ketika kebebasan mimbar kita dirampas.. dan kampus jadi pabrik manusia tanpa akal..

Sekarang tidak ada lagi yang boleh merampas kebebasan kita..tiran telah tumbang... apakah Guru Besar KPK sudah lupa?

Maka kedua,
Semua eksperimen demokrasi kita ini paling mahal dan menjadi segalanya bagi kita... sikap kritis kita ini mahal harganya..

Maka, biarlah kita mulai mendiskusikan KPK sebab ini lembaga biasa..lembaga tambahan yang tidak ada konstitusi..

Jika para Guru Besar KPK punya pandangan sampaikanlah dalam diskusi... ungkapkan dengan data... kita beradu data..

Bukankah ini akan lebih sehat?
Kenapa ikut-ikutan mengembangkan fiksi yang tidak ada dalam kenyataan?

Guru Besar KPK Yth,
Sekian dulu surat saya saya sampaikan sebagai keprihatinan...dan melalui surat ini saya sampaikan hormat..

Tidak ada maksud saya menghina.. meski saya tahu di beberapa kampus itu dikritik seperti dihina..

Feodalisme memang masih merajalela di kampus kita sehingga ruang inilah mungkin yang digunakan Guru Besar KPK..

Kepada para guru besar lain yang tidak ikut saya sampaikan simpati... Tapi jangan berhenti berpikir...

Mari temukan jalan ilmu..
Ajarilah kami pengetahuan..
Jangan malah kalian belajar politik...



Isilah ruang publik dengan hikmah dan keberanian...
bukan dengan kepengecutan... seperti menggalang
dukungan politik kepada lembaga negara..

Semoga terbuka jalan baik...
Dan diskusi.. semoga mimbar kampus kita bersemi..
dalam buntu pikiran murni..

Kita pasti bisa...
Saya percaya INDONESIA...
Assalamualaikum wr wb.

II. KITA TAK TERIMA BANGSA KITA BUKAN BANGSA MALING

Pagi ini kita dengar lagi KPK RI melakukan OTT di
Kementerian Perhubungan.

Baru Senin lalu ada OTT KPK juga di PN Jakarta Selatan
persis setelah KPK ganti rugi Hakim Syarifuddin.

Setiap OTT KPK terjadi, wartawan segera mengontak
Humas atau Pimpinan KPK. Umumnya mereka belum
tahu.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa OTT KPK adalah aktivitas penyidik secara *independent*.

Tidak ada yang tahu kapan dimulainya kegiatan yang berujung OTT KPK bahkan tidak oleh pimpinan KPK.

Dalam konferensi pers, humas KPK selalu mengatakan, “dilakukan setelah ada laporan masyarakat.”

Seolah menjadi sah, bahwa karena laporan masyarakat lalu sebuah pengintaian dan penyadapan dilakukan.

Maka, Jadilah isu korupsi pertama-tama pindah kepada soal uang *cash*. Jauh dari definisi awal korupsi.

Tapi pertunjukan uang *cash* pasti lebih menarik dari atraksi apapun; mendapat perhatian masyarakat dan sukses.

Sukses diukur seperti berburu di kebun binatang atau mancing di empang Ikan. Makin banyak makin sukses.

KPK akhirnya sibuk menggunakan alat sadap, mengintip dan memantau percakapan orang. Dianggap sah dan benar.



Padahal OTT adalah istilah yang janggal dan juga tidak ada dalam hukum formal atau materil.

Kita hanya mendengar berita OTT KPK, mulai dari pejabat, eksekutif, legislatif, yudikatif, swasta bahkan sampai kepala desa.

Kebenaran konsepsi OTT KPK tidak ada. O dan TT tidak berjodoh, nanti kita urai agar dunia tidak nampak kelam.

Berita OTT ini tidak hanya dikonsumsi masyarakat kota, tapi masuk sampai ke plosok desa, di atas gunung, di bawah lembah

Menjadi biasa tiap ada pejabat yang di-OTT KPK, sumpah serapah pada pejabat negara membuat masyarakat semakin antipati.

Kepercayaan pada pejabat negara telah sampai pada titik nadir, lalu kita mengutuk bangsa sendiri sebagai bangsa maling

Mari kita berfikir dengan kepala jernih, apakah OTT ini merupakan jalan penyelesaian masalah korupsi?

Bangsa kita lahir dengan perilaku luhur termasuk anti mencuri dan korupsi. Jelas terpatriti dalam agama dan budaya kita.

Maka apakah benar bangsa ini adalah bangsa maling dengan fakta cerita yang dibuat oleh OTT KPK tiap hari itu?

Kita butuh pikiran tenang dan kepala dingin dalam melihat masalah korupsi. Kita perlu otak bukan otot.

KPK memakai hukum perang penuh nafsu tapi tak akan menyelesaikan masalah. Ini demokrasi. Tangan besi tak lagi bisa.

Kembali ke istilah OTT KPK, ada *contradictio in terminis* dalam istilah OTT yang paling marak menjadi bahasa komunikasi KPK ke publik.

Ini penting kita perjelas karena komunikasi berbasis salah paham sulitnya bukan main, apalagi basisnya paham yang salah.

Istilah OTT mengandung ambiguitas makna yang merusak tata frasa (*frasiologi*) bahasa Indonesia.



Dalam kaidah bahasa Indonesia, membuat frase itu tidak boleh dengan menggabungkan dua kata yang memiliki arti yang kontradiktif.

Kalimat dan atau frase harus disusun untuk merujuk pada satu makna yang jelas dan terang.

Mari kita analisis struktur dari frase OTT. Karena istilah ini bukan istilah hukum yang benar.

Pertama kata Operasi dalam KBBI diartikan sebagai pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.

Itu artinya operasi adalah sebuah tindakan yang didahului oleh serangkaian kegiatan pendahuluan bukan mendadak.

Sementara arti Tertangkap Tangan dalam KBBI adalah “Kedapatan” waktu melakukan kejahatan atau perbuatan.

Berdasar kamus Hukum J.C.T, Tertangkap tangan sama dengan “*heterdaad*” yaitu Kedapatan tengah berbuat; tertangkap basah;

Kedapatan atau ketahuan pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang

Istilah KBBI ini misalnya merujuk pada maling jemuran, yang sering kedapatan dan lalu diteriaki orang.

Lalu bgmn pengertian tangkap tangan dalam KUHAP sebagai peraturan hukum formil yang berlaku.

Pasal 1 butir 19 KUHAP: Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.

...atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka Operasi dan Tangkap Tangan itu *contradictio in terminis*.

Karena Operasi harus didahului oleh serangkaian kegiatan tapi tangkap tangan adalah sebuah tindakan seketika

Maka pasal 18 ayat 2 KUHAP menegaskan bahwa “dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,...”

Maka lucu jika ada penyidik yang membawa surat tugas apalagi surat penangkapan atas sebuah kasus



Bagaimana dia tahu bahwa di situ akan terjadi kejahatan?
Tangkap tangan tak mengenal operasi pendahuluan
apalagi sempat buat surat.

Jika ada surat tugas dan surat penangkapan, maka
namanya bukan tangkap tangan tapi penangkapan biasa

Jadi penggunaan istilah OTT KPK harus dihentikan
karena tidak hanya mengacaukan kaidah Bahasa
Indonesia tetapi juga Hukum Acara.

Hukum Acara dikacaukan oleh istilah OTT KPK karena
Tertangkap Tangan dan Penangkapan adalah dua istilah
yang sangat berbeda.

Kekacauan hukumnya adalah karena Tertangkap Tangan
tidak didahului oleh serangkaian kegiatan pendahuluan.

Sementara penangkapan dalam KUHAP harus melalui
serangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan dan harus
disertai surat tugas.

Dan dalam hal penangkapan penyidik tidak punya
kewenangan menangkap tanpa izin penyidik

OTT KPK di BPK beberapa saat yang lalu tidak ada polisinya. Mereka yang datang motifnya menjebak.

Pemberi suap dan pegawai KPK kumpul di *lobby* dan naik *lift* yang sama lalu duduk di ruang tunggu yang sama

Karena kalau bukan pengebakan maka seluruh pegawai KPK yang datang itu sebetulnya melakukan pidana *omission*. Alias Pembiaran.

Ini mirip kelakuan polisi lalu lintas di lampu merah. Sembunyi di balik semak lalu “Hap! Kamu ditangkap!”

Jadi ada kekacauan makna, antara kata operasi dengan tertangkap tangan, juga tertangkap tangan dengan penangkapan

Kita tutup pembahasan soal OTT KPK sebab sebetulnya akar semuanya adalah penyadapan.

Selanjutnya nanti kita bahas soal penyadapan dan *Lawful Taping* . Terima kasih.



III. MANDRA DAN KORUPSI

Mandra dan korupsi tidak nampak sebagai kata yang dapat dihubungkan..

Korupsi nampak sebagai sesuatu yang rumit dan canggih...

Sementara Mandra mewakili sesuatu yang sederhana, kocak dan bahkan *ndeso*..

Korupsi membuat kita marah sementara Mandra membuat kita tertawa...

Korupsi adalah kejahatan kerah putih padahal Mandra masih biru..

Mungkin kita punya masalah dalam kemampuan membuat kategorisasi..

Tapi kearifan para penegak hukum pada akhirnya kita nanti...

Kita percaya proses hukum tapi penghukuman bukan ajang kompetisi..

Para penyelidik dan penuntut juga hakim tidak boleh segan dan ragu membebaskan jika tidak meyakinkan..

Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tak bersalah..

Filsafat itu muncul karena cinta..

Tidak boleh ada benci dalam hukum..

Jadi ini bukan soal Mandra..

Ini soal arah dan orientasi hukum..

IV. MITOS KORUPSI

Korupsi adalah kejahatan yang mudah diakhiri kecuali bagi mereka yang niatnya memperpanjang masalahnya.

Korupsi adalah penyakit negara totaliter bukan penyakit negara demokrasi. Kecuali mereka yang memutarbalikkannya.



Korupsi adalah penyakit dalam negara gelap. Seperti maling beroperasi malam hari. Jika terang maling perlahan hilang.

Begitu suatu negara terbuka, sama dengan datangnya pagi dan siang. Hantu dan iblis hilang.

Waspadalah dengan penyakit negara. Tidak mau masalah hilang supaya tetap bisa kerja *ngabisin* uang negara.

Waktu kita masuk demokrasi 1998 niat kita jelas agar korupsi hilang. Logikanya demokrasi datang korupsi hilang.

Tema terbesar perang angkatan anti rezim otoriter ORBA adalah melawan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Mustahil kita menumbangkan orde baru dengan hasil KKN merajalela. Ini pemutarbalikan fakta.

Teori yang benar adalah semakin terbuka tentu KKN semakin hilang. Semakin tertutup KKN semakin banyak.

Seperti sebuah ruangan, coba tutup makin lama di dalamnya akan banyak penyakit; ada tikus, kecoak dan pengap.

Tapi coba mulai buka ruangan itu; cahaya masuk, udara segar masuk, penyakit hilang, tikus kabur dan kecoa mati.

Itulah keterbukaan demokrasi kita yang telah membuka ruang politik kita menjadi sehat dan anti KKN.

Dulu, KKN merajalela dan pesta pora korupsi menghabiskan uang negara. Bagi-bagi harta negara gila-gilaan dan semua gak berani bicara.

Zaman itu, rezim berkuasa mutlak, negara tertutup dan tidak ada yang berani membuka mulut. Semua dibungkam suasana mencekam.

Zaman itu, Pemerintah tidak punya pengkritik dan semua yang mengkritik Pemerintah hidupnya bisa susah.

Pernah ada kritik oleh Prof Soemitro bahwa 30% APBN bocor. Kritik itu tahun 1993 bikin tempat. Tapi beliau ekonom besar.

Tapi zaman ini, isu kebocoran tidak ada lagi dan tidak bikin gempar. Karena semuanya terbuka untuk diukur.



Sekarang ini semua orang bisa melakukan kritik kepada Pemerintah dan banyak cara melakukannya.

Demokrasi telah memaksa Pemerintah transparan dan semua pejabat negara seperti hidup dalam akuarium.

Sejak terbukanya demokrasi kita telah melakukan serangkaian reformasi untuk mempersempit ruang gerak KKN.

Dalam hal APBN telah lebih transparan lagi, dulu DPR tidak membahas APBN secara terbuka. Ikut saja pidato Presiden.

Uang masuk dan uang keluar *gak* ada yang jaga dan kebocoran tidak menjadi perhatian utama.

DPR dulu disindir oleh Iwan Fals lewat lagu “Wakil Rakyat” yang terkenal. Datang, Duduk, Diam, Dengar dan Duit. 5D.

Sekarang DPR RI galak, BPK RI akurat, lembaga-lembaga sangat profesional dan keuangan negara selamat.

Ibarat pipa berisi harta negara, pipanya tidak bocor.

Pipanya telah kita tutup secara baik. Dari hulu ke hilir.

Di hulu, Kementerian Keuangan kita dipimpin oleh menteri yang kredibel dan mengawasi sektor pemasukan.

Sektor pajak, cukai dan pemasukan negara bukan pajak lainnya mereformasi diri terus menerus.

Menteri-menteri teknis yang melakukan belanja juga dilakukan secara terbuka dan transparan.

Bahkan kemarin untuk pertama kali Pemerintah Pak Joko Widod mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI .

Jadi kita bisa bilang, demokrasi kita berhasil dan uang negara selamat dalam pipa yang tebal dan kuat.

Kebocoran yang diukur dengan metode ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indonesia selalu membaik.

Dengan itu pipa keuangan negara semakin berani kita salurkan ke 75.000 desa di seluruh negeri.



Dengan UU No. 6/2014 tentang desa kita telah menggerakkan seluruh bangsa ini. Revolusi terjadi!

Pipa keuangan telah dinikmati oleh seluruh anak bangsa bukan *kayak* dulu, pipa berhenti di Propinsi.

Demokrasi adalah berkah bagi bangsa ini. Ini adalah cahaya yang membuat Indonesia maju.

Maka dengan itu, saya berani mengatakan Indonesia sebenarnya sudah bebas korupsi.

Logika ini yang diputar oleh pejuang anti korupsi antek negara asing. Pengkhianat bangsa!

Mereka mengukur korupsi dari persepsi. Dan persepsi itu mereka yang buat melalui keributan tiap hari.

Dulu LSM-LSM ini dibayar oleh kekuatan asing untuk bikin ribut. Sekarang yang bayar APBN kita sendiri.

Negara-negara donornya mulai bangkrut tapi mereka tetap harus cari makan akhirnya ambil uang dari dalam APBN kita.

Jadi isu Anti Korupsi adalah Mitos Korupsi yang mereka buat secara diametral dengan prestasi bangsa kita.

Demokrasi kita sukses tetapi mereka bilang kita gagal. Keuangan negara kita aman tapi mereka bilang banyak pencuri.

Maka, konspirasi berikutnya adalah membuat definisi yang ngawur. Korupsi tidak lagi terkait keuangan negara.

Mereka tidak suka dengan hasil audit tetapi sangat suka dengan Ngintip yang tidak melibatkan uang negara.

Mereka frustrasi karena pipa uang negara tidak ada lubang lagi. Mereka frustrasi karena uang negara mengalir jauh.

Akhirnya mereka tangkap yang pegang pipa, atau mencium bau-bau sedap atau jilat pipa dari luar.

Dan mereka terus kampanye di luar negeri bahwa Indonesia penuh korupsi. Di bawah Joko Widodo masih banyak korupsi.



DPR, DPD, MK, MA, KY, BPK, JA, POLRI, TNI, Pemda, Kepala Desa, dll semua sudah disebut banyak korupsi.

Hampir semua lembaga itu mendapatkan penilaian WTP dalam pengelolaan uang negara.

Sampai kiamat mereka tidak mau korupsi hilang. Kalau hilang pekerjaan mereka hilang.

Buat mereka, semakin hancur citra negara ini adalah semakin bagus agar pekerjaan tambah banyak.

Biarkan citra negara hancur yang penting aktifis anti korupsi tetap pesta pora gaji tinggi.

Itulah yang terjadi.

Waspadalah bangsaku.

Ini perang proxi.

Perang menghancurkan diri sendiri.

V. NIAT KPK MEMANG MERUSAK CITRA PERADILAN

Ijinkan saya menyampaikan fakta tentang peradilan kita pasca reformasi..

Jangan percaya KPK dan antek-anteknya soal keadaan pengadilan kita karena memang niatnya dihancurkan citranya.

Penghancuran citra pengadilan adalah bisnis antek-antek yang menyebut diri pejuang anti korupsi.

Soal kepercayaan terhadap pengadilan dapat dilihat dari parameter negara hukum.

Ada tiga parameter tercapainya negara hukum: pertama, menghindari anarki. Ini menonjol di Indonesia.

Secara umum anarki di Indonesia relatif kecil dibandingkan skala geografis negara RI dengan penduduk yang beragam.

Bangsa kita telah belajar hukum sebelum ada negara bahkan bangsa kita percaya hukum yang abstrak.

Bulan-bulan lalu, kita menyaksikan demonstrasi besar seperti aksi 212 yang dihadiri jutaan manusia tidak ada anarki.



Parameter kedua menuju negara hukum: ada jaminan warga untuk merencanakan aktivitas hidup sehari-hari. Ini juga jelas.

Di sini, secara umum warga masih bisa bekerja, sekolah, rekreasi tanpa rasa takut.

Dan parameter ke-3 adalah warga lebih mengutamakan proses hukum daripada jalan kekerasan.

Saking percaya hukum, setiap tahun ada 13 ribu perkara di MA, sengketa pilkada juga diselesaikan lewat MK, dan seterusnya.

Jadi secara umum publik percaya pada sistem hukum/ yudisial kita sebagaimana hasil survei OECD.

Perhatikan peringkat Indonesia...

14. SERVING CITIZENS

Citizen satisfaction with public services and institutions

14.1 Citizen satisfaction with the health care system, 2007 and 2016



Source: Gallup World Poll (database)

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933533834>

14.2 Citizen satisfaction with the education system and the schools, 2007 and 2016



Source: Gallup World Poll (database)

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933533853>

14.3 Citizen confidence with the judicial system and the courts, 2007 and 2016



Source: Gallup World Poll (database)

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933533872>



Lihat IDN dengan skala 70 (2016) dan 40 (2006) sebanding dengan Australia, NZL, Jerman dll.

Kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia sudah sangat tinggi. Lalu pengkhianat dan antek-anteknya mau merusak.

Secara institusional pengadilan sudah sangat independen dari pengaruh eksekutif/legislatif sesuai dengan amanat reformasi.

Reformasi pengadilan lalu diarahkan pada penguatan integritas dan akuntabilitas hakim/peradilan.

Untuk itu penegakan etik menjadi utama dibandingkan dengan penindakan.

Dan sesuai dengan UN CAC 2003 pencegahan *judicial corruption* melalui kode etik pun sangat diutamakan (Bab II).

Dalam amandemen UUD 1945, Kehadiran KY adalah dalam rangka pencegahan terhadap *judicial corruption* tsb.

Tapi yang jadi persoalan, KPK menjadikan dunia peradilan sebagai cara untuk meraih dukungan publik, bukan semata-mata penegakan hukum.

Hal itu ditunjukkan dengan dramatisasi OTT terhadap hakim. Padahal ada KY, KPK hebat sendiri.

Padaahal di manapun di seluruh dunia, penegakan hukum/etik terhadap hakim harus mempertimbangkan penghormatan terhadap wibawa hakim.

Di manapun di seluruh dunia, hakim dan pengadilan adalah lembaga yang harus dijaga wibawanya.

Tapi di Indonesia KPK memburu hakim kayak memburu maling ayam.

Kamar kerja ketua Mahkamah Agung sudah digeledah dan di ruang ketua MK diumumkan ada narkoba.

Semua pengrusakan ini tanpa menimbang betapa pentingnya membangun kredibilitas pengadilan kita.

Selanjutnya LSM dan para pengamat mereka akan menyerang seperti dalam artikel di atas.



Orangnya yang itu-itu *aja*, orkestra dilakukan untuk menghancurkan citra negara kita.

Prestasi demokrasi kita dan kerja kolektif anak bangsa dirusak segelintir orang gila ini.

Menjelang pemilu, mereka akan menyerang kandidat tertentu dan mendukung kandidat tertentu.

Kalau ada calon mereka akan melamar menjadi calon nomor 2 atau bila perlu nomor 1. Paling tidak jadi tim sukses.

Mereka tidak pernah bikin partai tapi mereka selalu ingin berkuasa. Senior-senior mereka masuk istana dan lembaga-lembaga negara.

Menjelang pemilu biasanya mereka menghancurkan citra partai dulu supaya kader-kader partai gak layak dipertandingkan.

Nanti kalau ada peluang dorong orang yang gampang dipengaruhi. Di sini opini dan media berfungsi

Masih panjang cara membaca mereka. Tapi hanya hati jernih yang bisa mencerna. Waspadalah bangsaku.

BAGIAN KEDUA PULUH EMPAT
**TEGAKKAN HUKUM
TANPA DENDAM**



“ *Negara adalah organisasi manusia biasa.
Maka di dalamnya ada kemungkinan salah dan alpa.
Termasuk perilaku manusianya.* ”



I. 10 TANYA UNTUK KETUA KPK

Malam Pak Agus Raharjo,
Ketua KPK yang saya hormati.
Semoga bapak tetap bisa istirahat saat kesibukan memuncak.

Malam ini saya ingin mengetuk kejujuran hati bapak.
Sebab KPK yang bapak pimpin punya semboyan Berani Jujur Hebat.

Jujurlah bapak kepada bangsa ini.. apakah betul bapak terlibat dalam Kasus e-KTP yang katanya MEGA KORUPSI itu?

Sebab kalau bapak terlibat dalam Kasus e-KTP ini maka tentu bapak tidak pantas lagi memimpin KPK. Bapak punya *conflict of interest*.

Saya coba membaca biodata bapak dan jabatan bapak saat-saat skandal ini terjadi rasanya perlu penjelasan.

Bapak menjadi ketua KPK sejak 21 Desember 2015 tapi bapak ternyata adalah pendiri dan kepala LKPP sejak tahun 2010.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah bertanggung jawab kepada presiden.

Dan saat bapak memimpin sejak 2010 lah Kasus e-KTP ini terjadi. Padahal bapak bertugas mendisain sistem pengadaan.

Saya telah membaca lebih dalam Kasus e-KTP ini. Alhamdulillah saya punya akses data yang cukup luas.

Dalam dakwaan yang dibuat KPK peran bapak seolah tidak nampak sama sekali. Bagaimana bisa? Bapak penanggungjawab kan?

Sekarang,

Karena keterangan Mendagri tentang bapak tidak disebut dalam dakwaan KPK yang sekarang bapak pimpin, saya mau bertanya:

1. Setelah sistem lelang disepakati Tim yang LKPP ada di dalamnya apakah betul bapak meminta 9 tender dipecah?
2. Betulkah bapak menyampaikan kepada panitia tender



bahwa “Kalau konsorsium Telkom kalah proyek ini bisa gak jalan”.

3. Hal itu terjadi sekitar april 2011 sebelum tender diumumkan, “Betulkah bapak bertemu Sekjen dan Irman (terdakwa?)

4. Betulkah bapak minta bertemu 4 mata dengan Mendagri dan ditolak karena Mendagri minta ada saksi dan notulen?

5. Kenapa di dalam dakwaan hanya ada *time line* lelang tapi tidak muncul bahwa lelang 21 Februari 2010 itu diumumkan setelah dapat persetujuan dari bapak?

6. Kenapa tidak muncul dalam dakwaan bahwa 3 hari setelah lelang diumumkan lalu bapak menginterupsi agar paket dipecah?

7. Kenapa tidak muncul dalam dakwaan bagaimana perdebatan di kantor Wapres yang dipimpin oleh pak Sofyan Jalil untuk menuntaskan masalah dengan bapak?

8. Lalu tiba-tiba mendekati lelang, PT Telkom tiba-tiba ikut dan bapak meyakinkan panitia bahwa hanya PT

Telkom yang bisa mengerjakan proyek ini?

9. Bukankah pernah ada kesepakatan PT Telkom tidak ikut jadi peserta tapi akan dijadikan sebagai penyedia layanan?

10. Apakah bapak mengetahui penggeledahan kantor Kemendagri tanggal 4 Mei 2011 oleh Polda METRO?

Inilah 10 pertanyaan yang sebetulnya masih banyak.. Tapi intinya adalah apakah mungkin bapak tidak terlibat Kasus e-KTP?

Pak Agus yth,
KPK adalah Lembaga Negara dan beroperasi dengan kewenangan dan uang dari negara. Prinsip kerja harus terbuka.

Bapak jangan sakit hati kalau saya bertanya sebab itu tugas setiap warga negara kepada aparat negara.

Saya mengajak bapak rendah hati sebagai pejabat publik sebab semua orang bisa khilaf dan salah.

Tidak karena bapak bekerja di KPK tiba-tiba bapak jadi



bersih dan tidak punya salah. Manusia sama saja.

Selamat istirahat pak ketua KPK semoga bapak sadar bahwa bapak juga banyak masalah.

II. KPK RI: ANTARA OKNUM DAN INSTITUSI

Saya *sharing* sedikit pandangan soal Gerakan Novel Baswedan dan kawan-kawannya. Sebuah versi yang berbeda.

Pandangan saya ini untuk menyempurnakan ide-ide saya soal bernegara yang telah saya tulis dalam bentuk buku dan lainnya.

Dan pak Polisi, cc: Div Humas POLRI mohon segera memberikan kejelasan soal siapa yang menyiram air keras ke wajah Novel.

Paling tidak Polri harus terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jelaskan temuan sementara agar kita tidak penasaran.

Syukurlah saya dengar hari ini sudah ada *expose*

dan dugaan sketsa wajah dan lainnya, sudah mulai diumumkan. Ini bagus sekali.

Polri jangan tertutup sehingga kasus ini mengalami pengembangan ke arah yang jauh dari kenyataan.

Fakta harus dibiarkan bicara apa adanya. Seperti malam ini disampaikan ke hadapan publik.

Dan Novel dkk telah menyampaikan sesuatu yang sebetulnya serius. Soal seorang jenderal yang terlibat.

Dan KPK sebagai lembaga telah melibatkan diri sangat jauh dalam kasus ini. Tidak ada lembaga masuk soal pribadi sejauh ini.

Itu yang menjelaskan mereka enggan menanggapi kritik kepada pejabat KPK seperti kritik saya kepada ketua KPK.

Saya ulangi lagi, bahwa ada dugaan kuat ketua KPK agus raharjo terlibat kasus e-KTP. Ini bukan pelanggaran etik tapi hukum.



Keganjilan yang mendasar dalam tubuh KPK adalah persoalan personalisasi lembaga. Bahkan personalisasi isu.

Teman-teman kita yang bekerja di KPK tumbuh dengan mentalitas yang keliru. Mentalitas yang sudah kita tinggalkan.

Inilah yang saya tentang sejak awal. Mentalitas *superbody* bahwa lembaga kami paling mampu dan paling penting.

Mentalitas ini dalam teori bernegara disebut sebagai mentalitas otoritarian. Mentalitas yang bersandar pada kuasa yang satu.

Dengan UU yang memberi begitu banyak kewenangan, institusi yang diistimewakan, pegawai yang dibayar mahal, biaya besar..dll.

Jadilah KPK menjadi istimewa dan membangun citranya sendiri padahal KPK lupa bahwa ia dibentuk untuk lembaga lain.

Saya punya naskah perdebatan penyusunan UU No. 30/2002 Tentang KPK. Maksud dibuatnya KPK adalah perbaikan lembaga lain.

Tidak ada satu pasalpun yang membenarkan KPK bertindak untuk diri sendiri.

Itulah yang membuat saya tambah yakin saat berbicara dengan lembaga semacam KPK di Korea Selatan, ACRC.

Mereka meletakkan diri sebagai pembantu sukses kerja Polisi dan Jaksa. Karena hukum dan prosesnya (*pro justitia*) adalah oleh lembaga inti.

Penegakan hukum tidak bisa dititipkan pada lembaga sementara. Pasal 27 UUD 1945 mewanti-wanti adanya diskriminasi pada penegakan hukum.

Ini memang tema berat. Tapi harus dikatakan untuk membaca fenomena penyimpangan di tubuh KPK yang semakin menjadi.

Sekarang, kita melihat tindakan KPK semakin tersudutkan. Karena lembaga hasil pemilu mulai memakai kewenangan investigasinya.

Hanya DPR yang memiliki hak angket untuk menyelidiki langkah KPK belasan tahun. Ini peristiwa sejarah yang penting.



Maka,
Saya mengajak agar KPK menerima penyelidikan ini dengan mental positif. Ini demi kebaikan.

Mari tinggalkan mentalitas yang menganggap “hanya KPK” yang memberantas korupsi, yang mampu, yang sungguh2, dll. Itu bahaya sekali.

Sejak kita melakukan amandemen 4 kali maka kita mengalami pergeseran paradigma dalam bernegara menuju demokrasi.

Dalam demokrasi, tidak ada lembaga yang terpenting karena semua penting. Terutama lembaga yang diperlukan secara permanen oleh negara.

Itulah sebabnya, sejak konstitusi baru dicanangkan maka tugas kita adalah membangun penguatan lembaga negara.

Bahkan untuk tujuan itu lembaga kepresidenan dilucuti sebagian dari kewenangannya.

Maka, sekarang semua lembaga Negara kita adalah andalan. Semua penting dan semua bisa ditugaskan untuk tujuan nasional.

Maka kalau ditanya, “Siapa yang memberantas korupsi?” Jawabannya adalah semua lembaga negara. Kenapa demikian?

Karena dalam demokrasi kekuasaan telah diberikan kepada semua lembaga negara. Semua punya tanggungjawab yang sama.

Inilah cara demokrasi membersihkan negara dari kemungkinan melakukan penyimpangan baik korupsi maupun *abuse of power* lainnya.

Yaitu dengan menolak adanya kekuatan absolut dalam negara. Sebab absolutitas adalah pintu korupsi.

Itulah dasar dari keyakinan saya bahwa di KPK telah terjadi korupsi dan *abuse of power* yang tidak pernah diawasi.

Penyimpangan ini sekarang telah mulai kita dengar melalui Pansus Angket KPK banyak orang membuat pengaduan dan pengakuan.

Tidak terkecuali tuduhan juga dialamatkan kepada Novel dkk yang selama ini dianggap pahlawan.



Oleh sebab itu apakah kita siap untuk mendengarkan kelanjutan kisahnya? Ini yang saya khawatirkan.

Kita terbiasa dengan kultur satu pahlawan. Dan ini kurang cocok dengan pandangan demokrasi. Dimana semua dibagi-bagi.

Kalau mau audit ya suruh BPK ,
Kalau mau legislasi dan pengawasan ya DPR . Kalau ke daerah ya otonomi. Dll.

Jangan sampai nanti kita minta BPK audit KPK publik tidak percaya. Atau polisi usut kasus Novel publik tidak terima?

Seperti sekarang, KPK mulai mengusut tindak pidana umum yaitu kesaksian palsu atau merintangangi pemberantasan korupsi.

Ini preseden buruk dalam pembangunan sistem. Dan ini bisa mengarah kepada pembangkangan sistem yang kita miliki.

Karena itu, terimalah kerja polisi, BPK dll lembaga yang memperoleh kewenangan dalam UU. Itulah arti kita bernegara demokrasi.

Dalam nafas itu juga kita menerima kemungkinan adanya kelemahan dalam lembaga-lembaga yang ada. Karena itulah manusiawi.

Negara adalah organisasi manusia biasa. Maka di dalamnya ada kemungkinan salah dan alpa. Termasuk perilaku manusianya.

KPK sangat mungkin salah dan Novel dkk sangat bisa melakukan tindak pidana. Itu dinamika manusiawi.

Tetapi, perjuangan untuk menjadikan KPK spesial dan Novel dkk adalah pahlawan yang tidak mungkin bersalah adalah bahaya.

Ini membuat kita menjadi sulit berpikir objektif. Semua dipaksa dalam kerangka teori konspirasi.

Sampai suatu keyakinan bahwa seluruh pejabat negara sedang berkonspirasi melakukan kriminalisasi kepada KPK dan pegawainya.

Pada kelompok anti korupsi mereka mengembangkan teori bahwa seluruh pejabat negara berkonspirasi melawan mereka.



Jadilah semua ini tidak rasional. Dan tidak ada akhir dari irrasionalitas kecuali irrasionalitas itu sendiri.

Saya menyebutnya fiksi
Kadang saya sebut mitos
Dan korupsinya makin tidak terdefinisi.
Kita satu negara mengkhayal.

Semakin sibuk dianggap makin sukses.
Masalah tak harus selesai tapi fiksi dan mitos merajalela.

Mari kita perbaiki cara kerja kita.
Dan Pansus Angket KPK di DPR adalah muaranya.

Mari tegakkan akal.
Mari lihat faktanya.
Gak usah takut.
Jangan percaya fiksi dan mitos.
Mari lihat apa adanya.

Wakil-wakil anda di DPR mustahil jahat seperti fiksi dan mitos yang selama ini dikisahkan.

Mereka anggota DPR itu nyata dan ada di antara kita.
Berbeda dengan LSM atau kampanye di dunia maya.

Mari tonton semuanya.
Ini adalah momen berharga.
Sebuah peristiwa sejarah.
SAKSIKANLAH!



BAGIAN KEDUA PULUH LIMA **FIKSI PENEGAKAN HUKUM**



“ *Saya banyak mendengar
berita lain yang lebih tajam. Bahwa pembocoran itu
memiliki maksud yang lebih teknis.* ”



I. CERITA FIKSI & FITNAH KPK

Kita lagi menunggu cerita 14 anggota DPR yang katanya mengembalikan uang e-KTP... siapa mereka ya? Kenapa dilindungi ya?

Kenapa ada orang yang sudah makan uang korupsi bertahun-tahun tapi *gak diapa-apain* sementara yang belum terbukti babak belur?

Termasuk nama lembaga DPR jadi hancur.. lalu siapa? Saya anggota DPR *gak* rela ada orang sudah makan uang masih *ngantor* di DPR

KPK membangun fiksi seolah ada pesta bagi uang... lalu begitu ditanya *gak* ada buktinya... nama lembaga dan orang sudah hancur..

Lalu mengembangkan fiksi seolah ada kerugian 2,3 T padahal yang berhak hitung kerugian menurut UU hanya BPK RI

Pansus Angket KPK bagus mengundang BPK RI dan BPKP untuk membandingkan temuan kerugian..

Menurut BPK yang punya dasar kewenangan hanya ada dugaan 18-23 Milyar... tapi BPKP bilang 2,3 T...

Ini akan seru sebab lembaga-lembaga itu selama ini dipakai secara tidak bertanggungjawab.. tidak independen...

Tahap-tahap kasus e-KTP ada fiksi ada fakta..kebanyakan fiksi...

Kalau dilihat,
Fitnah kepada anggota DPR dalam kasus ini luar biasa... padahal keterlibatan hanya dalam pembahasan..

Salah satu bagian yang nanti akan menarik adalah keterlibatan kepala LKPP yang sekarang menjadi ketua KPK..Agus Raharjo..

Dakwaan KPK dalam kasus e-KTP menonjolkan peran komisi II DPR padahal tidak ada peran dalam tender dan pelaksanaan.

Peran komisi-komisi DPR hanya dalam fase pembahasan APBN dengan pemerintah...7 tahun lalu..

Tapi di sisi lain, intervensi LPPK (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai pribadi dan lembaga hilang.



KPK terlalu leluasa mengembangkan satu versi... insya Allah Pansus Angket KPK akan membuka versi lain... termasuk kasus e-KTP...

Sudah terlalu banyak orang yang diam dan bungkam... dipenuhi rasa takut... karena diancam...

Kemarin yakin bahwa anggota DPR telah menekan saksi lalu menggunakan ruang sidang untuk fitnah...

Lalu anggota DPR yang punya hak pengawasan melakukan konfirmasi dan tidak bisa menjawab..

Lalu tentu anggota DPR merasa, berani betul KPK memfitnah dan meminta alat bukti... KPK menolak...

Lalu bagaimana nasib nama-nama orang yang telah cemar? Apakah boleh ruang pengadilan menjadi fitnah dan proses hukum menjadi gosip?

Inilah yang kita perbaiki...

Hukum harus ditegakkan dengan asas yang benar... inilah sumber kebaikan kita ke depan... amin..

II. KEMATIAN ‘SAKSI KUNCI’ DAN SKANDAL JURNALISME KPK

(Tulisan ini akan mulai membongkar skandal paling besar dalam cara kerja KPK Selama Ini).

Nanti kita akan sampai pada pengertian yang baik tentang beda antara Hukum dan Jurnalisme.

Dan kematian Johannes Marliem menyeret kita pada perdebatan yang memang seharusnya.

Jika benar bahwa kematian JM ada kaitannya dengan eksploitasi berita secara sepihak maka ini adalah skandal besar.

Soal kematian sudah jelas. Saya mendapat konfirmasi langsung dari otoritas kita yang secara resmi diberitahu oleh FBI.

Maka selanjutnya akan ada penyelidikan yang panjang. Apalagi jika kasusnya bunuh diri.

Sementara itu, KPK telah menggunakan informasi ini untuk mengangkat citra, “Kami akan lanjutkan”, ini saksi kunci dll.



Di tanah air telah menggema istilah Saksi Kunci e-KTP, entah datang dari mana seorang yang belum pernah diperiksa jadi kunci.

Kebiasaan latah ini masuk ke media *mainstream* yang punya reputasi hebat-hebat.

Malam-malam saya menelpon seorang jurnalis senior. Saya tanya kenapa Anda sebut saksi kunci? Kunci apa yang dia bawa?

Dia tersadar dan mengatakan bahwa memang itu tidak ada dasarnya. Tapi mungkin karena sebuah berita di sebuah media.

Pagi ini memang rame kita membaca berita tentang keluhan JM sebelum meninggal dunia.

Saya tampilkan 2 artikel:

<https://t.co/C6w3zL9mW3> <https://t.co/LFsXNs88s1>



Jelas digambarkan dalam berita itu bahwa JM menyangkan Pembocoran pemeriksaannya.

Saya kutip:

“Saya tidak mau dipublikasi begini sebagai saksi. Malah sekarang bisa-bisa nyawa saya terancam,” ujar Johannes.

“Seharusnya penyidikan saya itu rahasia. Masa saksi dibuka-buka begitu di media...”

“...Apa saya enggak jadi bual-bualan pihak yang merasa dirugikan? Makanya saya itu kecewa betul,” imbuhnya.



“Saya kira sama saja hukum di AS juga begitu. Kita selalu menjunjung tinggi *privacy rights*,....

“...harus memberitahu dan *consent* bila melakukan perekaman,” tuturnya.

Jadi ada dugaan kuat bahwa pemeriksaan JM oleh KPK telah dibocorkan kepada sebuah media. Inilah Jurnalisme KPK.

Saya banyak mendengar berita lain yang lebih tajam. Bahwa pembocoran itu memiliki maksud yang lebih teknis.

Nanti,
Semua akan terungkap tetapi yang penting adalah Jurnalisme KPK harus segera dihentikan sebab korban sudah banyak.

Sejak lama KPK telah mempraktikkan upaya menjadikan KPK tidak saja sebagai lembaga penegak hukum tetapi pembentuk opini.

Pressroom KPK jauh lebih aktif dari *pressroom* istana. Jubir KPK yang pindah ke istana pun hilang ditelan Jubir KPK.

Tidak saja itu tetapi KPK terlibat banyak sekali kasus Pembocoran dokumen kepada media.

Mulai potongan percakapan, potongan video, sampai bocoran dokumen pemeriksaan.

Ada satu modus yang nanti harus dibuktikan bahwa ada oknum di *pressroom* KPK langsung mendapat bocoran.

Lalu, banyak saksi sehabis diperiksa kaget sebab apa yang ditanya di atas ternyata di bawah sudah ditanya wartawan.

Pembocoran seperti ini adalah skandal besar. Dan sayangnya kita menganggap ini biasa.

Di Indonesia, bagi KPK tidak ada *privacy* dan perlindungan dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Orang-orang diperiksa tanpa perlindungan nama baik dan *privacy*. Bahkan KPK sengaja mengundang media untuk dieksploitasi.

Ratusan orang diperiksa sebagai saksi untuk 1 atau 2 tersangka tanpa perlu dirahasiakan. Bahkan sering ikut dihancurkan.



Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang justru kita bentuk untuk itu malah takut sekali kepada KPK.

Saksi-saksi KPK mereka tidak mau lindungi dan kalau saksi kasus korupsi datang mereka bilang: “boleh gak oleh KPK?”

Komnas HAM juga gitu, bagi mereka saksi kasus korupsi tidak punya HAM karena KPK bilang Korupsi itu kejahatan luar biasa.

Para Aktifis perlindungan HAM di negeri ini mengecualikan HAM dari isu yang ditangani KPK.

Karena itu, kasus Niko dan JM yang kita saksikan adalah puncak gunung es dari malpraktik hukum dan Jurnalisme KPK.

Ini adalah tantangan besar bagi Pansus KPK DPR untuk membuka semua kejanggalan ini.

Mari kita saksikan dengan mata hati yang jernih.

BAGIAN KEDUA PULUH ENAM OPERASI TANGKAP TANGAN ILEGAL



“ Negara tidak boleh diberikan ruang yang longgar untuk menyalahgunakan makna hukum. Hukum harus harus jelas dan rinci, agar hukum tidak dipermainkan melalui opini dan propaganda. ”



I. KORUPSI ITU KALAU HUKUM DILANGGAR DAN NEGARA MERUGI

Survey membuktikan *Netizen* rasional dan memiliki preferensi yang normal.

Dan saya senang karena preferensi saya dan *Netizen* dalam berbagai isu hampir sama 100%. Saya *Netizen* aspiratif.

Terlepas soal validitas teoritis tetapi secara spontan relasi saya dan *Netizen* cukup positif.

Hanya ada sedikit perbedaan dalam memandang isu korupsi.

Saya menganggap korupsi lebih dikaitkan dengan sistem dan kerugian negara bukan moral individual.

Menurut saya tidak ada korupsi tanpa pelanggaran hukum dan kerugian negara.

Soal seseorang menerima uang silahkan saja selama negara tidak rugi dan sistem tidak dirusak, itu soal etika pribadi.

Tapi jika negara rugi dan hukum dilanggar saya tidak peduli Anda terima uang atau tidak. Balikin uang negara!

Ada seorang gubernur memberikan pelayanan publik dengan baik. Mempermudah urusan orang. Negara untung.

Tiba-tiba setelah masalah selesai dia dikirimi hadiah dan ucapan terima kasih. Kalau dia terima itu urusan moral pribadi dia.

Tapi ada seorang gubernur membuat kebijakan menjual aset negara dan dihitung BPK negara rugi. Ini saya peduli.

Saya tidak peduli dia terima uang atau tidak tetapi karena negara rugi saya anggap ada unsur korupsi.

Apalagi ada indikasi suap dalam membuat kebijakan itu, maka peristiwa pidananya sempurna.

Kalau tidak ada suap pun saya tetap anggap adanya kerugian negara jauh lebih penting untuk dipertimbangkan.



Dalam kasus reklamasi di Jakarta jelas ada pelanggaran hukum bahkan protes publik yang merasa dirugikan.

Jangan lupa kerugian publik adalah bagian dari kerugian negara. Keselamatan publik adalah hukum tertinggi.

Saya tidak terima,

Jika gubernur yang menciptakan kerugian negara aman. Sementara yang menguntungkan negara dituduh korupsi.

Gratifikasi harus dibuktikan ada waktu 1 bulan. Kalau orang terima diam-diam itu soal moral pribadi.

Kalau soal moral pribadi sulit diseragamkan dan jangan. Itu urusan Tuhan, ada pengadilannya kelak.

Kepedulian kita adalah pada publik. Untung rugi publik dan uang negara, itu ukurannya. Bukan moral pribadi.

Nah, OTT KPK itu mengintai moralitas pribadi. Tidak ada kerugian negara sama sekali. Inilah bohongnya.

Jadilah KPK ini seperti utusan malaikat ke muka bumi. Mengintip moral pribadi orang sehari-hari.

Kalau malaikat pengadilannya nanti di akhir zaman, KPK mengadili hari ini di pengadilan Tipikor.

Jadilah persidangan Tipikor sebagai pertunjukan moral dan dosa hari-hari soal suap dan selingkuh. Soal rahasia pribadi.

Ini semua bohong.

Ini semua fiksi.

Omong kosong.

Ini tipu-tipu.

Selamat terprovokasi.!

Merdeka!

II. SERANGAN OTT LAGI

KPK OTT lagi di Malang. Zaman Jokowi paling banyak tangkapan... Pemerintah ini beternak maling! Jangan-jangan?

Kalau tidak sanggup menciptakan pemerintahan yang bersih lempar handuk aja...



Dalam sebulan ada 6 maling ditangkap korupsi. Terbesar sepanjang sejarah Republik ini... terus kita disuruh memuji pemerintahan?

Jadi kalau korupsi makin banyak itu artinya makin sukses? Ini ilmu dari mana ya?

Tapi,
Malam ini kepada pendukung Presiden Joko Widodo saya ajak berpikir agak dalam.. jangan salahkan Presiden dulu...

III. (LEGALITAS) ISTILAH OTT KPK

Prof. Moh. Mahfud MD perlu membuat tulisan tentang istilah OTT KPK dan legalitas penyadapan pasca keputusan MK 24/2/2011.

Sebenarnya semua ahli hukum bertanggungjawab atas penggunaan pasal yang tidak ada dalam UU seperti OTT KPK ini.

Tetapi prof Moh. Mahfud MD paling bertanggungjawab karena keputusan membatalkan pasal penyadapan dalam UU ITE dibaca beliau.

Dengan segala maaf kepada prof Moh. Mahfud MD saya ingin meminta pertanggungjawaban akademik bapak. OTT KPK adalah ilegal.

Jangan dulu mengatakan semua hakim Tipikor membenarkan OTT KPK sebab saya minta pertanggungjawaban akademik.

Mari kita kaji secara akademik dan terbuka OTT KPK ini sebab setelah itu baru kita masuk ke wilayah politik penegakan hukum.

Jika cerdas pandai terus menerus terintimidasi oleh sukses OTT KPK lalu kehilangan keberanian akademik maka bahaya!

Selama ini, pembela KPK terus menerus memproduksi bahasa kekuasaan yang bahkan anti akademik. Menyedihkan!

Lucu, ada kampus melarang membahas revisi UU KPK. Seperti mau revisi kitab suci dianggap penistaan. Payah!

Maka saya mengajak para guru besar hukum seperti prof Moh. Mahfud Md dan Prof Romli Atmasismita duduk sebagai akademisi.



Nanti kita sambung,
Ijin ke dapil.

Kembali kepada prof Moh. Mahfud MD yang pada tanggal 24 Februari 2011 membaca keputusan MK membatalkan pada 31 (4) UU ITE No.11/2008.

Ijinkan saya mengutip beberapa pernyataan hakim MK pada hari itu yang dikutip oleh media massa pada hari itu dan hari selanjutnya.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata ketua majelis hakim konstitusi Mahfud MD dalam amar putusnya.

“Menyatakan bahwa pasal 31 ayat 4 tidak berlaku lagi,” tandas Prof. Moh. Mahfud Md

Sebelum membacakan amar putusan, dalam pertimbangannya, MK mengutip putusan MK sebelumnya tertanggal 19/12/2006 dan 30/3/2004.

Intinya menyatakan bahwa pembatasan melalui penyadapan harus diatur dengan UU guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar HAM.

MK memandang perlu pengulangan karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap HAM.

Di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan UU sebagaimana diatur Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945,” kata Hakim Muhamad Alim

MK juga menimbang perlu adanya UU khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga.

“Bahwa PP tidak dapat mengatur pembatasan HAM.....

Pembentukan PP merupakan pengaturan administrasi dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan atas HAM,” (kyd/jpnn)

Ijin take off lagi....

Nanti kita sambung..

IV. OTT KPK: SEKALI ILEGAL TETAP ILEGAL

Saya lanjutkan sedikit soal OTT KPK karena selain ini terminologi baru, jangankan milenial yang awam, sarjana hukum belum tentu paham.



Saya sudah pernah menulis beda arti kata OTT dan TT berdasarkan banyak pandangan pakar.

Bermodal pergaulan sebagai mantan pimpinan komisi hukum DPR saya mendapat akses yang cukup valid.

Suatu hari saya duduk panjang dengan profesor Laica Marzuki mantan wakil ketua MK dan juga MA. Beliau cerita kontradiksi itu.

Bahkan beliau menceritakan naskah-naskah bahasa Belanda yang mendefinisikan istilah *heterdaad* atau tertangkap tangan.

Saya juga sering duduk dengan bapak almarhum Adnan Buyung Nasution atau ABN TERKAIT ISU HAM DI KPK.

Ini ada artikel bagus dari kantor pengacara ABN:
TERTANGKAP TANGAN | Adnan Buyung Nasution And
Partners <https://t.co/P3YP2jbiVb>

ADNAN BUYUNG
NASUTION & PARTNERS

MENU

Find a justice > Choose ABNP >

TERTANGKAP TANGAN

Wednesday, 22 February 2017



Penulis : Hektor Siahaan, S.H. - Lawyer

TERTANGKAP TANGAN

Jadi prof Moh. Mahfud Md tanggal 3/11 /2009 bapak membuka rekaman dalam Sidang MK, kasus JR Bibit Chandra yang terpuji.

Saya termasuk yang tidak setuju, itu bukan sidang pidana urusannya apa dengan rekaman? Ini menguji norma kok jadi teknis.



Sejak saat itu, saya mulai mencatat bahwa prof Moh. Mahfud Md telah melakukan banyak kekeliruan memahami persoalan Sadapan.

Kasus Pembukaan sadapan di MK itu akhirnya luar biasa dan mengubah seluruh konstelasi. Prof Moh. Mahfud MD mendapat pujian.

Memang menurut saya waktu itu adalah puncak dari popularitas KPK. Berseberangan bisa berakibat fatal.

Tapi juga saya sudah mulai tahu bahwa di dalam KPK mereka memakai kewenangan mereka untuk membela diri pribadi.

Sekarang, dengan kasus-kasus yang ada semua mulai terbuka. Kewenangan yang besar berkali-kali disalahgunakan.

Termasuk soal OTT KPK sehingga tanggal 24/2/2011 prof Moh. Mahfud Md membaca pembatalan UU ITE pasal 31 ayat 4.

Pembatalan itu berakibat pada batalnya rencana Pemerintah melahirkan PP penyadapan.

Seharusnya Pemerintah segera membuat Perpu penyadapan atau mengajukan UU penyadapan ke DPR. Tapi sampai sekarang tidak ada.

Akibatnya, sejak 2011 KPK tidak lagi diaudit penyadapannya sebab karena tidak adanya PP maka tidak ada kewenangan.

V. “OTT” VS “TT”

Senin pagi, dari sumbawa menuju Seteluk dan kembali ke Jakarta. Coba kita sambung lagi soal OTT KPK

Saya *copy*-kan beberapa pernyataan saya di masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono meminta Perpu dibuat akibat PP tak boleh lagi mengatur sadap.

Fahri Hamzah Minta SBY Terbitkan Perpu Penyadapan.
(SAYA JUGA MENGINGATKAN SOAL TEKNOLOGI)

<https://t.co/am5043HFwV>





Fahri Hamzah minta SBY segera terbitkan Perppu penyadapan | <https://t.co/bteB2B7euX>



Silahkan Google sendiri tetapi memang saya cerewet soal ini. Masalahnya kompleks dari sekedar urusan OTT KPK

Dulu menyadap itu pakai kabel, tapi sekarang bisa pakai gelombang dan aplikasi. Atau yang belum kita paham...

Baiklah, sekarang kita kembali ke persoalan OTT KPK yang diawali oleh kegiatan pengintaian dan penyadapan.

Prof Moh. Mahfud Md bersikukuh bahwa OTT dan TT (sebagaimana dalam KUHAP) dianggap tetap sama.

Beliau menganggap kata “OPERASI” bisa ada bisa tidak ada. Yang penting “tertangkap tangan”.

Padahal dalam definisi “*heterdaad*” seperti dijelaskan banyak ahli justru terletak pada situasi “seketika” tanpa rencana.

Itu sebabnya para ahli berpendapat dan dalam KUHAP tidak diatur keharusan adanya surat perintah dalam peristiwa TT.

Juga dalam *heterdaad* tidak harus penyidik dan Polisi yang pertama melakukan bisa juga masyarakat.

Sementara dalam OTT KPK telah dilakukan pengintaian dan penyadapan lama sekali.

Bahkan dalam banyak kasus seperti almarhum Mulyana Kusuma dan Probo Sutejo terjadi pengebakan.

Makanya saya tanya prof Moh. Mahfud Md tentang *control delivery* dan *control buying* seperti yang diatur Pasal 75/78 UU 35/2009 tentang narkotika.



KARENA ketentuan-ketentuan seperti itu selama ini bisa disalahgunakan dan apa bisa dipakai dalam kasus korupsi?

Dalam kasus Probo Sutejo baru kita dengar bagaimana KPK meminjam uang Rp. 6 Milyar untuk menjebak hakim.

Apakah penjemputan ini dibolehkan? Lalu kita dengar bahwa uang pinjaman tidak dikembalikan.

Sekarang orang baru mulai terbuka setelah ada Pansus KPK yang menjamin keselamatan mereka di bawah sumpah.

Lalu bagaimana dengan “pelanggaran HAM” yang diwanti-wanti prof Moh. Mahfud Md dalam Keputusan MK tanggal 24/2/2011?

Oleh sebab itu prof Moh. Mahfud MD selain perlu bertanggungjawab secara akademik juga yuridis dan politis juga dong ya?

Karena menurut saya sikap longgar kita kepada penggunaan ketentuan yang tidak ada dalam UU dan sudah dilarang ini awal masalah.

Hal itu tidak saja menyebabkan pelanggaran dan rusaknya seluruh bangunan hukum kita tetapi juga membelokan.

Kesibukan OTT KPK yang selama ini menyibukkan bangsa kita adalah “jalan pintas” yang salah dan bahaya.

KPK tidak lagi memberantas korupsi sebagaimana yang kita maksudnya dalam perumusan UU. Tapi mencari sensasi.

Hasil dari OTT KPK hanya ada dalam imajinasi. Pikiran orang-orang yang gagal memahami persoalan dan tidak menyelesaikan masalah.

KPK akhirnya tidak suka audit. Kerugian negara Trilyunan diabaikan dan uang terima kasih puluhan juta diintip.

Padahal sampai kiamat kalau manusia mencoba mengontrol moralitas individual *gak* akan sanggup.

Tetapi kerugian negara adalah sesuatu yang dapat dicegah sekarang juga dan diperlukan.

Karena itu saya juga termasuk yang cerewet soal audit BPK dan keharusan KPK untuk Kordinasi temuan dalam Hapsem.



Seharusnya KPK bukan secara intensif melakukan OTT KPK tapi meminta audit yang lebih tajam kepada BPK.

Di sanalah kerugian publik dapat ditemukan secara substantif rupiah demi rupiah oleh BPK yang punya reputasi internasional.

Sekarang, jangankan sinergi malah KPK menggelar pengintaian di BPK. Lalu menyadap dan menangkap uang 40 juta.

Peristiwa OTT KPK di BPK ini aneh justru setelah BPK sebagai *Supreme auditor* mulai berkoordinasi dengan *supreme controller* DPR.

Inilah yang membuat saya curiga bahwa KPK menggunakan kewenangan besarnya justru untuk melumpuhkan lembaga lain.

Kita lihat sekarang, lembaga yang kredibel sudah hilang. Hanya satu sisanya KPK saja.

Maka untuk didiskusikan secara akademik oleh para cendekiawan, apakah kerja KPK masih sesuai rencana awal reformasi?

Apakah dengan dominannya OTT KPK maka kerja ini masih bisa disebut pemberantasan korupsi?

Sementara KPK anti pengawasan dan seluruh pejabatnya tidak boleh dipersoalkan maka bagaimana melakukan perbaikan?

Waktu akan menceritakan....buat saya, asalkan pintu diskusi dibuka itu sudah baik. Jangan mutlak-mutlakan.

Jangan sampai karena punya kasus di KPK, punya kepentingan dan cari keuntungan jadi reaktif dan anti perdebatan.

Mari buka mata hati dan telinga, mari sambut kebenaran dalam perdebatan.

**VI. OTT KPK ITU TIDAK ADA DI KUHP
MAUPUN UU KPK.
ADANYA HANYA DI SOP KPK BERARTI
ITU ILEGAL!**

Ijinkan saya melanjutkan sedikit keterangan bagi prof Moh. Mahfud MD soal konsekwensi dari keputusan MK sendiri yang dibacanya.



Silahkan Googling tanggal 24/2/2011 prof Moh. Mahfud MD membaca keputusan MK tentang pembatalan UU ITE 11/2008 pasal 31 ayat 4.

Soal kenapa JR dilakukan telah saya sampaikan sebelumnya. Intinya adalah invasi ke wilayah pribadi melawan HAM.

Prof Moh. Mahfud Md kurang menyadari akibat hukum keputusan MK yang beliau baca sendiri. Saya jelaskan sekarang.

JR itu dilakukan akibat Pemerintah Susilo Bambang Yudoyono mau menerbitkan PP soal penyadapan. Tanya pak Tifatul Sembiring yang saat itu menteri.

Maka publik terutama *lawyer* sangat khawatir dengan kemungkinan Pemerintah membuat ketentuan yang melawan HAM.

Pasal 31 ayat 4 UU ITE No. 11/2008 memungkinkan pengaturan itu dibuat dengan PP. Akhirnya pasal itu dilawan.

Terjadilah *Judicial Review* dan dimenangkan oleh para pemohon dengan alasan yang telah disebutkan.

Ini adalah *link* naskah asli keputusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang dibaca oleh Prof Moh. Mahfud MD
<https://t.co/5mNxNU2O0H>





Saya ambil dari situs resmi BPHN tercetak 74 halaman:
halaman terakhir tercetak nama para hakim MK;
<https://t.co/7cWEDJrBD4>



Sekarang pertanyaannya adalah: kalau PP saja dilarang menjadi dasar penyadapan kenapa KPK *ngotot* memakai SOP?

Dan SOP yang dimaksud oleh KPK tidak pernah ada yang melihatnya, sehingga saya juga menganggap itu tidak ada.

Sudah SOP penyadapan tidak ada, KPK justru fokus pada penyadapan sebagai cara pamungkas, padahal ilegal.

Lama-lama, KPK mengembangkan norma baru yang tidak pernah ada dalam seluruh UU yang ada. Itulah yang disebut OTT KPK

Dengan dasar penyadapan dan pengintaian yang sama sekali tidak punya dasar, justru KPK membuat hukum baru yang asing.

OTT, singkatan dari Operasi Tangkap Tangan, tidak ada dalam UU apapun termasuk KUHAP dan UU KPK.

Kata Operasi tidak ada, kata Tangkap Tangan tidak ada karena yang ada adalah “tertangkap tangan” (KUHAP PASAL 1 butir 19).



Jadi apa dasar OTT yang selama belasan tahun bikin heboh Indonesia? TIDAK ADA!

Saya hanya mengingatkan akal yang mulai redup dan terbenam oleh ketakutan dan tirani pencitraan.

Sampai-sampai orang yang tahu dan punya ilmu tidak berani berpendapat hanya karena takut dan tidak mau repot dengan segala urusan.

Tapi saya tidak tahan,
Ada raja telanjang dipuji seolah memakai pakaian kehormatan. Saya tetap bilang Raja itu Telanjang!

Saya diserang bukan karena korupsi dan bergelimang kasus penyimpanan dana tapi karena memberi pandangan yang berbeda!

Inilah tingkat peradaban ruang perdebatan kita, ketika kebenaran takluk di bawah basa basi dan ikut-ikutan pandangan orang.

Ini yang membuat kita gampang sekali ditipu, penjajah datang sebagai pedagang lama-lama kita dikangkangi. Tragis!

Kita pernah dijajah bangsa asing, juga dikebiri bangsa sendiri. Kita terlalu baik hati dan mudah jatuh hati!

Sampai hari ini, kita sering sekali mendengar berita tentang orang ditipu dalam berbagai bidang, mulai tampang sampai uang.

Mulai perdagangan sampai aliran dan agama. Nabi palsu merajalela di negeri ini tidak karuan. Kita mudah terpukau, tertipu.

Sampai akal dan pikiran datang, kebebasan dan demokrasi serta agama yang meletakkan kita secara setara.

Kebebasan membuat kita harus tumbuh kritis menjadi bangsa yang tidak mudah dikekang dan dilarang. Akal harus bekerja.

Demokrasi membuat kita menghargai keterbukaan dan berbeda pandangan dalam berbagai pilihan. Dalam pikiran dan tindakan.

Agama meletakkan kesetaraan bahwa yang mulia di mata Tuhan adalah yang paling baik dan manfaat bagi sesama.



Jadi hilanglah tirani, kita lawan semua preseden unjuk diri seolah lebih bersih dan lebih anti-korupsi.

Manusia sama, lembaga negara sama, dan semua dijamin sama di mata hukum. Semua perlu rendah hati untuk menerima kekurangan.

Ini yang bikin saya belasan tahun ini tidak terima dan sering tidak habis pikir, kenapa ada yang ingin hebat sendiri?

Begitu gelagat itu muncul secara refleks saya melihat ada berhala! Dan saya tidak bisa diam, saya lawan!

VII. OTT KPK ADALAH SKANDAL MENIPU RAKYAT

Makin hari saya temukan bahwa OTT KPK adalah skandal menipu rakyat paling besar di Indonesia.

Karena tidak boleh ada hukum yang berlaku tanpa ada definisi dan ketentuannya dalam UU dan Hukum Indonesia.

Atau tidak boleh ada hukum yang berlaku yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU dalam makna sebenarnya.

Maka penasaran saya tertuju kepada kata OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang menjadi kata paling populer sekarang.

Jika dalam masyarakat Jahiliah, sebuah konsep yang semakin populer justru di-mitos-Kan, maka OTT telah jadi mitos.

Kata itu disebut dan diulang², tanpa berani melakukan kritik dan pencarian makna. Makin hari makin keramat.

Dalam masyarakat berpengetahuan, justru sebuah konsep yang menarik akan dibedah dan diteliti secara ilmiah.

Jadilah sebuah konsep atau peristiwa menjadi ilmiah dan rasional. Jelas dan dapat diterangkan.

Apalagi apabila konsep itu dalam negara. Maka tidak boleh ada mitos. Negara adalah organisasi rasional.

Berbeda dengan agama, karena percaya kepada yang Ghaib adalah bagian dari iman, biarkan ada misteri.

Semakin lama, mitos tentang OTT KPK makin dibangun. Termasuk oleh para cendekiawan yang karakternya lemah.



Saya mohon maaf kepada mereka karena tidak bisa ikut menipu bangsa Indonesia. Kebohongan OTT KPK harus diungkap.

Pagi ini, saya terus coba membaca pasal-pasal dan naskah dasar yang digunakan KPK untuk beraksi.

Buku-buku ini saya coba baca untuk mencari ketentuan yang digunakan KPK untuk OTT KPK yang terkenal itu.

<https://t.co/LsNrNIKJ8m>



OPERASI TANGKAP TANGAN ILEGAL



Dan ternyata istilah OTT atau Operasi Tangkap Tangan tidak ada sama sekali dalam semua dokumen-dokumen hukum yang ada.

Kata Operasi tidak ada, Tangkap Tangan juga tidak ada. Kata “tangkap” tidak ada yang berdiri sendiri.

Tetapi kata Tertangkap Tangan jelas ada tapi hanya dalam KUHAP yaitu UU No. 8 tahun 1981. Coba kita simak;



Ini ada beberapa ketentuan dalam KUHP, pasal 1 butir 18-21. <https://t.co/QN5NqnWzxs>

18. Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Coba kita fokus sekarang ke butir 19-20 kata “tangkap”, semua pakai awalan, tidak sendiri. Tentu makna berbeda. <https://t.co/ESzFNm3zrq>

19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sekarang, coba kita zoom lagi pasal 19 di mana ketentuan tentang OTT diambil menurut prof Moh. Mahfud MD .

<https://t.co/4mUQMib8Uw>

19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Ada baiknya pasal ini dicerna secara bahasa sebelum dibaca dan dipahami secara hukum.

Sebab suatu kata atau konsep dapat memiliki makna bahasa yang longgar tapi secara hukum dia harus presisi.

Sekali lagi, kita harus memberikan makna yang pasti terhadap ketentuan dalam UU agar terpenuhi azas legalitas.

Di mata hukum, negara tidak boleh diberikan ruang yang longgar untuk menyalahgunakan makna hukum seperti yang dilakukan KPK.

Dalam hukum, Ketentuan Pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*lex scripta*);



Maka saya bertanya, dimana ketentuan tentang OTT KPK itu tertulis? Jika pasal 1(19) KUHAP, itu yang keliru. Saya akan jelaskan lagi.

Dalam hukum, dalam ketentuan dan UU yang ada, rumusan ketentuan pidana harus jelas (*lex certa*);

Dan dalam hukum, Ketentuan Pidana harus ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*) dan tidak boleh multi tafsir.

Inilah prinsip penting yang selama ini diabaikan oleh KPK, hal ini akibat kegemaran bermain opini dan propaganda.

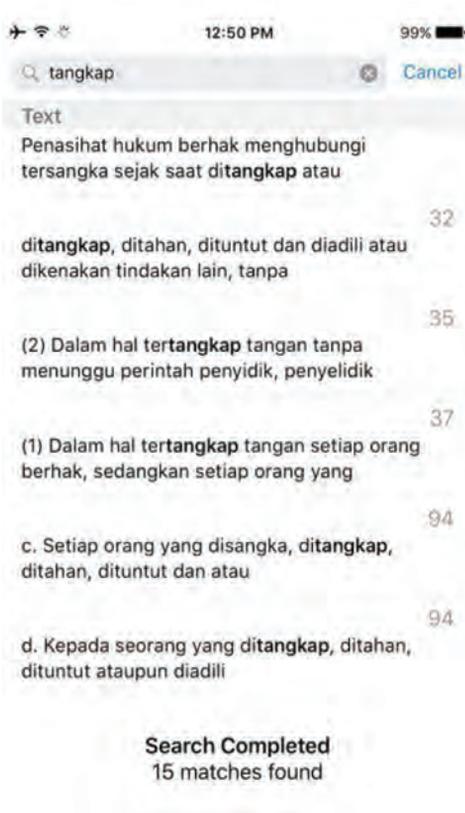
Tukang propaganda di belakang KPK telah mengabaikan semua makna hukum. Karena yang penting menang dan lawan dihukum.

Sesungguhnya itu bukan tujuan hukum, tetapi mungkin prinsip itu ada dalam perang dan politik. Apakah KPK berpolitik?

Sekarang, kita kembali ke pasal 1 UU No.8/1981 tentang KUHAP yang mengatur tentang “tertangkap tangan” atau *heterdaad* dalam bahasa Belanda.

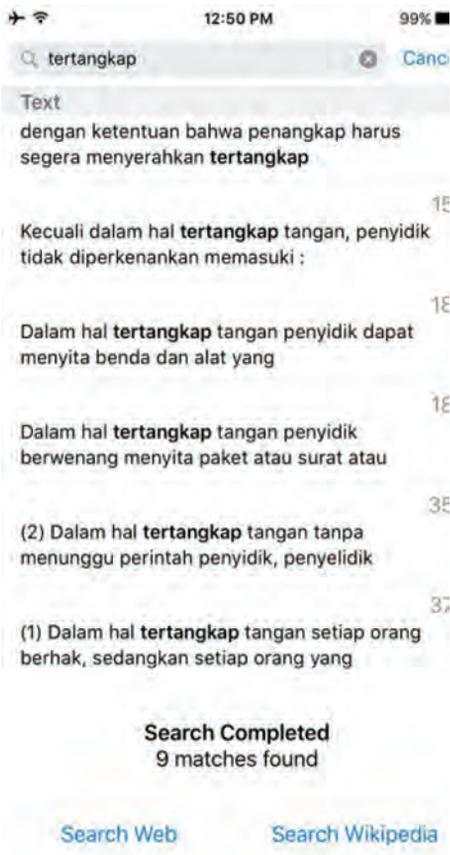
Kata dasar “tangkap” ada di 15 tempat . Tetapi semuanya memakai awalan; “ter”, “di” atau kombinasi “pen-an”.

<https://t.co/eG1UYm0B5a>

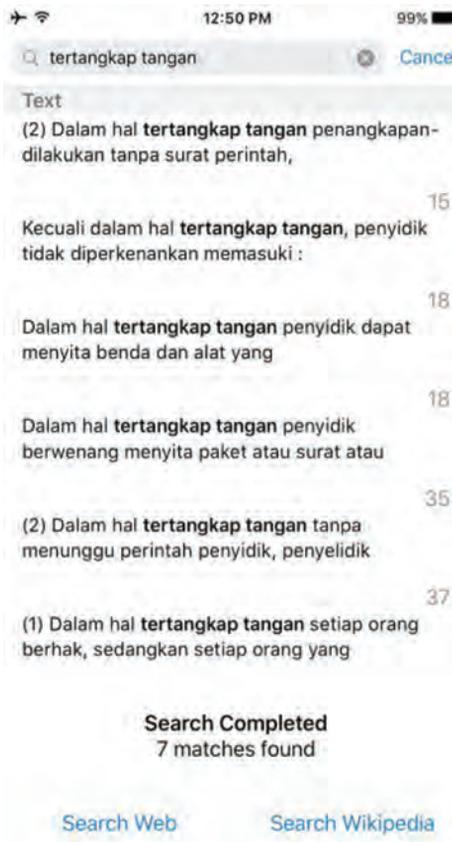




Sementara kata “tertangkap” ada di 9 tempat karena dia bagian dari kata dasar “tangkap”. <https://t.co/rsdcQSM2Uh>

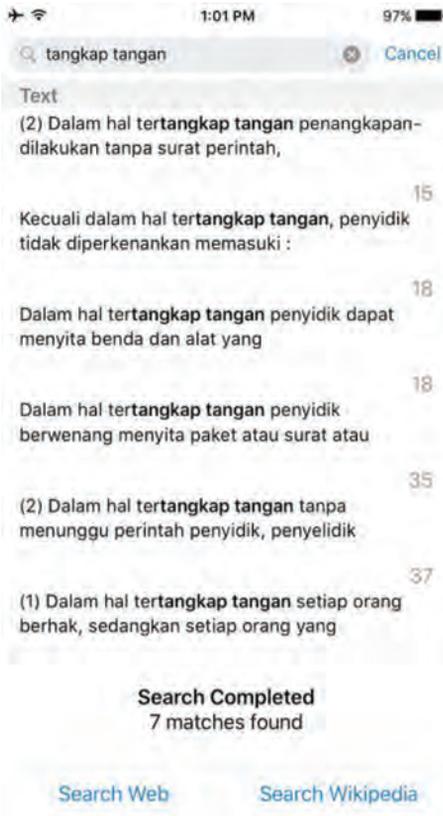


Maka kata “tertangkap tangan” hanya ada di 7 tempat. Ini semua tentang *heterdaad* . <https://t.co/Orhzb3mvx>

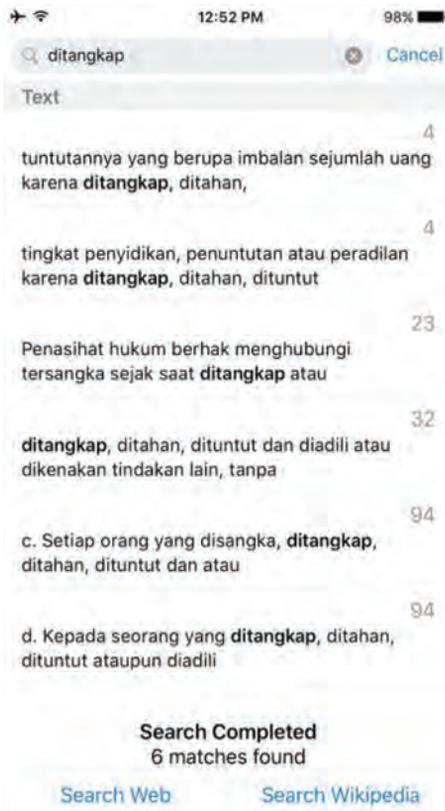




Maka yang menarik kata “tangkap tangan” secara mandiri dia tidak tetapi bergabung dengan “ter” di 7 tempat. <https://t.co/K8KIran51n>

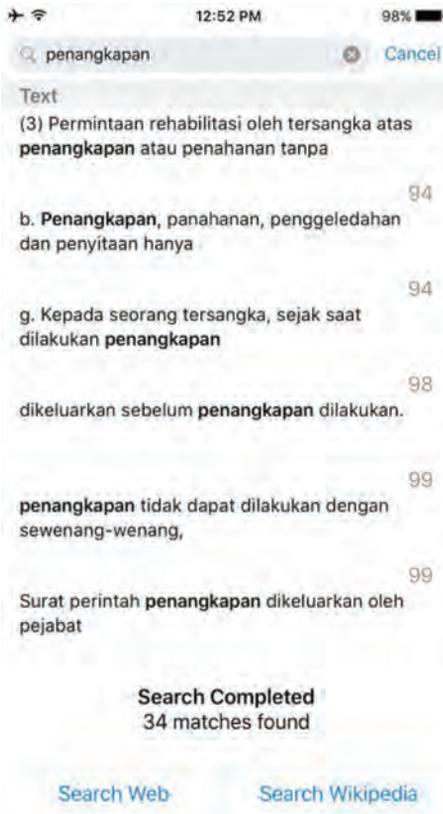


Kata “ditangkap” jumlahnya 6 kalau ditambah dengan “tertangkap” yang 9 persis berjumlah 15 (tangkap)
<https://t.co/WicW55bivW>

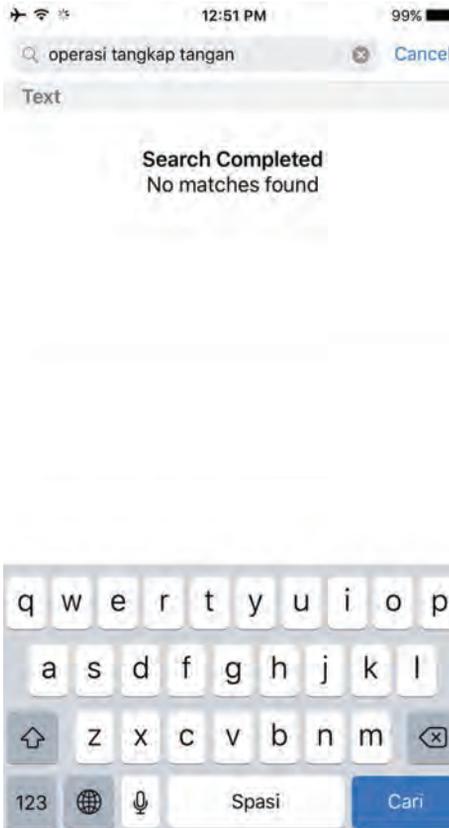




Sementara itu, kata “penangkapan” ada di 35 tempat karena tidak memakai kata dasar “tangkap”. <https://t.co/qaZXBLvxsF>



Sementara itu kata “OTT” dan “operasi tangkap tangan” tidak ada dalam KUHAP. Juga kata “tangkapan” <https://t.co/KZbYnAISsS>





Setelah saya pelajari, ternyata definisi OTT KPK yang selama ini dipakai, dirujuk kepada ketentuan tentang “tertangkap tangan”.

Lalu, konsep “tertangkap tangan” ini diberi kata “operasi” di depannya dan awalan “ter” dihilangkan. Jadilah OTT.

Dalam buku-buku laporan KPK, OTT adalah singkatan dari “Operasi Tangkap Tangan” bukan “Operasi Tertangkap Tangan”.

Tetapi yang aneh bahwa kata OTT justru tidak ada dalam panduan kerja KPK. Maka dari mana dia?

Kita mesti kembali kepada konsep yang tertulis *dong* (*lex scripta*), masak hukum bisa maksa orang *gak* tertulis.

Sudah *gak* tertulis maknanya juga multi interpretasi dan akhirnya dikembangkan sesuka hati KPK.

Sementara itu, UU Tipikor tidak mengandung kata “tertangkap” atau “tangkap”. Ada kata “penangkapan” yang merujuk ke pasal 1(20) KUHAP.

Sementara itu saya sudah mengurai di masa lalu kesalahan dalam penyusunan kata OTT. Baik secara bahasa maupun secara hukum.

Kata operasi merujuk kepada serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana.

Sementara “tertangkap tangan” secara hukum tidak terencana. Segelnya nanti pada kekacauan makna.

Bagaimana disebut “tertangkap” padahal diintai berbulan-bulan dan menyimpang dari makna asal.

Sementara dalam konsep *heterdaad* itu adalah kejadian tidak terencana, maka tidak harus penyidik yang menangkap.

Siapapun boleh melakukan kegiatan tertangkap tangan tapi tidak semua jenis pidana. Sebab pelaku dan barang bukti harus jelas.

Karena itu tertangkap tangan tidak memerlukan surat perintah sebab semuanya tidak sengaja.

Kalau saya penasaran setelah membaca pilihan BAP korban KPK, saya cek memang ada kegiatan pengintaian. Jadi kekuatan KPK memang ada pada kegiatan-kegiatan ilegal dalam KPK itu sendiri yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi.



Semisal kalau pengintaian dan penyadapan dilakukan berbulan-bulan sebelumnya, apa dasarnya?

Sehingga patut diduga bahwa tindakan ya g dilakukan KPK motifnya bukan penegakan hukum tetapi operasi politik.

Nanti Pansus KPK DPR akan mengungkap banyak hal yang selama ini tidak kita Ketahui.

Apa yang sudah terungkap sekarang sebetulnya sudah membuat publik tercengang. Kok bisa KPK *ngawur* sekali.

Dalam hal saksi, ditahan sendiri, disekap sendiri, diarahkan sendiri, disogok, ditekan dll.

Tidak ada perlindungan saksi sebagaimana ada dalam UU LPSK, HAM, dll yang melindungi setiap warga negara.

Lalu dengan modal intimidasi dan tekanan kepada semua pihak, KPK selalu menang. Lalu dijadikan kampanye bahwa KPK selalu benar.

Orang-orang semua terdiam, termasuk advokat karena takut dengan incaran KPK. Sudah terlalu banyak korban.

Dalam hal aset sita, umumnya didapatkan dari OTT dan pengembangan yang disebut TPPU. KPK tidak peduli pidana asal.

Karena tidak peduli dengan pidana asal lalu semua aset orang diangkut dan disita tanpa batas.

Aset orang digeledah sendiri, disita sendiri, disimpan sendiri, dinilai sendiri, dijual sendiri. Dll.

Lembaga negara yang lain *gak* diajak bicara dan KPK sering tidak percaya lembaga lain. Lembaga lain dianggap bermasalah.

Padahal menurut UU 30/2002 justru KPK didirikan oleh negara untuk membantu lembaga lain. Bukan untuk diri sendiri.

Karena fakta yang sudah terlalu banyak inilah seharusnya KPK berhenti dulu. Ini malah sebaliknya.

Sekarang KPK justru sedang meyakinkan publik bahwa hanya KPK yang sanggup bekerja efektif. Yang lain masalah.

Padahal KPK melakukan kesalahan yang semakin dalam. Tidak bisa lagi disembuhkan.

Padahal KPK melakukan kesalahan yang semakin dalam. Tidak bisa lagi disembuhkan.

Saya punya kecurigaan yang lebih mengkhawatirkan. Lain kali kita bicarakan.



VIII. OTT ITU BERARTI MENJEBAK, ILEGAL

Saya terima artikel Prof Eddy ini lalu saya kirim ke prof Romli Atmasismita dan beliau tanggap: <https://t.co/ygSpA7LCYs>

Memaknai Tertangkap Tangan

Oleh EDDY OS HIARIEJ

"In criminalibus, probationes tenent esse loco delicti" (dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih banyak daripada dirayah)

Lewat kutipan di awal tulisan ini, jelaslah bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tak hanya berdasarkan persangkaan semata. Bukti-bukti yang ada haruslah jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun.

Seseorang pelaku yang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana tentunya lebih mudah dibuktikan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan tertangkap tangan?

Delik tertangkap tangan berasal dari raman Romawi yang disebut dengan istilah *delictum flagrum*. Delik tertangkap tangan ini kemudian diadopsi dalam pidana Perancis dengan istilah *flagrant delit* dan punya akibat hukum yang berbeda dengan delik lain.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), tertangkap tangan—tertangkap basah dalam percakapan sehari-hari—diartikan sebagai keadaan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tak boleh dilakukannya. Pengertian yang demikian tak jauh berbeda dengan pengertian dalam kamus hukum yang mer-

definisikan tertangkap tangan sebagai keadaan waktu kejahatan sedang dilakukan atau tidak lama sesudah kejahatan dilakukan.

Kendati tak sama persis pengertian tertangkap tangan antara KBBI dan kamus hukum, kedua pengertian tersebut lebih sempit apabila dibandingkan pengertian tertangkap tangan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 Angka 19 KUHAP memberi pengertian tertangkap tangan sebagai berikut: "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserahkan oleh khlayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Per definisi, ada empat keadaan seseorang disebut tertangkap tangan: (1) tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; (2) tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (3) tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserahkan khlayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan (4) apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Per definisi dalam Pasal 1 Angka 19, KUHAP tidak saja mengatur keadaan-keadaan seseorang disebut tertangkap tangan, lebih dari itu, KUHAP memberi cakupan kepada pelaku. Tidak hanya *outravle dader* (pelaku material), tetapi juga pelaku peserta lainnya—apakah itu orang yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan atau orang yang menyorotikan—bahkan terdapat pembantuan.

Dalam kaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang belakangan ini sering dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terburuj pada persiapan seorang pejabat publik sebagai tersangka, dapatkah dikatakan pejabat publik tersebut tertangkap tangan? Hal ini mengingot satu dari empat keadaan tidak terdapat pada diri seorang pejabat publik saat KPK membawanya untuk diinvestigasi lebih lanjut. Terhadap pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakuk.

Pertama, KPK, sebelum melakukan OTT sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyidikan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyidikan pada dasarnya bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana.

Kedua, berdasarkan Pasal 12 UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan KPK melakukan penyidikan bukan pada tahap penyidikan, melainkan penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap awal proses perkara pidana sebelum penyidikan. Artinya, penyidikan dilakukan masih pada tahap untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana.

Ketiga, OTT hanyalah untuk mengonfirmasi serangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah dapat diproses secara pidana karena memiliki minimum dua alat bukti.

Keempat, per definisi tertangkap tangan dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP, sangatlah mungkin seorang pejabat yang dit ditangkap dalam OTT tidak terdapat satu dari empat keadaan tersebut karena dapat saja uang atau barang bukti yang jadi obyek suap belum ada atau tidak ada di tangan pejabat tersebut. Artinya, tindak pidana penyimpangan itu belum selesai atau masih dalam tahap percobaan.

Di sini terjadi apas yang dalam teori peromban disebut *genachte poging* atau tentatif, situ dalam literatur Jerman disebut *unbeendigtet versuch* atau percobaan terhenti. Dalam konteks demikian, tidak mungkin uang suap atau barang bukti yang jadi obyek suap ada di tangan pejabat publik. Namun, perlu diingat, berdasarkan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, percobaan melakukan tindak pidana korupsi sama dengan perbuatan pidana korupsi yang telah selesai. Dengan demikian, pejabat publik yang ditangkap KPK dalam OTT meskipun masih dalam konteks percobaan dan tanpa suatu keadaan menurut Pasal 1 Ayat 19 KUHAP—tetap dapat tertangkap tangan.

EDDY OS HIARIEJ
 Guru Besar Hukum Pidana
 Fakultas Hukum UGM

PENDAPAT PROF ROMLI ATMASASMITA kepada artikel Prof Eddy di KOMPAS hari ini.

Prof Eddy sudah menyimpang dari asas legalitas dalam hukum (Pasal 1 ayat (1) KUHP dan dengan tafsir *lex certa*.

Hal ini karena dalam setiap UU Pidana tafsir analogi dilarang sama sekali.

Dalam artikel itu Prof Eddy sudah menganalogikan ketentuan Pasal 1 angka 19 TT = Pasal 53 KUHP tentang percobaan.

Padahal per definisi sama sekali berbeda baik dari aspek filosofi, yuridis dan komparatif serta diakui universal.

Selain itu KBBI dan Bahasa Inggris hukum membedakan tegas antara TT=*red handed* dan OTT = pengebakan=*entrapment*.

OTT dilarang dan tidak ada pengaturannya dalam KUHAP kecuali dalam UU No 35 /1999 tentang Narkotika.

Patut diingat oleh kalangan ahli hukum dan masyarakat bahwa HUKUM secara filosofis mengharamkan tujuan menghalalkan cara.

Hukum menentang tujuan menghalalkan cara (*het doel heilig de middellen*).

Tetapi hukum mewajibkan cara yang benar untuk mencapai tujuan.



Asas legalitas dan asas *lex certa* tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk seorang prof hukum pidana.

Karena itu pemikiran analogis tentang OTT termasuk pemikiran sesat bagi mereka yang benar-benar ingin memperoleh pencerahan.

Prof Eddy harusnya tidak lakukan pembenaran apalagi membenarkan tindakan KPK yang potensial melanggar hak asasi manusia.

Sesungguhnya esensi OTT bukan pada hasil yang diperoleh tetapi pada CARA (*de middelen*).

Cara ilegal untuk memperoleh suatu hasil pasti ilegal (*Illegal evidence is not evidence at all!*)

Konsep percobaan (*poging*) yang penting ada unsur perbuatan permulaan pelaksanaan yang harus terjadi dan dilakukan oleh pelaku.

Jadi konsep percobaan bukan situasi yg dibuat oleh KPK. Seperti dalam banyak kasus. Sekian.

BAGIAN KEDUA PULUH TUJUH **KEDZALIMAN BERBUNGKUS KEADILAN**



“

*Mereka memilih siapa yang akan dihancurkan.
Diintip berbulan-bulan, aib dan dosa direkam,
opini publik pun dipengaruhi.*

”



I. ANARKHI KPK

Saya telah berusaha menegur KPK bertahun-tahun melalui berbagai cara. Tulisan dan lisan, buku dan percakapan.

Tapi KPK dasar isinya bola liar dan para petualang, semua nasehat dan masukan dianggap pandangan koruptor yang punya niat jahat.

Sekarang telah terjadi akumulasi. Entahlah apa yang terjadi. Tapi apa yang dilakukan KPK ini adalah anarki.

Begitu kita tak lagi menghargai hukum dan sistem hukum yang ada, lalu membuat norma dan aturan sendiri maka hancurlah negara.

Silahkan ahli hukum bicara dan berdiskusi apa adanya. Dalam tenang dan tanpa rasa takut.

Inikah yang kita sebut negara hukum yang demokratis? Ini baru bicara konstitusi UUD 45 pasal 1 ayat 3...

Belum kita bicara dasar dan ideologi negara... adakah Pancasila dalam hukum kita?

Mari bicara sesama anak bangsa... jangan suka pecah belah... lalu bilang “saya anti korupsi kamu pro korupsi”... ini kelakuan PKI!

II. PROPAGANDA PEMBERANTASAN KORUPSI CARA-CARA PKI

Mereka menyerang orang yang mengkritik cara mereka bekerja sebagai koruptor.

Buat mereka, lebih baik Anda korup tetapi memuji cara kerja mereka yang gaduh dan gagal. Daripada bersih tapi mengkritik.

Orang bersih dijebak karena membuat kritik tetapi yang kotor dilindungi asalkan diam.

Mereka dibeli oleh maling besar untuk meramaikan sukses bikin gaduh kasus-kasus sensasi.

Cirinya: kalau ada kerugian negara yang besar pasti aman. Akhirnya ditutup setelah sensasinya selesai.

Buat mereka, korupsi adalah apa yang bikin ramai dan bikin citra mereka sebagai pahlawan tinggi.



Buat mereka kerugian negara Trilyunan *gak* penting sebab itu sulit dicari dan sudah selesai negosiasi.

Kasus besar di nego kan di belakang layar. Kasus kecil ditayangkan di depan layar.

Dengan alat yang mereka punya mereka hancurkan reputasi negara demi permainan mereka sendiri.

Mereka tidak peduli nama baik lembaga lain yang penting mereka dan *konco-konco* mereka yang terpuji.

Mereka halalkan segala cara karena yang haram hanya definisi mereka soal korupsi.

Jual aset sita negara secara gelap *gak* apa-apa demi memberantas korupsi.

Hukum publik dibikin sendiri dan disimpan sendiri dan dipakai sendiri halal asalkan untuk kepentingan kerja mereka.

Menyogok saksi tidak masalah asalkan mereka mengaku dan memudahkan pembuktian pengadilan.

Lawyer dilarang mendampingi biarkan asalkan dapat diancam untuk mengakui *plot* yg mereka buat.

Saksi diancam dan disuruh diam sebab kalau tidak kasusnya akan dikembangkan dan dicari yang lain.

Kehidupan privasi orang dibuka di ruang publik untuk menghancurkan nama di ruang sidang.

Persidangan media dibiarkan dan dikembangkan, malah *trial by the Press* merupakan jalan yang efektif.

Mereka masuk ruang sidang hukum setelah memenangkan opini publik. Hakim ditekan dan ditakuti.

Kalau hakim hukum berat mereka puji dan usulkan promosi. Mereka undang dan beri penghargaan dalam luar negeri.

Hakim menghukum rendah apalagi membebaskan akan dihabisi dan dimaki-maki.

Kalau hakim berani memutuskan demi hukum dan keadilan maka habis dilapori dan dimaki-maki dihancurkan reputasi!



Jalur hukum dipegang, dari mengintip, merekam aib, bank data dosa, lid, dik, tut, sampai pengaruhi di ruang publik.

Mereka memilih siapa yang akan dihancurkan. Diintip berbulan-bulan.

Walikota untuk kepentingan wakil walikota, bupati untuk wakilnya dan gubernur untuk wakilnya.

Siapa yang di TO (target operasi) dan kenapa di TO semua misteri karena akhirnya hancur sendiri.

Ini perang maka jangan tanyakan hukum. Hanya satu hukum dalam perang, lawan harus mati.

Mungkin ada dendam dari kelompok itu. Mereka membajak negara!

Semua Presiden diancam dengan kasus yang ada di sekitarnya, selain elektabilitas; anak, isteri, ipar, atau apapun.

Penegak hukum semua diancam; polisi, jaksa dan hakim juga *lawyer* yang banyak kasus.

Ke kampus dan kaum milenial mereka menjual pencitraan seolah hanya mereka pahlawan zaman.

Partai politik paling tertekan. Hari-hari ini parpol diintip dan dihabisi.

Media massa lumpuh oleh doktrin berita buruk adalah berita bagus. Prestasi nasional tertutup kabut korupsi.

Saya berharap kepada media sosial yang bebas. Meski di sini banyak yang berpikir sederhana. Ayo Lawan !

Semoga kebenaran segera terungkap. Semoga borok mereka terungkap. Ayo Lawan

III. JIKA HENDAK MENIPU, JANGAN KAU BILANG AKAN BERJUANG

Kepentingan publik adalah tegaknya hukum dan kembalinya uang negara.

Soal persilatan lawyer dan KPK itu sandiwara kalian. Faktanya 14 pengembalian uang tidak diproses dan



kerugian negara tidak dihitung BPK dan BPKP.

Sementara itu Nazar yang memiliki 162 kasus mulai bebas

Dugaan saya, SN ingin mengikuti rute Nazaruddin yang sukses menjadi JC dan akhirnya dituntut “bersahabat” atau masa2 narapidananya diperpendek.

Nazar punya banyak kasus tapi paling cepat keluar Sukamiskin. Sesuatu yang tentu juga dirindukan oleh setiap orang.

Dalam persekongkolan itu, tugas Nazar adalah: berbunyi dan diam.

Berbunyi tentang satu kelompok dan diam tentang satu kelompok lainnya.

Anggota @DPR_RI paling banyak dibunyikan. Dan sukses membungkam banyak orang.

Maka merajalela segala kezaliman. Nazar aman.

Masih ingat kan Pohon kasus Nazar
Dan ada kesaksian Nazar..

Ada pengakuannya...

Dia pakai kata:

“Ada saya, ada Novanto...”

Kenapa dia bebas?

Inilah surat yang telah KPK secara diam2 terbitkan. Surat No. 437/26/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017.

Maksudku,

Jika maksudmu menipu,

Menipulah,

Jangan kau bilang berjuang,

Atau membela kebenaran,

Atau demi rakyat,

Sebab perutku sakit,

Nalarku berkerut,

Karena aku sulit kembali ke belakang,

Ini era kebebasan,

Ketika kata-kata harus diperjuangkan...



BAGIAN KEDUA PULUH DELAPAN
**MEWASPADAI AGENDA ASING
DALAM PENEGAKAN HUKUM**



“

Bangsa ini memerlukan kemerdekaan berpikir dan bertindak. Tapi pengkhianat meminta kita tunduk pada penjajah.

”



I. TELAH DATANG BANTUAN ASING UNTUK KPK

Telah datang bantuan PBB ke KPK dan bersukaria lah semuanya. Ini tanda KPK dilanda bahaya.

Saya baca beritanya siapa yang memuji KPK tapi pimpinan KPK telah memuji dirinya sendiri.

Bahkan tidak ada berita siapa saja nama pejabat UNODC yang datang ke gedung KPK itu. Tapi Laode Heki luar biasa.

Orang tidak tahu bahwa ini adalah misi untuk lobby internasional. Mental minder akan bahagia gitu saja.

Ini misi negara2 besar untuk mengatur adanya asuransi timbal balik bagi mereka.

Jangan lupa KPK dibuat dengan bantuan donor asing. Dalam masa transisi yang kita sendiri baru bangun lagi.

UU KPK nomor 30 tahun 2002 dibuat bersamaan dengan berakhirnya amandemen konstitusi ke-4.

Proposal membuat KPK berjalan sendiri. Kita sendiri masih bingung negara mau ke mana. Tiba-tiba lembaga raksasa ini dibuat.

Kita terima begitu saja bantuan asing yang di dalamnya ada agenda yang tidak jelas untuk kepentingan siapa.

Adalah fakta bahwa lembaga negara yang paling kuat hubungannya dengan #BantuanAsingKPK adalah KPK dan tim hore-nya.

Waktu saya menjadi pimpinan Komisi 3 kami menghentikan puluhan juta dolar US yang diterima langsung atau tidak.

Buat kami aneh, kok bisa ada lembaga negara yang superior atas lembaga lain tapi bantuan asingnya banyak sekali.

Jika KPK dibubarkan maka asuransi timbal balik akan dihentikan. Maka jaminan keamanan pengusaha asing tidak ada.

Itulah tujuan negara2 besar di Indonesia. Jaminan keamanan ketika hasil bumi dan kekayaan alam disedot habis.



Orang tidak akan mudah percaya tapi betapa banyak kasus korupsi di sektor sumberdaya alam yg melibatkan asing berhenti.

Anda ingat kasus Gayus? Bagaimana perusahaan asing menilap pajak sudah ada daftarnya. Hilang begitu saja.

Asuransi timbal balik adalah jaminan keamanan perusahaan asing untuk mengambil sumberdaya alam; emas, minyak, batubara dll.

Hutang budi kenapa lembaga-lembaga penerima bantuan asing ini akhirnya pasti akan ditagih. Jangan ganggu tuanmu!

Berbahagialah KPK yang kedatangan pembela yang tidak jelas. Tiba-tiba menilai KPK “Best Practice”. Gundul mu!

Meneer! Otak kami cukup waras dan sistem kami kami bangun sendiri dan kemerdekaan ini kami rebut atas berkat rahmat Allah!

Kami sedang Kerja menilai diri kami dengan otak kami yang makan dari hasil bumi kami sendiri. Kami bukan bangsa pemeras!

Negara mana yang kalian pakai untuk menilai KPK “Best Practice”? Alat ukur tuan apa? Memangnya kami bego apa?

Tapi kita akhirnya tahu sampai di sini sekarang. Ini perang besar. Perang merebut diri kita sendiri. Dari penjajahan.

Kalau besok kawan2 membaca buku Prof Romli @ rajasundawiwaha yang sudah mengungkap aliran dana asing kita akan sadar.

Bangsa ini memerlukan kemerdekaan berpikir dan bertindak. Tapi pengkhianat meminta kita tunduk pada penjajah.

Saya sudah sampai pada kesimpulan, KPK adalah *proxy* yang hadir dalam sistem kita tanpa kendali.

Mohon @PansusKPK mengundang kembali ibu Siti Fadilah, korban mengusik kepentingan asing di Indonesia.

KPK tega dengan bangsa sendiri. Putra putri terbaik bangsa ini telah dikorbankan dan dikriminalisasi.



Tapi kita tidak boleh berhenti. Ancaman tak boleh membuat kita takut! Allah Maha Besar!

Kita pernah mengusir penjajah dengan bambu runcing!
Kita tumbangkan rezim otoriter berkali-kali. Dengan ijin Allah.

Semuanya kecil apabila keyakinan kita besar!
Merdeka!
Allahuakbar!
Waspadalah Bangsaku!

BAGIAN KEDUA PULUH SEMBILAN
SKANDAL
PEMBERANTASAN KORUPSI,
MEMPRETELI DPR



“

*Pesimisme pada bangsa sendiri ini
dibuat oleh pengkhianat!
#Waspadalah!*

”



I. “INI BUKAN SOAL SN” (TWIT TRAGEDI ‘SETYA NOVANTO’)

Dengan pengertian saya yang sederhana, saya juga tahu bahwa mengapa KPK mengorkestra citra diri yang negatif soal SN. Oktober 2014 persis setelah SN dilantik, KPK telah memulai kalimat negatif kepadanya.

Persis seperti stabilo merah kepada para mantan menteri sebelum dilantik pada akhir bulan yang sama. Dan yang bertanda merah hidup dalam sandera citra. Kata KPK mereka siap jadi tersangka.

KPK keberatan dengan terpilihnya SN, tapi memang sejak awal KPK memilih DPR sebagai ‘pasien’nya. Nampaknya, kalau DPR yang menjadi musuh maka akan banyak yang mendukung.

Ini juga karena banyak anomali, anggota legislatif mewarnai pemilu Indonesia dengan segala citranya. Kata saya “DPR ITU SAMSAK NASIONAL”. Mereka seperti hadir untuk menerima kemarahan rakyat atas situasi yang tak jelas.

Maka, penangkapan, penggeledahan dan segala tindakan

KPK kepada SN tidak saja sebuah peristiwa politik, tetapi melambangkan sikap kepada DPR. KPK sepertinya menganggap bahwa SN adalah wajah asli DPR dengan segala persepsi jelek yang telah dibangun lama.

Dalam perilaku KPK kepada ketua DPR ini kita dipertontonkan sebuah drama tentang betapa lemahnya cita rasa yang dibangun bagi seorang pejabat negara yang menjadi simbol kekuasaan legislatif di Republik. Lembaga DPR ikut hancur lebur.

Seorang pejabat negara yang mendapatkan amanah kuasa langsung dari rakyat. Seorang pejabat negara yang keliling dari satu rumah ke rumah lainnya untuk mendapatkan mandat kuasa. Tentu SN tidak sampai segitu, tapi ia hasil pemilu yang sah.

Disamping banyak orang bertanya “Jika terhadap ketua lembaga tinggi negara saja hukum bisa berlaku sewenang-wenang, lalu bagaimana terhadap rakyat biasa?”, tapi muncul juga suatu kecemasan tentang pengertian kita tentang negara hukum yang demokratis.

Negara hukum bukanlah institusi kebal hukum, kekuasaan tidak selamanya benar, ia dapat dipersalahkan



jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hukum. Hukum materil sama dengan hukum formal. Keduanya wajib dilaksanakan.

Dalam suatu negara hukum demokratis, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap individu, siapapun dia, sehingga negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena selalu dibatasi oleh hukum dan konstitusi (UUD 1945 pasal 28(j)).

Rule of law di dalamnya mengandung asas *dignity of man* yang harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang kekuasaan. Inti dari *rule of law* adalah terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (UUD 1945 pasal 27).

Kepastian kita junjung tinggi di seantero negeri maka rakyat bisa memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, rasa aman, dan dijamin hak-hak asasinya. Inilah tujuan dari negara hukum kita seperti tercantum dalam UUD 1946 pasal 1 ayat 3.

Dalam hal Novanto sebagai ketua lembaga tinggi negara, yang pada diri pribadinya melekat kewibawaan lembaga, betapa marwah kelembagaan DPR jatuh dalam

perlakuan yang sangat tidak etis oleh SEBUAH LEMBAGA SAMPIRAN NEGARA YANG TIDAK DIPILIH OLEH RAKYAT

KPK di sini telah melampaui kepatutan. Karena semua hanya upaya kampanye dan membangun persepsi. KPK dikendalikan oleh Public Relation Asing atas biaya lembaga asing. Saya punya bukti.

Jika tidak ingin melihat Novanto sebagai pejabat negara yang memimpin kamar legislatif, dengan segala keistemewaan yang melekat pada dirinya yang dijamin oleh UU sebagai pejabat tinggi negara, maka lihatlah Novanto sebagai rakyat biasa.

Setiap warga negara, bersamaan kedudukan dalam hukum. Bukan karena dia pejabat yang dibenci rakyat lalu haknya yang sedang mencari keadilan dan sedang melakukan berbagai upaya hukum yang legal konstitusional ditolak.

Kita harus melihat alasan rasional Novanto dalam berhadapan dengan hukum dibanding menjadi awam yang larut pada caci maki yang sudah menempatkan Novanto pada sidang opini publik sebagai penjahat



Ini bukan Keadilan tapi yang sedang dipertontonkan oleh lembaga yang katanya penegak hukum bernama KPK adalah diskriminasi kasat mata. Masih ingat waktu pimpinan KPK dipanggil Pansus Angket?

Pansus angket adalah lembaga penyelidikan tertinggi di negara kita. Jangankan Pimpinan KPK, Presiden dan Wakil Presiden pun bisa dipanggil. Angket juga punya kewenangan panggil paksa tapi coba lihat kelakuan KPK.

Ketika Pansus Angket DPR RI yang dasar legalitasnya diatur oleh konstitusi melakukan pemanggilan kepada pimpinan KPK, Pimpinan KPK menjawab kami tidak akan datang karena UU DPR sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Sementara ketika KPK memanggil Novanto sebagai pimpinan dan anggota DPR, maka Novanto juga menjawab dengan jelas bahwa sedang melakukan uji materi tentang imunitas DPR ke mahkamah konstitusi. Tapi upaya paksa terus dilakukan.

Padahal Novanto adalah manusia merdeka 100% pasca memenangkan prapradilan atas status tersangkanya. Seharusnya ada jeda untuk membaca untuk pelajaran

bersama. Tapi KPK menyerang hakim Cepi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinafikan.

Konsekuensi dari putusan prapradilan tersebut adalah Novanto tidak boleh kembali dtersangkakan dalam kasus yang sama, dan seluruh penyelidikan atas kasus yang didugakan padanya harus dimulai dari awal. (Ini keputusan hakim praperadilan).

Maka, apa salahnya jika KPK memberi waktu pada SN dan semua upaya hukum yang ada karena toh SN juga telah dicekal dan tidak boleh ke mana-mana?
BUKANKAH DIA PENJAMIN TIKET JOKOWI UNTUK MAJU DI PIPRES YANG AKAN DATANG DENGAN 14,7% kursi Golkar?

Namun tanpa melakukan pemeriksaan ulang, KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka, dan surat panggilan pertama dalam status tersangka kedua kalinya langsung berupa penggeledahan dan penahanan oleh KPK.

Bagaimana bisa seorang manusia merdeka menjadi tersangka atas sebuah kasus yang ia belum pernah diperiksa sebagai tersangka? Tapi KPK memakai istilah mangkir memberantas situasi dan fakta.



KPK ingin menunjukkan bawa mereka bisa menangkap siapa saja tapi KPK lupa dengan keistimewaan yang telah diberikan kepada begitu banyak orang; Suni dkk dalam kasus reklamasi, RJ Lino dkk dalam kasus pelindo 2, Budiono dkk dalam kasus Century, dll banyak lagi.

Saya yakin banyak Anggota DPR terpukul tapi sepertinya kesulitan bicara. Tapi oleh sebab diamnya kita semua, SN bisa di eksploitasi. Bagaimana seorang ketua partai besar seperti tak ada harganya, pendukung pemerintah sekalipun.

Kezaliman ini memang memerlukan sikap diam semua orang, seperti ada *conspiracy of silence*. Padahal ini adalah *conspiracy of fear* dan *the absence of justice*. Ini mencemaskan demokrasi kita dan mencemaskan masa depan kita.

KPK ingin kukuh dalam sikapnya bahwa negara dalam darurat korupsi dan DPR adalah sarang koruptor. Tetapi, tentu ini hanya persepsi sendiri. Kampanye KPK akan gagal karena fakta sebenarnya tidak demikian. Ujaran kebencian kepada pejabat itu yang kriminal.

Sadapan demi sadapan yang telah tayang dan dibocorkan

KPK takkan membuat kita percaya bahwa negara ini darurat korupsi. Negara kita adalah negara demokrasi. Dan negara demokrasi adalah negara normal. Sandiwara darurat hanya wacana sebab sistem ini normal.

Sikap KPK yang terus membangun persepsi darurat membuat kita menjadi negara yang tak kunjung normal dan sehat termasuk permisif terhadap KPK yg menabrak hukum dan etika kita sebagai bangsa timur yang memegang adat istiadat dan agama.

Citarasa luhur ini telah lama menjadi pola dalam negara. Saya teringat sebuah kisah tentang pengadilan atas sultan Hamid II: beliau dituduh terlibat subversi pada negara. Bagaimana sikap presiden soekarno terhadap sultan hamid II?

Beliau menyelenggarakan pengadilan secara terhormat. Sultan Hamid dijemput Jaksa Agung Muda dan dituntut oleh Jaksa Agung langsung. Hal ini karena sultan Hamid pernah menjadi menteri.

Bayangkan, apapun kita tetap harus punya hormat pada pimpinan negara. Dendam kesumat dan benci yang auranya disebar oleh KPK atas nama pemberantasan



korupsi ini bukan budaya Indonesia. Ini lebih mirip komunisme. Sedangkan Indonesia dibangun di atas pondasi agama.

Itu adalah sikap cara pergaulan kita sebagai bangsa berketuhanan. Tapi apa yang dipertontonkan hari ini adalah sesuatu yang gelap dan senyap. Orang-orang berpura-pura dan menganggap musibah pada seseorang adalah aib baginya dan kalau bisa jangan nampak punya hubungan.

Novanto sebagai ketua partai kedua terbesar, telah mendukung pemerintahan dan telah memberikan loyalitasnya terhadap pemerintahan. Kita bisa menyebut SN memimpin penyelamatan anggaran APBN mulai UU Tax amnesty sampai soal politik. Semua dilakukan untuk Jokowi.

SN mengeluh kepada saya karena kesulitan mencari waktu ketemu para pejabat sekedar untuk menyampaikan masalah sebenarnya. Presiden seharusnya mendapat laporan yang tepat. Tapi upaya itu sia-sia.

Tiba-tiba seperti tidak dikenal dan SN pergi begitu saja,

dijemput pada malam hari buta, digeledah rumahnya sampai pagi hari buta dan akhirnya dia menghilang berkendara di jalan-jalan, sampai ia mengalami kecelakaan dengan memar di kepala dan goncangan jiwa.

Pada saat ia mengalami kecelakaan, KPK membuat interpretasi sendiri dan aparat penegakan hukum ini tidak percaya dia mengalami kecelakaan. Ramai berita dan meme seolah ia berpura-pura tabrakan untuk menghindari pemeriksaan.

KPK juga seperti tidak percaya lembaga kedokteran dan rumah sakit, lalu SN dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar, dikawal oleh 40 polisi bersenjata lengkap dan dijaga oleh 4 penyidik 24 jam dengan larangan untuk menerima tamu.

Ini perlakuan apa kepada ketua lembaga tinggi negara, ketua partai terbesar kedua, pemimpin kamar legislatif, seolah ia bandit berbahaya yang disertai mafia yang bersenjata di kiri kanannya. Kalau SN berbahaya kenapa tak ada yang bela? Katanya Sinterklas?

Mari kita bersatu menghadapi persoalan ini, karena ini adalah persoalan akal fikiran yang tidak dijalankan.



Aparat penegak hukum tidak mengambil jalan hukum tetapi jalan pemaksaan dan kekerasan yang mengarah pada premanisme yang sebetulnya berbahaya.

Seandainya Novanto betul-betul merupakan mafia, tentu dia akan punya pasukan dalam tentara dan kepolisian yang juga bersenjata, paling tidak dia akan punya pasukan, toh malam itu dia sendiri bersama seorang wartawan, dia tidak ditemani siapa-siapa

Saya mendengar, efek dari itu semua justru aparat penegak hukum pencitraan. Aparat penegak hukum bahkan yang bertugas menjaga Setya Novanto sebagai pejabat pun tiba-tiba terlucuti. GEDUNG DPR SEBAGAI OBJEK VITAL NEGARA JUGA SEPI SEOLAH LEMBAGA ITU TIDAK LAYAK UNTUK DIJAGA Lagi.

Inilah saatnya kita bersatu, Reformasi kelembagaan Dewan harus dilanjutkan, saya menuntut revisi UU MD3 jadi pintu masuk bagi kesadaran kolektif anggota. Kalau bukan DPR siapa yang mengawasi negara?

#TragediSN tidak boleh terjadi lagi; *enough is enough, the power of legislatif* harus *manifes*, kekuasaan kamar legislatif untuk mengawasi jalannya pemerintahan

harus nyata, tidak boleh lagi hambar dan samar; SERTA GAMPANG DITEKAN BALIK.

Kamar legislatif ke depan harus kuat, independen, dan professional. Karena itulah dia memerlukan UU legislatif yang kuat. Saya memimpin Tim Reformasi DPR dan DPR sedang mengarah ke sana tapi nampaknya banyak yang tidak suka.

Seperti saya katakan, jika kekuasaan negara dan yang mengoperasikannya 100% maka 99% ada di tangan eksekutif. Kamar legislatif memakai kurang dari 1 % kekuasaan. Kekuasaan pengawasan harus independen. Bagaimana mengawasi kekuasaan begitu besar tanpa kemerdekaan?

Sekarang, KPK tidak mengawasi yang 99%? tapi justru setiap hari mengganyang kekuatan DPR yang hanya 1% serta membuat rekayasa kebencian kepada DPR.

Bayangkan kalau KPK sejak awal dalam kasus EKTP menyebut bahwa ada bacakan APBN 2,3 Trilyun di DPR sehingga rakyat ini saban hari memaki DPR sebagai tempat maling uang rakyat. Padahal BPK dan BPKP tidak pernah menemukan kerugian negara dalam kasus ini.



Kepada publik terus dihasut seolah proyek E-KTP gagal karena banyak rakyat yang tidak dapat blangko. Mereka lupa bahwa dari lebih 1/4 milyar rakyat Indonesia setiap tahun ada puluhan juta yang menjadi berusia 17 tahun yang memerlukan kartu baru. Jadi proyek ini gak akan selesai.

Hanya DPR YANG BISA MEMBUKA INI DAN KEPADA PANSUS ANGKET DPR SEMOGA BISA MENERUSKAN KERJANYA UNTUK MEMBONGKAR KASUS INI DENGAN SEBENARNYA.

II. SAYEMBARA SEPEDA MASIH BERLAKU. SAYA TUNGGU.

Soal skandal e-KTP begini ceritanya.....

1. Tuduhan awalnya adalah bancakan di DPR oleh anggota komisi 2 periode 2009-2014. Ada tuduhan bagi-bagi uang Rp 2,3 T. Tapi sampai sekarang, belum ada 1 pun anggota komisi 2 yang jadi tersangka korupsi. Ada tersangka, di kasus menghalangi penyidikan.
2. Sampai sekarang saya masih bikin sayembara akan memberikan sepeda, motor dan helm bagi mereka yang

bisa memberikan kepada saya perhitungan kerugian negara oleh lembaga berwenang khususnya BPK dan BPKP. Silahkan masih saya tunggu.

3. Kasus ini terjadi yang paling besar adalah dugaan bagi-bagi uang sebanyak 2,3T akhir tahun 2010 saat APBN 2011 disusun. Lalu angka itu dikonversi sebagai total kerugian negara yang sampai sekarang tak ada perhitungannya. (Ayo ikut sayembara).

4. Dan yang hebat, salah satu orang yang mengaku aktor kunci skandal e-KTP yaitu Nazaruddin tidak didakwa sama sekali bahkan menjadi JC dan bebas sebentar lagi. Jadi ada yang mengaku jadi aktor dan mengaku terima uang malah bebas.

5. Irwan dan Sugiharto, kuasa pengguna anggaran yang telah divonis sesungguhnya lebih banyak dalam kasus tender. Ini urusan bisnis persaingan para supplier. Tidak terkait pengadaan. Dan tidak melibatkan kerugian negara.

6. Tapi isunya sudah bercampur kesana kemari. Substansinya tidak ketemu. SN sebagai ketua Fraksi Golkar (bukan fraksi pemerintah) dan bukan anggota



komisi 2, menjadi anggota DPR pertama yang menjadi tersangka kasus ini.

7. Saya belum tahu bagaimana sebuah korupsi dengan kerugian trilyunan hanya ditangani sendiri oleh anggota DPR padahal keputusan ada di komisi 2 dan lobby anggaran memang merupakan tugas anggota DPR hari-hari. Kenapa ia menjadi korupsi?

8. Kalau ini hanya soal bagi-bagi uang berarti uang yang dibagi bukan uang negara sebab pembagian dilakukan sebelum APBN cair. Nah kenapa yang sudah mengembalikan tidak diumumkan dan dihukum terlebih dahulu?

9. Entahlah, semoga SN mau membuka nama-nama di belakang Nazaruddin. Orang-orang yang oleh KPK telah diajak berdamai terlebih dahulu. Partai penguasa dan mereka yang punya kendali mayoritas atas jalannya sebuah proyek raksasa.

10. Tapi apapun keterangan SN kita tahu, ini telah menjadi sandiwara pengalihan dari substansi. Skandal EKTP adalah tipuan yang keluar dari kepentingan membangun negeri. Tidak ada kerugian negara, tapi

ribut satu negara. Hanya untuk target antara.

11. Lambat laun skandal akan terbongkar. Sepandai-pandai menutup busuk akan terungkap juga. Pejabat yang tersandera ini akan ketahuan belangnya seperti yang telah pergi membawa cap berbagai-bagai; pembunuh, kesaksian palsu, pemalsu, dan banyak lagi. Berdoalah untuk kesejatan.

12. Pimpinan KPK sekarang adalah yang paling tersandera dan terlibat negosiasi kasus terbesar sepanjang sejarah kepemimpinan lembaga ini. Akan terkuak kelak. Semoga Allah SWT memberi kita umur untuk membuka dan mengadilinya di depan publik. Kepalsuan akan terbakar sirna!

13. Penutupan kasus pimpinan KPK yang terlibat #SkandalEKTP adalah salah satu kejahatan yang akan membuka mata publik. Mereka menyelenggarakan hukum bukan untuk menyelenggarakan keadilan dan kepastian tetapi untuk saling sandera karena semua mereka punya kasus.



III. PROF MAHFUD, SATU UJUNG KASUS INI: BOHONG!!

Pak Mahfud mendingan bapak wawancara pak Gamawan Fauzi sebelum bapak tulis soal EKTP supaya jangan tambah jauh kelirunya.

Saya lebih percaya pak Gamawan daripada ketua KPK Agus Raharjo. Nanti waktu akan membuktikan pak. Pakailah hati bapak membaca realitas.

Nampaknya semua tulisan bapak adalah versi KPK saja. Gapapa, tapi berani gak bapak sedikit menyela dengan pertanyaan dan jawaban yang disembunyikan dan tak pernah nampak di ruang publik.

Misalnya, “Kenapa SN jadi aktor utama, kenapa bukan partai pemerintah?”

Ini bukan soal SN yang sudah jadi terdakwa. Silahkan SN diteruskan.

Tapi hak publik adalah mendapat jawaban atas keanehan. “Kenapa Nazar yg mengaku jadi aktor utama bukan tersangka? Bukankah pengakuan adalah alat bukti yang sempurna? Ada apa? Apa yg disembunyikan?”

Kalau Pak Mahfud ketemu KPK tanya 1 aja: “Kenapa peran LKPP yg dipimpin Agus Raharjo selama tender hilang dalam semua dakwaan?”

Bukankah Agus Raharjo sangat aktif dalam Kasus EKTP? Kenapa lobby Agus untuk satu konsorsium tidak diungkap? Ah tipu semua...

Masih banyak...

Saya hanya khawatir Mahfud, soal SN minta JC itu bukan soal kebenaran kasus... tapi soal SN mau bilang, “Hei KPK, saya sama dengan Nazar...”. Jadi kalau KPK besok setuju bukan untuk kebenaran tapi agar kasus ini terisolir...

Apa yang mau bapak buktikan dalam #KasusEKTP sebagai kepentingan publik?

Kerugian negara? Ayo bapak ikut sayembara...sepeda, motor dan helm menunggu bapak...???

Maksud saya kita lagi bahas apa sebenarnya? Ini bohong pak. Masak gak masuk akal bapak sih?



#KasusEKTP adalah cara KPK menunjukkan kesaktian baru bahwa KPK bisa tangkap ketua DPR. Hanya itu kok.

Tapi ini hanya akan dibatasi 1 orang saja. Yang lain sudah hilang dalam dakwaan wahai prof Mahfud jadi mungkinkah korupsi aktornya 1? Ayolah prof kita bahas...

Saya tahu rakyat ditipu dalam Kasus EKTP ini... dan saya tetap bilang rakyat ditipu... sampai yang dibbilang bancakan 2,3 T itu memang ada dan memang merugikan keuangan negara.

Kalau tidak, maka saya bilang rakyat ditipu! Kalau ada yang mau ditipu silahkan tapi jangan tipu rakyat!

Tuduhan pada SN dalam dakwaan Irman, Sugiharto dan Andi tadinya SN dituduh terima sekitar Rp 500 Milyar.

Sekarang dalam kasusnya sendiri SN hanya dituduh terima Rp 70 Milyar dan jam tangan.

Dan tuduhan yang 500 M hilang! $500-70=430$ Milyar bedanya!!

Saya tahu ujung kasus ini, satu kata: BOHONG!

Sebuah persidangan diselenggarakan oleh KPK bukan untuk mencari kebenaran materil tentang “siapa berbuat apa, bersama siapa, di mana dan merugikan negara berapa”. Tapi sebuah drama untuk mengisi ruang publik yang gamang.

Saya sedih karena guru besar hukum ikut gamang,
bagaimana rakyat umum?

Tidak melihat bahwa hukum sedang diajak bermain-main dan masuk ke ruang gosip publik yang jauh dari substansinya.

Gak usah menjawab rakyat dapat apa selain hiburan...
menjawab “ini soal apa” saja mereka gagal

Lalu kita lupa,

Bahwa pada masa lalu ada sebuah prestasi anak bangsa melahirkan sistem nasional yang terintegrasi sehingga ada 294 lembaga negara sekarang menggunakan database EKTP untuk kepentingan yang luar biasa. Kita semua sedang dirongrong oleh ketidakpercayaan diri.

Masih banyak yang saya ketahui soal ini. Bismillah.... saya akan buka satu persatu... sampai keterangan yang benar didengarkan rakyat...



Pesimisme pada bangsa sendiri ini dibuat oleh
pengkhianat!
#Waspadalah!

IV. 13 CATATAN UNTUK PROF MAHFUD MD

Ijinkan saya memberi komentar.

Pertama, saya mempersoalkan istilah
#MegaKorupsiEKTP yang misleading karena justru
kerugian negara belum dihitung oleh pihak yang legal.
Angka 2,3T itu faktanya tidak ada dan tuduhan terbesar
ke SN Rp. 500 M sdh dihapus, sisanya 70 milyar

Kedua, bagaimana disebut korupsi berjamaah paling
besar jika tersangkanya di DPR hanya SN? Setahu saya
yang artinya berjamaah harus lebih dari 1. Tersangka lain
2 pegawai Kemendagri dan seorang pengusaha. Adapun
yang lain, hanya 1 pengusaha.

Ketiga, saya setuju dengan kesimpulan prof @
mohmahfudmd sebab ini semua tidak bermula dari audit
BPK, tapi dimulai dari nyanyian Nazar. Lalu memaksa
KPK mencari korban. Nanti akan nampak diujung.

Keempat, saya bilang bukan tidak ada korupsi 3 kali audit BPK ada kerugian negara kecil sekali itupun hanya kurang bayar. Mustahil uang 5,7 T bocor 0. Tapi KPK bilang bancakan 2,3T? Melibatkan hampir semua anggota komisi 2? Padahal komisi 2 belum ada tersangka? SN bukan komisi 2.

Kelima, fakta ini adalah permainan antar supplier yang sampai ke pemerintah. Dia gak akan menciptakan kerugian negara baru. Itu adalah kesalahan pengusaha vs pengusaha. Dan setiap tender yg sub kontraktornya banyak biasa terjadi. Lalu mereka lari ke pemerintah.

Keenam, justru ini menarik prof. Kenapa yang mengembalikan uang katanya 14 orang justru tidak dihukum? Kalau gitu SN juga bisa dong?

Ketujuh, jangan lupa Prof Mahfud bahwa Andi Narogong sudah menjadi JC maka dia harus terima bahkan ngaku. Itu kata Prof Mahfud sendiri.

Kedelapan, orang itu namanya ibu Mustoko Weni (Fraksi Golkar anggota komisi 2) meninggal 18 Juni 2010 tetapi dituduh bagi-bagi uang sepanjang Oktober 2010. Sekitar



5 bulan setelah meninggal kok bisa bagi-bagi uang?

Kesembilan, kalau ini sudah terlalu sering prof, KPK menyebut nama orang sampai rusak hubungan keluarga, hancur usahanya, dll. Terlalu banyak korban.

Kesepuluh, itulah prof kenapa saya katakan. Bawa semua ini adalah persekongkolan kolaborasi untuk mengatur perkara yang tujuannya bukan penegakan hukum tetapi sandiwara belaka

Kesebelas, saya senang akhirnya prof Mahfud jumpa pak Gamawan. Menurut saya dia lebih bisa dipercaya daripada ketua KPK yg punya interes atas kasus ini.

Keduabelas, Gamawan, meniti karir dari bawah lebih dari 30 tahun dan terkenal sebagai pejabat berintegritas dan menerima piagam berbagai lembaga tapi mau dihancurkan karena Agus Raharjo punya masalah. Nanti akan terbuka prof.

Ketigabelas, demikianlah catatan saya prof Mahfud semoga dukungan bapak kepada KPK tidak disalahgunakan dan akhirnya bapak kecewa kemudian. Siapa yang tidak anti korupsi...? Bukan itu masalahnya karena hukum itu sukses bukan oleh hasil tapi oleh adil...

V. DUKUNG PANSUS ‘KTP TERCECER’

Orang tidak mengungkap hubungan antara e-KTP tercecere dengan para supplier-nya dan kementerian yang membayar pengadaannya. Orang sibuk membahas keterangan Nazaruddin tentang uang beredar di antara anggota DPR tapi lupa memeriksa permainan tender yang bikin tercecere.

Skandal EKTP itu ada 2: pertama yang sekarang heboh tetapi gak mau diungkap soal kenapa ada kelebihan cetak? Bagaimana kalau ada penggelembungan jumlah pemilih di database?

Kedua, yang dramanya sudah selesai dengan dipenjaranya SN sahabat NZ. Drama selesai tapi kepalsuan tidak.

Keanehan dalam skandal EKTP ini adalah karena KPK tidak mau menelusuri proses tender sampai adanya pemenang yang punya akses kepada data penduduk/pemilih Indonesia, pencetakan dan yang menyebabkan semua kekacauan sampah EKTP hingga lahirkan keraguan pada Pemilu 2019.



Dalam Skandal EKTP yang diributkan malah sesuatu yang awam. Soal bagi-bagi uang dari pengusaha sebelum tender. Belum ada peredaran uang negara. Keributan ini bukan tentang kerugian negara tapi soal bagi-bagi *fee* antara pengusaha sebelum ranah negara. Sementara masalah inti lupa.

Seandainya KPK mau mendalami surat-menyurat antara Kemendagri dan LKPP yang diketuai oleh Agus Raharjo (Ketua KPK sekarang) tentu beda cerita. Akan terungkap bagaimana modus penyimpangan data kependudukan yang sangat berpotensi lahirkan kecurangan dalam pemilu.

Ini salah satu twit saya hampir setahun lalu. Silahkan TV ONE News dan Bang Karni Ilyas melakukan investigasi lanjutan. Terimakasih.

BAGIAN KETIGA PULUH **AKU TAK AKAN DIAM**



“

*Menyelesaikan problem dalam demokrasi
dengan cara totaliter itu tidak saja bodoh
tapi merusak negara*

”



I. KORUPSI ITU MUDAH DIOBATI

Pahlawan anti korupsi kesiangan ini otaknya kosong... hanya satu kata dalam otaknya “Hidup KPK!” Setelah itu dianggap masalah selesai..

Mereka pahlawan kesiangan tapi sebenarnya merupakan generasi otoriter....mereka menikmati kekuasaan sebagai cara bernegara.. kuno!

Menyelesaikan problem dalam demokrasi dengan cara totaliter itu tidak saja bodoh tapi bikin rusak negara...

Korupsi adalah penyakit rezim totaliter...karena rumus korupsi adalah $C = \text{Monopoli} + \text{Diskresi} - \text{Akuntabilitas}$. Monopoli ada di mana?

Diskresi sudah kita sisir!

Dan akuntabilitas meluas akibat pengawasan publik. Ini watak sistem demokrasi.

Sebaliknya negara totaliter itu jelas penuh monopoli. Politik, ekonomi, dll. Semua pejabat dapat diskresi. Habis gitu gak ada pengawasan.

Masa itu gelap...

Teknologi belum mendukung kebebasan sipil... waktu itu serba sulit mengkritik pejabat...

Ketertutupan sistem membuat pejabat berbuat seenaknya; korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN kata generasi itu...

Di era itu hidup ini seperti milik segelintir orang. Penguasa dan para kroni. Ruang publik pengap penuh dikte dan propaganda...

Sadarkah kita perubahan ini?
Mengertikah kita bahwa kebebasan ini mahal? Situasi ini membuat ruang otoritarianisme menciut

Ini fakta,
Ini tidak bisa dibantah bahwa ruang publik kita telah disehatkan oleh udara bebas nan segar...

Sampai di sini coba kita merenung mendalam...apa yang kita takutkan? Menurut saya ketakutan ini diciptakan...

Korupsi ini adalah momok...
Ini perang momok...
Perang hantu...



Perang persepsi ..
Korupsi imajinasi...

Negara punya penyakit baru; korupsi adalah penyakit lama. Tetapi menciptakan masalah agar ada program negara, adalah korupsi baru..

Maka,
Histeria ini adalah dibuat seolah ruang publik kembali pengap oleh korupsi...seolah ini era kegelapan...

Sampai di situ masih belum terlalu jahat, lebih jahat ketika justru korupsi ditutupi oleh versi fiksinya agar kerugian negara tak terbaca..

Mereka melewatkan kasus-kasus hasil audit kerugian negara dengan hura-hura amplop tipis gratifikasi...

Skandal Century 6,7 T, BLBI trilyunan, kasus Hambalang 2,5 T, Pelindo2 4,08 T, Sumber Waras Reklamasi, dll... berhenti..

Sementara yg bikin ramai adalah amplop-amplop kecil dari ucapan terima kasih swasta...pipa APBN nyaris tak tersentuh...

Inilah yang menurut saya kejahatan pemberantasan korupsi yang dikorupsi oleh imajinasi palsu...

Saya tidak mau dibohongi...

Saya tidak mau ditipu...

Meski dituduh korupsi...

Saya tidak peduli...

Saya lawan!

Ini soal kebohongan yang telah kadung menjadi kebenaran karena dipuja dan tidak pernah mendapat kritik..

Mereka bisa mempersoalkan reputasi saya...tapi mereka gagal menjawab kritik saya...

Maka saya percaya KPK baru bisa benar kalau otak lebih dominan dari otot...ini kerja demokrasi...bukan kerja otokrasi...

Kecerdasan adalah obat rezim demokrasi sementara dalam rezim otoriter yang diperlukan adalah alat pemukul...kuno!

Mari kita benahi akal budi kita...perbaiki niat kita dan



jernihkan hati kita...Situasi ini mudah kita atasi...

Ayo bersama,

Lawan fiksi korupsi...

Hadapi diri sendiri dengan pikiran bersih...ini semua mudah kita atasi ...

II. SEMBOYAN MEREKA: KATAKAN BOHONG KARENA MANIS

Seburuk-buruk kelakuan adalah menganggap orang lain salah padahal benar, hanya karena berbeda dengan pendapatnya.

Aku tidak korupsi, ALHAMDULILLAH lebih 14 tahun jadi pejabat tidak ada kasus korupsi.

Tapi dianggap tidak anti korupsi hanya karena suka kritik pemberantasan korupsi.

Aku janji bisa berantas korupsi lebih cepat, aku tahu cara habisi pungli, mahar politik dan korupsi pejabat publik.

Aku buktikan aku tidak ikut gaya hidup korupsi tapi tetap

saja aku tidak pro-pemberantasan korupsi karena suka kritik KPK.

Aku ikut pemilu, pemilihku senang sama aku, aku dipilih setiap pemilu terus tambah banyak.

Terakhir aku dipilih dengan suara terbanyak di dapilku. Juga terbanyak di partaiku.

Tapi aku disebut tidak disukai rakyat karena suka kritik dan berbunyi ??

Mungkin maunya, aku korupsi aja, tapi diam dan pujilah pemberantasan korupsi OTT dan sadap sana sini.

Mungkin maunya aku diam, atau puji segala aksi pejabat dan Jokowi lalu di belakang punya proyek dan koneksi.

Mungkin maunya; lu bego aja yang penting muji-muji.

Atau jangan kritik aja yang penting dapat bisnis dan koneksi.

Atau korupsi aja gapapa, tetapi puji aksi pemberantasan korupsi.



Atau apa maunya?

Dasar penipu,
senang menipu.
Senang ditipu.
Dasar pembohong,
suka bohong,
Senang dibohongi.

Semboyan mereka,
katakan bohong karena manis.
Jangan jujur karena pahit...
Pegeeeelll!

Mari kita jaga akal bangsa kita,
Mari kita berjihad meluruskan pikiran semesta....!

#MerdekaBro!

III. SURAT KEPADA KPK, 'MALAIKAT SUCI BERWUJUD MANUSIA'

Ini surat kepada KPK yang selalu gagah berani membuat norma baru dalam hukum negara.

Kali ini, mereka akan mengumumkan calon tersangka Pilkada. Hebat luar biasa. Maka Ijinkan beta mengingatkan saja.

Di awal pemerintahan Pak @jokowi dan @Pak_JK itu KPK melakukan seleksi nama anggota kabinet.

Daftar panjang yang dibawakan kepada mereka diberi tanda: MERAH, KUNING, HIJAU. Tanda2 ini dikaitkan dengan jarak seorang jadi tersangka

Arti coretan (stabilo) @KPK_RI waktu itu berkembang dan menyebar:

- MERAH: sebentar lagi jadi TSK.
- KUNING: berpotensi jadi TSK (katanya dalam 6 bulan)
- HIJAU: bebas kasus di KPK.

Jadilah kabinet @jokowi - @Pak_JK berubah nama.

Tapi apa yang terjadi? Nama-nama orang dalam coretan stabilo berwarna telah menyebar. Arti dari warna telah menyebar pula.

Betapa malu satu keluarga dan betapa orang merasa terhina. Nama cemar oleh warna-warna.



Ternyata, nama-nama cemar itu tak muncul jadi tersangka. Sebagian mereka telah menjadi korban kerusakan nama, sebagian telah beralih ke jabatan lainnya.

Tapi @KPK_RI tanpa rasa bersalah tak mau membuat koreksi atas nasib orang yang hancur namanya; gagal jadi menteri dan rusak nama.

Jangan lupa. @KPK_RI juga meminta @DPR_RI dan @PresidenRI @jokowi untuk batalkan calon Kapolri Budi Gunawan.

Padahal nama sudah masuk komisi 3 lalu disahkan paripurna. BG tetap jadi tersangka setelah eksekutif dan legislatif meloloskannya

Karena dijadikan tersangka @KPK_RI lalu BG melakukan praperadilan (uji judikatif) lalu MENANG.

Apa tanggungjawab KPK setelah BG digagalkan jadi Kapolri? Mereka diam saja. Lalu BG menjadi kepala BIN. Banyak LSM yg terlibat kampanye negatif ini.

Ada yg bilang konflik dengan BG adalah perpanjangan

konflik dalam Pilpres 2014 saat @KPK_RI ingin ajukan wakil dari salah seorang pimpinan KPK.

Tapi ibu Mega memilih pendamping @jokowi adalah @ Pak_JK dan ada kemarahan luar biasa. Muncullah konflik memakai lembaga.

Sejak @KPK_RI merasa menjadi alat ukur moral pejabat publik, mereka mengembangkan metode untuk mengatur opini bahwa KPK berhak mengatur alur politik bangsa.

Setelah Pilpres, sekarang melalui Pilkada. KPK akan umumkan tersangka.

Kata agus Rahardjo ketua @KPK_RI ada 90% dari calon akan jadi tersangka. Entah dari 171 daerah itu akan diberi coretan stabilo MERAH, KUNING, HIJAU, yang manakah?

Mana yang akan menyandang calon tersangka seumur hidupnya?

Di tengah malam saya menulis mengingatkan KPK. Jangan main api, jangan korbankan pesta demokrasi dan



jangan rusak apa yang telah ada .

Pilkada adalah peristiwa demokrasi rakyat. KPK jangan berpolitik dan jangan ikut-ikutan main politik.

Jika KPK tidak menahan diri dan terlibat dalam politik ini silahkan. Kalau ada apa-apa tanggung sendiri.

Saya masih mengerti akibat permainan KPK selama ini; dendam, rasa tak pasti dan mengorbankan ekonomi. Lalu kerja KPK untuk siapa, dan untuk apa keributan ini?

Himbauan Menkopolkam pak Wiranto sebetulnya sekedar mengingatkan akibat dari kekacauan ini. Peserta Pilkada lalu akan saling mencurigai bahwa ada yang bermain hakim sendiri.

IV. PERSEKONGKOLAN SEMPURNA NAZARUDIN DAN KPK

Penipuan!

Kebohongan publik!

Skandal korupsi terbesar dalam sejarah !

Saya sajikan beberapa slide awal yang sudah banyak beredar supaya publik jangan mau ditipu oleh persekongkolan @KPK_RI dengan Nazarudin. Ini adalah persekongkolan untuk melindungi kejahatan di kedua belah pihak.

Kita tidak boleh lupa dengan pohon korupsi Nazaruddin karena seharusnya dialah yang menjadi awal persoalan tetapi oleh @KPK_RI nazar diselamatkan untuk kepentingan persekongkolan dan kebohongan drama korupsi selama ini.

Jangan lupa, Nazar bukan pengusaha tapi dia anggota DPR dari partai berkuasa. Maka lihat proyeknya luar biasa.

Lihat saja daftar proyeknya. Kok bisa orang kayak begini justru dilindungi dan dibebaskan @KPK_RI atas alasan berjasa?

Ini rekam total proyek Nazaruddin yang sekarang dalam perlindungan. Dari 162 proyek yang diproses hanya 6 dan nazar hanya dituntut di 2 proyek. 4 proyek dituntut tanpa nazar sebagai tersangka tapi sopir, OB, staf dll supaya bungkam.



Lihat betapa saktinya nazar. Kasus begitu banyak tapi dia dijerat begitu sedikit. Sekarang sudah bebas luar biasa. Mantan presiden PKS LHI tidak terima suap dijerat 18 tahun. Nazar sudah bebas LHI bebas 2032 jika tanpa remisi.

Beginilah harta2 Nazaruddin disimpan. Sebagian juga dimiliki bersama oleh oknum penegak hukum sebagai bagian dari kerjasama.

Harta Nazaruddin meledak sejak dia menjadi bagian dari partai berkuasa. Ia menggunakan segala kuasa untuk menambah harta. Tiba-tiba dia bebas oleh @KPK_RI, lalu apa yang disebut *Grand Corruption* yang digemborkan KPK?

Tidak saja itu, Nazar dan KPK juga mengorbankan anak buahnya Nazar demi memperlancar persekongkolan mereka. Ini memang gila!

Anak-anak muda miskin ini mendekam di penjara tanpa masa depan sementara bos-nya sebentar lagi keluar sebagai orang kaya dan @KPK_RI menganggapnya pahlawan yang berjasa.

Demi membela para korban Nazar dan KPK, data ini kita sampaikan kembali untuk Melawan Lupa bahwa persekongkolan membebaskan nazar adalah skandal besar di negara kita.

Inilah Nazar sang Pahlawan KPK yang justru akan dibebaskan padahal memiliki begitu banyak perkara.

Dari penjara nazar tetap mengoperasikan bisnisnya karena seluruh hartanya dijaga oknum @KPK_RI yang kini tidak kena TPPU. Kok bisa? Ini semua persekongkolan sempurna.

Begitu keluar penjara nazar langsung jadi orang kaya. Kepada seorang narapidana dia pernah berkata, “Bang, nanti keluar penjara kita beli partai dan berkuasa lagi”. Hebat kan?

Inilah data sementara yang pernah dibuka dalam Pansus Angket KPK. Semoga kita Melawan Lupa dan tetap waspada karena @KPK_RI dan Nazar sedang menipu bangsa Indonesia. Hanya satu kata, Lawan !



V. KARENA CURANG ADALAH KORUPSI, MAKA KPK TELAH JUGA KORUP

Saat Khutbah Jumat (8/9) di masjid, khotib membahas hadits: “Barangsiapa mencurangi kami maka bukan dari golongan kami” [HR Muslim, kitab Al-Iman No. 101]

Hadits ini oleh para ulama fiqh diaplikasikan secara luas, mulai nyontek di kelas sampai mengurus negara.

Asbabul Wurud (sebab keluarnya hadits) itu adalah ketika suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan di pasar madinah.

Beliau melihat seorang pedagang kurma yang menaruh kurma yang bagus di atas, dan yang busuk disembunyikan di dalam karung.

Lalu beliau memeriksa.

Beliau SAW memasukkan tangan ke dalam karung dan mengambil kurma busuk itu seraya bertanya, “Hei pedagang ada apa ini, sambil menggenggam kurma busuk di depan pedagang”.

Pedagang menjawab, “Ya Rasul, tadi terkena hujan”.

Padahal Madinah jarang hujan.

Maka, keluarlah hadits yang artinya tadi, “Barangsiapa mencurangi kami maka bukan dari golongan kami”, sebuah pernyataan yang keras tentang KECURANGAN.

Hadits itu mengandung makna yang kuat sekali dalam muamalah; negara, pasar atau sosial.

Saya mencoba menetralsisir tafsir arti CURANG dalam pengertian isu kekinian. Ternyata KORUPSI itu berasal dari kata CORRUPTIO yang salah satu arti dasarnya adalah CURANG.

Coba kita dalam, agar kita temukan jalan keluar.

Kita lanjutkan, maka menurut saya inti dari PRILAKU korup itu ada pada sifat CURANG.

Inilah yang lebih dalam dan lebih substantif dari seluruh definisi yang ada.

Saya telah membaca semua definisi tetapi inti dari korupsi adalah CURANG dengan berbagai bentuk.

Kalau kita memahami bahwa curang itu korupsi maka kita akan menghindari curang di mana pun ia berada; di



ruang kelas, di timbangan dagang, di anggaran negara, dalam kewenangan, dalam jabatan, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, guru, kyai, ulama, dll. Semua haram!

Karena itulah, definisi formal dari tindak pidana korupsi itu saking luasnya, maka banyak yang mencoba memasukkan semuanya.

Padahal kita tidak sanggup. Kalau dimasukkan semua nanti justru akan merusak makna inti bahwa curang itu korupsi dalam negara.
Jangan berbelok.

Itulah yang inti sebetulnya, CURANG yang kita cari dalam definisi korupsi adalah curang dalam perspektif kerugian negara.

Curang yang merugikan negara. Curang yang dalam perspektif private sudah ada hukuman lainnya, misalnya penipuan, pemalsuan, dll.

Karena itu, dalam UU 30/2002 telah ada beberapa unsur yang sebetulnya harus difokuskan:

1. Seseorang.

2. Melanggar UU.
3. Memperkaya diri dan orang lain.
4. Merugikan Keuangan Negara.

Maka empat unsur ini pendekatannya sitemik untuk melacak bahwa curang itu korupsi.

Dalam pengertian UU 30/2002 maka yang disebut korupsi itu harus memenuhi 2 unsur tersebut.

Sebagian pakar malah menyebutnya, khusus untuk KPK RI untuk memenuhi kehati-hatian harus ada 3 unsur. Sebab KPK tidak ada SP3, dia gak boleh salah.

Tapi, KPK sekarang sudah tidak gemar memakai UU 30/2002. KPK lebih gemar menghukum niat dalam delik; suap, gratifikasi, percobaan, turut serta, dll secara bercampur.

Padahal, kalau kita membaca secara teliti, UU KPK justru lahir untuk membenahi sistem.

Maka, perpindahan perhatian KPK dari SISTEM kepada “PERILAKU” memiliki konsekuensi yang luas pada waktu penyelesaian korupsi.



PERILAKU manusia itu labil sementara SISTEM itu yang stabil. Maka amanat UU 39/2002 adalah perbaikan sistem. Harusnya KPK fokus.

Beda cara kerja KPK sebagai aparat sistem dan KPK sebagai polisi moral saya akan jelaskan khusus nanti, tetapi yang agak mendesak adalah kita kembali ke definisi curang itu korupsi.

KPK sebetulnya telah berlaku curang.
Maka kita bisa menganggap KPK juga korup.

Pertama, kenapa belok dari tugas dalam UU 30/2002? Sementara di sana jelas KPK ditugaskan untuk kerja membangun sistem.

Kedua, mengapa beralih kepada fungsi intelijen sehingga penegakan hukum bercampur dengan operasi intelijen. Sesuatu yang terlarang.

Ketiga, kenapa memproduksi banyak norma hukum baru yang sebetulnya tidak ada dalam UU seperti OTT itu?

Keempat, kenapa menyibukkan diri dengan soal baru padahal soal lama tidak selesai? Jangan-jangan ini adalah pengalihan?

Bukankah curang kalau menutup kasus Century dengan kerugian negara 6,7 T? Kasus itu sudah matang mengapa berhenti?

Bukankah curang jika mengalihkan Kasus BLBI kepada pemain kecil?

Bukankah curang membuat kita lupa dengan Kasus RJ Lino di Pelindo 2?

Saya bisa membuat list begitu banyak kasus yang oleh KPK didiamkan. Dibelokkan, dihentikan diam-diam, dinegosiasikan, dipakai mengancam, dipakai barter, dll.

Seperti kasus pejabat partai dipanggil karena disebut namanya sementara pejabat partai lain didiamkan.

Saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam pengertian curang itu korupsi maka KPK juga melakukan korupsi yang begitu banyak termasuk dalam propaganda dan kebohongan publik.

Tapi, selama ini seolah lenyap karena KPK tak boleh dipersalahkan.



Semoga, catatan kecil ini menyadarkan kita bahwa curang itu korupsi dan sampai kapanpun begitu.

Curang itu sifat pengecut, tidak berani apa adanya. Curang itu main belakang. Mengintip kesalahan lawan dan menyembunyikan kesalahan kawan. Itulah yang terjadi.

Ini akan ada akhirnya sebab curang adalah dosa yang dipantau langit.

Barang siapa yang curang pastilah dia zalim dan tidak adil. Tuhan pasti Maha Adil menghadapi mereka yang curang dan yang dicurangi.

Wallahu a'lam.

BAGIAN KETIGA PULUH SATU
**KORUPSI SISTEMIK,
BERTINDAKLAH SISTEMIK**



“

Kita bisa membuat perilaku korup dan teror itu semakin lama semakin tidak terdengar. Dan jawabannya bukan uang dan kekuasaan tetapi kecerdasan.

“



I. GAK USAH JAGO, YANG PENTING SERIUS KERJA, MAFIA BERAS GAMPANG DITUMPAS

Jika negara ini punya sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yg hebat, seharusnya mafia-mafia dan pemburu rente ekonomi itu bisa diendus keberadaannya dari akar persoalan.

Sebagai contoh, isu impor beras kemarin. Negara dalam kondisi aneh. Publik saja bertanya-tanya. Ini produksi beras banyak, lagi musim panen kok tiba-tiba impor beras?

Seharusnya ini kan membunyikan “alarm” sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Memberantas mafia pangan tak cukup dgn jargon lalu kampanye, seperti parpol. Penegak hukum harus kerja senyap tapi sistematis.

Tidak gaduh, efektif, hasilnya kelihatan. Korupsi hilang mafia hilang.

Cara kerja senyap dan efektif itu butuh pemahaman

mendalam terhadap relasi negara dan pasar.

Dalam spektrum relasi tersebut ada yg namanya kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan pemerintah dalam mengelola pasar (government failure).

Di antara spektrum tersebutlah perilaku korup dan pemburu rente berkeliaran. Tidak perlu sadap-menyadap.

Cukup jeli perpikir dan bertindak aja. Ini yang saya sebut sebagai pendekatan sistem yang senyap tapi efektif.

Secara teori, adanya permainan harga dalam pasar beras adalah hal yang sangat mungkin. Karena struktur pasar beras ini bukan pasar persaingan sempurna melainkan pasar persaingan tdk sempurna (imperfect market).

Harga beras terbentuk tidak serta merta karena kekuatan tawar menawar yg imbang antara produsen dan konsumen.

Konsumen dalam posisi lemah dibanding produsen. Maka produsen bisa main-main dan mereka ini ketahuan kok siapa-siapa saja.



Catatan: produsen adalah penghasil beras yg membeli gabah dari petani untuk diolah jadi beras dan disimpan dalam gudang.

Produsen juga yg membeli beras dari impor (importir). Pemainnya mudah ditelusuri dan tentu ada datanya.

Mengapa posisi produsen bisa lebih kuat dibanding konsumen? Karena pemain dalam produksi beras (membeli gabah, mengolah dan menyimpan) membutuhkan modal yang besar sehingga agar efisien membutuhkan skala produksi yang besar.

Ingat, bahwa padi tidak bisa panen sepanjang tahun, sehingga butuh gudang besar untuk penyimpanan, butuh biaya besar pula utk distribusi krn konsumen menyebar sedangkan sentra beras hanya ada di daerah-daerah tertentu.

Sehingga jumlah produsen yang terbentuk dalam pasar relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah konsumen (yang hampir semua rakyat indonesia butuh beras).

Nah, dalam teori struktur pasar, kondisi tersebut membentuk struktur pasar oligopolis.

Struktur pasar akan mempengaruhi cara atau strategi produsen menetapkan harga (pricing).

Kalo struktur pasarnya persaingan sempurna harga adalah given, produsen tidak bisa menetapkan harga semaunya (price taker).

Kalo struktur pasar monopoli, produsen bisa sebagai price maker, produsen bisa menetapkan harga semaunya. Kalau database negara kuat maka para oligopolis ini pasti ketahuan.

Nah, bagaimana kalau struktur pasarnya oligopolis? Tentu harga ditetapkan oleh beberapa produsen dengan berbagai strategi.

Biasanya harga yg terbentuk adalah hasil kompromi antara para oligopolis. Sehingga “*nature*”nya, harga yang terbentuk adalah kolusi.

Makanya struktur pasar oligopolis memunculkan istilah kartel. Dan dalam pasar beras ini indikasi kartel pasti ada karena naturenya adalah oligopolis.

Makanya beras tidak diserahkan pada mekanisme pasar,



ada regulasi harga batas atas dan bawah serta ada Bulog yg menjaga stabilitas stok.

Kalau pemerintah bisa menjalankan perannya dgn baik. Menteri akur dan kompak dan tidak ada kongkalikong dengan pengusaha. Seharusnya tdk ada masalah dgn regulasi dan institusi yg menstabilkan harga dan stok beras.

Tapi kalau semua berjalan aneh. Harusnya alarm pencegahan dan pemberantasan korupsi berkedip-kedip dengan sendirinya.

Dan inilah arti supervisi, koordinasi dan monitoring dalam UU No. 30/2002. Tugas @KPK_RI harusnya fokus di sini.

Tapi, kita semua punya perhatian lain. Sistem tidak perlu dibenahi dan rakyat terus menjadi korban sistem yang buruk.

Tapi sebagai korban yang menonton OTT yang mengasyikkan sehingga hilanglah rasa penderitaan. Demikianlah nasib kita.

II. NEGERI YANG FRUSTRASI KARENA KORUPSI

Jika sebuah mesin pesawat terbang mengalami kecelakaan maka segera setelah itu akan dilakukan investigasi menyeluruh. Tentang apa sebab terjadi kecelakaan dari seluruh aspeknya. Ini soal mesinkah atau human error kah?

Tim bekerja untuk melacak secara detail kejadian. Perusahaan pembuat pesawat juga turun dan semua diteliti termasuk teknologi sampai detail sekali. Latar pilot dilacak serta percakapan dalam kotak hitam diungkap. Lalu diambil kesimpulan.

Kesimpulan-kesimpulan yang terakumulasi digunakan untuk memperbaiki operasi kedepan. Hal ini membuat penerbangan pesawat terbang menjadi moda transportasi paling aman di dunia. Jarang sekali terdengar adanya kecelakaan.

Itu metafora yang saya ingin sampaikan bahwa operasi sebuah negara juga bisa diumpamakan seperti industri penerbangan. Ada mesin birokrasinya, ada manusianya dan tata cara kerja yang disepakati.



Negara dan Lembaga-lembaga yang ada di dalamnya terdiri dari elemen-elemen yang kompleks tetapi tradisi bernegara lebih tua daripada tradisi industri pesawat terbang. Karenanya pengalaman melakukan Audit Negara jauh lebih banyak.

Seperti pesawat, jika ada kecelakaan dalam negara semisalnya korupsi maka negara telah lama melakukan investigasi dan menemukan apa sebabnya. Audit Negara telah menemukan apa sebab korupsi dan bagaimana cara mengatasinya.

Tradisi itulah yang melahirkan negara-negara besar dan bahkan tradisi itu juga yang mengajarkan kepada kita kapan negara itu menjadi besar dan menguat serta kapan suatu negara dan imperium menjadi rapuh dan jatuh.

Tapi hari ini, ada sebuah negara setelah lebih 72 tahun merdeka tapi belum tahu. Adanya menyelesaikan kecelakaan bernama Korupsi. Semua orang frustrasi dan bahkan menyimpulkan ini gak bisa diperbaiki. Coba bayangkan!

Saya lebih ngeri tadi setelah mendengar pernyataan wakil ketua @KPK_RI Laode Syarif yang menyampaikan

bahwa tidak ada masalah sistem dalam Korupsi di Indonesia dan ini semua masalah moral dan meminta semua orang bertobat.

Saya ingin sampai di sini dulu untuk membiarkan kita memikirkannya secara baik. Sebab jangan-jangan kita memang tidak punya jalan keluar. Karena yang dipaksakan bukan Audit Negara tapi semacam fiksi dan jurnalisme.

III. KORUPSI & TERORISME ITU SAMA PENANGANANNYA, YAITU SISTEM. PAKAI OTAK BUKAN UANG

Pemerintahan yang setiap hari meminta kewenangan tambahan dan uang APBN tambahan adalah pemerintahan gagal. Lawan!

Konstitusi negara UUD 1945 adalah pagar dan payung warga negara bagi perlindungan HAM dan menjaga agar pemerintah tidak melampaui batas.

Dan ini adalah salah satu konstitusi terbaik di dunia. Yang ingin menjadi otoriter gak cocok pakai Konstitusi



ini. Lupakan!

Semua UU yang dibuat pasca amandemen ke-4 UUD'45 adalah UU yang mengandung proteksi HAM.

Ada yang dibuat sebelum itu yang mengandung kemarahan di dalamnya seperti UU KPK No.30/2002.

Karena itu lihatlah hasil-nya. Kewenangan besar, uang APBN besar hasil nihil. BOHONG!

UU yang dibangun setelah dipompa kemarahan biasanya begini: marah dengan kejadian dan dramanya, lalu minta kewenangan besar yang punya konsekwensi uang besar.

Inilah yang sedang kita alami persis menjelang 2002. Marah akan korupsi lahirilah UU aneh. Parah!

Bahayanya, setelah jadi UU dan aparaturnya beserta para stakeholders merasa bahwa mereka sudah mapan, mereka ingin terus minta kewenangan tambahan dan uang APBN tambahan.

Mereka juga mengumumkan dan menampakkan bahwa masalah tambah banyak. Aneh!

Dalam kasus korupsi kita menyaksikan pemerintahan yang justru bangga dan menganggap bahwa makin banyak masalah makin sukses pemerintahan.

Padahal, korupsi itu penyakit dalam pemerintahan. Loh kok menganggap diri sukses karena masalah tambah banyak? Ajaib!

Lalu, dalam kasus terorisme juga demikian. Kegagalan menangani dan mendeteksi teroris malah menjadi dasar meminta uang dan kewenangan lebih besar bukannya mengevaluasi pejabat yang berwenang.

Lalu kapan pejabat diminta pertanggungjawaban? Parah!

Coba bandingkan dengan cerita ini. Di sebuah pantai di Eropa, ikan hiu sering menyerang dan memangsa orang mandi di pantai. Banyak yg mengenaskan, kehilangan tangan atau kaki. Sampai terbunuh oleh mamalia laut yang buas itu. Masyarakat marah sekali. Wajar!

Puncak kemarahannya, karena ada jenis ikan hiu tertentu yang kalau sudah menerkam mangsanya bisa hilang dan tidak ketemu sama sekali.



Hiu putih itu membawanya ke dasar lautan yang dalam. Emosi publik teraduk dengan kemarahan yang semakin menjadi. Apa reaksi negara?

Seharusnya, kalau mengikuti kemarahan rakyat, negara mengerahkan angkatan perang dan menambah armada laut untuk memburu hiu sampai habis di laut.

Mereka malah melarang membunuh hiu juga melarang memancing anak hiu. Apa yang dilakukan pada binatang buas itu?

Binatang atau manusia kalau diperangkap dalam sistem dia akan tunduk pada sistem. Manusia membuat EARLY WARNING SYSTEM di pantai.

Lalu dibuat jaring pengaman dan di pinggir pantai selama jam mandi ada pengawas yang jeli melacak sirip hiu jika mendekat. Memakai teknologi.

Sejak itu tak ada lagi kejadian. Jika ada hiu mendekat, sirine berbunyi. Jika ada hiu putih yang suka mengendap di dasar laut dia kena jaring.

Para petugas juga sigap dengan alat pemantau yang

canggih. Dan tak ada lagi berita manusia dimakan hiu.
Tuntas!

Korupsi dan terorisme adalah 2 penyakit manusia yang bisa dilampaui dan diantisipasi dengan sistem.

Kita bisa membuat perilaku korup dan teror itu semakin lama semakin tidak terdengar. Dan jawabannya bukan uang dan kekuasaan tetapi kecerdasan.

Jadi, pemerintahan yang hebat adalah yang setiap hari melahirkan kebijakan yang segar dan cerdas dan solutif bukan yang saban hari minta uang dan kuasa tambah banyak.

Padahal masalah tambah banyak. Sekian.

IV. PENGAKUAN SANDI ADALAH PINTU MENCERABUT AKAR KORUPSI

Sore menjelang malam waktu Makkah, saya ingin menulis tentang Biaya Politik 2019 yang oleh KPK RI agak diabaikan.



Saya ingin memberi komentar lebih lanjut terkait pengakuan Sandiuno yang ingin membiayai pasangan Prabowo-Sandi 2019. Karena isu penting maka saya bicara.

Yang dilontarkan salah seorang kandidat wapres pada Pilpres 2019 adalah isu penting. Apalagi berkaitan dengan masalah yang menggelayuti bangsa kita.

Akar korupsi sistem itu ada pada Biaya Politik 2019 dan kalau KPK RI menganggap sepele ini saya sayangkan.

Ada banyak sebab isu ini penting: pertama, karena baru sekarang ada orang yang mengaku akan membiayai sendiri Biaya Politik 2019 sampai 1 Trilyun Rupiah.

Sandiuno sudah mengakui angka itu meski kita tidak tahu apakah uangnya sudah ada atau belum.

Pengakuan Sandiuno ini punya efek yang sangat luas. Bagi pribadinya pun akan besar.

Sederhananya, tahun depan, apalagi jika menang, beliau akan mengumumkan bahwa dalam LHKPN-nya telah terjadi pengurangan harta senilai Rp.1 T.

Sebagai pengusaha, mungkin terbiasa beliau rugi 1 trilyun. Bagi pribadi tentu tidak.

Apalagi Ia melakukan itu juga sebagai pejabat publik (wagub DKI) yang kekayaannya dipantau ketat oleh KPK RI.

Harta pejabat itu rawan kena TPPU apabila penegak hukum lagi iseng.

Saya membayangkan kerumitan yang luar biasa bagi Pak Sandiuno untuk memisahkan alokasi 1 trilyun dari 3,8 trilyun rupiah kekayaan pribadinya.

Sementara itu, karena sudah diumumkan kini mata semua pihak termasuk kader parpol juga ikut menunggu tindak lanjut.

Kedua, isu ini penting juga karena merupakan salah satu dari akar korupsi di Indonesia.

Saya kategorikan korupsi itu hanya 2: yang berakar pada politik dan yang berakar pada pelayanan publik. Dengan mengatur Biaya Politik 2019 maka kita memangkas 1 akar utamanya.



Masalahnya, apakah kita berniat menghapus korupsi politik? Saya melihat respon KPK RI atas kasus ini menegaskan bahwa memang korupsi bukan mau diakhiri tetapi dibiarkan akarnya dan mewabah lalu menjadi momok.

Seperti ada kehendak agar kita tetap punya untuk sibuk. Saya punya observasi yang cukup luas tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, kesimpulan saya, (korupsi tampaknya) bukan mau diakhiri tapi dibuat jadi mitos.

Akarnya tidak dicabut tapi ceritanya dibuat kompleks sehingga korupsi kita terima sebagai nasib bangsa kita.

Padahal, kalau mau, sederhana saja.

Kalau Sandiuno pribadi mengaku harus keluar 1 T rupiah, maka biaya sebenarnya yang dikeluarkan setiap kandidat berapa.

Kalau misalnya 5 T lalu sisanya siapa yang menanggung?
Kalau tidak jelas berarti akar masalah ketemu.

Kalau dalam politik ternyata porsi pembiayaan gelap lebih banyak dari yang terang seperti pengakuan

Sandiuno itu berarti kita sudah masuk dalam darurat pembiayaan politik.

Bikinlah terang maka korupsi akan hilang.
Itu abjad kerja kalau mau korupsi hilang.

Saya lanjutkan, kejujuran Sandiuno bahwa ia siap menanggung beban biaya 1 Trilyun adalah mutiara.

Paling tidak supaya kita mulai jujur terkait Biaya Politik 2019. Ia takkan kena delik apa-apa karena ia adalah calon. Pertanyaannya bagaimana dengan calon lain?

Kalau pasangan lain tidak ada yang mengaku membiayai, lalu siapa yang membiaya mereka? Ini uang tidak kecil.

Bagaimana menjelaskan masuknya uang trilyunan ke rekening kandidat sementara kebanyakan tidak dilaporkan? Padahal UU mengatur pembatasan?

Jadi terornya, politik itu tidak jelas, makanya perlu regulasi supaya terang.

Tapi semakin banyak yang tidak jelas politik akan memproduksi kerusakan sistem.



Maka, langkah Sandiuno untuk mengumumkan adalah awal membersihkan politik dari yang tidak jelas.

Pertanyaanya, apakah otoritas seperti KPU yang sudah bikin norma hukum baru kepada mantan napi korupsi juga Bawaslu RI dan utamanya KPK RI yang sudah menangkap ribuan orang itu mengerti bahwa ini sumber persoalan?

Atau tidak masuk dalam akal mereka?

Ketiga, kenapa masalah ini penting karena pemilu ini bukan hanya Pilpres 2019 tapi juga Pileg 2019 dan keduanya memiliki masalah pembiayaan yang sama.

Apabila kita benar-benar ingin menghapus uang haram dari politik maka inilah waktunya. Biaya Politik 2019 harus ditata.

Seandainya pejabat dan lembaga berwenang memberantas korupsi seperti KPK RI memang niat, maka inilah waktu yang tepat.

Tangkal uang haram masuk politik sejak dini melalau pengaturan Biaya Politik 2019 secara transparan. Sekian.

V. NYASAR, KPK NGURUSIN TIKET OLAHRAGA

KPK tidak mau tertarik dengan gambar besar strategi pemberantasan korupsi sebagaimana mandat UU No. 30 tahun 2002.

Padahal UU itu sendiri tidak mau diubah.
Ini sudah 16 tahun.

Masak sih ada pekerjaan yang gak selesai?
Terus terang saya sudah tau jawabnya.

Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak punya gambar besarnya?
Ibarat kita mau masuk suatu wilayah, kan harus bawa peta. Kalau kita tidak bawa peta maka dijamin nyasar.

Tidak jelas mana pintu masuk dan keluar, akhirnya terjebak di dalam.
Maka, saya sampai pada kesimpulan bahwa KPK ini sudah nyasar.

Bahkan bingung mau bagaimana, sementara selama ini bermain di wilayah opini akhirnya hanya itu yang dijaga.



Hari-hari mencari sensasi baru tanpa harus menyelesaikan masalah.

Saya punya banyak sekali daftar masalah yang tidak jelas nasibnya di KPK tetapi mereka terus memproduksi masalah baru.

Yang kita anggap penting oleh KPK, dianggap gak penting dan sebaliknya.

Ini bom waktu. Akan ada titik jenuh yang dapat meledak suatu waktu.

Momen Pilpres yang penting malah di lewatkan.

Soal pembiayaan Pilpres dan Pileg tidak jadi perhatian. Padahal korupsi politik mulai dari pembiayaannya.

Eh malah sibuk urus tiket Asian games yang akhirnya dibantah pak JK. Aduh, untuk apa ada KPK?

Ini yang saya takutkan tentang keberadaan lembaga sampir atau *State Auxiliary Body*.

Ada kecenderungan untuk terus mencari alasan keberadaan. Padahal apa yang dikerjakan sudah keluar dari rencana awal. Wallahualam.

BAGIAN KETIGA PULUH DUA
ARAH BARU
PEMBERANTASAN KORUPSI



“*Harus ada yang menawarkan peta jalan, karena korupsi soal sederhana. Jangan percaya korupsi soal rumit. Sebab korupsi bukan kejahatan baru. Di banyak negara bahkan korupsi itu sudah tinggal nama. Di era Digital Technology orang makin sulit mencuri.*”



I. SURAT UNTUK SEMUA KETUA PARPOL: PARTAI KALIAN DITUDUH LUMBUNG KORUPTOR

Sambil menikmati Jurnal ringan ini saya mencoba menulis surat terbuka kepada para pimpinan partai politik. Mereka yang menentukan banyak hal di negara ini.

Kepada Pimpinan Partai Politik yang terhormat,
kepada yang tertuduh sebagai lumbung koruptor,
kepada Pusat Pengkaderan Politisi dan Pemimpin
Negara...

Apapun partai anda,
Dimanapun posisi anda...

Tidakkah saudara mendengar, berita terakhir tentang sebuah kota yang hampir seluruh anggota legislatif daerahnya menjadi tersangka?

Ya, di kota Malang, negara hampir lumpuh di kota indah itu, tujuan negara berubah menjadi perang melawan korupsi, meski negara harus lumpuh.

Tidakkah saudara mengetahui bahwa mereka semua

adalah anggota partai anda?

Aku tak perlu menyebut nama-nama partainya, sebab nanti partai baru yang belum ikut pemilu akan sesumbar norak seolah mereka harapan baru... seolah mereka lebih suci...

Mungkin anda tidak marah karena berita penangkapan pejabat negara sudah menjadi sinetron tiada akhir, hingga menjadi biasa, tetapi aku, entah mengapa, padahal aku tak lagi menjadi pengurus partai, tapi aku mengerti dan merasakan bagaimana tulang punggung demokrasi itu dibangun.

Membangun parpol jangan saudara reduksi menjadi membangun firma atau korporasi berjual pengaruh. Parpol adalah tulang punggung demokrasi.

Tanpa parpol maka punggung demokrasi kita patah dan kita kembali ke zaman gelap gulita.

Maka, pilihan membangun parpol adalah pilihan tidak saja rasional yang tak mudah bagi mereka yang hanya bermodalkan ide dan gagasan, parpol adalah jalan yang paling legal konstitusional untuk mengambil bagian dalam negara, ini jalan orang dewasa untuk berkuasa.



Tiada jalan lain bagi masa depan ide dan gagasan suatu kelompok yang ingin ikut memimpin negara dan berpengaruh dalam politik selain dikontestasikan melalui pemilu, dan peserta pemilu hanyalah partai politik. Jalur pribadi terbatas.

Perkara membangun parpol adalah satu hal yang sudah berat, namun hal lainnya adalah menjaga narasi rasional anak bangsa untuk tetap melihat parpol sebagai masa depan dan puncak perjuangan kelompok. Ini sumber optimisme bahwa kita tetap akan menempuh pertarungan ide saja.

Maka, partai politik itu seharusnya suci dalam ide bukan karena ia benar tetapi karena ide dan pikiran adalah jalan damai.

Demikianlah reputasi kita bangun, namun ada yang ingin merusaknya dengan terus mengkampanyekan kebusukan parpol sebagai mesin produksi koruptor.

Inilah yang saya sedihkan, sesuatu yang mungkin para pimpinan parpol tidak merasa sedih.

Saya terpukul oleh ketidakberanian menjelaskan

diri. Parpol telah jatuh dan ketakutan mereka telah melampaui seluruh sisa kebenaran yang masih mungkin dikatakan. Mereka sembunyi.

Kesedihan dan kecemasan bercampur. Seolah di masa depan tulang punggung demokrasi ini tidak diperlukan lagi.

Dan nanti perjuangan kelompok dapat disederhanakan dengan cara lain yang lebih efektif menurut kelompok penguasa.

Atau kelompok yang terus mengkampanyekan kebusukan partai politik ini seperti sedang memberi sinyal, bahwa ada jalan lain mengambil alih kekuasaan tanpa ikut bertarung dalam pemilu, mereka pergi ke istana mengetuk pintu dari belakang. Lewat dapur dan kamar pribadi sang raja.

Ada juga sebagian dari mereka yang karena menguasai akses jalur distribusi uang dan modal, menguasai frame public dengan kepemilikan media massa, bisa membangun partai dalam hitungan hari.

Partai tumbuh langsung pakai iklan: ANTI KORUPSI ANTI INTOLERANSI.



Banyak yang menganggap bikin parpol seperti bikin jalur pemasaran barang; tak ada konsolidasi ide dan gagasan, tak pernah melakukan pendampingan atas kelompok marginal, basis dan platform perjuangan bisa disusun belakangan, namun eksis listed sebagai peserta pemilu pakai konsultan.

Tapi, kita menghormati mereka yang memiliki kesadaran demokrasi maju dengan mendirikan partai politik.

Adapun niat kita jangan adili. Tapi penguasa media massa, seorang jenderal atau pengusaha yang ingin berikhtiar membangun bangsa dengan mendirikan parpol harus tetap diapresiasi.

Bahwa kita tahu mereka juga akan menjadi mangsa sistem ini itulah masalahnya. Pernah ada partai di masa lalu berkampanye anti korupsi, tutup mata dan telinga; KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI! tapi akhirnya mereka terkena pukulan mereka sendiri bahkan bintang iklannya pun masuk bui.

Disinilah darahku mendidih mendengar berita dan tuduhan bahwa semua partai politik hari ini tertuduh sebagai perusak bangsa, semua kader parpol yang dibina

melalui pendidikan politik berjenjang seolah hanya dilahirkan untuk menjadi garong uang negara.

Dan menyedihkan bagi bangsa karena seolah tiada hari tanpa berita mangsa KPK, dan cerita itu sukses membuat rakyat sprt gembira tiap ada pejabat negara yg ditangkap KPK, kebencian trhdp pejabat publik yang mengakibatkan *distrust* terhadap negara semakin menjadi jadi.

KPK telah berhasil membuat hampir semua lembaga negara nampak busuk. Tak tersisa tinggal hanya KPK. Maka KPK adalah sisa harapan bangsa. Kalau lembaga mau bersih pakai orang KPK. Demikianlah parpol juga berlomba mencari mantan KPK untuk dicalonkan menjadi pejabat negara.

Alumni KPK menyebar menjadi penyelamat lembaga negara dan juga parpol. Mereka dicalonkan menjadi inspektorat, direksi, komisaris, kepala daerah pendamping bak obat pemutih. Atau Jadi caleg dan anggota partai yang menjamin bahwa partai itu sekarang suci terlahir kembali.

Tapi Pertanyaan reflektif yg harus kita ajukan hari ini



adalah apakah tujuan utama solidaritas agung bernama negara ini dibangun untuk perang lawan korupsi?

Mengapa negara menyerahkan semua tenaganya untuk membolehkan KPK mendefinisikan diri menjadi apa dan melakukan apa?

Dalam kasus DPRD yang Malang itu, 41 dari 45 anggota DPRD yg krn mengaku menerima pemberian uang dari seorang ketua DPRD senilai 12,5-15 juta membuat KPK mengambil tindakan membakar habis lembaga yang tanpanya pemerintah daerah yang mengurus urusan khalayak ramai tak bisa berjalan.

Setelah sekian lama mengintip dan menyadap mereka, KPK menunggu waktu yang tepat untuk mempermalu mereka dan mempermalu partai politik semuanya. KPK Memberangus habis orang-orang yang dalam posisinya harus mendapat legitimasi rakyat melalui pemilu langsung yang mahal.

Pimpinan Parpol yang terhormat,
Apakah saudara mengerti dengan apa yang terjadi?
Apakah anda percaya bahwa seluruh kader itu korupsi?
Jika demikian untuk apa politisi terus berani mengajukan

diri untuk menjadi pemimpin negeri ini?

Saya ingin mengaja saudara melakukan refleksi setelah 16 tahun UU anti korupsi Uu No 30/2002 dijalankan, bhw maksud dr UU itu dibuat adalah agar tercipta national integrated system dmn semua unit dlm system lembaga negara terbebani tugas pemberantasan korupsi yang sama.

Dan KPK dlm situasi transisi dilahirkan sbg trigger bg lembaga penegak hukum untk mengembalikan trust public pd lembaga inti negara, penindakan hanya dilakukan atas kasus raksasa dibatas 1 Milyar rupiah yang memiliki efek koreksi dan perbaikan pada sistem peninggalan orde baru.

Mudah memahami bahwa demokrasi itu bekerja berbasis sistem, tiap ada korupsi harus direspon dengan penguatan sistem agar waspada hingga system menjadi kuat dan tak memberikan sedikitpun celah bagi kreativitas jahat, dan sistem akan bekerja otomatis menambal lubang korupsi pada dirinya.

Sementara komisioner KPK datang silih berganti, tanpa *legacy* berupa sistem yang kuat, kita hanya akan melihat



mereka sibuk mengulangi pekerjaan yang sama, dan itulah kegilaan.

Cara kerja KPK hari ini hanya seperti membuang air dari perahu, sementara bocor tak pernah ditutup.

Dan kita terlihat sibuk bekerja dan takjub dengan tepuk tangan, situasi ini hanya akan membuat kita terus mengutuk diri sendiri sebagai bangsa maling, kita akan terus menghadirkan cerita dimana kita sebagai sesama anak bangsa saling memakan dan mencabik satu sama lain.

Pimpinan Parpol Yth,
Situasi ini harus dihentikan, KPK tidak mampu lagi bekerja di atas rel yang seharusnya sesuai perintah UU 30/2002. Ketidakmampuan itu membuatnya menjadi liar dan justru menjelma sebagai anomali yang merusak sistem.

KPK tak lagi bekerja sesuai UU karena tugas trigger terhadap lembaga penegak hukum lain justru dikubur dengan MoU untuk tidak saling mengganggu. Sementara itu lembaga perwakilan dan peradilan terus menjadi bulan bulanan, partai politik di-*blackmail* sebagai penghasil koruptor.

Saatnya kita hentikan bangun system transisi dan mempercayakan kembali pemberantasan korupsi pada lembaga inti negara. Banyak yang berkata polisi dan jaksa belum baik, lalu sampai kapan kita akan membuatnya baik tanpa diberi peran yang utuh?

Negara akan tetap ada tanpa KPK, namun negara tak akan ada tanpa adanya Polisi dan jaksa sebagai lembaga inti negara.

Mereka tidak akan bisa melakukan perbaikan jika tidak melalui koreksi langsung dari publik atas tiap tindakannya. Itulah cara membangun sistem inti negara.

Maka satu-satunya cara memberi ruang perbaikan pada lembaga inti negara tersebut adalah dengan menghilangkan KPK, transisi pun kita nyatakan usai. Dan kita hidup dalam era demokrasi penuh yang sebenarnya adalah racun bagi korupsi.

Pimpinan Parpol Yth,

Meski saya ragu dengan situasi terkini, pesan ini tetap saya sampaikan.

Sebagai warga yang melihat semua ini dari dekat.

Saya tahu bagaimana sandera ini diakhiri.

Sulit sekali.



Semua pimpinan parpol telah berhutang budi, berhutang nyawa.

Ada suatu situasi seolah pimpinan parpol masih menunggu eksekusi.

Kalau tidak pejabat paling tinggi maka ada pejabat paling penting.

Pukat harimau KPK telah menjaring seluruh dosa dan semua telah tercatat dalam daftar eksekusi KPK: Diam atau mati.

Dalam suasana inilah pemilu yang akan datang kita nanti. Dan calon presiden tak punya pilihan lagi.

DUKUNG KPK BERANTAS KORUPSI.

Hanya satu semboyan yang masih bisa memberikan tambahan suara.

Karena ide dan idealisme sudah tak ada lagi.

Semoga lahir generasi yang menggunakan mata hati.

Sebab kemunafikan ini menyesakkan dada.

Orang-orang berlomba nampak bersandiwara.

Akrobat di sana-sini.

Apakah partai saudara seperti itu?

Semoga ada jalan baru.

Ada Arah Baru.
Bagi negeri ini.
Terima kasih.

**II. KORUPSI BUKANLAH KUTUKAN. BISA
SELESAI DENGAN PETA JALAN,
BUKAN TEPUK TANGAN ALA
PERTUNJUKAN
(Catatan Hari Anti Korupsi se-Dunia)**

Tragis di negara kita, hari anti korupsi se-dunia dirayakan tanpa proposal pemberantasan korupsi kepada bangsa. Orang-orang merayakannya seperti merayakan hari bahagia. Hari yang akan kita ulang setiap tahun dengan jumlah korupsi dianggap tambah banyak.

Kemarin, antara dua kandidat sempat bertengkar, ada yang mengatakan korupsi tambah banyak. Ada yang bilang korupsi tambah sedikit. Ada yang bilang ini dari masa lalu dan ada yang bilang ini dari masa sekarang. KPK bingung berada di tengah pertengkaran.

Jika pejabat dan penguasa bingung, rakyat tentu tambah linglung. Kita ada di mana sekarang? Kita mau kemana



besok? Apakah korupsi adalah nasib atau kutukan? Apakah ini semua hukuman Tuhan? Ah, kita semua diajak semakin tidak rasional dan jalan akal dihentikan.

Bahaya dalam bangsa kita adalah karena perasaan bertanggung jawab rendah. Lalu disusupi oleh proyek yang tidak jelas ujung pangkalnya. Momok-momok masuk rumah tangga bangsa dan kita akhirnya menghabiskan tenaga untuk menghalau hantu tidak jelas bentuknya.

Inilah yang terjadi dengan isu korupsi ini. Sejak 16 tahun lalu proyek ini dilancarkan dengan bantuan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). Para pejabat datang silih berganti tanpa tahu mereka lagi bermain apa. Sibuk mulai nampak sebagai sukses. Seperti topeng monyet!

Setelah 16 tahun, masalah tambah banyak, tapi pejabat itu terus meyakinkan dirinya bahwa dia sukses. Maka, Hari Anti Korupsi dirayakan seperti sebuah sukses besar. Sementara itu ekonomi mulai surut dan reputasi negara tambah amburadul. Pejabat semakin sibuk tak peduli apapun.

Lama-lama kita semakin diajak untuk percaya bahwa inilah kita, negara penuh maling dan bromocorah, genderuwo dan sontoloyo! Mereka meyakinkan publik bahwa tidak ada jalan akal dalam memberantas korupsi. Mereka menyebarkan perasaan tidak berdaya bahwa memang inilah nasib kita.

Harus ada yang menawarkan peta jalan, karena korupsi soal sederhana. Jangan percaya korupsi soal rumit. Sebab korupsi bukan kejahatan baru. Di banyak negara bahkan korupsi itu sudah tinggal nama. Di era *Digital Technology* orang makin sulit mencuri.

Tetapi, ada yang tidak ingin korupsi hilang dari negeri ini. Agar tetap menjadi proyek APBN resmi. Dan setiap tahun negara mengeluarkan anggaran lagi. Untuk pertunjukan anti korupsi dan juga perayaan anti korupsi.

Selamat Merayakan Hari Anti Korupsi .
Terus dan terus lagi. ?



BAGIAN KETIGA PULUH TIGA
**PRESIDEN HARUS
MEMIMPIN ORKESTRA
PEMBERANTASAN KORUPSI.**



“ *Tidak boleh terlalu lama
membiarkan negara dalam keadaan darurat korupsi
seperti tuduhan selama ini. Karena jika benar, artinya
presiden gagal memberantas korupsi.* ”





I. KEKUASAAN PRESIDEN VS KPK?

Pertanyaan laten muncul:

Kenapa KPK selalu ada dalam situasi ini?

Ada jawaban mudah dan ada jawaban sulit...

Tapi orang selalu ingin mendengar jawaban mudah...

Jawaban sulit tidak mendapat tempat...

UU 30/2002 tentang KPK jelas memandatkan
Koordinasi, Supervisi dan Monitoring...

Itu kewenangan besar yang *gak* ada batasnya...
mengalahkan Presiden...

Dalam isu korupsi bahkan KPK boleh mengkoordinasikan
lembaga apapun termasuk yang tidak bisa dikoordinasi
Presiden..

Jadi orang jarang melihat *superbody* KPK dalam konteks
pencegahan...

Di antara sebabnya karena pencegahan agak rumit dan

memerlukan kenegarawanan...

Sementara penindakan sebetulnya kewenangan itu melekat di Polisi dan Jaksa...

Polisi dan Jaksa tidak bisa melakukan pencegahan seperti KPK..

Tak salah kalau kita bertanya apa inti penindakan KPK..ya jawabannya polisi dan Jaksa...

Lah kalau gitu kenapa tidak bagi tugas aja? Kok malah berantem? Gak selesai-selesai?

Jawaban gampangnya ada...dan umumnya orang senang mendengar yang gampang..

Negara memerlukan kecerdasan...
Otot tidak bisa selesaikan masalah..

Saya *gak* punya jawaban mudah...

Saya berdoa Presiden Republik Indonesia dan wakilnya..
diberi Hidayah Allah...



Sebab beliau menghadapi persoalan yang tidak mudah...

Tapi konstitusi memberinya kuasa besar..ini
presidensialisme...

Pak Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala
pemerintahan...

Pak Joko Widodo adalah undang-undang...dia bisa
menutup mata dan telinganya...

Kata Thomas Jefferson, ciri presidensialisme adalah
adanya Penangungjawab tunggal...

Karenanyalah ia pegang kuasa besar...

Sumpah Presiden adalah untuk jalankan konstitusi...
hanya itu...

Presiden bukan penghibur...

Konstitusi adalah akal sehat dan melawan kelemahan
emosi sesaat...

Bagaimana orang terus menikmati pertikaian antar
lembaga negara?

Bagaimana kita bisa terus tidak menemukan akarnya dalam 12 tahun?

Itulah...

Ada jawaban mudah dan mayoritas ingin mendengar yang mudah...

Marilah kita memandang wajah Presiden kita..dan mendoakan nya...semoga tegar..

II. SAYA BERTANYA: DI MANA PRESIDEN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI?

Kalau kita bicara tentang lembaga negara kita harus pakai Ilmu Negara jangan pakai perasaan apalagi emosi

Menilai kinerja lembaga negara tidak bisa pakai opini tetapi pakai Ilmu Negara, standarnya harus jelas.

Coba nalar fakta ini: baru saja ada OTT KPK hakim lagi di Bengkulu. Dan ini melengkapi OTT gubernur dan jaksa di Bengkulu.

Artinya “Ada Apa dengan Bengkulu?” kenapa KPK intens memantau Propinsi tersebut ?



Itu satu sisi dari pertanyaan, sebab ada soal lain, seorang penyidik KPK juga jadi tersangka pembunuhan di sini.

Penyelidikan sudah tuntas. Dari Polisi ke Jaksa P21 lalu siap dilempar ke pengadilan. Lalu dihentikan. Karena di KPK.

Setelah Jaksa Agung mengeluarkan penghentian perkara bagi NB, maka keluarga korban menuntut via peradilan.

Tapi ini bukan penghentian pertama, kasus NB ini justru awalnya diproses tahun 2012.

Atas perintah Presiden SBY waktu itu Kapolri Timur Pradopo menghentikan perkara. Korban diabaikan.

Atas desakan korban yang dianiaya oleh penyidik saat kasus itu terjadi, kasus ini dibuka kembali tahun 2015.

Kali ini kasus sampai P21 yang berarti bahwa ini telah memenuhi keyakinan penyidik dan penuntut di Kejaksaan.

Tetapi, begitu kejaksaan ingin membawa kasus ini Pengadilan, maka Presiden ditekan kembali.

Akhirnya Jaksa Agung mengeluarkan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Perkara). NB dkk selamat lagi.

Sekarang keluarga korban telah melakukan upaya praperadilan dan dimenangkan. SKPP batal.

Tapi apakah bangsa Indonesia bisa menang dan negara hukum berjalan untuk penyidik KPK?

Selama ini belum pernah yang terbuka, karena laporan pidana kepada pejabat KPK adalah pidana itu sendiri.

Kasus Bengkulu ini adalah gambaran tentang hukum yang berhenti di depan orang-orang yang menerima kemewahan dan perlindungan.

Kemarin para korban datang lagi. Tim Pansus Angket KPK DPR kembali memberi mereka ruang bicara.

Mereka menangis memohon keadilan karena Mulyadi sudah mati. Setelah ditembak Mulyadi infeksi dan mati.

Mulyadi, pencuri itu sudah mati, tak ada yang mengobati apalagi ke luar negeri.



Di balik semua yang kita ketahui dan mungkin banyak yang kita tidak ketahui. Tapi penegakan hukum nampak kacau.

Kemarin kita berbahagia karena Pak Dahlan Iskan bebas. Bahkan ada partai Pemerintah yang merayakan kebebasan beliau.

Kita mulai permisif dengan malpraktik hukum. Seolah kerugian adalah resiko bagi korban.

Seperti kasus NB ini dengan segala aspeknya, kita mulai melihatnya sebagai rutinitas biasa.

Maka saya bertanya, di mana Presiden dalam pemberantasan korupsi?

III. MALING DI BAWAH KURSI

Bapak Presiden,
Maling itu di bawah kursimu Pak.
Jangan pura-pura gak tahu.

Bagaimana krisis OTT ini bapak tonton 5 kali dalam sebulan? Seolah situasi bangsa ini normal?

Padahal rakyat bisa-bisa bilang “di zaman Presiden Jokowi, korupsi merajalela”

Investor juga bisa bilang, “di zaman Presiden Joko Widodo korupsi merajalela”

Mana tanggungjawab Presiden Joko Widodo atas maraknya korupsi di negeri ini? Sehingga menyeret adik sendiri?

Atau Presiden Joko Widodo tidak ada yang memberi tahu bahwa korupsi adalah tanggung jawab Presiden?

Atau ada yang menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa situasi aman, biasa dan korupsi adalah urusan KPK?

Lalu untuk apa Presiden dipilih? Kenapa isu sebesar korupsi, Presiden tidak terlibat?

Ah...ini harapan kosong...Presiden Joko Widodo mungkin meminta bangsa kita menerima nasib sebagai bangsa penuh korupsi

Dan mungkin Presiden Joko Widodo meminta kita menerima nasib di bawah KPK karena sedang bekerja.



Asalkan Presiden Joko Widodo merasa nyaman ya monggo saja....*Aku Ra Popo*

Semoga korupsi tambah banyak, supaya OTT tambah sukses dan drama OTT semakin banyak peminat.

Mari bersama Presiden Joko Widodo kita nikmati hiburan OTT KPK yang penuh sensasi dan adegan berbahaya....

Mari kita berikan kewenangan besar kepada KPK: mengintip, menyadap, menangkap, dan bila perlu tembak di tempat...

Indonesia seolah hanya punya satu harapan yaitu KPK yang luar biasa...karena lembaga lain sudah rusak luar biasa..

Anggota DPR sudah kena OTT, Ketua DPD sudah, hakim MK ditangkap, MA digeledah, jaksa, polisi.. semua sudah.

Kepala daerah langganan kena OTT KPK, gubernur, walikota, bupati sampai kepala desa... sudah rusak semua.

Semua tokoh moral sudah kena, kyai, rektor dan guru besar, tokoh agama semua jadi pasien KPK...

(Seakan) tinggal KPK harapan bangsa, mari kita jaga agar tetap bisa OTT yang banyak. Jangan biarkan ada yang sentuh KPK.

Bla... blaaablaaa...

Blaaaaa... blaaa... blaaa...

Bla.. bla... bla.... blllaaaaaaa!

(Jubir KPK)

IV. SURAT TERBUKA BUAT JOKOWI: TENTANG KORUPSI, KPK DAN KEPASTIAN HUKUM.

Saya ingin menulis surat terbuka kepada presiden @jokowi yang masih memimpin republik ini....ini tentang tuduhan korupsi dan nilai tukar kita yang semakin letih... ia seperti nampak tak terkait padahal hukum adalah penunjuk arah ekonomi...#KursKepastian

Pak presiden @jokowi yth,
Sekitar 2 atau 3 bulan setelah bapak dilantik, akhir 2014,



kita bertemu untuk rapat konsultasi....entah apa yang membuat saya begitu bersemangat pada pertemuan pertama saya membawa buku tulisan saya tentang “Demokrasi, Transisi dan korupsi..”.

Saya juga membawa dokumen hasil kajian BPK tentang tentang “Audit Kinerja KPK”. Saya serahkan buku itu langsung ke tangan bapak. Saya katakan, “Pak, penting Bapak mulai dengan hukum yang pasti”. Dokumen itu saya serahkan disaksikan wakil presiden dan menteri sekretaris negara.

Waktu itu, Bapak mengucapkan terima kasih. Dan saya berharap Bapak akan menyuruh staf Bapak mempelajari. Sebuah temuan dan sebuah pendekatan dalam pemberantasan korupsi agar hukum itu pasti dan agar semua tak menjadi alat untuk menghibur diri. Hiburan semata seperti hari ini.

Sementara buku yang saya bawa dan dokumen temuan BPK tersebut menjelaskan dua hal yakni: Bahwa korupsi adalah persoalan sistem, bukan soal PERILAKU manusia semata, dan bahwa KPK sebagai penegak hukum pemberantasan korupsi telah mulai ditemukan bermain kotor. KPK adalah sapu kotor.

Itulah yang saya sampaikan kepada Bapak waktu itu, berharap bapak akan waspada bahwa apa yang menjadi perhatian saya akan Bapak pelajari dan akan bapak perbaiki. Sebab satu-satunya sesal saya terhadap pemerintahan sebelumnya adalah membiarkan KPK seperti ini. #KursKepastian

Waktu itu, telah muncul beberapa kali sengketa antara penegak hukum, bermula dari saling curiga dan dilanjutkan oleh saling sangka bahkan berakhir dengan saling serang. Ada #CicakBuaya1, ada #CicakBuaya2 dan seterusnya. Konflik dibiarkan jadi sengketa terbuka.

Untuk mengingatkan Bapak, bahwa di awal pemerintahan Bapak konflik berlanjut. KPK mengintervensi pemilihan kabinet. KPK mencoret Nama-nama (merah kuning hijau) yang sampai sekarang mereka mainkan. Lalu terjadilah konflik terbuka kembali. #KursKepastian

Sekedar mengingatkan Bapak, KPK secara sembrono mentersangkakan seseorang yang telah Bapak kirim ke DPR sebagai calon Kapolri dan lalu dalam uji kelayakan DPR meloloskan yang bersangkutan. Dan lalu yang bersangkutan melakukan praperadilan. Ia menang. #KursKepastian



Seseorang, yang telah lolos di eksekutif, legislatif bahkan di yudikatif gagal dilantik menjadi Kapolri hanya karena opini. Negara kalah! Bapak kalah dan kita semua kalah! Tapi, begitu orang yang sama menjadi kepala BIN, kita semua terdiam dan KPK pura-pura tidak tahu perkara.

Kita semua mulai melihat permainan dan kita semua menjadi pemain sandiwara. Kita para elit Indonesia melihat secara telanjang bahwa hukum mulai berkelana memasuki wilayah politik,”rupanya permainan mulai keluar arena”, itu bisikan hati saya saat itu.

#KursKepastian

Dan itulah yang terjadi, sejak itu, kita menyaksikan sengketa terbuka, pimpinan KPK menjadi tersangka dan aibnya terbuka. Menggalang kesaksian palsu dan memalsukan dokumen keluarga. Dan semua mereka masih bermasalah. Sampai sekarang status hukum mereka tidak jelas.

Gedung KPK kembali menjadi tempat penggalangan politik, ada gelora karena wadah pegawai KPK berpolitik. Mereka menuntut bermacam hal bahkan mereka menuntut agar pimpinan Dilawan. Pimpinan transisi pilihan Bapak dilawan. Tegang! Kata Pak Ruki kepada saya. #KursKepastian

Lalu terpilihlah pimpinan yang sekarang di bawah pertarungan yang telah meninggalkan sisa-sisa perang dan perdamaian. Pimpinan KPK yang baru adalah hasil dari negosiasi politik lama. Tapi penyidik KPK permanen sampai ada yang diserang. Novel Baswedan menjadi pahlawan baru.

Siapa yang menyerang Novel? Mengapa Bapak tidak memberi jawaban? Siapa yang berperan dan siapa yang menjadi dalang? Entahlah, tapi Sadarkah Bapak Presiden. Bahwa semua ini adalah sumber ketidakpastian? Sadarkah Bapak bahwa kita mengirim sinyal kekacauan kepada dunia ?

Sementara itu, DPR mengajukan evaluasi. Lalu kita kembali mengadakan rapat konsultasi. Ada tiga kali setahu saya. Khusus untuk membahas masa depan Kepastian hukum. Waktu itu revisi UU KPK hampir disepakati tetapi selalu dibatalkan di ujung.
#KursKepastian

Habis sudah upaya DPR untuk mengingatkan Bapak bahwa sebagai lembaga pengawas tertinggi di negeri ini, DPR menemukan sesuatu yang harus kita baca. Melalui pansus Angket KPK hampir saja semua terbuka tapi



akhirnya semua dihentikan. Tergesa-gesa dan Entah oleh apa.

Dalam pansus Angker KPK semua hampir terbuka. DPR hampir saja menemukan segala sumber masalah dan segala sumber ketidakpastian hukum yang dibuat KPK. Tapi rupanya, KPK punya mekanisme Melawan balik. Semua terkena. Dan semua kembali ke semula.
#KursKepastian

Maka, semua keinginan DPR untuk mengingatkan presiden dari masa ke masa terus mendapat hambatan KPK. Revisi UU KPK agar bisa diawasi, pansus angket KPK, audit oleh BPK semua ditahan atas ancaman dan ketidaksetujuan KPK. #KursKepastian

Itu juga nasib RUU KUHP peninggalan Belanda itu. DPR telah menyelesaikan pekerjaannya awal tahun ini dan tinggal pengesahan. KPK lagi yang tidak mau lalu presiden pun menolak meneruskan pembahasan. Dan kita berhenti sampai di sini. Ketidakpastian terus menjadi-jadi.

Bapak Presiden Yth,
Apakah bapak melihat apa yang saya lihat? Terutama

sekarang setelah kurs rupiah terhadap dolar mulai menyentuh angka berbahaya. Apakah bapak tidak merasa seperti mendirikan benang basah? Apakah Bapak siap jika krisis datang lagi?

#KursKepastian

Oh ya, saya ingat dalam satu rapat konsultasi yang akhir ya batal menyepakati revisi UU KPK karena tekanan forum rektor dan pimpinan KPK mengancam mundur. Saya berbisik lagi kepada bapak, “pak, saya khawatir ekonomi kena serang, tolong pelajari Korea selatan”.

Waktu itu, saya mempelajari sebab-sebab pembubaran KICAC, semacam lembaga mirip KPK di Korea selatan. Korea selatan ini mirip sekali dengan kita dalam sejarah pemberantasan korupsi dan kemerdekaan. Pembubaran KPK Korsel karena tuntutan ketidakpastian kepada ekonomi.

Itulah yang terjadi di kita sekarang, kita terima atau tidak. Survey pasar kalau ditanya maka, “kepastian hukum” adalah sumber keraguan yang utama di negeri ini. Bagaimana menaruh uang atau datang ke negara yang hukum tidak nampak pasti?

#KursKepastian



Sementara Bapak Presiden mengatakan kepada dunia “marilah datang ke negeri kami dan berinvestasi”, pada saat yang sama di media mereka melihat ada banyak pencuri ditangkapi. Bukankah artinya negara ini tidak aman menitipkan investasi? #KursKepastian

Demikianlah yang terjadi Bapak Presiden. Dan hari ini, di kota Malang, kota yang indah berseri. Arek-arek Malang yang pemberani, KPK menangkap hampir semua anggota DPRD kota itu, Kecuali yang bolos karena dianggap tidak ikut merugikan negara. (Bolos ternyata bagus sekali)

Bapak presiden @jokowi,
Inilah hari-hari Bapak. Di negeri yang Bapak pimpin. Tapi rasanya dalam hukum bapak tidak memimpin kami. Dan dalam ekonomi pasar mulai nampak tidak sudi. Entahlah, semoga Bapak masih punya waktu untuk memperbaiki negeri ini.

Saya selalu cemas, apabila kita tetap tidak mengerti dan ini tidak Bapak mengerti sesungguhnya kita sedang bunuh diri. Semua sedang mengantri gerakan bunuh diri Pak. Saya tidak mau mengantri. Saya akan lawan semua ini. Bila perlu sendiri. #KursKepastian

KPK adalah beban bangsa ini, sebuah lembaga dan sekelompok orang yang menipu negeri ini. Tapi, akan ada akhir. Entah kapan, yang penting saya sudah sampaikan dan yang penting Bapak sudah saya ingatkan. Agar tak ada sesal nanti.

V. SOAL PEMBERANTASAN KORUPSI, BELAJARLAH KE KORSEL PAK JOKOWI

Pak Jokowi ke Korea Selatan, saya titip: Pelajari sejarah pemberantasan Korupsi di Korsel dan khususnya sejarah KICAC (Korean Independent Commission Against Corruption).

Lalu diganti ACRC (Anti Corruption and Human Right Commission). ACRC adalah gabungan banyak lembaga termasuk Ombudsman.

Bapak presiden @jokowi tidak boleh terlalu lama membiarkan negara dalam keadaan “darurat korupsi” seperti tuduhan selama ini.

Karena kalau iya, maka artinya presiden gagal memberantas korupsi. Presiden akan ditagih rakyat.



Maka sekarang ambillah keputusan yang radikal.

Hanya di Indonesia, darurat korupsi hanya menjadi kesibukan satu lembaga. Presiden sendiri tidak menyebut darurat melihat begitu merata “tangkapan KPK” sehingga semua partai dapat disebut sebagai lumbung koruptor menurut cap yang dibuat KPK.

Terakhir KPK menangkap hampir semua anggota legislatif kota Malang. Lalu, mempersoalkan tiket Asian Games 2018 tapi diam setelah dibantah wakil presiden. Jadi hanya di Indonesia definisi korupsi masih kita sengketakan. Bagaimana bisa kita selesaikan?

Dari semua negara yang saya pelajari, Korea Selatan paling baik jadi contoh kita. Pembubaran KICAC dan diganti oleh ACRC adalah karena ekonomi yang terganggu.

Manuver KICAC bikin rusak iklim usaha dan kebebasan sipil. Maka Anti Korupsi digabung dengan HAM.

Sementara di kita aneh. Tidak ada koordinasi. Definisi aja gak jelas. Ada lembaga sibuk sendiri yang lain menonton dan lebih baik menghindar.

Akhirnya sejak 2002 (persis sama dengan tahun berdirinya KICAC) di Indonesia berkembang suasana tidak pasti.

Sementara evaluasi atas UU yang sudah berumur 16 tahun terus ditentang. Usulan amandemen bak mau mengubah kitab suci.

Demonstrasi dikerahkan dan ancaman dilayangkan label “koruptor menyerang balik”. Jadilah ia lembaga suci yang tidak boleh diganggu gugat.

Terserah Pak Jokowi, Bapak pasti melihat pelambatan ekonomi. Akhirnya pemerintah cabut subsidi, *ngutang* ke luar negeri, proyek dikerjain sendiri dan BUMN disuruh *ngutang* bunga tinggi.

Nanti BUMN bisa-bisa dijual ke luar negeri. Ini semua karena ketidakpastian hukum.

Sambil Pak Jokowi berpikir, teken saja kerjasama dan ikut saja pola Korea selatan. Gak usah malu untuk kebaikan negeri.

Lihat Korsel itu, industri hidup, kelas menengah tumbuh.



Kita merdeka bareng, bikin KPK bareng, tapi hasilnya lain. Kenapa? Karena mereka mau koreksi.

Kita berkejaran dengan waktu. Sementara Korea Selatan tambah menguasai industri dunia; mulai soal otomotif, elektronik dan digital media, sampai K-POP dan restoran di mana-mana.

Eh kita sibuk tangkap pencuri. Dan dianggap prestasi. Tambah banyak dianggap tambah sukses.

Pantaslah saya tutup dengan kutipan dari Albert Einstein di tentang definisi kegilaan. “Gila itu: Melakukan sesuatu dengan cara yang sama tapi berharap hasil yang berbeda”. Ini sudah 16 tahun bapak!

VI. BAPAK PRESIDEN, INGAT SKANDAL BANK CENTURY

Kita sebagai warga negara yang baik, memberi nasehat kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya bahwa suatu hari kesalahan hari ini akan dipersoalkan. Dan sudah sering kita lihat akhir dari kebijakan yang salah di masa lalu. Terbongkar di masa depan.

Ini saran saja. Terserah mau terima atau tidak. Saya ingatkan “Skandal Bank Century” di masa lalu. Pada saat keputusan terburu-terburu diambil, ada saja pihak lain yang memanfaatkan situasi. Niat “MENGUASAI 51% “ terasa sangat mulia. Tapi mulia untuk siapa?

Dalam Skandal Bank Century yang terjadi 10 tahun lalu menyisakan tanya.

Sampai sekarang KPK RI belum melaksanakan perintah pengadilan. Tapi ini sandera bagi mantan wapres kita.

Saya anggota Pansus Skandal Bank Century dan tahu betul modus orang, modus yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam kasus Inalum Freeport pasti ada. Dan kasat mata. Karena kita tahu ini bukan transaksi biasa. Ini mega transaksi. Bisa jadi skandal raksasa.

Dari banyak argumen yang sudah disampaikan orang sederhana saja. Kata para ekonom, “Ini kan barang sendiri, kok pakai dibeli? Mahal lagi”. Belum lagi problem hukum dalam banyak UU yang dapat membuatnya jadi bahan sengketa.

Saya ingatkan status keuangan BUMN dalam konsep



keuangan negara di Indonesia. Masih penuh interpretasi yang dilematis. Tidak gampang bagi Inalum disulap dan meminjam uang begitu besar tanpa jaminan negara. Maka ia bukan entitas bisnis murni.

BUMN kecil Inalum ini dapat uang dari mana? Hutang besar ini dijamin siapa? Saham per 51% bernilai 56 Trilyun kata siapa? Padahal masa operasional tinggal 3 tahun. 3 tahun lagi nilainya 0% tambah Rongsokan sekarang 100% bernilai lebih 100T? Ini transaksi diatur siapa?

Itu saja peringatan, kita belum persoalan tapi resiko yang diambil Presiden Jokowi akan ditanggung pemerintahan yang akan datang. Ingat sekali lagi Skandal Bank Century padahal yang menang adalah petahana, toh pansus terbentuk dan skandal terbuka.

Itu saja peringatan, kita belum tahu detail persoalan tapi resiko yang diambil Presiden Jokowi akan ditanggung pemerintahan yang akan datang. Ingat sekali lagi Skandal Bank Century padahal yang menang adalah petahana toh pansus terbentuk dan skandal terbuka.

Drama “merebut kedaulatan dari tangan asing” ini luar

biasa membuat kita lupa bahwa skandal mengintip ketidakcermatan. Sehingga lebih baik *ngutang* membeli milik sendiri daripada menunggu ambil hak sendiri.

Sekali lagi 2021 Freeport selesai ijinnya dan tidak perlu ada negosiasi. Kalau mau negosiasi ulang minta 50% gratis. Sekarang, setelah kita bayar pakai utang Freeport berlanjut 20 tahun lagi. Betul kata ekonom itu, “Namanya goblok!”. Maafkan.

Pelajaran berharga dari dua kasus tambang Newmont dan Freeport adalah: Orang gak punya uang, maksa ingin nampak jadi jagoan, ujungnya jadi *ngutang* dan ditipu masuk lubang. Harusnya masuk bui lalu cari cantolan kesana.



BAGIAN KETIGA PULUH EMPAT MENCIPTA SEJARAH



“ Setelah persoalan Tuhan,
satu-satunya kesetiaan yang layak kita perjuangkan
adalah kesetiaan kepada pikiran-pikiran.”

“



I. MANUSIA YANG MENCIPTA SEJARAH

An idea starts to get interesting when you get scared of taking it to its logical conclusion” (Nassim Nicholas Taleb).

Jangan takut berpendapat, Jika pendapat itu berasal dari keyakinan yang belum kau katakan. Katakan apa adanya!

Setelah persoalan Tuhan, satu-satunya kesetiaan yang layak kita perjuangkan adalah kesetiaan kepada pikiran-pikiran.

Hari-hari kita berdoa agar Tuhan memantapkan keyakinan dalam dada kita. Agar kita tidak mudah goyah. Agar kita Istiqomah.

Karena kematian di ujung waktu kita hanyalah soal mempertahankan apa yang kita yakini. Sendiri tanpa orang lain.

Maka keyakinan tidak datang dari apa yang kita dengar dari orang lain. Tetapi apa yang kita dengar dari hati kita.

Katakanlah apa yang menjadi bisikan hati. Simpanlah apa

yang menjadi kata orang. Katakanlah dengan lantang.

Meski getir jika ia adalah kebenaran, katakanlah dan tahanlah pahitnya. Pahitnya akan hilang oleh ketenangan hati.

Mengatakan kebohongan untuk menghibur orang membuat mulut kita berlumur gula tapi hati kita pahit dan getir.

Kalau harus memilih antara berkata benar atau menghibur orang pilihlah berkata benar karena kebenaran tetap, sementara sikap orang berubah.

Ada banyak yang terluka oleh kata yang benar tetapi luka itu akan sembuh oleh keikhlasan. Baik bagi yang berkata atau yang mendengar.

Lalu keyakinan yang dikatakan apa adanya adalah nasib kita. Ialah yang menuntun kita pada seluruh kehidupan.

Kata-kata kita memantul ke bumi, menggerakkan saraf-saraf dan otot kita menuju gerak dan laku kehidupan yang panjang.



Pikiran akan menjadi dasar tindakan dan tindakan adalah dasar kebiasaan dan kebiasaan adalah sejarah kita.

Demikiankah manusia sejarah lahir....pikiran, tindakan dan kehidupannya di potongan waktu dan lempeng bumi.

Di situlah seluruhnya
Pada mulanya adalah kata-kata...
Bacalah...

Selamat tidur kawan...

II. TUMBANGKAN BERHALA MAYA

Selamat Tahun Baru 1439H
Seandainya kau menepi..
Aku tetap di sini untukmu..
Aku takkan pergi..

Tahun ini tahun 1439 Hijriah
Tahun ini kita akan tumbangkan Berhala Maya
mitos-mitos dan setan pengganggu jiwa.

Berhala yang ditumbangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad berjarak ribuan tahun nampak kasat mata. Tapi Berhala Maya samar.

Di balik yang nyata ada yang samar,
Berhala Maya merasuk relung-relung dan mencipta halusinasi tentang fiksi sampah.

Berhala Maya mencipta mitos dan Hoax tentang Kepalsuan dan ajaran kebencian, mencipta ketakutan dan perasaan dendam.

Berhala Maya berhala moderen penganut popularitas penuh kepalsuan penyembah keyakinan berdasar angan-angan. Kita tumbangkan!

Tidak datang membawa keyakinan baru aku hanya ingin mengingatkan, aku membangunkan yang tertidur dalam ketakutan

Bahwa kepalsuan yang dibangun sebagai ritus pada Berhala Maya akan sirna terbakar menjadi debu dan asap semata.



Dan kebenaran akan menang,
Keyakinan pada yang benar akan wujud menjadi
kenyataan.

MARI TUMBANGKAN Berhala Maya

Kepalsuan,
Dan angan-angan,
Ketakutan pada pagi dan petang,
Perasaan lemah dan tak berdaya,
Tertekan dan intimidasi Berhala Maya

Selamat Tahun Baru 1439H

Semoga tahun ini... Berhala Maya Tumbang!

BAGIAN KETIGA PULUH LIMA
**LENTERA YANG ENKAU BAWA,
NYALAKANLAH**



“

*Keangkuhan yang kuat akan berakhir
Kemunafikan telah terbongkar
Dan kita akan mendengarkan
lagu kemenangan orang biasa*

”



LENTERA YANG ENKKAU BAWA, NYALAKANLAH

Siang yang sepi

Dalam kotak kecil hitam itu ada nalar berlarian
Berkejaran... Saling memotong dan menunggang...
Sepertinya ada yang luka

Dan...

Jejaring katanya menyerang kotak hitamku
Seperti aku diserang malaria siang ini
Panas dan dingin... Kata-kataku melepuh.

Terkadang ada salam hangat
Dari yang katanya gadis...
Nampak dari pelambangannya yang pink
Sopan sekali, seperti kemauan orang-orang padaku.

Kuterima kata merah, berapi...
Mungkin itu yang membuatku demam
Dan bola kata salju yang membuatku dingin
Ajaib... Kotak ini menyulut perang.

Aku tertidur...
Dan kotak hitam bergetar dalam pelukanku
Dalam tidur perang tak pernah henti...

~oOo~

Pagi kedua

Nur katakan padanya, Aku mau dia bercahaya
Dan aku mau hari ini kita memanjat cahaya.
Selapis saja... Kita semua akan suka

Han...

Apa pengertianmu tentang matahari pagi ini
Terbit di antara gerimis dan dingin yang menyayat.
Apakah kita punya hak menafsir?

Dit...

Andai kau menangis, kucurkanlah air melalui mataku
Aku ingin menjadi yang menyertaimu malam ini
Dalam sedih dan gunda gulanamu

Aku terapung

Di tengah pagi yang mengirimku gerimis
Dan kesibukan jalan raya
Kita berbaris pelan, menelan kebosanan, kota ini lamban

~oOo~

Abjad di langit bertabur

Kosa kata terkuak
Kami terus kesepian



Sendiri dalam tahanan pelangi
Apa yang real? Apa yang sejati?

Malam...

Dan tentang rasa sepi, perih
Kutahan derunya
Mengapa kau matikan nyala hatimu?
Kuusap peluhku
Kita ini siapa?
Mungkin kata-kata

Terlelaph kasih
Kunjungi aku di mimpimu
Karena aku hanya ada di sana
Malam ini aku menutup kisah,
Yang tak pernah sanggup kau dengar

~oOo~

Aku ini berharta kata-kata

Aku ini sungai berbuih rasa
Aku ini mentari bersinar senyum
Aku ini rembulan bercahaya kasih
(Din Rayes)

Aku ini puisi nurani
 Fakir pikir dunia
 Aku ini bubur insan
 Sejenak lagi berkubur di bawah kemboja kenangan
 (DinRayes)

Aku bukan bebek
 Tak punya ekor, tak sanggup mengekor
 Aku juga bukan keledai, karena tak suka ditunggangi
 Tapi aku lebah, berhati-hatilah

~oOo~

Menjelang kebahagiaan...

Pada ranting berembun dan kemilau pagi
 Ijinkan aku pergi membawa pelangimu
 Dalam khayalku sepanjang hari ini

Mengeja air matamu
 Apakah kau bahagia?
 Mungkinkah setetes air ini menjadi perlambang yang
 berbeda?
 Aku tak hafal perangaimu, aku lupa

Kalau kau jatuh cinta,



Katakanlah, jangan sembunyikan
Karena itu membebani hatimu
Katakanlah sekarang meski hanya dengan bunga

Jika kau bersedih, lerailah air mata
Agar orang tak melihat lukamu
Atau tersenyumlah agar mereka tertipu
Kesedihanmu adalah rahasia kita

~oOo~

Berjalanlah secara harfiah

Apa adanya
Aku menunggumu di persimpangan kesadaran
Lentera yang kau bawa, nyalakanlah di malam hari

Kau takkan menemuiku
Aku tak akan datang, maafkan...
Tetapi hatimu menyala dan terbaca oleh cita-citaku
Kenanglah aku apa adanya

Teruslah kawan
Keangkuhan raja-raja telah tumbang
Mereka akan sembunyi dan berlari
Mereka salah paham membaca hati kita

Keangkuhan yang kuat akan berakhir
Kemunafikan telah terbongkar
Dan kita akan mendengarkan lagu kemenangan orang
biasa
Kau misalnya

~oOo~

Satu... Dua... Tiga...

Tanda-tanda samar nampak seperti terkaman serigala
Awan gelap puting beliung memasuki tenggorokan
mahkamah
Riuh

Dan, seperti telah aku duga
Ayam berkokok menjelang fajar
Kita terbangun dan saling memandang
Mimpi apakah aku semalam?

Cuaca panas dan dingin, itu biasa
Selama bumi ini tempat kita
Bersabarlah kawan
Jangan jera tersenyum mesra



Aku tinggalkan kota berdebu, malam ini
Melalui sebuah perpisahan yang lengang
Pantunmu dan cinderamatamu
Dan kegundahan aku bawa pergi

Senyummu yang terhimpit getir
Kosa kata yang terbatas dalam kelapangan dadamu
Aku tahu kau menyimpan luka
Aku berjanji kan kembali

Aku seorang diri
Di antara bukit pelepah samudra
Menyaksikan camar melukis jingga sore
Selamat datang malam di pelabuhan ule lhuen

Di sini aku pernah merasakan getirmu
Pahit yang tak dapat dilukis ulang
Pada sisa manusia dan pada kematian
Batinku memar waktu itu

Kini kau terbanglah ke angkasa
Arungilah keluasaanya
Petiklah bintang yang kau suka
Dan jangan hentikan kelanamu sejauh mimpimu

~oOo~

Pagi ini pun indah

Setelah semalam hujan
Kita menyaksikan rerumputan bercengkrama
Dengarkan salamnya meski tak terdengar

Dingin ketika kebekuan melanda kotamu
Salju di mana-mana, tapi hati kita hangat
Orang-orang melantun shalawat
Ini keharuanku

Aku terbangun dalam tanda baca
Kita semua bertanya lalu berseru
Kemudian berhenti sejenak
Apakah tanda bacanya mengeluh?
Tak ada

Langit putih lalu hitam, lalu biru
Apakah warna aslimu?
Apakah kau punya warna?
Apa yang tak berwarna tak berpamrih?
Tertembuslah langit

Pagi ini mengapung
Di atas sumpah serapah dan kata-kata pesimis
Kita seperti tidak punya pilihan



Maka tertawalah sejenak

Meski getir

Biarkan bening itu seperti kupu-kupu di kebunmu

Hilang setelah malam lalu terbitlah embun

Menyiram pagi terbaik kita

Dingin tertahan

Aku ingin merayakan hari ini sebagai hari baik

Tempat kata dan manusia bertukar tempat

Lalu lahirlah harapan

Sampai kita terlelap

~oOo~

Biarlah angin meniup senja ke ufuk

Pertanda perpisahan kita

Lirih kepergianmu menjadi senandungku

Sampai pagi buta

Aku coba melupakan warna auramu

Yang mengesankan gerimis dan datangnya lambaian

Guntur

Apalah yang kubisa ingat selain lesung pipimu

Kota yang menjadi pertanda semu
Tak jelas lentera dan lampion
Itu pertanda apa?
Orang-orang mematikannya dengan tergesa

Kecepatanmu meninggi pertanda tak suka
Kau seakan terbang canggung
Membawa keluh kesahku yang terakhir
Sebuah luka

~oOo~

Lebih baik kita akhiri malam

Dan memulai menghitung
Apakah kita dapat menembus perbatasan rindu kita
Dan berapa lama?

Aku kutawarkan angka-angka
Tapi bukankah perpisahan ditambah prasangka
Tidak akan menghasilkan apa-apa.
Itu yang kusedihkan

Aku hampir tak percaya
Bermimpi dan gelisah di lorong katulistiwa
Sangkakala kedua sayup terdengar



Membawa sukma ku kembali

Apakah aku boleh tidur

Jika sangkalkala terakhir menanti di ujung masa

Dan para malaikat menjemputmu

Berkereta kuda putih

Robbi...

Ijinkan aku kembali pada saat yang tepat

Saat kutelah tunai melupakan warna dunia

Dan saat musim semi bunga kamboja

Setiap malam saat malaikat-Mu turun

Aku berdandan rapi memakai warna putih

Meski terlambat

Aku ingin menyambutnya sendiri

~oOo~

Mas...

Kaulah yang tahu batas permainan ini

Karena kau memegang kendali

Jika kau tak melihat batasnya

Hati-hatilah, Mas

Ijinkan aku tetap bersuara
Menggangu tidurmu
Dalam pujaan sanjung
Dan berita manis yang kau suka
Aku ingin melihatmu waspada

Ini malam ku
Biarlah aku melayang sendiri
Kau tak perlu tahu apakah lentera telah kutiup
Aku menerka sepoi-sepoi

Apakah yang menguap dari ujung rambutmu yang hitam
berkilau? Aku ingin kau tulis mimpi-mimpimu yang
belum pernah ada. Mungkinkah?

Steve, aku kehilangan kau
Seperti kepergian nabi yang merangkum kalimat-kalimat
Dan kehidupan dalam tablet yang kugenggam makin
kecil

Kawan, percakapanku malam ini adalah tentang
kematian
Yang membawa pergi khayalan dan angka-angka
berharga Sebelum tersimpan



Aku bertanya,
Apakah melupakan dan mengingat adalah kewajiban?
Atau jika ia datang sebelum kematian?
Bagaimana aku mengucapkan salam?

~oOo~

Telah lama aku tak berjumpa gerimis

Awan seperti menjauh di kotaku
Dan aku kini terpukau
Kotamu gerimis sejak pagi

Hujan yang turun hari ini
Seperti hujan yang turun di masa kecilku
Aku melihatnya seperti Tuhan menyirami
Bumi kita yang sendiri

Pengemis berambut pirang
Menggelepar di jalan Manhattan
Menuntut sarapan yang tenang
Dalam suasana perang di pagi buta

Dan dari kaki tambora ini
Aku melihat dengan mataku sendiri
Ketamakan memakan tanah dan menelan gunung

Membunuh nyawa dan keindahan

Inilah gerimis

Yang melukis pertanda pada perpisahan kita

Aku ingin melerai airmatamu

Meski aku tahu kita tak lagi sama

Bang... Kau orang baik

Senyummu teratur

Kata-katam selalu bertata bahasa dan ejaan yang
dibenarkan

Kaulah lelaki santun itu

Kau ingat suatu saat kita berdua

Dan kau bicara padaku

Dan kau seperti memimpin upacara penyambutan

Padahal aku sendiri

Aku tak ingin mengenang masa-masa baik

Saat kau mau duduk bersama

Dan kata-kata tak terlalu memerlukan tanda baca

Kau menari riang

Aku yang salah

Aku menganggapmu lelaki perkasa



Kau hanya tukang tarik suara
Melodi suka duka atau pidato tentang sengketa

Gerimis malam ini adalah gerimis paling sadis
Karena aku menyaksikanmu dimangsa kata-kata manis
Yang kau ajarkan pada pengemis

Entahlah...
Anginkah yang meniup hujan
Atau hujan yang meniup angin malam ini.
Mereka berdua seperti saling mengejar

Perbincangan kita terputus
Kata-katamu lenyap
Mengalir ke dalam desah malam dingin ini
Dan aku menolak kau ajak pergi

Kau bukan orang sebrang
Tetapi kau tak pernah mendengar halilintar
Yang seperti merobek cakrawala
Menjadi lima

Hujan di kotamu miskin apresiasi
Kau tak pernah melihat air jatuh ke pekarangan
Melalui daun dan bibir perawan

Aku merindukan jagung bakar dan secangkir kopi pahit
 Serta omong kosong politik kampung
 Hujan angin pasti makin dingin

Malam kelam peradabanmu
 Tangis meleleh seperti suara renta
 Enggan melafazkan ucapan selamat jalan aku
 menyaksikan ajal pikiranmu

~oOo~

Apakah langit pernah seterang ini

Tidak jawabku
 Bintang seperti bertumpuk
 Melemparkan senyum kepada bumi
 Kepada kita semua

Terangnya langit hati kita harus lebih terang dari langit
 malam ini
 Agar seluruh gerak ternaungi cahaya
 Agar semua dalam presisi

Agar gemuruh dada kita malam ini seperti zikir para sufi
 Mendekat diri pada ilahi
 Agar getarannya mengetuk pintu langit-NYA



Agar getar kata-kata kita menyelinap
Ke dalam hati bangsa kita dan umat manusia
Agar terang jalan bangsa kita menuju bahagia

Aku tak bisa tidur
Aku naik pitam
Aku mencubit diriku
Dengan zikir menyebut namaMu
Meninju bodohnya aku

~oOo~

Awan mengenang saat-saat panas

Ketika api dan awan tercampur
Ketika suara tak terdengar karena keras
Aku masih melihat sisanya

Dan murungmu berwarna putih
Diam tertegun tanpa ekspresi
Seperti kita tidak saling kenal
Dan kau ragu angkat bicara
Bisu

Awan mengenang saat-saat panas
Ketika api dan awan tercampur

Ketika suara tak terdengar karena keras
aku masih melihat sisanya

Aku tak pernah tahu kegundahan dan harapan
Manakah yang berdiri sendiri
Dan manakah yang kau idap
Bukankah kita sedang hilang?
Seandainya aku boleh kumpulkan
Maka ingatanku tertuju pada masa lalu
Dalam sebuah diorama
Tapi engkau ada di mana?

Catatlah ini
Berdamailah, kita berada di titik nisbi
Dan kita mendayung pancaroba
Jangan pegang langit
Juga fatamorgana

Kota ini memelukku dalam selimut tebal
Udara, sejarah dan aura penasaran
Tapi manusianya pergi
Lalu lalang tanpa ucapkan salam

Ada yang menatapku dari kejauhan
Memeriksa cara ku berjalan



Menawarku membeli orang
Menjual harapan pada malam
Malang nian

Kalau dunia ini sebuah kotak
Inilah sudutnya yang terang
Orang-orang berlari mengejar bintang
Memetikanya, menjualnya pada tsar

Mungkinkah kita melepaskan diri
Atau berpisah sehari saja tanpa upacara benderamu
Dia ragu, orang-orang naif katanya
Perlu arah

Aku melihat kota ini berubah
Setiap bayi yang lahir menangis lebih keras dari biasanya
Dan remajanya makin tak sopan
Seperti aku

~oOo~

Ini pagi

Kicau di ranting akasia
Suara menembus gerimis, lembut seperti mineral
Hari ini angin sepoi-sepoi basah

Awan tak tertebak nalar
Selamat Pagi...
Bangunlah gadis-gadis cilik
Kereta kaca menanti kalian
Hari ini tamasya kalian ke angkasa biru
Petiklah satu bintang

Dan kau anak muda
Jauhkan selimut itu
Hari ini berburu juara
Kita harus jadi satu meraja
Orang-orang bumi mengejar
Kereta kita tua

Lampu berkelip telah menemui ajalnya
Akan hanya ada matahari
Meski kita tahu ia sembunyi
Awan tak kan lama
Ia datang dan pergi

~oOo~

Aku berdiam diri menatapmu

Menembus cakrawalamu
Mencari diriku dalam susah payah yang tiada sampai



Pada apapun kecuali istigfar

Dan seandainya malam ini tertunda

Entah oleh amarah

Atau karena sak wasangka

Esok pada waktunya surya akan nampak seperti biasa

Kau dan aku tidak bisa bersengketa tentang matahari

Dinding langit terlalu jauh

Mungkin kau sudah gila

Atau berpura lupa

Maka katakanlah aku sedang bermimpi

Dan hujan kau anggap pertanda tsunami

Kau terjebak di titik nisbi

Tertelan tepi malam sepi

Tidurlah

Aku pergi berpamitan membawa selendangmu yang
harum

Seperti pertanda surgawi

Sunyi di tepi sunyi

~oOo~

Apakah kau telah tertidur

Malam ini hanyalah bayang
Karena kita masih tenggelam
Ketika malam menarikmu dalam

Padahal, aku ingin ucapkan selamat pagi
Sebagai tanda perpisahan
Lanjutkan tidurmu
Dan seperti pagi ini, penuh mimpi

Bermimpikah mereka, tanyamu semalam
Aku menyendiri dalam pertanyaan
Sepertinya kita mengkhayal
Dunia kita menjadi maya

Kau tanya lagi...
Kenapa siang tetap gelap?
Aku meyakinimu bahwa bukan wajah kita yang hitam
Hati kita sepertinya berselimut ragu

~oOo~

Dunia yang kita tinggal

Dunia yang kita dayung
Kita hirup dan kadang kita rusak



Dunia yang pergi juga datang tanpa ucapan salam

Aku mendengar suara dari kotak hitam
Aku melihat baying-bayang tangis tawa
Atau rintihan orang-orang di tahan jiwa raganya
Ada sandiwara

Apa-apa yang tak asli tak kan kau beli
Dan mentari berselimut di puncak sejarah
Aku menunggu dengan perasaan cemas
Kicau burung besi

May...
Apakah kau merasakan kehilangan
Apakah pernah alam melantunkan amarahhanya
untukmu
Aku selimuti hatiku dengan kafan

Jika kematian adalah akhir
Apakah bisa semua jadi sederhana?
Apakah hidup ini rumit?
Apakah kau tak mengerti letak sukmanu

Semakin jauh aku pergi semakin dekat aku denganmu
Aku meminta sebuah perjumpaan

Semacam mi'raj
Dan hatiku semakin merindu

Pagi yang membawamu pergi adalah cahaya
Debu perjalanan terlerai oleh embun
Yang menantimu sejak malam
Kabut dan gelap terurai pelan

Fay...
Aku menyusuri lorong waktu
Aku mengukur jarak perpisahan kita
Dan aku telah menitipkan pesan
Pada azan pertama yang terdengar

Dan seandainya kau di sini
Mawar yang tumbuh di taman ini
Aku akan selipkan di antara mayang rambutmu
Sebagai pertanda haruku

Sampai sekarang aku sering tak mengerti
Kenapa aku merindukanmu
Dan aku senang menjadi tak mengerti
Aku senang menjadi dungu

Pagi, ketika semua terbangun



Dan aku seperti menerobos labirin
Aku seperti hilang di antara alang-alang
Dan kau pasti sudah besar

~oOo~

Tidurlah...

Aku masih dengan secangkir sari jahe
Aku duduk memandangi statistik
Katanya gelombang surut terus mengintai
Manusia makin tidak dewasa
Tuhan, kenapa Kau tak lahirkan kami dewasa?..
Tuhan, aku bersyukur menjadi anak desa
Ujung dari kedewasaan adalah hati yang bersih
Itulah ajaran desa

Tuhan, bersihkan hati kami
Kirimlah malaikat-Mu dan bawalah kami ke padang
gembala
Bedahlah dada kami dengan pisau belati-Mu
Biarlah darahnya mengalir dan ambillah hati kami
Cucilah ia dengan embun atau air zamzam, atau salju
Lalu kembalikanlah kami sebagai manusia pengikut
nabi-Mu

Apa yang membuatmu silau?
Pagi di tiang pancang matahari hanya mencipta
bayangan tegak
Itukah kau?

Kau bertanya padaku
Apakah kita sedang berselisih?
Aku bertanya padamu apakah kita punya musuh?
Lupakanlah

Kau takkan sanggup hinggap pada kaca
Kau tak harus memikirkan luka
Dan dengan apa kau membalas sakit hati
Jadilah angin

Terimalah ini seperti kehadiran embun
Dan larutlah dalam sujud
Matikanlah rasa duka
Ambillah jalan sunyi

~oOo~

Pesona Amarahmu

Simpanlah kemarahanmu sahabatku
Karena aku tahu kau sedang marah, kau gelisah



Kita semua memiliki suara hati yang tak terdengar
Derunya sampai kepadaku
Seperti gunung api
Di mana-mana magmamumu bergemuruh, aku dengar
Apakah kita salah karena resah?
Tidak, kita manusia dan kita masih muda
Apakah amarah kita berdasar?
Apakah rasa memiliki logika? Apakah rasa itu
matematika?

Apa yang tersembunyi di hatiku dan hatimu adalah fakta
yang paling telanjang
Dan karena rasa itu ada aku ada
Aku menjadi manusia dan mencinta
Kemarahan kita adalah cinta

Adakah kemarahan kita akan jadi gelombang?
Apakah gelisahku akan menemukan muara?
Apakah akhir dari semua ini akan terselenggara?
Tapi yang kutahu adalah amarah yang menjalar seperti
air bah
Dan apakah dia merasa apa yang kurasa?
Aku bertanya kembali pada ombak

Kita seperti tak terjawab
Dan kita seperti tak diinginkan katamu
Lalu apa alasan kita bersatu jika kita tak saling
menerima?
Kenapa kita harus menjadi bagian dari mereka yang aku
tak kenal?
Kawan, simpanlah amarahmu karena akupun begitu

Kau pernah melihat laut? Apakah kau pernah merasakan
arus?
Semakin dalam semakin keras
Seperti amarah yang kau simpan?
Simpanlah amarahmu seperti arus
Karena orang kuat dan berani bukanlah yang pemarah...
Yang kuat dan yang berani adalah yang menyimpannya
Menjadi arus cikal gelombang

Kawan, simpanlah amarahmu meski kau lihat kepalsuan
merajalela
Simpanlah amarahmu meski pengkhianat berpestapora
Simpanlah amarahmu meski kau lihat tanah airmu
terkoyak
Orang-orang yang kau hadapi dan membuat mu marah
pun tak tahu apa yang kau hadapi



Karena sepertinya kita hendak menyeberangi suatu
masa, yang mereka nikmati
Dan akan kita tinggal
Karena kita akan melukis dengan pena kita sendiri dan
menulis selamat jalan
Cara kau berdandan dan cara kau menyambut mengucap
selamat datang
Bukankah kita perlambang masa2 baru dalam
peradaban?

~oOo~

Aku menantimu dalam doa

Mengharap kau sibak sekat
Hingga tak ada batasku dengan hidayah

Di perputaran malam yang tak pernah tergesagesa
Kau melintas seperti airmata
Menikmati perubahan cita rasa

Kau dalam belai awan putih
Semesta dan cakrawala
Doakanlah yang tertinggal dan digulung sepi malam
Aku sendiri

Redamlah sepi
Seperti kita memadam rasa sakit
Orang-orang terluka membawa sisa harapannya ke atas
awan

Tuhan...
Jika ada luka yang tak tampak
Maka beri kami penawar sakit yang tak tampak
Sepi ini adalah penawar perih

Tuhan...
Tutuplah malam kami dengan ampunan-Mu
Kembalikan kami pada pelangimu yang indah
Menuju haribaanMu

~oOo~



EPILOG

TIGA AGENDA PENTING

Pemberantasan korupsi bukanlah satu-satunya langkah dalam mewujudkan tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun ia adalah prasyarat dalam mewujudkan tujuan tersebut, sehingga pengelolaan sumber daya negara bisa dilaksanakan dengan penuh amanah dan profesional. Beberapa negara gagal, salah satunya disebabkan oleh pembusukan di dalam negara oleh perilaku korupsi pejabat dan aparaturnya.

Pada pembacaan sejarah Indonesia, kita menjumpai korupsi sebagai salah satu momok yang merusak Orde Baru. Tapi karena rezimnya tertutup, maka kasusnya tidak banyak terungkap ke permukaan. Setelah reformasi bergulir, dan demokrasi menjadi pilihan, maka penyakit-penyakit yang sudah bernanah mulai terbuka, terungkap ke publik. Hari-hari kita pun dipenuhi dengan cerita pengintipan dan penangkapan. Hampir semua lingkaran dan level kekuasaan pernah menjadi “sampel” pemberantasan korupsi, hampir semua profesi juga pernah masuk dalam daftar pasien, mulai dari pejabat-pejabat di lembaga tinggi negara, pengurus partai politik, PNS Pusat hingga Daerah, pejabat



pemerintahan daerah dan desa, pengusaha, advokat, hakim, dan terutama politisi.

Setelah 20 tahun reformasi, bangsa kita seperti terjebak dalam status “darurat korupsi”. Dan dengan dalil kedaruratan itu, maka proses pembangunan hukum kita tertunda, baik dari sisi regulasi, kelembagaan maupun sumber daya manusianya. Ketertundaan itu, terbaca melalui opini kolektif yang selalu dihembuskan, selalu diperlukan kehadiran lembaga *superbody* dalam penegakan hukum terkait korupsi, yang mengumpulkan sumber-sumber kekuatan dari berbagai institusi hukum. Demokrasi hukum kita belum jua tumbuh, karena kesetaraan antara penegak hukum tidak diperoleh dengan adanya perbedaan perlakuan antar berbagai lembaga penegak hukum. Namun toh, walaupun telah memiliki kekuatan *superbody*, sampai sekarang belum ada kejelasan, kapan “darurat korupsi” ini berakhir?

Jika setelah 20 tahun reformasi, kita masih belum bisa mengakhiri “darurat korupsi” ini, maka pertanyaannya, apakah pola pemberantasan korupsi kita sudah benar? Ataukah kita memerlukan arah baru dalam pemberantasan korupsi?

Hemat saya, cara pemberantasan korupsi kita selama ini telah gagal, dan kita memerlukan inisiatif baru, *road map* baru dalam pemberantasan korupsi. Kita mesti menemukan jalan keluar. Kita tidak boleh terjebak dalam kubangan ini terlalu lama. Kita mesti melangkah ke depan menyambut tantangan-tantangan baru dalam pergaulan internasional, melepaskan diri dari pergulatan di dalam, menuju pergulatan di luar.

Semangat itulah yang saya sampaikan melalui rangkaian *tweet* di buku ini. Secara sistematis, merefleksikan pikiran saya yang lebih utuh, yang sudah saya tuangkan dalam buku saya sebelumnya, “Demokrasi Transisi Korupsi”.

Menuntaskan buku kumpulan *tweet* ini akan membawa kita pada pendalaman situasi kritis pembangunan demokrasi dan penanganan korupsi di Indonesia. Sekaligus memberikan perspektif baru bagaimana memandang dan menyelesaikan korupsi yang telah lama menahun dan kronis di negeri kita. Ada beberapa pokok pikiran yang saya tuangkan dalam rangkaian *tweet* ini, sebagai salah satu ikhtiar dalam penuntasan pemberantasan korupsi.

Pertama, perbaikan regulasi terkait dengan pemberantasan korupsi mesti dituntaskan, mulai dari KUHP, UU



Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN, UU Tipikor, UU KPK, UU TPPU dan regulasi lainnya yang terkait. Regulasinya solid, tidak tumpang tindih, memenuhi asas legalitas dalam pemberantasan korupsi. Regulasi tersebut harus memiliki makna yang jelas dan pasti, juga memiliki tafsir yang ketat dan tidak multitafsir. Dengan demikian, kepastian hukum bisa diwujudkan dalam bingkai keadilan dan kemanfaatan.

Kedua, penataan lembaga dan birokrasi. Lembaga dan birokrasi penegak hukum kita adaptasikan dengan semangat demokrasi, yang terbuka dan terdistribusi. Tidak ada satu lembaga yang menjadi *superior*, dan yang lainnya hanya menjadi pelengkap. Termasuk juga penataan lembaga politik, khususnya pada aspek keuangan politik. Karena lembaga politik menjadi sumber rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah.

Ketiga, menegaskan kepemimpinan (*leadership*) presiden dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK saja, KPK bukan aktor tunggal, juga bukan aktor yang paling utama. Agenda pemberantasan korupsi menjadi beban tanggung jawab seluruh elemen bangsa, yang mestinya langsung dipimpin oleh Presiden yang telah dipilih melalui Pemilu yang super

mahal. Presiden mesti memiliki *timeline* penuntasan agenda ini. Jangan sampai kita memasuki lorong “darurat korupsi” tanpa ujung, tanpa kepastian.

Tiga isu pokok ini yang saya nilai kurang mendapatkan perhatian dalam penuntasan pemberantasan korupsi, yaitu minimnya peran Presiden, penuntasan reformasi hukum dan perbaikan keuangan politik. Ketiga isu ini mesti dibaca dalam pelembagaan demokrasi yang utuh, bukan *pseudo* demokrasi.

Ikhtiar ini perlu diperbincangkan sesering mungkin, sehingga tumbuh sebagai kesadaran bersama, bukan sekedar terjebak dalam kegelapan saling mengutuk. Dari sanalah, kita bisa mencipta sejarah, keluar dari “darurat korupsi” menuju mimpi baru, sebagai bangsa besar, yang dirasakan pengaruhnya dalam pergaulan Internasional.

Saya ingin menutup buku ini, dengan sebuah puisi yang saya tuliskan untuk ABRAHAM SAMAD sekitar 31 Januari 2012, saat itu Abraham adalah ketua KPK yg baru menjabat. Saya menulis puisi untuknya sebagai nasehat. Berikut selengkapnya:



Apa pengertianmu tentang mendung abraham?

Pernahkah kau berjalan dalam gelap?

Atau diantara hujan dan angin puting beliung?

Atau pernahkah kau mendekati pusaran arus yang berputar?

Atau menerjang gelombang pasang?

Pernahkah kau seperti berada
pada ketinggian yang semakin tinggi?

Lalu kau terlepas seperti layang-layang.

Dunia ini sepi kawan,
itu yg aku ingin berbagi.

Kita ini sendiri di hadapan apapun.

Apa pengertianmu tentang hingar bingar dan tepuk tangan?

Bagiku itulah puncak kesepian.

Jika kau berada di atas pentas
dan semua orang bergemuruh
berdecak kagum kepadamu.

Pergilah kepada dirimu.

EPILOG
TIGA AGENDA PENTING

Jika kau terkucil dalam gelap,
pergilah kepada Tuhan mu,
Dia akan menghiburmu.

Yang gemuruh dan yang sepi adalah fatamorgana.
Sementara dirimu adalah fana.
Jadikanlah kubur sebagai tempat tidurmu
sebab kesanalah kau akan kembali
dan bakarlah amarah mu dalam peti mati.

Selamat jalan kawan,
setiap orang bertanggungjawab sendiri.
Jangan takut gelap.
Aku tahu kau tak takut ombak.

Puisi ini saya persembahkan pula kepada mereka
yang berjaan menegakkan akal dan pikiran serta
segala upaya untuk menjaga demokrasi di negara ini







Demokrasi adalah kesadaran tentang kebebasan manusia di satu sisi dan penegakan hukum di sisi yang lain. Buku ini menggambarkan ide-ide Fahri Hamzah tentang konsolidasi dan pelembagaan demokrasi. Kicauan Fahri menjadi bernada tinggi setiap dua sisi demokrasi berjalan saling menegasi. Penegakan hukum tidak boleh dibangun dengan amarah yang membunuh kreativitas manusia untuk tumbuh dan berkembang. Penegakan hukum haruslah dibangun untuk memfasilitasi kebebasan agar tercipta keadilan dan produktivitas. Apapun yang tampak angkuh dan sewenang-wenang meski atas nama penegakan hukum adalah behala kuasa yang harus diruntuhkan.



Dari membaca buku ini, ada benang merah yang bisa kita tarik dari seorang Fahri Hamzah, yakni konsistensi dan kekokohan sudut pandang yang tidak bergantung pada arah angin politik dan menjadi populer atau tidak di sisi arus utama publik. Ini yang saya salut kepada Fahri Hamzah bahkan ketika saya berbeda pandangan sekalipun. **(Arsul Sanjaya, Sekjen PPP/ Ketua FPPP DPR RI)**



Fahri Hamzah punya konsen yang serius tentang demokrasi dan kebebasan manusia. Dia seorang aktivis yang mengalami kehidupan di era orba sehingga secara presisi memahami bagaimana mahalnnya kebebasan yang didapatkan di era reformasi. Fahri adalah Fahri, dia manusia yang bebas, kicaunya lantang setiap berbicara falsafah manusia yang harus bebas dari belenggu behala kuasa. Tak banyak orang yang seberani dia, dia satu satunya orang yang bahkan menang melawan partainya sendiri di pengadilan ketika anasir otoriter dia pandang mulai muncul di partainya. **(Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PKB DPR RI)**



Karena fungsi utama DPR RI adalah berbicara (parle/ to speak/ berbicara), maka di Indonesia DPR RI disebut sebagai Parlemen. Bung Fahri Hamzah adalah satu prototype Anggota DPR RI yang menjalankan fungsinya sebagai Parlemen. Ide dan pemikirannya tentang Demokrasi dan masa depan agenda pemberantasan korupsi disampaikan dengan bernaas melalui pernyataan dalam bentuk lisan seperti wawancara dengan pers, dialog maupun diskusi. Bahkan idenya dituangkan dalam bentuk tulisan yang dibaca publik seperti di twitter, artikel dan buku. Ide/gagasan Bung Fahri Hamzah tentang Demokrasi dan pemberantasan korupsi yang beliau sampaikan sangat relevan menjadi perenungan kita bersama untuk kemajuan Negeri kita tercinta Indonesia. Bravo Bung Fahri. Tetap berjuang untuk Indonesia Raya. **(Masinton Pasaribu, Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan)**



Mengerti adalah alasan untuk mengkritik. Saya mengerti kritik Fahri Hamzah, karena dia mengerti ujung pangkal kekusutan hukum dan pelembaan demokrasi. Cuitan nyaring melalui twitter sering memekakkan. Tapi itu memang perlu, karena kekuasaan harus diteriaki agar tak lalai akan tugasnya: menghasilkan keadilan dan mencerdaskan bangsa. **(Rocky Gerung, Pengamat Politik)**



Fahri Hamzah mungkin layak dijuluki si pahit lidah. Kata-katanya tajam, menusuk. Menggedor hati terdalam orang-orang yang tak suka dengan pernyataannya. Yang sering dilupakan, Fahri tak berbicara tentang kemauannya atau kepentingan dirinya, ia menyuarakan kegelisahan konstituenya. Sebagai politisi, ia mengambil jalan yang susah, jalan yang kadang tak dipahami oleh koleganya sendiri. Tapi, begitulah adanya Fahri Hamzah. **(Najwa Shihab, Founder Narasi.TV)**

